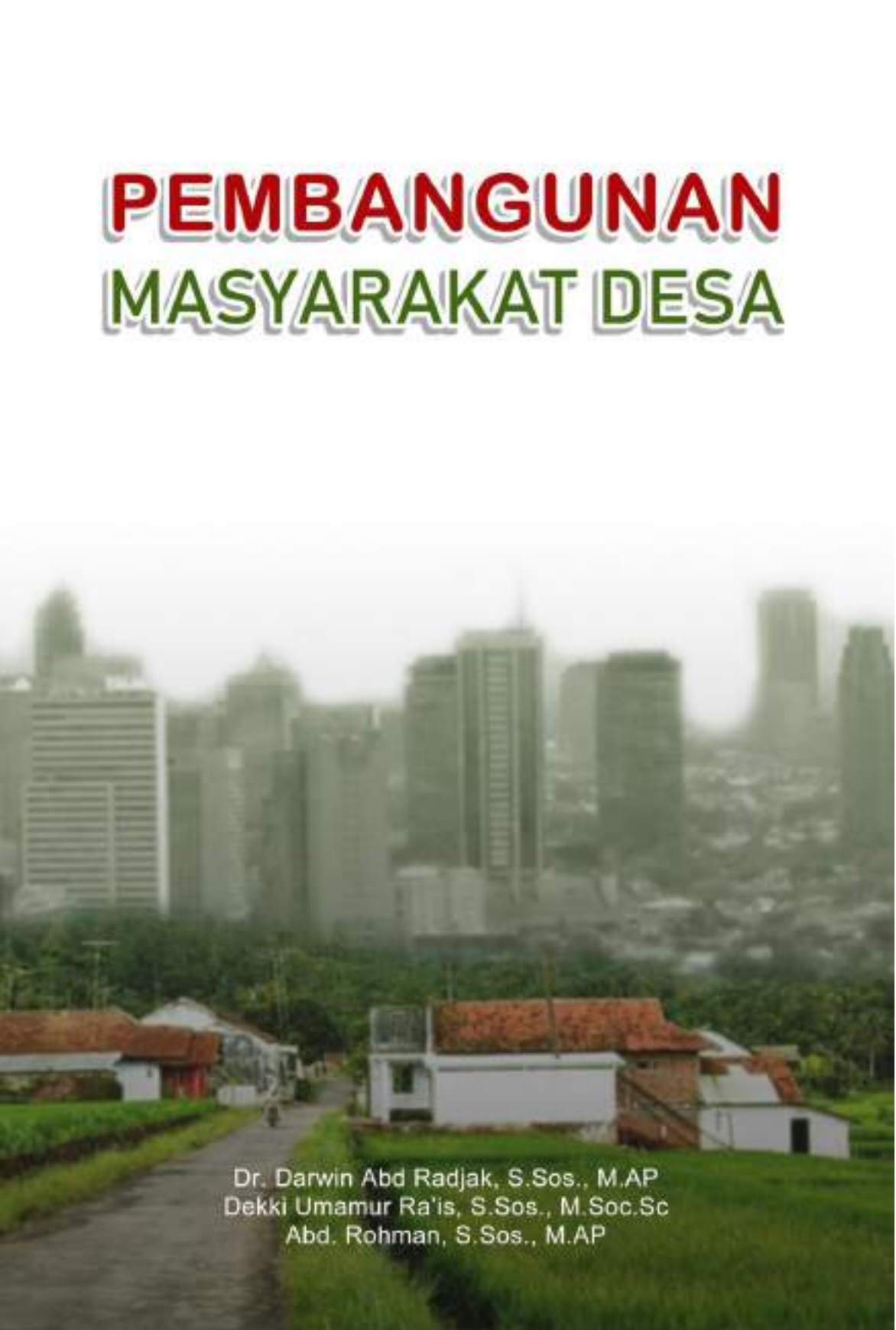


PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA



Dr. Darwin Abd Radjak, S.Sos., M.AP
Dekki Umamur Ra'is, S.Sos., M.Soc.Sc
Abd. Rohman, S.Sos., M.AP

PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA

Dr. Darwin Abd Radjak, S.Sos., M.AP
Dekki Umamur Ra'is, S.Sos., M.Soc.Sc
Abd. Rohman, S.Sos., M.AP

PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA



Penerbit Forind

PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA

Copyright ©Mei 2024

Dr. Darwin Abd Radjak, S.Sos., M.AP
Dekki Umamur Ra'is, S.Sos., M.Soc.Sc
Abd. Rohman, S.Sos., M.AP

ISBN: 978-623-99722-9-5

Editor: Mega Safitri Amra, S.STP., M.Si
Cover & Layout: Tim Forind

Diterbitkan oleh Forind
Jl. Raya Tlogomas 05 No. 24 Tlogomas
Malang Jawa Timur

Pembangunan Masyarakat Desa

Malang: Forind, 2024

15,5 x 23 cm

x + 390 hlm

Cetakan Pertama Mei 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk dan dengan cara apa pun juga, baik secara mekanis maupun elektronik, termasuk fotokopi, rekaman, dan lain-lain tanpa izin tertulis dari penerbit.

PRAKATA PENULIS

Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya yang memungkinkan para penulis menyelesaikan buku ini. Kami juga mengucapkan salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju cahaya kebenaran.

Kami menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah mendukung kelancaran proses penyelesaian buku ini, mulai dari penulisan dan pencetakan buku ini, termasuk keluarga, rekan-rekan sejawat, penerbit, dan banyak lagi yang tidak bisa kami disebutkan satu per satu.

Buku ajar berjudul "Pembangunan Masyarakat Desa" ini telah disusun dengan sebaik mungkin untuk memberikan manfaat kepada para pembaca (baik itu akademisi, pemerhati, praktisi, Profesional, pemangku kepentingan desa, dan masyarakat luas) yang membutuhkan pengayaan informasi, pengetahuan, metode, teknik, pengalaman, dan praktik tentang Pembangunan Masyarakat Desa.

Dalam buku ini, kami membahas Kemandirian dan Kesejahteraan Desa, keterlibatan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat desa, pemahaman terhadap aspek sosial dan budaya sebagai basis dan modal pemberdayaan masyarakat desa, metode dan teknik pemberdayaan masyarakat desa, advokasi pembangunan desa, dan metode Monitoring dan evaluasi pembangunan desa.

Ke depan, kami memiliki harapan besar, buku ini akan memperkaya khazanah pengetahuan, wawasan, skill dan menjadi buku pelengkap bagi buku lainnya yang relevan dengan tema besar dari buku ini, yakni pembangunan masyarakat desa melalui pemberdayaan masyarakat.

Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami sangat menghargai kritik dan saran dari pembaca untuk meningkatkan kualitas buku ini di masa depan.

Dengan demikian, kami berharap buku ajar ini dapat memberikan pemahaman dan wawasan yang mendalam tentang Pembangunan Masyarakat Desa dan bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Terima kasih.

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA PENULIS.....	v
DAFTAR ISI	vii

BAB 1. Mewujudkan Kemandirian dan Kesejahteraan Desa

Melalui Pemberdayaan	1
A. Pemberdayaan Masyarakat Desa	2
B. Kemandirian Desa	14
C. Kesejahteraan Desa.....	18

BAB 2. Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat ..22

A. Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa	23
B. Pemberdayaan Pelayanan Publik di Desa	27
C. Pelayanan Sosial Dasar di Desa	30
D. Pemberdayaan Ekonomi Desa	34
E. Pembangunan Desa Inklusif.....	41
F. Akuntabilitas Sosial Desa	46
G. Pengembangan Sumberdaya Manusia	49
H. Pembangunan Desa Berkelanjutan (SDGs Desa)	51
I. Keahlian yang Harus Dimiliki Pemerintah Desa	56

BAB 3. Aspek Sosial, Budaya, Dan Ekonomi

Dalam Pemberdayaan Desa	66
A. Modal Sosial	71
B. Nilai dan Norma	97
C. Pola Pikir dan Perilaku Masyarakat	104
D. Struktur Sosial Masyarakat	107
E. Keberagaman Masyarakat	116

BAB 4. Pemberdayaan Masyarakat Desa

A. Memahami Pemberdayaan	119
B. Perspektif Pemberdayaan	139
C. Dimensi Pemberdayaan	147

D. Bentuk-bentuk Pemberdayaan	148
E. Peran Pemberdayaan	152
F. Makna dan Arti Penting Pemberdayaan Masyarakat	153
G. Elemen-Elemen Kunci Pemberdayaan Masyarakat	156
H. Langkah-langkah untuk Mendorong Pemberdayaan Masyarakat	160
I. Strategi Pemberdayaan	167
J. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat	195
K. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat	202
L. Pelaku Perubahan.....	219
M. Indikator Keberhasilan Proses Pemberdayaan	222
BAB 5. Pembangunan Masyarakat Desa.....	225
A. Pembangunan Masyarakat	225
B. Masyarakat	237
C. Memahami Pembangunan.....	240
D. Asumsi-Asumsi Kerja Pembangunan Masyarakat	241
E. Elemen-Elemen Pembangunan Masyarakat.....	242
F. Prinsip-prinsip Pembangunan Masyarakat	242
G. Etika, Prinsip, dan Nilai-nilai Dasar Pembangunan Masyarakat .	244
H. Nilai dan Keyakinan dalam Pembangunan Masyarakat	245
I. Sumberdaya Pembangunan Masyarakat	245
J. Pendekatan-pendekatan dalam Pembangunan Masyarakat	248
K. Kapan Pembangunan Masyarakat Terjadi?	270
L. Proses Pembangunan Masyarakat (<i>Community Development</i>).	281
M. Masalah Umum dan Solusi dalam Pembangunan Masyarakat..	302
BAB 6. Advokasi Pembangunan Desa; Panduan Untuk Menciptakan Dampak	315
A. Definisi Advokasi	318
B. Masyarakat dan Advokasi	320
C. Tujuan Advokasi	322
D. Komponen-Komponen Advokasi	323
E. Prinsip-Prinsip Advokasi	324

F. Langkah-Langkah Untuk Melakukan Advokasi (Siklus Advokasi)	325
G. Pertanyaan-Pertanyaan Untuk Membangun Strategi Advokasi	337
H. Monitoring dan Evaluasi Advokasi	340
I. Faktor-Faktor Advokasi yang Efektif/Elemen Dasar Advokasi ..	340
J. Kerangka Kerja Konseptual untuk Advokasi	344
K. Lima Perilaku yang Baik dari Seorang Advokat	346
BAB 7. Monitoring Dan Evaluasi Pemberdayaan Desa	348
A. Mengapa Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Penting? ...	349
B. Apa yang Membuat Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Menjadi Sulit?	351
C. Siapa yang Memonitoring dan Mengevaluasi Pemberdayaan?.	352
D. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan	354
E. Implikasi dan Rekomendasi Kebijakan	359
F. Memahami Monitoring dan Evaluasi	361
G. Teori Perubahan	364
H. Sistem Manajemen Kinerja Dan Pengukuran Kinerja	365
I. Indikator Kinerja	367
J. Target, Data Dasar (<i>Baseline</i>) dan Sumber Data	370
K. Mengukur Hasil	373
DAFTAR PUSTAKA.....	374
PROFIL PENULIS	389

PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA

Mewujudkan Kemandirian dan Kesejahteraan Desa Melalui Pemberdayaan

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat (12) Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 1 disebutkan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedudukan Desa tercermin dalam Pasal 2 dan Pasal 5 Undang-Undang tersebut, sebagai berikut bahwa Desa merupakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan

Bhinneka Tunggal Ika”. Ketentuan di atas menegaskan kedudukan Desa sebagai bagian dari Pemerintahan Daerah.

UU Desa membentuk tatanan desa sebagai penggabungan fungsi *self-governing community* dan *local self-government*. *Self governing community* masyarakat adat yang memiliki pemerintahan sendiri yang khas dan tidak terikat dengan pemerintahan yang lain. Sedangkan *local self government* yaitu pemerintah desa yang mempunyai kedudukan dan kewenangan yang identik dengan daerah otonom, serta mempunyai hak dan peluang untuk mengembangkan diri dan mengejar ketinggalan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kemasyarakatan setempat yang positif dan kondusif.

Dengan asas dimana pemerintah desa maupun masyarakat adat mempunyai hak dan peluang untuk mengembangkan diri mereka sendiri yang merupakan inti dari pemberdayaan. Pemerintah dalam mengatur desa dengan UU Desa Pasal 4 mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, desa sebagai sebuah pemerintahan dapat melakukan kegiatan pemberdayaan terhadap masyarakat desa.

A. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat 12 diartikan sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pada pasal 67 ayat 2 juga menyebutkan bahwa desa berkewajiban untuk mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun masyarakat desa berhak untuk meminta dan mendapatkan informasi, dan mengawasi serta

menyampaikan aspirasi mengenai program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa (pasal 68 ayat 1).

Pemerintah desa di dalam program pembangunan diharuskan melakukan pemberdayaan masyarakat. Apabila pemerintah desa tidak melakukan program pemberdayaan, maka masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya untuk mendorong terciptanya program pemberdayaan yang harus dilakukan oleh pemerintah desa. Desa dapat mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat (pasal 94 ayat 1). Contoh lembaga kemasyarakatan desa seperti PKK, Dasawisma, lembaga keagamaan, lembaga budaya, atau lembaga ekonomi.

Adapun pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah baik Provinsi atau Kabupaten memberdayakan masyarakat dengan:

- a. Menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa;
- b. Meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan
- c. Mengakui dan memfungsikan institusi asli atau yang sudah ada di masyarakat desa. Ketiga intervensi dari pemerintah tersebut dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan (pasal 112 ayat 3 dan 4).

Pada tingkat kawasan perdesaan, program pemberdayaan desa dimaksudkan untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi (pasal 83 ayat 3). Program kerjasama antar-Desa pada tingkat kawasan dapat diwujudkan dalam bentuk pemberdayaan (pasal 92 ayat 1 huruf b). Lingkup kegiatan pemberdayaan masya-

rakat desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 Tahun 2014 pada pasal 6 meliputi:

1. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan
2. pelatihan teknologi tepat guna
3. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa; dan
4. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 - a. kader pemberdayaan masyarakat Desa
 - b. kelompok usaha ekonomi produktif
 - c. kelompok perempuan
 - d. kelompok tani
 - e. kelompok masyarakat miskin
 - f. kelompok nelayan
 - g. kelompok pengrajin
 - h. kelompok pemerhati dan perlindungan anak
 - i. kelompok pemuda
 - j. kelompok lain sesuai kondisi Desa
 - k. kelompok usaha ekonomi produktif

Pemberdayaan masyarakat desa adalah inisiatif untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warga desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi permasalahan dan prioritas kebutuhan masyarakat setempat. Pendekatan ini menekankan pada proses pengalihan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan kepada masyarakat guna meningkatkan kapasitas individu. Pemberdayaan juga diartikan sebagai rangkaian langkah untuk merangsang, mendorong, atau memotivasi individu agar memiliki kemampuan atau kemandirian dalam menentukan pilihan-pilihan hidupnya.

UU Desa membentuk tatanan desa sebagai penggabungan fungsi *self-governing community* dan *local self-government*. Tatanan itu diharapkan mampu mengkomodasi kesatuan masyarakat hukum

yang menjadi fondasi keragaman NKRI. Lebih-lebih pengaturan desa dalam UU Desa berlandaskan pada asas yang meliputi:

- a. Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul;
- b. Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa;
- c. Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- d. Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun desa;
- e. Kegotong-royongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun desa;
- f. Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa;
- g. Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
- h. Demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin;
- i. Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;
- j. Partisipasi, yaitu warga desa turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;

- k. Kesetaraan, yaitu kesamaan warga desa dalam kedudukan dan peran;
- l. Pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa;
- m. Keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa.

Pemberdayaan masyarakat desa dapat dipahami dengan beberapa cara pandang. Pertama, pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat (*beneficiaries*) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri.

Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggung jawab negara. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas (kewajiban) negara secara *given*. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumber dayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan.

Kedua, titik pijak pemberdayaan adalah kekuasaan (*power*), sebagai jawaban atas ketidakberdayaan (*powerless*) masyarakat. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Pengertian ini berasumsi bahwa kekuasaan sebagai suatu yang tidak berubah atau tidak dapat diubah. Kekuasaan sesungguhnya tidak terbatas pada pengertian di atas. Kekuasaan tidak vakum dan terisolasi, kekuasaan senantiasa

hadir dalam konteks relasi antar manusia. Kekuasaan tercipta dalam relasi sosial. Karena itu kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah.

Dengan pemahaman kekuasaan seperti itu, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal:

1. Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun; dan
2. Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis (Edi Suharto, 2005).

Ketiga, pemberdayaan terbentang dari proses sampai visi ideal. Dari sisi proses, masyarakat sebagai subyek melakukan tindakan atau gerakan secara kolektif mengembangkan potensi-kreasi, memperkuat posisi tawar, dan meraih kedaulatan. Dari sisi visi ideal, proses tersebut hendak mencapai suatu kondisi dimana masyarakat mempunyai kemampuan dan kemandirian melakukan *voice*, akses dan kontrol terhadap lingkungan, komunitas, sumber daya dan relasi sosial-politik dengan negara. Proses untuk mencapai visi ideal tersebut harus tumbuh dari bawah dan dari dalam masyarakat sendiri. Namun, masalahnya, dalam kondisi struktural yang timpang masyarakat sulit sekali membangun kekuatan dari dalam dan dari bawah, sehingga membutuhkan “intervensi” dari luar.

Hadirnya pihak luar (pemerintah, NGOs, organisasi masyarakat sipil, organisasi agama, perguruan tinggi, dan lain-lain) ke komunitas bukanlah mendikte, menggurui, atau menentukan, melainkan bertindak sebagai fasilitator (katalisator) yang memudahkan, menggerakkan, mengorganisir, menghubungkan, memberi ruang, mendorong, membangkitkan dan seterusnya. Hubungan antara komunitas dengan pihak luar itu bersifat setara, saling percaya, saling menghormati,

terbuka, serta saling belajar untuk tumbuh berkembang secara bersama-sama.

Keempat, pemberdayaan terbentang dari level psikologis-personal (anggota masyarakat) sampai ke level struktural masyarakat secara kolektif. Sasaran pemberdayaan adalah masyarakat, yang di dalamnya mewadahi warga secara individual maupun komunitas secara kolektif. Pemberdayaan adalah upaya membangkitkan kekuatan dan potensi masyarakat yang bertumpu pada komunitas lokal melalui pendekatan partisipatif dan belajar bersama. Dari sisi strategi, pendekatan dan proses, pemberdayaan merupakan gerakan dan pendekatan berbasis masyarakat lokal maupun bertumpu pada kapasitas lokal, yang notabene bisa dimasukkan ke dalam kerangka pembaharuan menuju kemandirian masyarakat.

Dasar pemikiran pemberdayaan masyarakat adalah memajukan kemampuan masyarakat desa untuk mengelola secara mandiri urusan komunitasnya. Dalam hal pemberdayaan masyarakat desa, UU Desa menempatkan kesepakatan bersama seluruh warga desa sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengelola kewenangannya untuk mengurus dan mengatur Desa. Pemberdayaan masyarakat memprioritaskan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sekaligus mengembangkan kontrol publik atas implementasi dari keputusan-keputusan publik. Dengan demikian, dalam pemberdayaan masyarakat ditekankan adanya keutamaan politik.

Politik dalam rangka pemberdayaan masyarakat ini merupakan transformasi politik ke dalam tindakan nyata, khususnya demokrasi hadir dalam hidup sehari-hari. Melalui penerapan demokrasi musyawarah mufakat setiap warga desa berkesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan sesuai konteks hidupnya masing-masing. Dengan demikian, demokrasi memberi ruang bagi anggota masyarakat dalam melindungi dan memperjuangkan kepentingan mereka.

Pembangunan desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat secara umum merujuk pada upaya meningkatkan mutu kehidupan dan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui partisipasi serta keterlibatan penuh masyarakat sebagai suatu komunitas. Intinya, dalam Pembangunan desa urgensi pemberdayaan komunitas di tingkat desa memiliki peran yang sangat vital dan strategis.

Keperluan akan model pembangunan yang berbasis masyarakat (*community-based development*) berasal dari kesadaran bahwa model pembangunan *top-down* seringkali tidak berhasil mengatasi kemiskinan dan kurangnya daya tahan masyarakat terhadap tekanan struktural yang timbul akibat model pertumbuhan yang mengabaikan dimensi sosial dalam masyarakat. Pendekatan pembangunan yang mengedepankan pemberdayaan ini bertujuan untuk membentuk struktur masyarakat yang lebih tangguh dan memiliki ketahanan terhadap berbagai tekanan, dengan mengatur regulasi berlandaskan prinsip-prinsip keadilan dan inklusi.

Penyelenggaraan pemberdayaan merupakan tanggung jawab pemerintah desa, sementara masyarakat memiliki ruang untuk menyuarakan aspirasinya agar dapat mendorong pembentukan program pemberdayaan dan mengawasi jalannya program tersebut. Partisipasi dan komitmen masyarakat dalam program pemberdayaan menjadi bentuk kontribusi kelompok tersebut dalam upaya pembangunan desa.

Pemberdayaan masyarakat di Desa merupakan tugas yang diamanatkan oleh Undang-Undang Desa dan merujuk pada akar persoalan yang mendasar. Artinya, tugas ini diberikan berdasarkan pemahaman yang objektif tentang akar penyebab kemiskinan di Desa. Undang-Undang Desa memandang kemiskinan di Desa bukan sebagai suatu takdir, melainkan sebagai dampak dari sistem, peraturan perundangan, dan kebijakan yang tidak adil terhadap Desa. Seiring berjalannya waktu, Desa kerap terpinggirkan dan hanya dianggap sebagai objek program.

Otonomi Desa dalam mengelola urusan masyarakat secara mandiri (*Self Governing Community*) perlu didukung oleh sumber daya yang handal, terampil, dan berkualitas dalam tata kelola Desa. Namun, kenyataannya, sebagian besar Desa saat ini masih kekurangan kapasitas yang memadai akibat kurangnya sumber daya manusia yang terlatih. Keadaan ini jelas menjadi hambatan dalam mempercepat proses pembangunan Desa. Diperlukan suatu intervensi untuk memperkuat sumber daya manusia di Desa, sehingga masyarakat setempat memiliki kemampuan untuk memimpin, mengelola, dan bertanggung jawab atas pengelolaan Desa.

Intervensi yang dapat dilakukan melibatkan pendekatan pemberdayaan masyarakat Desa, sejalan dengan semangat Undang-Undang Desa. Pemberdayaan masyarakat Desa merupakan amanat dari Undang-Undang Desa yang berakar pada inti masalah (radikal). Ini berarti bahwa amanat tersebut diberikan berdasarkan pemahaman objektif tentang akar penyebab kemiskinan di Desa. Undang-Undang Desa menganggap kemiskinan di Desa bukanlah sesuatu yang pasti, melainkan akibat dari sistem, peraturan perundangan, dan kebijakan yang tidak adil terhadap Desa. Selama ini, Desa sering terpinggirkan, hanya dianggap sebagai objek program.

Berdasarkan pandangan Breton (1994), konsep pemberdayaan berakar pada realitas objektif yang mengacu pada ketidakseimbangan struktural dalam alokasi kekuasaan dan distribusi akses terhadap sumber daya masyarakat. Pengembangan Desa mengadopsi paradigma baru, di mana perhatian terfokus pada partisipasi masyarakat dan institusi lokal. Paradigma ini menekankan keterlibatan luas masyarakat dalam berbagai aspek secara menyeluruh.

Dijelaskan lebih lanjut, Pembangunan Partisipatif merupakan sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikomandoi oleh kepala Desa, dengan mengutamakan semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong-royong untuk mencapai tujuan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. "Pem-

berdayaan masyarakat Desa adalah usaha untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan mereka melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, dan pemanfaatan sumber daya, melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan hakikat permasalahan serta prioritas kebutuhan masyarakat Desa" (Pasal 1 ayat 12 UU No. 6 Tahun 2014).

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014, Pedoman Pembangunan Desa, menyatakan bahwa perencanaan pembangunan Desa merupakan serangkaian kegiatan yang diorganisir oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan elemen masyarakat secara partisipatif, dengan tujuan optimalisasi dan alokasi sumber daya Desa untuk mencapai target pembangunan Desa.

Pemberdayaan memiliki interpretasi yang bervariasi tergantung pada konteksnya dan hubungannya dengan Undang-Undang. Dalam konteks UU Desa, pemberdayaan memperoleh makna yang kompleks. Pertama, pemberdayaan mencerminkan upaya untuk mengembalikan kekuatan dan potensi masyarakat Desa. Kedua, pemberdayaan mencerminkan pengakuan terhadap terjadinya proses kemiskinan di Desa akibat kebijakan politis yang kurang mendukung Desa secara optimal. Selain itu, juga menunjukkan bahwa kemiskinan di Desa selama ini bersifat struktural.

Meskipun terdapat interpretasi yang beragam sehubungan dengan UU Desa, UU Desa secara tegas mengakui Desa sebagai entitas hukum yang memiliki hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri (Pasal 1 ayat 1). Salah satu ketentuan yang mencerminkan pengakuan tersebut adalah pasal yang menegaskan urgensi pemberdayaan masyarakat Desa (Pasal 1 ayat 12).

Pemberdayaan masyarakat Desa adalah inovasi signifikan dalam memajukan Desa dan mengubah paradigma pembangunan Desa

yang sebelumnya terpusat pada kekuasaan. Dalam melaksanakan pendekatan pemberdayaan masyarakat, UU Desa memandang pembangunan Desa dari perspektif yang lebih manusiawi dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pemberdayaan menciptakan sebuah model pembangunan yang fokus pada peran utama dan tujuan masyarakat (*people-centric*). Melalui langkah-langkah pemberdayaan masyarakat, pemerintah berusaha meningkatkan kesadaran kritis masyarakat terhadap arti dan tujuan pembangunan. Masyarakat didorong untuk aktif belajar dan memahami berbagai faktor yang mempengaruhi dampak pembangunan pada kehidupan masyarakat dan lingkungan.

UU Desa mengadopsi pemberdayaan masyarakat sebagai suatu model pembangunan. Dengan menerapkan konsep pemberdayaan masyarakat Desa, hasil pembangunan Desa akan mencerminkan aspirasi masyarakatnya sendiri. Dengan kata lain, Desa menjadi manifestasi kehendak bersama masyarakat yang memiliki keberdayaan dan kemandirian. Ciri khas dari Desa yang mandiri dan demokratis adalah keberadaan Keterlibatan warga. Keterlibatan warga dalam forum musyawarah Desa dan dalam penyusunan regulasi Desa menunjukkan tanggung jawab dan pengabdian warga terhadap Desa mereka. Ini juga mencerminkan kewajiban dan dedikasi warga negara dalam mendukung pembangunan nasional melalui tindakan sukarela.

Melalui upaya pemberdayaan masyarakat, penduduk Desa diimbau untuk bersama-sama mengembangkan kreativitas, memperkuat posisi tawar, dan meraih kedaulatan. Tujuan utama adalah mencapai visi ideal kemandirian masyarakat dimana mereka memiliki kemampuan untuk bersuara, mengakses dan mengendalikan lingkungan, komunitas, sumber daya, dan hubungan sosial-politik dengan negara. Proses ini diharapkan tumbuh dari inisiatif masyarakat di tingkat dasar dan gerakan yang berasal dari masyarakat itu sendiri.

Keberdayaan masyarakat Desa mencakup rentang yang luas, mulai dari dimensi psikologis-personal hingga dimensi struktural secara kolektif. Pemberdayaan psikologis-personal melibatkan pengembangan pengetahuan, wawasan, harga diri, kemampuan, kompetensi, motivasi, kreativitas, dan kontrol diri individu. Di sisi lain, pemberdayaan struktural-personal mencakup peningkatan kesadaran kritis warga Desa terhadap struktur sosial-politik yang tidak seimbang dan penguatan kapasitas individu dalam masyarakat untuk menganalisis lingkungan kehidupan yang memengaruhi mereka. Dari perspektif ini, pemberdayaan masyarakat Desa perlu merambah aspek psikologis sebagai landasan yang sangat mendasar. Pemberdayaan psikologis-masyarakat berarti memupuk rasa memiliki, semangat gotong royong, saling percaya, kemitraan, kebersamaan, solidaritas sosial, dan visi kolektif dalam masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat Desa dapat dilihat dari beberapa perspektif. Pertama, pemberdayaan diartikan sebagai cara pandang yang menempatkan masyarakat dalam posisi yang lebih aktif. Masyarakat tidak hanya sebagai penerima manfaat yang bergantung pada pihak eksternal, melainkan sebagai subyek yang bertindak secara mandiri. Ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Mereka dapat berkreasi, mengontrol lingkungan dan sumber daya mereka sendiri, menyelesaikan masalah mereka sendiri, dan ikut serta dalam menentukan proses politik di tingkat nasional. Kedua, pemberdayaan berhubungan dengan upaya memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemberdayaan mencoba untuk menepis pandangan bahwa masyarakat sebenarnya tidak membutuhkan hal-hal seperti demokrasi, desentralisasi, tata kelola yang baik, otonomi daerah, masyarakat sipil, dan sebagainya. Pemberdayaan merupakan usaha untuk memenuhi dan menjawab kebutuhan dasar masyarakat di tengah keterbatasan dan keterbatasan sumber daya. Akibatnya, pemenuhan kebutuhan masyarakat tidak hanya terbatas, sulit, dan

langka, tetapi juga terkait dengan masalah struktural seperti ketimpangan, eksploitasi, dominasi, hegemoni, dan sebagainya, yang mengakibatkan pembagian dan distribusi sumber daya yang tidak merata dan tidak seimbang.

B. Kemandirian Desa

Kemandirian masyarakat Desa merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan adanya kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan menggunakan kemampuan yang dimilikinya. Dimana kemampuan daya yang dimiliki meliputi kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, dan afektif serta sumber daya lainnya, baik itu yang bersifat fisik maupun non fisik (Ra'is, 2018).

Kemandirian desa adalah kemampuan pemerintah desa dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan melalui potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kemandirian desa juga menunjuk pada kewenangan desa. Kewenangan desa adalah hak desa untuk mengatur, mengurus, dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

Kemandirian desa mengacu pada kemampuan desa untuk berdiri sendiri dan tidak bergantung pada dukungan atau sumber daya eksternal. Kemandirian desa melibatkan pengembangan sumber daya, kelembagaan, dan kapasitas lokal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Kemandirian desa merupakan tujuan penting dalam pembangunan desa, karena dapat mengarah pada kemandirian yang lebih besar, mata pencaharian yang lebih baik, dan masyarakat yang lebih tangguh. Pengembangan kemandirian desa sering kali didukung oleh program dan kebijakan pemerintah, seperti alokasi dana desa, yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat lokal dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan.

Kemandirian desa mengacu pada kemampuan masyarakat desa untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya mereka sendiri dan menyelesaikan masalah mereka sendiri, baik dari segi fisik maupun non-fisik, melalui partisipasi masyarakat yang berkapasitas tinggi. Hal ini melibatkan pemberdayaan masyarakat dalam hal sosial, ekonomi, dan ekologi, yang semuanya penting untuk pembangunan berkelanjutan. Pengembangan kemandirian desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat, memperluas akses terhadap kegiatan ekonomi produktif, dan memperkuat kelembagaan masyarakat melalui jaringan modal sosial.

Kemandirian desa dapat diwujudkan dengan strategi pemberdayaan masyarakat desa. *Output* dari kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah ekspansi aset dan kapabilitas warga masyarakat, terutama kelompok miskin. Kemandirian desa juga dapat diwujudkan dengan pendekatan pemberdayaan desa melalui usaha ekonomi melalui BUMDesa berbasis potensi lokal.

Kemandirian ekonomi desa diartikan sebagai desa yang memiliki ketahanan ekonomi terhadap berbagai macam krisis dan tidak bergantung pada pemerintahan provinsi dan/atau pemerintahan kabupaten/kota.

Kemandirian desa mencakup berbagai dimensi, termasuk:

1. Ketahanan sosial

Dimensi ini berfokus pada kemampuan masyarakat untuk mengatasi tantangan sosial, menjaga kohesi sosial, dan mendukung anggota masyarakat yang rentan.

2. Ketahanan ekonomi

Kemandirian desa juga mencakup pengembangan kegiatan ekonomi lokal, mata pencaharian, dan infrastruktur untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya eksternal dan mendorong keberlanjutan ekonomi di desa.

3. Keberlanjutan ekologi/lingkungan

Dimensi ini menekankan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, konservasi lingkungan, dan praktik-praktik berkelanjutan untuk memastikan kesejahteraan jangka panjang desa dan sekitarnya.

Upaya untuk mendorong kemandirian desa sering kali melibatkan inisiatif untuk memperkuat tata kelola pemerintahan lokal, meningkatkan akses ke pendidikan dan kesehatan, meningkatkan produktivitas pertanian, dan mendukung usaha kecil di desa. Pemanfaatan dana desa yang efektif dan bentuk dukungan lainnya dapat secara signifikan berkontribusi pada kemajuan kemandirian desa dan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.

Kemandirian desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup manusia di pedesaan, dan mengurangi kemiskinan. Hal ini dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan pemerintahan kepada pemerintahan desa, sehingga desa memiliki hak otonomi yang kuat dalam melaksanakan program-program pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kemandirian desa juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa dalam pembangunan dan pemberdayaan diri.

Kemandirian desa adalah kemampuan masyarakat desa untuk mengatur wilayahnya sendiri dan meningkatkan kualitas hidup seluruh warganya melalui kegiatan swadaya. Kemandirian desa dapat diwujudkan melalui strategi pemberdayaan masyarakat desa, yang bertujuan untuk memperluas aset dan kemampuan warga, terutama masyarakat miskin, sehingga mereka dapat meningkatkan kesejahteraan mereka dan hidup secara mandiri. Konsep kemandirian

perdesaan juga terkait dengan gagasan resiliensi (ketahanan), yaitu kemampuan masyarakat perdesaan untuk menjadi mandiri dan tidak bergantung pada bantuan dari luar.

Salah satu syarat kemandirian desa selain potensi desa dan sumber daya manusia adalah partisipasi. Maka penting untuk memperhatikan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, inisiatif lokal, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Maka perlu adanya upaya yang dilakukan oleh desa secara komprehensif dan serius untuk mendorong tingkat partisipasi masyarakat guna menegaskan eksistensi daerah pedesaan sebagai daerah yang otonom dan mandiri.

Dalam Visi UU Desa, kemandirian adalah bertemunya hubungan simpul antara pemberdayaan dengan pembangunan. Pembangunan sebagai alat untuk mensejahterakan masyarakat Desa tidak lagi dipandang sebagai alat tunggal dan berdiri sendiri. Pembangunan masyarakat desa membutuhkan pemberdayaan sebagai jalan utama mencapai kemandirian Desa. Pemberdayaan dengan pembangunan adalah dualitas dalam ketunggalan pembangunan Desa. Relasi tersebut tidak hanya sekedar mengaitkan hubungan pokok antara negara dengan kapital dalam konteks teknokrasi semata, akan tetapi juga menempatkan masyarakat sebagai pelaku pembangunan (Ra'is, 2018).

Menurut Ra'is (2018), ciri utama Desa Mandiri adalah kuat secara ekonomi, budaya dan sosial melalui pendekatan pembangunan dan pemberdayaan. Jika dibaca dengan seksama kemandirian Desa menurut UU Desa bertumpu pada tiga daya, yakni berkembangnya perekonomian desa dan antar desa, semakin kuatnya sistem partisipasi masyarakat, dan mempunyai kepedulian tinggi terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Untuk mencapai kemandirian desa, tentu memerlukan proses belajar. Dengan belajar desa akan memperoleh daya, kekuatan, dan kemampuan yang bermanfaat dalam perumusan dan pembuatan

keputusan secara mandiri. Percepatan belajar warga desa dapat dilakukan melalui intervensi khusus, yakni dengan pemberdayaan. Hal tersebut sesuai dengan ruh pemberdayaan sendiri, yaitu menciptakan kemandirian yang ditandai dengan berubahnya pola perilaku yang independen. Harapannya jika sudah mandiri, desa secara kolektif bisa meningkatkan taraf hidup keluarga masyarakat desa dan mampu untuk mengoptimalkan segala sumber daya yang dimilikinya (Ra'is, 2018).

Melalui pemberdayaan desa, perlu juga didorong wujudnya Inisiatif lokal. Ini bermakna melalui pemberdayaan, desa harus mendorong inisiatif lokal dan kerja sama antar warga dalam mengatasi permasalahan dan memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, pemberdayaan juga sebagai sarana untuk mengawal perubahan relasi ekonomi-politik desa secara internal maupun eksternal, menuju tatanan kehidupan desa baru yang lebih demokratis, mandiri, dan adil.

C. Kesejahteraan Desa

Kesejahteraan masyarakat desa adalah tingkat kemakmuran dan kesejahteraan yang dicapai oleh penduduk di pedesaan. Hal ini meliputi aspek-aspek seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan keadilan sosial. Kesejahteraan dapat diartikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial seseorang atau masyarakat sehingga dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri serta melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan juga dapat dinilai dari kemampuan individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya, seperti pendapatan yang mewujudkan kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan, dan Pendidikan. Kesejahteraan juga terkait dengan kondisi seseorang atau masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya, seperti sandang, pangan, papan,

kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, lingkungan bersih, aman, nyaman, serta terpenuhinya hak asasi dan partisipasi.

Dalam upaya mencapai kesejahteraan, penting untuk memprioritaskan kepentingan masyarakat yang lebih luas daripada kepentingan. Selain itu, pembangunan ekonomi juga merupakan upaya penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, karena dapat berkontribusi pada kenaikan pendapatan nyata per-kapita dan kesempatan kerja yang lebih luas.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadi landasan bagi pembentukan negara Indonesia, dijelaskan bahwa salah satu tugas pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan umum. Hal ini dapat dilakukan dengan meratakan pembangunan di tingkat lokal, nasional, dan global. Pemerintah, dalam setiap implementasi kebijakan, selalu menetapkan kesejahteraan sebagai tujuan akhir yang ingin dicapai.

Kesejahteraan berasal dari kata "sejahtera," yang memiliki akar makna dalam bahasa Sanskerta "*Catera*" yang artinya payung. Dalam konteks ini, kesejahteraan yang terasosiasi dengan "*catera*" (payung) mencerminkan kondisi seseorang yang bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran, sehingga hidupnya aman, tenteram, baik fisik maupun mental.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesejahteraan merujuk pada keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, dan ketentraman. Secara keseluruhan, kesejahteraan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, termasuk sandang, pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan.

Midgley (1995) menekankan bahwa kondisi kesejahteraan sosial terdiri dari tiga elemen utama, yaitu:

- a. Tingkatan dimana suatu masalah sosial dapat dikelola
- b. Sejauh mana kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi
- c. Tingkatan dimana kesempatan untuk mengembangkan diri disediakan ataupun difasilitasi oleh pemerintah

Kammerman dan Kahn (2001) menjelaskan ada enam komponen atau sub-sistem dari kesejahteraan sosial:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pengelolaan Penghasilan
4. Pelayanan kerja
5. Perumahan
6. Pelayanan sosial secara personal

Kondisi-kondisi ini dapat dievaluasi melalui sejumlah indikator yang menjadi penentu apakah masyarakat tersebut mencapai tingkat sejahtera atau tidak. Indikator-indikator kesejahteraan ini mencakup beberapa aspek, seperti kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, kemiskinan, serta aspek sosial dan lainnya. Dengan menganalisis indikator-indikator tersebut, kita dapat menentukan apakah masyarakat tersebut mengalami kesejahteraan atau sebaliknya.

Tujuan utama dalam proses pembangunan adalah mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam setiap pelaksanaan kebijakan, pemerintah selalu menetapkan kesejahteraan sebagai sasaran yang ingin dicapai. Salah satu kebijakan pusat yang diharapkan dapat memberikan peluang kepada masyarakat di daerah puncak untuk mencapai kesejahteraan bersama adalah melalui implementasi otonomi daerah. Dengan desentralisasi, daerah diberikan keleluasaan untuk menginisiasi dan mengelola pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokalnya, sekaligus mendekatkan manfaat kesejahteraan kepada masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat dapat dicapai melalui berbagai konsep, dan dalam konteks tertentu, dapat merujuk pada kesejahteraan sosial. Menurut Undang-Undang tentang Kesejahteraan Sosial, negara mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara, sehingga

mereka dapat hidup layak dan mengembangkan diri serta melaksanakan fungsi sosialnya. Definisi ini mencakup dimensi kesejahteraan masyarakat secara umum, keberdayaan ekonomis individu, pelayanan sosial yang memadai, pengembangan potensi diri, dan pelaksanaan fungsi sosial. Pendekatan ini juga sejalan dengan definisi badan dunia PBB, yang menekankan peran individu sebagai subjek pembangunan.

Walter Friedlander (1994) melihat kesejahteraan sosial sebagai sistem yang terorganisir dari institusi dan layanan sosial untuk meningkatkan standar hidup, kemampuan diri, dan kesejahteraan individu serta keluarganya. Ini menegaskan perlunya sistem kelembagaan dan pelayanan sosial untuk memajukan standar kesejahteraan. Selain itu, konsep ini menguatkan ide bahwa keadilan sosial adalah upaya terorganisir untuk mendukung hubungan timbal balik antara individu dan lingkungan sosial mereka.

Todaro dan Smith (2006) mengartikan kesejahteraan masyarakat sebagai indikator hasil pembangunan, yang mencerminkan usaha masyarakat dalam mencapai taraf hidup yang lebih baik. Aspek-aspek tersebut melibatkan:

1. Peningkatan kemampuan dan penyebaran merata kebutuhan pokok seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan;
2. Peningkatan standar hidup, tingkat pendapatan, akses pendidikan yang lebih baik, serta peningkatan perhatian terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan; dan
3. Perluasan skala ekonomi dan variasi opsi sosial bagi individu dan komunitas.

Kesejahteraan masyarakat ditandai oleh pemenuhan kebutuhan dasar, seperti memiliki tempat tinggal yang layak, memadai sandang dan pangan, akses terjangkau dan berkualitas terhadap pendidikan dan kesehatan, serta kemampuan individu untuk memaksimalkan utilitasnya dalam batas anggaran tertentu.

Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Pergeseran paradigma dunia yang menjadikan desa sebagai bagian penting dari proses globalisasi juga mendorong Indonesia untuk segera mengubah cara pandangnya terhadap desa. Desa memegang peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Sebagai kelompok pemerintahan terendah, desa menjadi ujung tombak dalam mensejahterakan masyarakat. Semua proses, baik penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan desa, merupakan kegiatan yang langsung dirasakan oleh masyarakat (Andereck dan Vogt, 2000). Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah menekankan untuk memaksimalkan upaya pembangunan desa dengan mengeluarkan kebijakan berupa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Undang-undang tersebut menjadi pedoman penting dalam menjelaskan status dan bentuk desa secara nyata dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa Desa adalah desa adat dan desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat lokal. Agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik, pemerintah desa perlu memiliki kapasitas atau kemampuan yang memadai untuk mengelola pemerintahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Desa yang dipertegas dalam peraturan pemerintah memberikan pengakuan kepada desa melalui asas rekognisi dan subsidiaritas. Hal ini bermakna Desa dibiarkan tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Dengan demikian Desa memiliki posisi yang sangat strategis dalam mewujudkan pembangunan masyarakat. Posisi tersebut memiliki pengaruh kuat dan langsung terhadap perwujudan *local self-government*. Jika Desa menjadi semakin kuat dan mandiri, maka suatu daerah juga akan mengalami kemajuan dan kemandirian dalam mengelola warganya. Pemerintah Desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat dan merupakan tonggak penting bagi keberhasilan semua program pembangunan masyarakat.

A. Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa

Seperti yang dikemukakan oleh Solekhan (2012), bahwa fungsi pemerintah desa adalah:

1. Menyelenggarakan urusan rumah tangga desa
2. Melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan
3. Melaksanakan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat
4. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
5. Melaksanakan pembinaan perekonomian desa
6. Melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan
7. Dan lain sebagainya.

Pemerintah sebagai kumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan, menjalankan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan dan pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan. Sihabudin (2010), berpendapat bahwa pemerintah adalah suatu organisasi atau wadah orang-orang yang memiliki kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah-masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan negara. Kemudian, (Solekhan, 2012), menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berimplikasi pada perubahan hubungan antara desa dengan supra desa (kabupaten/kota) dan membawa perubahan relasi kekuasaan antar kekuatan politik di tingkat desa.

Hajar (2017), juga menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan desa yang demokratis (partisipatif, akuntabel, transparan, dan responsif) dapat menjadi lebih kuat, *legitimate*, dan mampu bekerja secara efektif jika didukung oleh keselarasan, keseimbangan, dan saling percaya antar elemen pemerintahan di desa. Sehingga pemerintah desa dituntut untuk melakukan perubahan yang serius, baik dari sisi kepemimpinan, kinerja birokrasi yang berorientasi pada pelayanan yang berkualitas.

Dalam ketentuan umum 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Selanjutnya, dalam pelaksanaan Penataan Desa sebagai upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang berkaitan dengan kesejahteraan bertujuan untuk:

1. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk mengembangkan potensi dan Aset Desa guna meningkatkan kesejahteraan bersama;

2. Membentuk pemerintahan Desa yang profesional, efisien, dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
3. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
4. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu menjaga kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
5. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
6. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Sementara, Kewenangan Desa, menurut Pasal 18, meliputi kewenangan di bidang:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa
3. Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
4. Pemberdayaan masyarakat Desa
5. Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Kemudian menurut Pasal 19, Kewenangan Desa yang dimaksud bersumber dari:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala Desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi

Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan kewenangan desa, pemerintahan desa didukung oleh keuangan desa, agar desa pada akhirnya menjadi kuat, maju, mandiri,

dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Kewajiban desa yang dijalankan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa antara lain:

1. Melindungi dan memelihara persatuan, kesatuan, dan kerukunan masyarakat Desa dalam rangka perdamaian nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa;
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
4. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
5. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

Masyarakat yang telah mendapatkan perhatian dari pemerintah desa dalam pemenuhan kebutuhannya secara partisipatif diharapkan dapat menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap keberadaan desa melalui kewajiban-kewajiban masyarakat. Kewajiban Masyarakat Desa antara lain:

1. Membangun dan memelihara lingkungan Desa;
2. Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa secara baik;
3. Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Desa;
4. Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai musyawarah, mufakat, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa; dan
5. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.

Pemerintah Desa dan masyarakat Desa saling menghormati dalam menjalankan kewajiban merupakan bentuk integrasi dan integritas antar warga Desa. Hal ini diharapkan sebagai kesadaran

yang muncul tanpa adanya paksaan dan rasa terbebani antara pemerintah desa dan masyarakat sehingga kemandirian desa dapat terwujud.

B. Pemberdayaan Pelayanan Publik di Desa

Berbicara mengenai konteks pelayanan publik tidak lepas dari pengertian membantu masyarakat dalam mencapai tujuan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelayanan publik ini dilakukan oleh pemerintah, berupa kegiatan yang memiliki unsur perhatian, kesediaan dan kesiapan dalam memberikan kepuasan kepada pelanggan (masyarakat). Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pelayanan prima berarti menutup kesenjangan antara persepsi penyedia layanan dengan pengguna layanan terhadap proses dan hasil layanan.

Permasalahan pelayanan publik yang paling utama dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas adalah kesiapan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan yang berkualitas dapat berimplikasi pada tata kelola pemerintahan yang baik. Konteks pelayanan publik tidak terlepas dari makna membantu dan memberikan kemudahan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung (Hajar, 2021). Pelaksanaan pelayanan yang dilakukan merupakan bagian dari implementasi kebijakan yang harus diberikan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya melalui upaya pemberian pelayanan sehingga dapat dikaitkan dengan pengembangan sumber daya manusia di bidang pelayanan publik. Memberikan pelayanan yang terbaik merupakan salah satu hasil kinerja yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa untuk mencapai kepuasan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada Pasal 1 Angka 1 menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sementara itu, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 mendefinisikan pelayanan publik sebagai segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sifat pelayanan publik menurut Holle (2011), antara lain:

1. Meningkatkan kualitas dan produktivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah di bidang pelayanan publik.
2. Mendorong upaya-upaya untuk mengefektifkan sistem dan manajemen pelayanan, sehingga pelayanan publik dapat dilaksanakan secara lebih efisien dan efektif.
3. Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa, dan peran serta masyarakat dalam gerak langkah pembangunan serta dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam pembangunan desa, antara lain semakin kuatnya kemandirian desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, tidak semua desa yang mengimplementasikan undang-undang desa ini menjadi maju karena tidak didukung oleh kemampuan dan pengetahuan sumber daya manusia (aparatur pemerintah desa).

Penerapan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian masyarakat desa menjadi fokus dalam mencapai tujuan pembangunan khususnya di desa. Hardiansyah (2011), menyatakan bahwa terdapat tiga dimensi kualitas pelayanan publik sebagai berikut:

1. Responsivitas mengukur daya tanggap penyelenggara terhadap harapan, keinginan dan aspirasi serta tuntutan pelanggan;
2. Responsibilitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan tidak menyalahi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan;
3. Akuntabilitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran-ukuran eksternal yang ada di masyarakat dan dimiliki oleh *stakeholder*, seperti nilai-nilai dan norma-norma yang berkembang di masyarakat.

Pemberdayaan pelayanan publik di desa mengacu pada upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan lokal melalui berbagai kegiatan seperti penyediaan kebutuhan dasar, pengobatan gratis, dan program pemberdayaan ekonomi. Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi peningkatan pelatihan sumber daya manusia, peningkatan alokasi anggaran, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam memantau dan mengawasi pelayanan publik. Evaluasi keberhasilan pemberdayaan pelayanan publik di desa melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, implementasi, evaluasi, dan pemantauan program untuk mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan dalam pengelolaan desa serta menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

Untuk memberdayakan layanan publik desa, ada beberapa bidang utama yang dapat difokuskan:

1. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Meningkatkan transparansi dengan berbagi informasi secara terbuka dengan masyarakat dan lembaga terkait. Mendorong akuntabilitas untuk menciptakan rasa kompetensi dan kepemilikan, yang pada akhirnya akan meningkatkan pelayanan.
2. **Pengembangan Kapasitas:** Mengembangkan dan memperkuat pengetahuan dan keterampilan petugas pelayanan publik

untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memberikan pelayanan yang efektif.

3. **Insentif:** Menerapkan insentif untuk menghargai kinerja yang baik dapat meningkatkan kinerja dan motivasi di antara para pekerja pelayanan publik.
4. **Memanfaatkan Teknologi:** Memanfaatkan teknologi dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi dan pemberian layanan dalam pelayanan publik desa.
5. *Political Goodwill:* Membina *Political Goodwill* sangat penting untuk mengatasi hambatan dan menciptakan lingkungan kerja yang sesuai. Hal ini mencakup kebijakan dan kepemimpinan yang mendukung untuk memberdayakan layanan publik.
6. **Keterlibatan Masyarakat:** Membangun hubungan antara penyedia layanan dan masyarakat melalui pertemuan publik lokal dan penjangkauan media sosial dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan spesifik, mendorong penyelesaian masalah dengan cepat, dan meningkatkan keterlibatan masyarakat.

Dengan berfokus pada area-area ini, layanan publik desa dapat diberdayakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik, meningkatkan pemberian layanan, dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan.

C. Pelayanan Sosial Dasar di Desa

Mengacu kepada UU Desa Pasal 4, Pengaturan desa antara lain bertujuan meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; Pasal 74 Ayat (1) mengamanatkan agar Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa. Kebutuhan pembangunan meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa. Yang dimaksud dengan “tidak terbatas” adalah kebutuhan pembangunan di luar pelayanan

dasar yang dibutuhkan masyarakat Desa. Sedang “kebutuhan primer” adalah kebutuhan pangan, sandang, dan papan. “Pelayanan dasar” adalah antara lain pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Pasal 78 Ayat (1) menegaskan Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pasal 80 UU Desa juga menempatkan peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar sebagai yang pertama dalam penentuan Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang dirumuskan di dalam Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.

Jadi, desa dalam membangun dan memelihara infrastruktur agar memprioritaskan dahulu kegiatan-kegiatan yang mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar. Di bidang pemberdayaan masyarakat Desa, perlu diprioritaskan dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas.

Pelayanan sosial dasar di desa adalah layanan yang diberikan oleh pemerintah desa atau lembaga sosial kepada masyarakat desa untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Pelayanan sosial dasar ini penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.

Berikut adalah beberapa jenis pelayanan sosial dasar di desa:

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Pendidikan yang berkualitas dapat membantu masyarakat desa untuk mengembangkan potensi diri dan meningkatkan taraf

hidup mereka. Pemerintah desa dapat menyediakan pelayanan pendidikan dasar, seperti PAUD.

2. Kesehatan

Kesehatan juga merupakan kebutuhan dasar manusia. Masyarakat desa yang sehat dapat bekerja dan berkontribusi secara produktif bagi masyarakat. Pemerintah desa dapat menyediakan pelayanan kesehatan dasar, seperti Posyandu, Puskesmas, dan ambulans desa.

3. Infrastruktur dasar

Infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, irigasi, dan air bersih, juga penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa. Infrastruktur dasar yang memadai dapat memudahkan masyarakat desa untuk beraktivitas dan meningkatkan perekonomian mereka.

4. Penanggulangan kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu tujuan dari pelayanan sosial dasar di desa. Pemerintah desa dapat memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin, seperti bantuan pangan, bantuan tunai, dan bantuan modal usaha.

5. Ketahanan pangan

Ketahanan pangan merupakan hal yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah desa dapat mendukung ketahanan pangan dengan mengembangkan pertanian dan peternakan di desa.

6. Pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi masyarakat desa. Pemerintah desa dapat memberikan pelatihan keterampilan, bantuan permodalan, dan pendampingan kepada masyarakat desa.

Pelayanan sosial dasar di desa dapat diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dapat

dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah desa, lembaga sosial, atau masyarakat desa sendiri.

Dalam rangka pelaksanaan program Dana Desa, pemerintah desa dapat menggunakan dana desa untuk membiayai pelayanan sosial dasar. Dana desa dapat digunakan untuk membangun sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar, seperti gedung sekolah, puskesmas, jembatan, dan irigasi. Dana desa juga dapat digunakan untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin dan mengembangkan pertanian dan peternakan di desa.

Pelayanan sosial dasar di desa memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah desa, lembaga sosial, dan masyarakat desa harus bekerja sama untuk mewujudkan pelayanan sosial dasar yang berkualitas.

Kemiskinan berhubungan langsung dengan hak-hak dasar dengan merujuk pada UU Ratifikasi Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (UU No. 11 Tahun 2005) dan UU Tentang Hak Asasi Manusia yang memuat 10 Hak Dasar. Keberadaan Hak Dasar itu menegaskan adanya Kewajiban Negara (*state obligation*) untuk mengatasi kemiskinan dalam konteks penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar.

Terpenuhinya hak dasar masyarakat miskin secara bertahap yang meliputi:

1. Terpenuhinya kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau.
2. Terpenuhinya pelayanan kesehatan yang bermutu.
3. Tersedianya pelayanan pendidikan dasar yang bermutu dan merata.
4. Terbukanya kesempatan kerja dan berusaha.
5. Terpenuhinya kebutuhan perumahan dan sanitasi yang layak dan sehat.
6. Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan aman bagi masyarakat miskin.
7. Terbukanya akses masyarakat miskin dalam pemanfaatan SDA dan terjaganya kualitas lingkungan hidup.

8. Terjamin dan terlindunginya hak perorangan dan hak komunal atas tanah.
9. Terjaminnya rasa aman dari tindak kekerasan.
10. Meningkatnya partisipasi masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan.

D. Pemberdayaan Ekonomi Desa

Pembangunan menurut Korten (2005), adalah sebuah proses dimana anggota masyarakat meningkatkan kapasitas individu dan kelembagaannya untuk menghasilkan perbaikan kualitas hidup yang berkesinambungan dan merata sesuai dengan aspirasi mereka. Dalam konteks penguatan kelembagaan, perubahan struktural pada institusi lokal diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup, produktivitas, kreativitas, pengetahuan dan keterampilan serta kapasitas kelembagaan agar selalu *survive* dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial yang melingkupinya. Perubahan tersebut sedapat mungkin dilakukan secara mandiri dan untuk kebutuhan masyarakat itu sendiri. Kalaupun ada intervensi dari pihak lain, sifatnya hanya memfasilitasi.

Dalam perspektif pembangunan yang berbasis pada kemampuan lokal, seperti yang dikemukakan oleh Caverta dan Valderrama dalam Suhirman (2003) bahwa keberhasilan pembangunan diukur dari seberapa besar masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya lokal yang mereka miliki yang secara garis besar terdiri dari:

1. Sumber daya manusia, yang meliputi jumlah penduduk, skala rumah tangga, kondisi pendidikan dan keahlian serta kondisi kesehatan penduduk.
2. Sumber daya alam, yang meliputi tanah, air, hutan, pertambangan, sumber daya hayati dan sumber daya lingkungan.
3. Sumber daya keuangan, termasuk sumber daya keuangan yang ada seperti tabungan, pinjaman, subsidi, dan sebagainya.

4. Sumber daya fisik, termasuk infrastruktur yang diperlukan, yaitu transportasi, perumahan, air bersih, sumber energi, komunikasi, peralatan produksi, dan fasilitas yang membantu manusia untuk mendapatkan mata pencaharian.
5. Modal sosial, yaitu jaringan kekerabatan dan budaya, serta keanggotaan kelompok, rasa saling percaya, pranata sosial, lembaga sosial dan tradisi yang mendukung, dan akses terhadap pranata sosial yang lebih luas.

Menurut Pasal 78 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 bahwa:

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Lebih lanjut, dapat dikatakan bahwa Pembangunan Desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan untuk mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Kaitan antara pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah bahwa esensi pemberdayaan masyarakat menempatkan pembangunan berkelanjutan sebagai salah satu isu penting dalam kebijakan pemerintah akhir-akhir ini.

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang tidak henti-hentinya menjaga agar kehidupan generasi yang akan datang tidak lebih buruk atau bahkan lebih baik dari generasi saat ini (Suparmoko, 2000). Penurunan kualitas lingkungan, merebaknya bencana, dan meningkatnya kepadatan penduduk merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah dalam menentukan rencana pembangunan di masa kini dan masa yang akan datang. Pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan sangat

diperlukan untuk mengantisipasi menurunnya cadangan sumber daya alam di masa mendatang.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses perubahan struktural yang harus muncul dari masyarakat, dilakukan oleh masyarakat dan hasilnya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat kota. Proses perubahan berlangsung secara alamiah dengan asumsi bahwa setiap anggota masyarakat sebagai pelaku sosial yang ikut serta dalam proses perubahan tersebut.

Esensi pemberdayaan masyarakat menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian sekaligus dipandang dan diposisikan sebagai subjek bagi dirinya sendiri dalam proses pembangunan. Mereka adalah manusia utuh yang aktif yang dapat berpikir, berkehendak dan berusaha. Dalam lembaran yang berarti, maka seperti yang dikatakan Ife sebagaimana dikutip Suharto (1997) mengatakan bahwa upaya pemberdayaan harus diarahkan pada tiga hal, yaitu:

1. Memampukan, yaitu membantu masyarakat desa agar mampu mengenali potensi dan kemampuan yang mereka miliki, mampu merumuskan dengan baik masalah yang mereka hadapi sekaligus mendorong mereka agar memiliki kemampuan untuk menyusun agenda-agenda penting dan melaksanakannya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki serta mengatasi kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi.
2. *Empowering*, yaitu penguatan dan daya yang dimiliki oleh masyarakat desa dengan berbagai macam *input* dan membuka akses terhadap berbagai peluang. Penguatan di sini meliputi penguatan modal manusia, modal alam, modal finansial, modal fisik, dan modal sosial yang mereka miliki.

3. Melindungi, yaitu mendorong terwujudnya tatanan struktural yang dapat melindungi dan mencegah yang lemah menjadi semakin lemah. Melindungi bukan berarti mengisolasi dan menutup diri dari interaksi. Karena hal tersebut akan mengerdikan yang kecil, dan melemahkan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi yang hebat terhadap yang lemah.

Strategi pemberdayaan masyarakat yang harus dibangun oleh pemerintah desa dalam pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan adalah:

1. Mengetahui karakteristik masyarakat yang akan diberdayakan;
2. Mengumpulkan informasi yang diperuntukkan bagi masyarakat setempat;
3. Membutuhkan dukungan dari pemerintah dan tokoh masyarakat setempat;
4. Pendekatan persuasif dengan cara ikut serta dalam menyelesaikan masalah masyarakat setempat dan membantu memenuhi kebutuhan;
5. Membangun kebersamaan dalam ikut serta dalam menyelesaikan masalah pertanahan masyarakat setempat dan membantu memenuhi kebutuhan;
6. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
7. Memprioritaskan masalah yang akan diselesaikan secara bersama-sama;
8. Menetapkan program desa yang dilakukan secara bersama-sama dengan masyarakat;
9. Menyadarkan masyarakat untuk memahami potensi sumber daya yang dimiliki dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat setempat;
10. Pemberdayaan masyarakat dilakukan secara berkesinambungan dalam upayanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

11. Membangun kemandirian masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya secara swadaya.

Terlepas dari beragam reaksi yang muncul terhadap lahirnya UU Desa dan sejarah panjang pasang surutnya pembelaan negara terhadap Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan tegas mengakui kedudukan Desa sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, hal tersebut diatur dalam pasal 1 ayat 2 UU Desa. Desa berhak merencanakan dan melaksanakan pembangunannya sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan terhadap Desa sebagai subyek juga tersirat dalam pasal-pasal lain UU Desa. Dalam pasal lain secara tegas UU Desa mengusung semangat pemberdayaan dalam membangun Desa. Pasal 1 ayat 12 jelas-jelas menyuarakan hal tersebut, pasal tersebut menyatakan amanat tentang pemberdayaan masyarakat Desa.

Pemerintah melalui UU Desa mencoba mengubah paradigma pembangunan Desa yang selama ini berlangsung. Melalui pemberdayaan yang diamanatkan UU Desa, pembangunan Desa mencoba untuk menampilkan sebuah karakter baru, dimana nilai-nilai kemanusiaan menjadi identitas pembangunan Desa. Ada beberapa karakter pembangunan Desa yang akan didorong oleh UU Desa. Pertama, pemberdayaan mewujudkan pembangunan yang berpusat pada masyarakat. Masyarakat menjadi pelaku utama sekaligus tujuan (*People Centre*). Dalam konteks ini pemberdayaan masyarakat menjadi bagian gerakan budaya. Kesadaran kritis masyarakat Desa terbangun, sehingga bisa memahami makna pembangunan secara utuh. Dengan nilai tersebut, masyarakat Desa selalu dituntut untuk siap sedia belajar memahami berbagai aspek yang mempengaruhi dampak pembangunan bagi masyarakat dan lingkungan.

Kedua, pembangunan partisipatif, yakni melibatkan dan menyertakan masyarakat untuk menggagas, merencanakan, melaksanakan,

dan mempertanggungjawabkan segala proses pembangunan. Dalam UU Desa karakter ini jelas dan tegas terlihat dalam azas pengaturan Desa yang terletak pada pasal 3 UU Desa. selain itu, karakter partisipatif juga sejalan dengan kearifan lokal Desa yang menghormati dan menjunjung musyawarah sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi Desa.

Ketiga, dengan adanya UU Desa, pemerintah berusaha untuk memampukan (*empowering*) masyarakat Desa yang terlibat dalam aktivitas pembangunan. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah menyertakan Peraturan Pemerintah (PP) yang menegaskan perlunya para pihak, utamanya pemerintah untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat dan aparat Desa. Perintah tersebut tersirat dalam pasal 128 PP Nomor 43 Tahun 2014. Ada empat bidang yang harus ditingkatkan kapasitasnya, di antaranya bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan masyarakat Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa (Pasal 129 ayat 1 C, PP. Nomor 43 Tahun 2014).

Menurut Ra'is (2018), harapannya dengan menggunakan pemberdayaan sebagai pendekatan pembangunan Desa, akan ada pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable*). Pembangunan tidak untuk saat ini, tapi bagaimana caranya pembangunan Desa harus visioner dan berpandangan jauh ke depan untuk kepentingan jangka panjang. Di samping itu, dengan adanya pembangunan Desa yang keberlanjutan, Desa bisa memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Dengan sifatnya yang berkelanjutan, perencanaan pembangunan bisa memperhatikan aspek- aspek dampak lingkungan dan sesuai dengan ciri khas, kearifan lokal, budaya dan identitas Desa. Paling tidak, perencanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaannya bisa menjaga keberlangsungan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan yang menjadi modal dan aset Desa.

Berpijak pada asas rekognisi dan subsidiaritas UU Desa, pemberdayaan merupakan sebuah pola pembangunan yang menjunjung

tinggi nilai kedaulatan masyarakat Desa, baik itu sebagai subyek maupun kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak dan kewenangan. Berubahnya pola pikir masyarakat dalam membangun Desa adalah sebuah aras baru dalam menyejahterakan rakyat Indonesia, dimana prosesnya dimulai dari Desa. Istilahnya membangun Indonesia dari halaman rumah yakni Desa.

Asas Rekognisi dan Subsidiaritas memberikan peluang bagi Desa untuk semakin kreatif dan inovatif dalam membangun Desa sesuai dengan karakteristik, lokalitas, dan kebutuhan Desa. Pembangunan masyarakat Desa melalui pemberdayaan seperti yang sudah dimandatkan oleh UU Desa tidak hanya dikukur secara materialistik semata, dan terpenuhinya sarana dan prasarana fisik, tetapi diukur dari meratanya kesejahteraan warga Desa. Paling utama adalah bagaimana sikap dan perilaku masyarakat Desa bisa berubah, sehingga bisa menyejahterakan dirinya sendiri. Pemberdayaan sebagai bentuk lain dari pendidikan karakter mampu mendorong masyarakat Desa tidak hanya semakin mampu dan terampil, tetapi juga berkembang menjadi masyarakat yang memiliki kapasitas sosial, jejaring sosial, dan integritas sosial.

Pembangunan masyarakat desa melalui pemberdayaan akan menciptakan kemandirian Desa. Desa telah bermetamorfosa dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, sejahtera, dan demokratis sehingga bisa menyediakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan desa yang berkeadilan dan makmur. Melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, desa telah diberi jalan untuk mandiri melalui pintu azas (rekognisi dan subsidiari) dan kewenangan Desa (asal usul dan kewenangan desa berskala lokal). UU Desa menempatkan dan memposisikan desa sebagaimana mestinya, yakni sebagai subyek pembangunan.

Pemerintah supradesa menjadi pihak yang memfasilitasi tumbuh kembangnya kemandirian dan kesejahteraan desa. Melalui skema

kebijakan yang mengutamakan rekognisi dan subsidiaritas, supra desa tidak perlu takut dengan konsekuensi pemberlakuan kedua azas tersebut. Dengan menjadi subyek pembangunan justru desa tidak lagi akan menjadi entitas yang merepotkan tugas pokok pemerintah kabupaten, provinsi bahkan pusat. Justeru desa akan menjadi entitas negara yang berpotensi mendekatkan peran negara dalam membangun kesejahteraan, kemakmuran dan kedaulatan bangsa, baik dimata warga negaranya sendiri maupun negara lain.

E. Pembangunan Desa Inklusif

Permasalahan perdesaan lambat laun kian kompleks dan berlapis-lapis. Kemiskinan, ketergantungan, ketertinggalan, sempitnya lahan pertanian, rendahnya produktivitas, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan pengangguran tak kentara kiranya sudah menjadi masalah khas perdesaan. Permasalahan itu kemudian berkembang lagi dengan ketunamiskinan (*landlessness*), menajamnya ketimpangan, melemahnya kohesi sosial, dan eskalasi ancaman bencana lingkungan. Kemiskinan perdesaan itu sendiri tidaklah sesederhana ungkapannya karena di dalamnya bisa tercakup gizi buruk, rumah tidak layak huni, kurangnya akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi lingkungan. Kompleksitas permasalahan perdesaan menjadikan tidak ada satu pun pendekatan tunggal yang dapat diklaim sebagai solusi paling mudah. Kehadiran Dana Desa tidak serta-merta mampu mengatasi berbagai permasalahan perdesaan yang cenderung akumulatif, kronis, dan telah berpuluh-puluh tahun lamanya (Ra'is, 2018).

Kemiskinan adalah salah satu permasalahan utama dalam pembangunan Indonesia. Namun, kemiskinan bukanlah label utama dari ketidakberdayaan seseorang atau kelompok masyarakat. Ras, etnis, jenis kelamin, agama, tempat tinggal (isolasi geografis), status disable, usia, status HIV/ AIDS, orientasi seksual atau penanda stigma lainnya, bisa menyebabkan seseorang atau sekelompok masyarakat

terkucilkan (tereksklusi) dari berbagai proses dan peluang. Eksklusi ini bisa terjadi pada tataran sosial, ekonomi maupun politik. Dalam kehidupan bermasyarakat, status eksklusi tersebut melekat sebagai stigma negatif yang menyebabkan seseorang terdiskriminasi untuk mendapatkan layanan dasar dan terkucilkan dalam relasinya dengan masyarakat lain. Individu atau kelompok ini, misalnya masyarakat adat (*indigenous people*), penganut paham keagamaan minoritas, orang yang terinfeksi HIV/AIDS, kondisi cacat fisik, anak yang dila- curkan, masyarakat disable, waria, masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil, sukarnya mengakses pendidikan yang layak, dan lain-lain. Kelompok masyarakat tersebut hidup di tengah-tengah masyarakat, namun mengalami eksklusi dan diskriminasi karena dianggap “ber- beda”.

Ketidaksetaraan sangat erat kaitannya dengan eksklusi sosial. Eksklusi sosial dapat mendorong masyarakat miskin kedalam kemiskinan lebih dalam, dan semakin mempersulit mereka untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Mereka yang tereksklusi berdasarkan gender, ras, status sosial, etnisitas, agama atau orientasi seksual sering dihadapkan dengan berbagai bentuk perampasan atau kehilangan hak dan kesempatan yang berakibat pada lebih rendahnya status sosial dan tingkat pendapatan, akses yang lebih terbatas pada kesempatan kerja dan pelayanan dasar, serta tdk adanya suara atau pelibatan dalam pengambilan keputusan (Ra’is, 2018).

Definisi Inklusi Sosial (*social inclusion*) merupakan kebalikan dari definisi Eksklusi Sosial (*social exclusion*). Menurut Francis (dalam Nabin Rawal, 2008) mendefinisikan eksklusi sosial sebagai suatu proses yang membuat individu atau kelompok tertentu tidak dapat berpartisipasi sebagian atau sepenuhnya, dalam kehidupan sosial mereka. Maka menurut Simarmata dan Zakaria (2015), Inklusi Sosial merupakan suatu proses yang memungkinkan individu atau kelompok

tertentu untuk dapat berpartisipasi sebagian atau seluruhnya dalam kehidupan sosial mereka.

Inklusi sosial merujuk pada definisi yang dikemukakan oleh Bank Dunia, merupakan sebuah proses untuk meningkatkan persyaratan bagi individu dan kelompok untuk ikut berperan serta dalam masyarakat. Inklusi sosial dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat miskin dan terpinggirkan untuk mengambil keuntungan dari peluang pembangunan global. Pendekatan ini memastikan setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka dan bahwa mereka menikmati akses yang sama ke dalam sistem pasar dan layanan serta ruang politik, baik secara sosial maupun fisik. Bank Dunia, bahkan menyatakan bahwa Inklusi Sosial merupakan prinsip utama untuk mengakhiri kemiskinan dunia yang ekstrim pada tahun 2030 serta mempromosikan kemakmuran secara bersama-sama.

Inklusi sosial merupakan upaya menempatkan martabat dan kemandirian individu sebagai modal utama untuk mencapai kualitas hidup yang ideal. Pendekatan inklusi sosial mendorong agar seluruh elemen masyarakat mendapat perlakuan yang setara dan memperoleh kesempatan yang sama sebagai warga negara, terlepas dari perbedaan agama, etnis, kondisi fisik, pilihan orientasi seksual dan lain-lain. Inklusi sosial merangkul semua warga masyarakat yang mengalami stigma dan marginalisasi, dengan mengajak masyarakat luas untuk bertindak inklusif dalam kehidupan sehari-hari. Sederhananya, inklusi sosial sebagai upaya untuk mendorong masyarakat membangun relasi sosial dan solidaritas, sehingga bisa membuka akses dan penerimaan kepada semua warga negara tanpa pengecualian, dan dilakukan cara sukarela tanpa paksaan. Sehingga Inklusi sosial memerlukan pemahaman untuk tidak saling mengucilkan dan dikucilkan serta mulai menerima adanya perbedaan sebagai sebuah Hak Asasi. Membuka pintu berarti mengundang “orang yang tereklusi” untuk membangun relasi baru dan menyadari hak-

hak formalnya. Sedangkan kelompok tereklusi bersedia membangun relasi baru dan menyadari hak-hak formalnya. Proses ini mungkin mengganggu di awal, namun berkontribusi pada stabilitas sosial, kohesi dan solidaritas dalam jangka panjang.

Inklusi dalam pembangunan merupakan suatu konsep yang perlu diterjemahkan oleh masyarakat di mana proses tersebut berlangsung. Ini merupakan proses pembelajaran terus-menerus di mana ruang pembelajarannya adalah masyarakat itu sendiri, dan instrumen pembelajarannya adalah institusi (aturan, praktik, tradisi dan budaya) yang ada dan terbuka untuk digunakan, diadaptasi, atau dicipta ulang oleh masyarakat yang bersangkutan. Dengan begitu, barulah pembangunan membawa perubahan sosial dan pemberdayaan.

Pendekatan Inklusi Sosial memiliki tujuan untuk memastikan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang universal, terlayannya kebutuhan dasar (mampu mengakses, terpenuhi layanan dasar minimum), partisipasi sosial penuh (melawan pengisolasian), dan pengakuan identitas serta dihormati dalam suatu kesatuan yang utuh. Inklusi digunakan sebagai sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka, mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya.

Inklusi sosial merupakan salah satu tujuan dalam Undang-Undang Desa untuk mengakhiri kondisi kemiskinan yang sangat esktrim di desa-desa. Mendorong desa untuk merancang Desa Inklusi merupakan upaya untuk mewujudkan kemakmuran desa secara bersama-sama. Inklusi Sosial merupakan hasil sekaligus merupakan proses untuk mendorong tingkat keterlibatan warga desa dalam kehidupan bermasyarakat.

Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 secara eksplisit berupaya merubah desa menjadi desa yang inklusif. Desa yang

inklusif artinya memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga untuk dapat memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan. Peningkatan kesejahteraan melalui pengembangan ekonomi desa menjadi salah satu semangat yang diusung oleh Undang-Undang Desa. Peluang penerapan perencanaan dan penganggaran partisipatif yang pro poor dan responsif gender serta ramah terhadap kaum marjinal makin terbuka dengan diperkenalkannya dua pendekatan dalam UU Desa. Pendekatan tersebut adalah “Desa Membangun” dan “Membangun Desa” yang diintegrasikan dalam perencanaan Desa.

UU No. 6 tahun 2014 juga mengamanahkan agar aparat desa melaksanakan pembangunan partisipatif. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala desa. Dalam proses pembangunannya harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan. Adapun tujuannya adalah mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Demi mencapai tujuan tersebut, perlu dijamin adanya keterbukaan ruang partisipasi bagi masyarakat dalam setiap tahapan dan proses perencanaan desa yang dilakukan oleh desa seperti yang dilakukan oleh Undang-Undang Desa. Pasal 23 Permendesa No. 2 Tahun 2014 telah menjamin keterbukaan akses untuk berpartisipasi dalam Musyawarah Desa kepada seluruh warga desa. Ini bermakna baik laki-laki maupun perempuan, baik dari kalangan berada maupun masyarakat miskin memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi.

Upaya meningkatkan efektivitas partisipasi dalam proses pembangunan memerlukan pelibatan (inklusi) semua pihak. Untuk itu dibutuhkan adanya sumber dan saluran untuk memperoleh informasi yang beragam, mekanisme umpan balik, dan forum terbuka yang memungkinkan terjadinya proses pertukaran informasi, perencanaan dan pembahasan program pembangunan secara bersama-sama dengan masyarakat.

F. Akuntabilitas Sosial Desa

Lahirnya UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 telah mengamanatkan kepada desa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik yaitu profesional, akuntabel, transparan, partisipatoris, efisien, efektif, inklusif, dan bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa. Untuk mewujudkan itu salah satu syaratnya adalah penerapan akuntabilitas (Ra'is, 2022).

Untuk menjelaskan konsep akuntabilitas sosial, pertama, penting untuk memulai dengan definisi akuntabilitas yang konkrit. Akuntabilitas dapat didefinisikan sebagai kewajiban pemegang kekuasaan untuk mempertanggungjawabkan atau bertanggung jawab atas tindakan mereka. “Pemegang kekuasaan” mengacu pada mereka yang memegang kekuasaan politik, keuangan atau bentuk lain dan termasuk pejabat di pemerintahan, perusahaan swasta, lembaga keuangan internasional dan organisasi masyarakat sipil. Secara garis besar, akuntabilitas merupakan hubungan antara dua badan, di mana kinerja yang satu diawasi oleh yang lain. Maka, bisa dikatakan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban pejabat publik untuk menginformasikan dan menjelaskan apa yang telah atau sedang mereka lakukan terhadap mandat yang telah mereka terima serta kemampuan untuk menegakkan sanksi apabila mereka melanggar mandatnya.

Akuntabilitas sosial mengacu pada bentuk akuntabilitas yang muncul melalui tindakan warga negara dan organisasi masyarakat sipil yang bertujuan meminta pertanggungjawaban negara, serta upaya pemerintah dan aktor lain (media, sektor swasta, donor) untuk mendukung dan merespons untuk tindakan ini (Lister, 2010). Akuntabilitas sosial merupakan “suatu pendekatan untuk membangun akuntabilitas yang mengandalkan keterlibatan sipil, yaitu, di mana warga negara biasa dan/atau organisasi masyarakat sipil yang berpartisipasi secara langsung atau tidak langsung dalam menuntut akuntabilitas” (Malena, Forster dan Singh, 2004). Untuk menjelaskan konsep akuntabilitas sosial, pertama, penting untuk memulai dengan

definisi akuntabilitas yang konkrit. Akuntabilitas dapat didefinisikan sebagai kewajiban pemegang kekuasaan untuk mempertanggungjawabkan atau bertanggung jawab atas tindakan mereka. “Pemegang kekuasaan” mengacu pada mereka yang memegang kekuasaan politik, keuangan atau bentuk lain dan termasuk pejabat di pemerintahan, perusahaan swasta, lembaga keuangan internasional dan organisasi masyarakat sipil. Secara garis besar, akuntabilitas merupakan hubungan antara dua badan, di mana kinerja yang satu diawasi oleh yang lain. Maka, bisa dikatakan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban pejabat publik untuk menginformasikan dan menjelaskan apa yang telah atau sedang mereka lakukan terhadap mandat yang telah mereka terima serta kemampuan untuk menegakkan sanksi apabila mereka melanggar mandatnya.

Akuntabilitas sosial mengacu pada bentuk akuntabilitas yang muncul melalui tindakan warga negara dan organisasi masyarakat sipil yang bertujuan meminta pertanggungjawaban negara, serta upaya pemerintah dan aktor lain (media, sektor swasta, donor) untuk mendukung dan merespons untuk tindakan ini (Lister, 2010). Akuntabilitas sosial merupakan “suatu pendekatan untuk membangun akuntabilitas yang mengandalkan keterlibatan sipil, yaitu, di mana warga negara biasa dan/atau organisasi masyarakat sipil yang berpartisipasi secara langsung atau tidak langsung dalam menuntut akuntabilitas” (Malena, Forster dan Singh, 2004).

Namun, akuntabilitas tersebut tidak bisa dipraktekkan hanya melalui mekanisme dua arah seperti pada umumnya, yaitu akuntabilitas vertikal dan horizontal. Kedua mekanisme tersebut dianggap belum cukup mampu untuk mewujudkan amanat UU Desa, karena masih memungkinkan terjadinya perilaku korup dan perilaku tidak bertanggung jawab lainnya dari pemerintahan desa, sehingga perlu ada mekanisme akuntabilitas lain, yaitu akuntabilitas diagonal atau akuntabilitas sosial (Ra'is, 2022).

Menurut Ra'is (2022), kuntabilitas sosial dalam praktiknya berfokus pada warga desa selaku aktor utamanya. Dengan warga desa sebagai aktornya, diharapkan akan menjadi penguat yang tepat guna mewujudkan amanat UU Desa. Warga desa adalah pemilik mandat sekaligus pemilik langsung kedaulatan desa sehingga bisa terlibat langsung untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan meminta pertanggung jawaban kepada pemerintah desa.

Warga Desa sebagai pemilik, memiliki sejumlah hak yang harus dipenuhi oleh desa. Hak-hak tersebut diantaranya hak untuk meminta pertanggung jawaban, hak untuk terlibat, dan hak untuk mendapatkan informasi. Hak-hak tersebut dijamin oleh Undang-undang sehingga pemerintah desa harus memenuhinya. Pemerintah desa harus bertanggung jawab kepada warga desa atas segala tindakannya dan siap menerima sanksi hukum jika menyalahgunakan tanggung jawab dan kewenangannya.

Namun, hal tersebut akan terwujud jika pemerintah desa bersedia dan bersungguh-sungguh untuk menerapkan akuntabilitas sosial dalam pemerintahan desanya serta bersedia untuk memberikan ruang kepada warga desanya untuk terlibat. Pemerintah desa perlu dikuatkan kapasitasnya untuk mampu menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas sosial. Pemerintah desa harus mulai untuk melakukan prakondisi politik, sosial dan budaya guna mewujudkan akuntabilitas sosial. Akuntabilitas sosial adalah kewajiban yang harus dipraktikkan dalam pemerintahan desa (Ra'is, 2022). Selain karena tuntutan regulasi, akuntabilitas sosial merupakan alat untuk saling mengawasi dan bekerja sama dalam membangun desa. Secara keseluruhan, akuntabilitas sosial merupakan salah satu cara untuk menguatkan demokrasi desa guna mencapai tata kelola pemerintahan desa yang baik.

G. Pengembangan Sumberdaya Manusia

Pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM) Desa adalah upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM desa dalam membangun dan mengelola desa. Pengembangan SDM Desa dapat dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan, seperti:

1. Pelatihan

Pelatihan merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan kualitas SDM. Pelatihan dapat diberikan kepada masyarakat desa untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap mereka. Pelatihan dapat dilakukan pemerintah desa, lembaga pelatihan, atau pihak swasta.

2. Pendidikan

Pendidikan juga merupakan faktor penting dalam pengembangan SDM. Masyarakat desa harus memiliki akses yang luas ke pendidikan, baik pendidikan formal maupun nonformal. Pendidikan formal dapat diberikan melalui sekolah-sekolah di desa. Pendidikan nonformal dapat diberikan melalui lembaga-lembaga pelatihan, seperti Pusat Pelatihan Masyarakat (PPM).

3. Peningkatan kapasitas

Peningkatan kapasitas merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Peningkatan kapasitas dapat dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan, seperti pelatihan kepemimpinan, pelatihan pengelolaan keuangan, dan pelatihan perencanaan desa.

4. Pengembangan potensi lokal

Pengembangan potensi lokal merupakan upaya untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Potensi lokal dapat berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, atau budaya. Pengembangan potensi lokal dapat dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan, seperti pengembangan pertanian, pengembangan pariwisata, dan pengembangan industri kecil.

Pengembangan SDM Desa memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. SDM yang berkualitas dapat membantu masyarakat untuk mengembangkan potensi diri dan meningkatkan taraf hidup mereka. Pemerintah desa, lembaga sosial, dan masyarakat desa harus bekerja sama untuk mewujudkan pengembangan SDM Desa yang berkualitas.

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) desa menjadi aspek krusial dalam memajukan kesejahteraan dan menggerakkan perekonomian masyarakat pedesaan. SDM yang berkualitas dapat meningkatkan daya saing bisnis, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di desa.

Selain itu, keterampilan non-teknis seperti manajemen waktu, kepemimpinan, dan keterampilan interpersonal juga sangat penting. Pengembangan SDM di desa melalui pelatihan, pendidikan, dan kolaborasi dengan institusi pendidikan dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja di desa.

Namun, dalam mengembangkan SDM *startup* desa, juga perlu memperhatikan tantangan seperti keterbatasan akses ke teknologi dan informasi, serta rendahnya minat masyarakat desa dalam mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan komunitas.

Pemerintah daerah juga dapat memberikan dukungan berupa dana dan program pelatihan. Lembaga pendidikan dapat berperan dengan memberikan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat desa tentang teknologi dan manajemen bisnis. Komunitas juga dapat berperan dalam memotivasi masyarakat desa melalui program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan potensi desa. Dengan demikian, pengembangan SDM dapat mendorong pertumbuhan *startup* desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan.

H. Pembangunan Desa Berkelanjutan (SDGs Desa)

Pembangunan desa berkelanjutan (*rural sustainable development*) adalah salah satu alternatif yang dapat diterapkan di dalam pembangunan desa ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang. Konsep ini sudah diperkenalkan di berbagai negara di dalam usaha untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Dalam konteks pembangunan desa berkelanjutan, yang ingin dicapai adalah terwujudnya pembangunan desa yang maju dari aspek ekonomi, terwujudnya ikatan sosial dan keharmonisan sosial yang kohesif di pedesaan dan terjaganya sumberdaya alam dan lingkungan yang ada di desa (Dinata, et. al., 2023).

Konsep berkelanjutan merujuk pada pemanfaatan sumberdaya alam sebagai dasar bagi aktivitas manusia (Hardoy et al, 1992). Sementara itu, istilah "pembangunan" lebih fokus pada pertumbuhan ekonomi yang melibatkan dimensi sosial, politik, dan budaya (Hardoy et al, 1992). Pembangunan diartikan sebagai peningkatan kualitas hidup dan terciptanya keseimbangan sosial, sedangkan berkelanjutan merujuk pada sistem yang dapat bertahan dalam jangka waktu panjang, memberikan dasar bagi proses pembangunan. Dalam konteks ini, keberlanjutan menjadi landasan bagi upaya pembangunan ekonomi.

Laporan Brundtland atau yang dikenal sebagai WCED mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai "pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka" (Keeble, 1988). Definisi ini menekankan aspek jangka panjang dan keberlanjutan, di mana pembangunan tidak hanya dinikmati pada masa sekarang tetapi juga memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

Pembangunan berkelanjutan bukan sekadar integrasi aspek lingkungan dalam proses pembangunan ekonomi, melainkan juga mencakup penciptaan keseimbangan di antara individu dalam satu

generasi dan di antara generasi, serta peningkatan partisipasi demokratis dalam pengambilan keputusan (Gibbs, 1997). Prinsip utama dari konsep pembangunan berkelanjutan adalah terciptanya masyarakat yang makmur dan adil, sambil menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan, baik untuk kepentingan saat ini maupun generasi mendatang. Pada dasarnya, konsep ini bertujuan untuk mencapai harmoni antara pembangunan ekonomi, sosial, dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan dalam berbagai aktivitas pembangunan, dengan tujuan menjamin kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Konsep pembangunan berkelanjutan telah mengalami perkembangan yang signifikan, tidak lagi hanya terfokus pada masalah penurunan sumberdaya alam, lingkungan, dan pertumbuhan penduduk seperti pada awal kemunculannya. Kini, konsep ini telah menyeluruh mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial dengan seksama. Sebagai akibatnya, implementasi dan realisasinya menjadi semakin kompleks, terutama dalam konteks negara sedang berkembang seperti Indonesia yang dihadapkan pada berbagai tantangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Meskipun begitu, konsep ini tetap menjadi landasan yang lebih jelas dan bermakna dalam upaya meningkatkan kualitas hidup secara global.

Meskipun pembangunan berkelanjutan telah menjadi topik yang populer dan aktual dalam pembangunan, pembicaraan mengenai pembangunan berkelanjutan di pedesaan masih belum mendapat banyak perhatian seperti yang terjadi di daerah perkotaan. Pembangunan berkelanjutan di pedesaan adalah suatu konsep pembangunan desa yang menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan, dengan penekanan khusus pada aspek dan tujuan pembangunan pedesaan. Fokus utamanya mencakup pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan pedesaan serta peningkatan kualitas hidup masyarakat desa (komunitas pedesaan).

Perhatian terhadap keberlanjutan di wilayah pedesaan akan bervariasi antara satu desa dengan desa lainnya, tergantung pada isu dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat serta tingkat pembangunan desa itu sendiri. Pemahaman tentang keberlanjutan pada tingkat rumah tangga memiliki peran yang sangat krusial dalam mewujudkan konsep pembangunan berkelanjutan. Nilai-nilai, perilaku, dan tindakan masyarakat menjadi faktor penentu untuk menilai apakah pembangunan yang telah dilaksanakan sesuai dengan konsep keberlanjutan atau tidak. Keberhasilan dalam mencapai konsep keberlanjutan dalam pembangunan pedesaan mencerminkan adanya transformasi nilai-nilai, sikap, dan tindakan masyarakat desa yang sejalan dan seimbang dengan prinsip-prinsip keberlanjutan.

Secara umum, prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan mencakup tiga dimensi utama, yakni ekonomi, sosial, dan ekologi. Dalam dimensi ekonomi, terdapat aspek pertumbuhan, keadilan, dan efisiensi. Dimensi sosial melibatkan pemberdayaan, partisipasi, gerakan sosial, kohesi sosial, identitas budaya, dan pembangunan institusi. Sementara dalam dimensi ekologi, terfokus pada integritas ekosistem, kapasitas dukungan (*carrying capacity*), keanekaragaman hayati, dan isu-isu global.

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk dunia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Sebagai bagian dari upaya untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan nasional (SDGs Nasional) hingga ke tingkat desa, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menerbitkan Permendesa PDTT No. 13 Tahun 2020 yang berfokus pada SDGs desa. Dalam regulasi ini diatur tentang prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2021 yang juga fokus terhadap upaya pencapaian SDGs. Permendesa PDTT Nomor 13 tahun 2020 ini dilatarbelakangi pemikiran terkait dengan model pembangunan nasional yang

didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 terkait dengan pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan.

SDGs Desa merupakan upaya konkret dalam membangun bangsa. SDGs Desa adalah turunan dari Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan atau SDGs Nasional. Tujuannya adalah agar SDGs nasional dapat tercapai melalui upaya pencapaian SDGs desa secara terpadu.

SDGs Desa sejalan dengan RPJMN yang ditetapkan oleh pemerintah, serta juga mengadaptasi pada SDGs global yang merupakan kesepakatan dunia. Ini menunjukkan pada dunia perihal komitmen Indonesia dalam mencapai tujuan SDGs.

Dengan adanya pembangunan terfokus berdasarkan SDGs Desa maka diharapkan mampu memberi hasil berupa arah perencanaan pembangunan desa yang berbasis kondisi faktual (evidence) di desa tersebut. Serta kedua, memudahkan intervensi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/kota) dan swasta untuk mendukung pembangunan desa.

Apabila dalam SDGs Nasional terdapat 17 tujuan pembangunan yang akan dicapai maka dalam SDGs Desa terdapat 18 tujuan. Ada satu tujuan yang ditambahkan guna menjamin agar pembangunan desa tetap mengangkat aspek kultural dan keagamaan. Tujuan ini tidak tercantum dalam SDGs global maupun nasional. Sehingga dalam SDGs desa ditambahkan tujuan ke-18 tentang kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Tambahan satu poin ini indikatornya kegiatan tolong menolong yang didasarkan pada ajaran agama, tokoh agama berpartisipasi dalam Musdes dan implementasi pembangunan desa, budaya dilestarikan mencapai 100 persen lembaga adat aktif, penyelesaian masalah sosial melalui pendekatan budaya. Jadi kita ingin agar kelembagaan budaya yang bagus itu dipertahankan. Dengan demikian,

poin ke-18 ini diarahkan untuk bisa melibatkan tokoh agama dan budaya agar setiap desa tetap dapat mempertahankan identitas budaya dan kearifan lokalnya.

Sehubungan dengan itu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah membagi sembilan tipe desa yang sesuai dengan SDGs desa, yaitu desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan. Kemudian desa peduli lingkungan hidup, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, desa tanggap budaya, dan desa Pancasila.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa atau SDGs Desa yang ingin dicapai dalam 10 tahun ke depan, yaitu:

1. Desa tanpa kemiskinan
2. Desa tanpa kelaparan
3. Desa sehat dan sejahtera
4. Pendidikan desa berkualitas
5. Desa berkesetaraan gender
6. Desa layak air bersih dan sanitasi
7. Desa yang berenergi bersih dan terbarukan P
8. Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa
9. Inovasi dan infrastruktur desa
10. Desa tanpa kesenjangan
11. Kawasan pemukiman desa berkelanjutan
12. Konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan
13. Pengendalian dan perubahan iklim oleh desa
14. Ekosistem laut desa
15. Ekosistem daratan desa
16. Desa damai dan berkeadilan
17. Kemitraan untuk pembangunan desa K
18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif

Pada pelaksanaan hingga tahun 2030, desa dapat memilih satu atau beberapa dari 18 tujuan yang ingin dicapai dalam SDGs Desa.

I. Keahlian yang Harus Dimiliki Pemerintah Desa

Keterampilan dan pengetahuan dasar diperlukan bersama dengan pola pikir atau sikap yang positif untuk melaksanakan proses pengembangan masyarakat secara efektif. Salah satu cara untuk berpikir tentang sikap, pengetahuan, dan keterampilan adalah dengan memikirkan apa yang perlu Anda yakini dan rasakan (sikap), apa yang perlu Anda ketahui (pengetahuan), dan apa yang harus dapat Anda lakukan (keterampilan) agar berhasil melakukan inisiatif pengembangan masyarakat. Tidak setiap individu yang terlibat harus memiliki semua keterampilan atau memiliki semua pengetahuan, tetapi memiliki sikap yang sama dan positif akan sangat membantu proses tersebut.

Sebagai bagian dari proses perencanaan, ada baiknya Anda menilai pengetahuan, keterampilan dan sikap anggota masyarakat, mengidentifikasi kesenjangan dan membuat rencana pelatihan untuk menanggapi kesenjangan tersebut. Dengan melakukan hal ini, Anda akan dapat membangun kapasitas individu dan kelompok.

Sikap, pengetahuan, dan keterampilan utama yang diperlukan untuk melakukan proses pengembangan masyarakat dirangkum di bawah ini.

1. Sikap (Perilaku)

Sikap adalah preferensi individu atau organisasi terhadap atau menjauhi sesuatu, peristiwa, atau orang. Sikap adalah semangat dan perspektif yang digunakan oleh seorang individu, kelompok atau organisasi dalam melakukan pendekatan terhadap pengembangan masyarakat. Sikap Anda membentuk semua keputusan dan tindakan Anda. Sikap sangat sulit untuk didefinisikan secara tepat karena terdiri dari kualitas dan keyakinan yang tidak berwujud. Kita terbiasa berbicara tentang sikap individu, tetapi penting untuk menyadari bahwa organisasi juga memiliki sikap. Biasanya, ketika kita berbicara tentang sikap organisasi, kita menggunakan istilah "budaya organisasi".

Berikut ini adalah kualitas dan keyakinan utama yang menurut pengalaman dapat menentukan apakah seorang individu, kelompok atau organisasi memiliki sikap yang diperlukan untuk berhasil memimpin atau berpartisipasi aktif dalam inisiatif pengembangan masyarakat:

- a. rasa hormat kepada individu, kelompok dan masyarakat;
- b. rasa tanggung jawab dan komitmen yang kuat;
- c. empati (memahami dari mana orang lain berasal);
- d. keterbukaan untuk melihat solusi alternatif, peluang baru dan cara-cara untuk memperbaiki diri;
- e. kesabaran, ketekunan dan daya tahan;
- f. kreativitas, inovasi dan intuisi;
- g. kesediaan untuk berpartisipasi tanpa harus selalu memimpin;
- h. kepercayaan kepada orang lain; dan
- i. rasa percaya diri.

Sangat mudah untuk melihat daftar di atas dan mengatakan "Tentu saja saya memiliki karakteristik sikap yang dibutuhkan untuk pengembangan masyarakat"; namun, secara konsisten menunjukkannya dalam proses yang Anda rancang dan tindakan yang Anda lakukan bisa sangat sulit. Penting bagi individu dan organisasi untuk melihat dari waktu ke waktu seberapa baik sikap mereka tercermin dalam tindakan mereka.

2. Pengetahuan

Pengembangan masyarakat membutuhkan dasar pengetahuan yang luas tentang banyak hal. Pengetahuan adalah data dan informasi serta model atau teori yang Anda gunakan untuk bekerja dengan informasi dan data tersebut. Setiap tim pengembangan masyarakat membutuhkan pengetahuan tentang:

- a. masyarakat;
- b. pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan;
- c. kemitraan;

- d. proses dan dinamika kelompok (kepentingan pribadi, hubungan politik dan perlindungan wilayah);
- e. pembangunan tim;
- f. pemecahan masalah dan proses pengambilan keputusan;
- g. manajemen proyek;
- h. manajemen keuangan dan penggalangan dana;
- i. metode dan peluang pelatihan dan pengembangan keterampilan;
- j. pengembangan dan desain organisasi.

Ingatlah bahwa, meskipun tidak ada satu orang pun yang harus memiliki basis pengetahuan yang lengkap ini, Anda perlu mengetahui apakah tim pengembangan masyarakat Anda memiliki pengetahuan ini secara kolektif dan bagaimana Anda dapat mengisi kesenjangan yang ada. Ingatlah bahwa, karena pengembangan masyarakat adalah proses yang dinamis dan evolusioner, Anda harus selalu terbuka terhadap informasi dan pemahaman baru tentang masyarakat dan proses pengembangan masyarakat.

Akan tetapi, pengetahuan saja tidak cukup untuk memulai dan mempertahankan upaya pengembangan masyarakat dengan sukses. Menerapkan pengetahuan ini juga sama pentingnya.

3. Keterampilan

Keterampilan memindahkan Anda dari teori dan pengetahuan ke tindakan. Keterampilan melibatkan kinerja tugas mental atau fisik. Untuk menjadi terampil, Anda harus mampu melakukan tugas dengan kompeten; ini bukan tentang keberuntungan atau upaya sekali saja. Keterampilan dipelajari dan dapat diulang.

Ada banyak cara untuk menggambarkan keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan proses pengembangan masyarakat. Pendekatan yang diambil di sini adalah mengelompokkan keterampilan yang dibutuhkan ke dalam lima bidang utama:

- a. keterampilan komunikasi, fasilitasi dan membangun tim;
- b. keterampilan penelitian, perencanaan dan evaluasi;

- c. keterampilan pemecahan masalah dan resolusi konflik;
- d. keterampilan manajemen; dan
- e. keterampilan desain dan pengembangan organisasi.

Uraian di bawah ini memberikan ringkasan singkat tentang keterampilan di setiap klaster. Semua keterampilan ini tidak perlu dikembangkan dengan baik di awal proses pengembangan masyarakat, tetapi seiring dengan upaya Anda bergerak dari perencanaan ke pelaksanaan dan keberlanjutan aksi, semua keterampilan ini akan dibutuhkan.

a. Keterampilan Komunikasi, Fasilitasi, dan Membangun Tim

Pengembangan masyarakat membutuhkan penciptaan hubungan yang kuat, kepercayaan, dan identifikasi kesamaan. Keterampilan komunikasi yang kuat, membangun tim dan fasilitasi kelompok diperlukan sebagai dasar untuk semua kegiatan pengembangan masyarakat. Tidak ada pendekatan yang mutlak untuk menerapkan keterampilan-keterampilan ini. Ada berbagai macam teknik yang dapat dan harus digunakan. Anda harus menggunakan keterampilan Anda untuk menciptakan proses yang responsif dan efektif untuk situasi tertentu.

Pembangunan tim bersifat inklusif dan membuat orang merasa nyaman. Semakin banyak pengalaman yang Anda miliki dalam bekerja dengan kelompok, semakin baik keterampilan Anda dalam bidang ini. Mampu "membaca" kelompok, atau mengetahui apa yang sedang terjadi tanpa diberitahu, adalah keterampilan yang datang dengan pengalaman dan penting untuk membangun inisiatif pengembangan masyarakat yang sukses.

Keterampilan untuk mengatur dan menjalankan pertemuan yang efektif juga penting. Keterampilan ini membantu memastikan bahwa Anda menggunakan waktu secara efektif dan anggota tim menjadi produktif.

b. Keterampilan Penelitian, Perencanaan dan Evaluasi

Keterampilan penelitian dan perencanaan diperlukan selama proses pengembangan masyarakat. Ini adalah keterampilan yang akan Anda gunakan untuk melakukan penilaian terhadap komunitas Anda, mengembangkan rencana dan mengimplementasikannya. Keterampilan ini juga dapat membantu dalam mengelola dan mengarahkan perubahan. Keterampilan ini membantu menggerakkan komunitas dari niat umum menjadi tindakan nyata. Keterampilan penelitian diperlukan untuk membantu mengumpulkan dan menginterpretasikan informasi tentang komunitas Anda.

Perencanaan terjadi di banyak tingkatan dalam proses pengembangan masyarakat, dari menciptakan visi hingga mengevaluasi keberhasilan. Ada banyak jenis perencanaan yang berbeda. Sebagai contoh, perencanaan jangka panjang, seperti dalam pembuatan visi, kadang-kadang disebut perencanaan strategis. Mengubah tujuan menjadi tindakan dan memutuskan apa yang akan Anda lakukan adalah perencanaan operasional.

Karena evaluasi merupakan aspek penting dari semua upaya pengembangan masyarakat, maka mengetahui bagaimana melakukannya dengan baik adalah penting. Evaluasi menentukan seperti apa keberhasilan itu, informasi apa yang diperlukan untuk mengukurnya, proses apa yang diperlukan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi, dan bagaimana menyajikannya dengan cara yang berguna. Evaluasi membutuhkan penelitian yang kuat, kemampuan analitis, teknis serta kemampuan untuk mensintesis informasi. Meskipun Anda tidak bertanggung jawab atas evaluasi formal, memiliki keterampilan ini akan sangat membantu Anda untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kunci tentang kemajuan yang sedang dicapai dan berpartisipasi dalam menyusun evaluasi ketika evaluasi dilakukan.

c. Keterampilan Pemecahan Masalah dan Resolusi Konflik

Ketika berbagai kelompok atau kepentingan berkumpul untuk memutuskan tujuan dan proses bersama serta mengambil tindakan bersama, keterampilan memecahkan masalah menjadi sangat penting. Anggota masyarakat yang merasa dipaksa untuk mengalah, atau yang merasa tidak didengarkan, umumnya tidak akan mendukung upaya pengembangan masyarakat dari waktu ke waktu. Agar efektif dalam pemecahan masalah, Anda harus memiliki kemampuan untuk:

1. mengidentifikasi isu atau masalah
2. melihat pilihan-pilihan dan alternatif-alternatif
3. membantu individu-individu untuk memahami pandangan orang lain
4. memecah kebuntuan jika diskusi mengalami kebuntuan
5. mengelola konflik jika terjadi
6. membantu menemukan titik temu
7. membantu para anggota untuk mengenali kesepakatan jika terjadi, dan
8. memastikan bahwa setiap orang memahami kesepakatan tersebut.

Semua tugas ini membutuhkan keterampilan jika ingin berhasil. Keterampilan-keterampilan ini dibutuhkan selama proses pengembangan masyarakat. Konflik dapat terjadi ketika Anda membangun dukungan dan membuat rencana komunitas. Potensi konflik dan kebutuhan akan penyelesaian masalah juga terjadi saat Anda mengimplementasikan rencana pengembangan masyarakat. Banyak keputusan implementasi yang berdampak pada penggunaan sumber daya dan hubungan kekuasaan, yang menghasilkan potensi ketidaksepakatan dan perbedaan perspektif. Konflik merupakan hal yang wajar. Masalah dan konflik tidak boleh ditekan. Penting bagi setiap orang untuk mengekspresikan pandangan dan pendapat mereka.

Namun, keterampilan diperlukan untuk membangun secara konstruktif masalah dan perbedaan sehingga tercipta titik temu sehingga tercipta titik temu.

d. Keterampilan Manajemen

Manajemen proses pengembangan masyarakat melibatkan berbagai keterampilan yang berbeda. Untuk memulai dan mempertahankan proses pengembangan masyarakat secara efektif, diperlukan keterampilan perencanaan strategis, keuangan, sumber daya manusia, dan operasional. Manajemen yang baik datang dengan kepemimpinan yang baik. Hal ini berarti memahami fasilitasi kelompok, memiliki kemampuan untuk bekerja dengan berbagai kepentingan, pengambilan keputusan kolektif, resolusi konflik, antisipasi terhadap masalah dan peluang, serta keterampilan yang dibutuhkan untuk membangun dukungan, energi dan motivasi. Keterampilan keuangan, sumber daya manusia, dan manajemen proyek menjadi sangat penting ketika Anda beralih dari perencanaan ke implementasi dalam mempertahankan momentum.

e. Keterampilan Desain dan Pengembangan Organisasi

Pada akhirnya, semua inisiatif pengembangan masyarakat membutuhkan struktur organisasi. Hal ini mungkin memerlukan pembuatan struktur baru atau membuat perubahan pada organisasi yang sudah ada. Selain itu, ketika rencana pengembangan masyarakat diimplementasikan dan diadaptasi, perubahan mungkin juga diperlukan dalam bagaimana kegiatan dan sumber daya diorganisir. Oleh karena itu, desain organisasi dan keterampilan pengembangan penting untuk keberhasilan jangka panjang dari setiap proses pengembangan masyarakat.

f. Membangun Keterampilan dan Menanggapi Kesenjangan Keterampilan

Keterampilan dan cara Anda menggunakannya akan berubah sepanjang proses pengembangan masyarakat. Penting untuk bersikap terbuka dalam menggunakan keterampilan Anda dengan cara-cara baru, mengembangkan keterampilan baru, dan mengenali kemampuan orang lain. Kegiatan pengembangan masyarakat sering kali menantang kita untuk berpikir dan melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda. Seperangkat keterampilan yang kuat yang dijelaskan di atas dan pikiran yang terbuka akan membantu mewujudkannya.

Mengembangkan kemampuan pengembangan masyarakat, Anda harus memiliki pemahaman yang jelas tentang keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang dimiliki oleh mereka yang memimpin proses tersebut. Cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan merefleksikan keterampilan, sikap, dan pengetahuan yang telah disebutkan di atas dan menentukan:

1. bidang-bidang yang menjadi kekuatan
2. bidang-bidang yang mungkin memerlukan sedikit penyempurnaan namun pada dasarnya sudah ada, dan
3. bidang-bidang yang memiliki kesenjangan yang dapat menghambat upaya-upaya pengembangan masyarakat anda.

Ada banyak cara untuk menanggapi kesenjangan pengetahuan, keterampilan dan sikap. Beberapa di antaranya adalah:

1. diskusi kelompok dan kesepakatan tentang nilai-nilai dan keyakinan yang membentuk pekerjaan pengembangan masyarakat Anda;
2. pembelajaran individu melalui kursus dan lokakarya di lembaga pendidikan setempat; identifikasi sumber daya tertulis dan Internet yang dapat membantu mengisi kesenjangan pengetahuan;
3. lokakarya kelompok dan sesi pelatihan yang dibuat khusus untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran tim Anda;

4. meminta anggota masyarakat dengan pengetahuan yang Anda cari untuk menjadi bagian dari tim kepemimpinan atau membantu Anda dalam tugas atau prakarsa tertentu; dan/atau
5. membagikan pengetahuan dan keterampilan Anda sendiri dengan mengajar dan mendukung yang lain.

Sangat disarankan agar, sebagai bagian dari proses perencanaan, Anda secara formal menilai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dibutuhkan untuk sukses dan mengembangkan rencana pelatihan untuk menjawab kebutuhan tersebut.

Rencana pelatihan merupakan gambaran umum yang komprehensif tentang pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diinginkan untuk mencapai tujuan serta sasaran rencana pengembangan masyarakat Anda. Rencana pelatihan dapat dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengembangan kapasitas individu dan organisasi. Meskipun pengembangan kapasitas merupakan prioritas utama dalam sebagian besar inisiatif pengembangan masyarakat, namun pengembangan rencana pelatihan yang sebenarnya jarang dilakukan.

Ada beberapa alasan untuk hal ini. Salah satunya adalah begitu banyak pekerjaan yang dilakukan untuk menciptakan visi dan rencana aksi sehingga pelatihan dikesampingkan, atau dipandang sebagai kemewahan dan sesuatu yang dapat ditunda. Alasan lainnya adalah bahwa menyusun rencana pelatihan yang baik juga membutuhkan pengetahuan dan keterampilan.

Terlepas dari kesulitannya, rencana pelatihan harus dikembangkan segera setelah Anda mengidentifikasi masalah kapasitas yang dihadapi komunitas Anda. Jika tidak memungkinkan bagi kelompok itu sendiri untuk menyusun rencana pelatihan, bantuan dari luar harus dicari untuk menentukan peran-peran apa saja yang perlu dilakukan dan keterampilan apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan peran-peran tersebut.

Saat Anda mengembangkan rencana pelatihan, Anda harus:

1. mendasarkan pelatihan pada keterampilan yang akan diperoleh, bukan pada topik-topik apa yang akan dibahas;
2. memberikan contoh-contoh di mana keterampilan yang diinginkan dapat digunakan, dan mencoba menggunakan keterampilan ini segera setelah keterampilan tersebut diperoleh;
3. mempertimbangkan berbagai macam metode pelatihan karena orang belajar dengan cara yang berbeda-beda dan ada banyak pilihan untuk dipilih; dan
4. memahami bahwa keterampilan-keterampilan khusus mungkin memerlukan pelatihan yang dibuat khusus.

Terkadang biaya pelatihan atau lokasi di mana pelatihan itu ditawarkan membuatnya tidak terjangkau atau tidak realistis, karena adanya keterbatasan keuangan atau geografis. Jangan menyerah pada rencana pelatihan; sebaliknya, carilah cara lain untuk memperoleh keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan kelompok.

Aspek Sosial, Budaya, Dan Ekonomi Dalam Pemberdayaan Desa

Aspek sosial budaya dalam pemberdayaan masyarakat, menyoroti peran penting yang dimainkan oleh faktor sosial dan budaya dalam memberdayakan masyarakat. Penting untuk memahami serta menangani dimensi sosial dan budaya dalam pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup individu serta masyarakat secara keseluruhan.

Salah satu nilai penting dari memahami aspek sosial dan budaya adalah pengakuan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak dapat dicapai hanya melalui langkah-langkah ekonomi atau pembangunan infrastruktur. Aspek sosial dan budaya, seperti partisipasi masyarakat, nilai-nilai budaya, norma sosial, dan dinamika gender, secara signifikan mempengaruhi keberhasilan dan keberlanjutan inisiatif pemberdayaan. Dengan mengenali dan menggabungkan faktor-faktor ini, pembuat kebijakan, praktisi, pelaku, dan peneliti dapat mengembangkan strategi dan intervensi yang lebih efektif yang memenuhi kebutuhan, aspirasi, dan kekuatan masyarakat secara menyeluruh.

Aspek sosial budaya dalam pemberdayaan masyarakat' menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan faktor sosial dan budaya dalam inisiatif pemberdayaan masyarakat. Pemahaman terhadap aspek sosial dan budaya akan memberikan wawasan yang berharga mengenai sifat holistik dari pembangunan dan perlunya pendekatan

yang inklusif, partisipatif, dan peka terhadap budaya. Dengan mengenali dan menangani aspek-aspek ini, maka program-program pemberdayaan bisa diimplementasikan dan diterima oleh sasaran dengan baik.

Pentingnya untuk memahami faktor sosial dan budaya dalam pemberdayaan masyarakat. Faktor sosial dan budaya memainkan peran penting dalam pemberdayaan masyarakat. Maka perlu intervensi dan strategi yang peka terhadap konteks sosial dan budaya masyarakat untuk mencapai hasil pemberdayaan yang sukses (Smith, 2010). Keragaman budaya dapat menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pemberdayaan masyarakat. Hal ini menekankan pentingnya merangkul dan menghargai keragaman budaya untuk mendorong strategi pemberdayaan yang inklusif dan efektif (Brown & Johnson, 2015). Penting untuk memelihara modal sosial dalam pemberdayaan masyarakat. Membangun dan memelihara modal sosial di dalam masyarakat dapat meningkatkan kapasitas mereka untuk melakukan aksi kolektif, mobilisasi sumber daya, dan pengambilan keputusan, yang pada akhirnya mengarah pada pemberdayaan yang lebih besar (Gupta & Sharma, 2012). Nilai-nilai budaya secara signifikan mempengaruhi pemberdayaan masyarakat. Maka, perlu pendekatan yang peka terhadap budaya yang selaras dengan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat. Maka, pentingnya memahami dinamika budaya untuk memberdayakan masyarakat secara efektif di berbagai konteks (Chen & Li, 2018).

Pemahaman terhadap aspek sosial budaya dalam pemberdayaan masyarakat memberikan wawasan yang berharga mengenai cara-cara yang dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat dan dampak dari pemberdayaan tersebut terhadap masyarakat. Pemberdayaan masyarakat terkait erat dengan modal sosial. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki jaringan sosial yang kuat, kepercayaan, dan kemandirian kolektif akan lebih mungkin mengalami pemberdayaan. Hal ini menunjukkan

bahwa membina hubungan sosial dan kohesi di dalam masyarakat sangat penting untuk mencapai hasil pemberdayaan yang bermakna. Selain itu, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa ketika individu merasakan rasa memiliki dan kepemilikan dalam komunitas mereka, mereka lebih mungkin untuk terlibat dalam tindakan kolektif dan berkontribusi pada pengembangan masyarakat.

Selain itu, dari beberapa kajian, menunjukkan bahwa nilai, norma, dan praktik budaya memainkan peranan penting dalam membentuk pemberdayaan masyarakat. Faktor-faktor budaya dapat mendukung atau menghambat proses pemberdayaan. Sebagai contoh, ada beberapa penelitian yang menemukan bahwa masyarakat dengan identitas dan tradisi budaya yang kuat, lebih tangguh dan lebih mampu memobilisasi sumber daya untuk inisiatif pemberdayaan. Di sisi lain, hambatan budaya, seperti praktik diskriminasi atau ketidaksetaraan gender, dapat menghambat kemajuan upaya pemberdayaan masyarakat. Memahami dan mengatasi dinamika budaya ini sangat penting untuk menciptakan strategi pemberdayaan yang inklusif dan efektif.

Memahami aspek budaya dan sosial secara komprehensif akan menghasilkan pemberdayaan masyarakat yang positif. Masyarakat yang diberdayakan lebih siap untuk mengatasi tantangan sosial, mempromosikan keadilan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Mereka lebih mungkin untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat, meningkatkan hasil kesehatan, dan meningkatkan kohesi sosial. Selain itu, masyarakat yang berdaya lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan, karena mereka memiliki keterampilan, sumber daya, dan agensi kolektif untuk mengatasi rintangan dan menciptakan perubahan positif. Pemahaman terhadap aspek sosial budaya dalam pemberdayaan masyarakat akan berkontribusi terhadap pemahaman kita mengenai bagaimana masyarakat dapat diberdayakan dan dampak positif dari pemberdayaan tersebut terhadap masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat memerlukan tingkat partisipasi yang tinggi. Tingkat partisipasi erat kaitannya dengan norma masyarakat. Ketika menyusun rencana aksi pemberdayaan diperlukan kehati-hatian. Karena, mungkin saja ada beberapa norma, praktik, dan nilai sosial budaya yang berdampak negatif terhadap partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam kelompok-kelompok pengembangan masyarakat (Diale, 2013).

Faktor sosial budaya adalah hal-hal yang dapat mempengaruhi gaya hidup kita sebagai masyarakat. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi perilaku individu tergantung pada nilai-nilai sosial seseorang. Beberapa di antaranya adalah agama, status ekonomi, pendidikan, keluarga, politik, nilai-nilai budaya, dan lain-lain. Semua itu merupakan fakta dan pengalaman yang mempengaruhi kepribadian, sikap dan gaya hidup individu. Faktor sosial budaya melibatkan elemen sosial dan budaya masyarakat. Usia, pendidikan, kasta, agama, status perkawinan, pendapatan keluarga, kondisi perumahan, dan lain-lain merupakan beberapa variabel penting yang mempengaruhi perempuan dalam pemberdayaan dan pengembangan mereka.

Faktor sosial budaya adalah elemen yang mengakar kuat dalam masyarakat tertentu dan mencakup nilai, sikap, norma, praktik, institusi, stratifikasi, dan cara-cara yang berhubungan dengan masyarakat. Pemberdayaan sosial budaya perempuan meliputi basis ketidaksetaraan gender, rasio jenis kelamin, angka harapan hidup dan tingkat kesuburan yang menunjukkan status perempuan secara umum dalam hal melek huruf, pertumbuhan ekonomi, ketersediaan fasilitas perawatan kesehatan dan pengendalian kelahiran, status pendidikan perempuan, usia menikah, tingkat melek huruf dan partisipasi perempuan di luar rumah.

Faktor sosial-budaya dapat mempengaruhi gaya hidup dan mempengaruhi perilaku individu. Beberapa contoh faktor sosial budaya antara lain: Pendidikan, Status ekonomi, Keluarga, Politik, dan Nilai-nilai budaya. Pemberdayaan adalah inisiatif pembangunan

yang digunakan untuk memperkuat nilai-nilai sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat (Sarjiyanto, et. al., 2022). Aspek sosial budaya memiliki peranan penting dalam memberdayakan masyarakat. Hal ini terkait dengan nilai-nilai, norma-norma, adat istiadat, dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Aspek ini harus diperhatikan dengan baik dalam upaya memberdayakan masyarakat agar tujuan pemberdayaan dapat tercapai secara efektif sesuai dengan kondisi yang ada. Menurut Prijono dan Pranarka (1996), pemberdayaan menjadi bermakna ketika ia menjadi bagian dan fungsi dari kebudayaan, yaitu sebagai aktualisasi dan koaktualisasi eksistensi manusia. Sebagai sebuah konsep sosial budaya dalam pembangunan berbasis masyarakat, pemberdayaan memperkuat nilai-nilai ekonomi dan sosial budaya masyarakat.

Pemberdayaan memperkuat kemampuan bawaan dengan cara memperoleh pengetahuan, kekuasaan dan pengalaman (Hashemi Schuler dan Riley, 1996). Pemberdayaan adalah proses memungkinkan atau memberi wewenang kepada individu untuk berpikir, mengambil tindakan, dan mengendalikan pekerjaan dengan cara yang otonom. Ini adalah proses di mana seseorang dapat memperoleh kendali atas nasibnya dan keadaan kehidupannya. Selalu ada sejumlah elemen dalam masyarakat yang dirampas hak-hak dasarnya di setiap masyarakat, negara, dan bangsa, tetapi elemen-elemen ini kurang memiliki kesadaran akan hak-hak mereka.

Berikut adalah beberapa peranan aspek sosial budaya dalam memberdayakan masyarakat:

1. Mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat
Aspek sosial budaya memainkan peranan penting dalam membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat. Nilai-nilai, norma-norma, adat istiadat, dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat akan mempengaruhi cara berpikir dan bertindak dari anggota masyarakat. Oleh karena itu, aspek sosial budaya harus dipertimbangkan secara serius dalam usaha memberdayakan

masyarakat agar perubahan yang diharapkan dapat diterima oleh mereka.

2. Sumber Daya pemberdayaan masyarakat

Aspek sosial budaya juga dapat menjadi sumber daya yang berharga dalam memberdayakan masyarakat. Nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dapat digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat. Selain itu, adat istiadat dan kebiasaan yang ada di tengah masyarakat juga bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam usaha pemberdayaan.

3. Menjadi hambatan dalam pemberdayaan masyarakat

Adanya hambatan dalam pemberdayaan masyarakat dapat disebabkan oleh aspek sosial budaya. Nilai-nilai dan norma-norma yang tidak sejalan dengan nilai-nilai modern bisa menghalangi proses pemberdayaan masyarakat. Selain itu, adat istiadat dan kebiasaan yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman juga bisa menjadi penghalang dalam upaya memberdayakan masyarakat.

A. Modal Sosial

Manusia adalah organisme sosial, kita telah berevolusi untuk menjadi sosial. Bekerja sama untuk tindakan kolektif sudah tertanam dalam diri kita. Kita ingin membantu, berbagi, dan saling memberi dan menerima dalam bentuk barang. Banyak hal yang kita inginkan dan butuhkan, tidak dapat diciptakan hanya dengan usaha kita sendiri, sehingga membutuhkan suatu bentuk kolaborasi atau timbal balik. Manfaat yang kita peroleh dari pergaulan tersebut dapat kita sebut sebagai modal sosial. Modal sosial muncul dari kemampuan manusia untuk mempertimbangkan orang lain, untuk berpikir dan bertindak dengan murah hati dan kooperatif.

Konsep modal sosial berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan penting tentang perilaku dan motivasi manusia, seperti mengapa

orang memberi atau menolong orang lain meskipun tidak ada keuntungan yang dapat diperkirakan untuk dirinya sendiri. Dapatkah pilihan rasional menjelaskan hal ini? Apakah ini merupakan hasil dari naluri, hasil dari evolusi biologis? Apakah itu hasil dari psikologi, atau norma sosial, atau agama? Apakah rasional bagi seseorang untuk melakukan pelayanan masyarakat secara sukarela, menerima tanggung jawab kepemimpinan yang tidak dibayar, atau melakukan upaya untuk menjaga perdamaian dan keharmonisan sosial di sekitar mereka (Uphoff, 1999)? Hal ini berkaitan dengan dikotomi antara persaingan dan kerja sama, kepentingan pribadi dan tanpa pamrih, rasionalitas dan moralitas, serta tindakan instrumental dan intrinsik.

Daya tarik modal sosial berasal dari integrasi sosiologi dan ekonomi yang menarik. Konsep ini membantu mengikis gagasan para ekonom tentang *homo economicus*, yang telah mendominasi masyarakat kapitalis. Gagasan *homo economicus* melihat manusia modern sebagai pemaksimalisasi utilitas yang mementingkan diri sendiri (Arrow, 200). Namun, pandangan ini mengabaikan peran faktor sosial dalam fungsi masyarakat dan ekonomi. Hal ini menyebabkan analisis para ekonom digambarkan sebagai "konsep manusia yang tidak tersosialisasi" (Granovetter, 2018). Ilmu ekonomi arus utama secara murni menghindari untuk menyelidiki dan menjelaskan bagaimana lembaga-lembaga masyarakat dan sikap bersama berinteraksi dengan cara kerja ekonominya (Solow, 2000). Modal sosial memberikan konteks untuk memahami berbagai fenomena di luar lensa ekonomi, dan dengan demikian telah digembar-gemborkan sebagai inovasi konseptual yang sangat penting bagi integrasi teori inter dan transdisipliner (Adam dan Roncevic, 2003).

Meskipun istilah modal sosial relatif baru, konsep ini tidak baru karena mencakup berbagai konsep lain yang telah ada setidaknya sejak abad ke-19. Para intelektual seperti David Hume, Adam Smith, Karl Marx, Georg Simmel, Emile Durkheim, dan Max Weber, dan

masih banyak lagi, telah membahas konsep-konsep yang serupa. Kutipan di bawah ini adalah salah satu contohnya.

Modal sosial adalah konsep yang intuitif dan merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari, namun sebagai sebuah teori, konsep ini sangat kompleks dengan berbagai dimensi yang beroperasi di berbagai tingkatan dengan berbagai faktor yang berbeda yang menentukan apakah modal sosial memiliki dampak positif atau negatif. Para ahli modal sosial dapat membuat konsep ini terdengar hampir mistis, dan bagi banyak orang yang baru pertama kali mengenal modal sosial, konsep ini bisa jadi menakutkan.

Modal sosial merujuk pada kumpulan nilai, norma, dan jaringan sosial yang dibagikan oleh anggota suatu masyarakat. Ini melibatkan kepercayaan, norma, dan interaksi antara individu yang memungkinkan masyarakat berfungsi dengan baik. Modal sosial juga dilihat sebagai bagian dari hubungan antar individu yang memungkinkan mereka saling percaya dan saling mendukung. Ini dapat meningkatkan efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan kolektif dan individu. Modal sosial juga didefinisikan sebagai kemampuan yang timbul dari kepercayaan umum dalam masyarakat.

Menurut (Bhandari dan Yasunobu, 2009), Modal sosial diyakini sebagai salah satu elemen kunci dalam memfasilitasi kerja sama, pertukaran ide, kepercayaan saling-menyalang, dan keuntungan bersama guna mencapai kemajuan bersama. Teori tentang modal sosial pada dasarnya berfokus pada konsep kepercayaan, norma, dan jaringan informal. Menurutnya, Modal sosial merupakan konsep yang sudah lama ada, namun baru masuk ke dalam perdebatan akademis dan kebijakan pada tahun 1990-an. Pentingnya modal sosial dalam menjelaskan fenomena ekonomi dan sosial semakin terasa dalam beberapa tahun terakhir. Literatur mengenai aspek teoritis dan empiris dari modal sosial tumbuh secara signifikan selama dekade terakhir. Keseluruhan gagasan tentang modal sosial berpusat pada hubungan sosial dan elemen-elemen utamanya meliputi

jaringan sosial, keterlibatan masyarakat, norma-norma timbal balik, dan kepercayaan umum. Secara garis besar, modal sosial didefinisikan sebagai aset kolektif dalam bentuk norma, nilai, kepercayaan, kepercayaaan, jaringan, hubungan sosial, dan institusi yang memfasilitasi kerja sama dan tindakan kolektif untuk mendapatkan keuntungan bersama. Modal sosial merupakan konsep multidimensi yang kompleks yang memiliki dimensi, jenis, dan tingkat pengukuran yang berbeda. Jenis modal sosial yang umum meliputi: struktur dan kognitif; ikatan, menjembatani, dan menghubungkan; kuat dan lemah; serta horizontal dan vertikal.

Menurut Coleman (1998), modal sosial bukanlah sebuah entitas tunggal, melainkan kombinasi dari berbagai entitas yang memiliki dua karakteristik yang sama: modal sosial merupakan aspek dari sebuah struktur sosial, dan modal sosial memfasilitasi tindakan-tindakan tertentu dari individu-individu yang ada di dalam struktur tersebut. Entitas-entitas tersebut meliputi kewajiban, harapan, kepercayaan, dan arus informasi. Modal sosial merupakan sumber daya produktif yang memfasilitasi produksi dan memungkinkan tercapainya tujuan-tujuan tertentu yang tidak mungkin dicapai tanpa adanya modal sosial. Modal sosial melekat pada struktur hubungan antara dan di antara para aktor dan membentuk dasar modal sosial. Coleman mengidentifikasi tiga bentuk modal sosial: timbal balik (termasuk kepercayaan), saluran informasi dan arus informasi, dan norma-norma yang ditegakkan melalui sanksi. Para aktor (individu atau organisasi) dapat menggunakan sumber daya ini untuk mencapai tujuan mereka. Tidak seperti bentuk modal lainnya, modal sosial tidak sepenuhnya dapat digunakan antar individu atau kegiatan. Modal sosial pada dasarnya bersifat sosial, sebagian besar bentuk modal dikembangkan melalui tindakan gabungan anggota kelompok. Bagi Coleman, modal sosial adalah barang publik karena ia ada dalam hubungan antar manusia.

Modal sosial mengacu pada fitur-fitur organisasi sosial, seperti kepercayaan, norma, dan jaringan yang dapat meningkatkan efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan yang terkoordinasi. Modal sosial mengacu pada hubungan antar individu, jaringan sosial, dan norma-norma timbal balik dan kepercayaan yang muncul dari hubungan tersebut. Putnam berpendapat bahwa modal sosial merupakan faktor kunci dalam menjelaskan mengapa beberapa masyarakat lebih berhasil daripada yang lain dalam mencapai tujuan mereka. Dia menyarankan bahwa modal sosial dapat dibangun melalui keterlibatan masyarakat, seperti menjadi sukarelawan, dan dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, dan kesejahteraan sosial (Putnam,1992).

Sementara Fukuyama (1996), menjelaskan bahwa modal sosial adalah kemampuan orang untuk bekerja sama demi tujuan bersama dalam kelompok dan organisasi. Ia mendefinisikan modal sosial dalam hal kepercayaan dan nilai-nilai bersama yang memungkinkan kerja sama di antara individu. Fukuyama menekankan kualitas-kualitas dalam hubungan sosial, seperti kepercayaan interpersonal, timbal balik, norma-norma bersama dan pemahaman, yang memungkinkan orang untuk bergaul dengan orang lain dan mengembangkan modal sosial. Ia berpendapat bahwa kepercayaan interpersonal merupakan dasar bagi munculnya hubungan sosial, dan rasa saling percaya akan meningkatkan kerja sama antar individu, mengurangi biaya transaksi, dan meningkatkan transaksi bisnis. Kontribusi signifikan Fukuyama terhadap teori modal sosial adalah bahwa ia memberikan satu cara yang paling mudah untuk mengukur modal sosial: proporsi orang yang berpikir bahwa 'sebagian besar orang dapat dipercaya'.

Lin (2002) melihat modal sosial sebagai "investasi dalam hubungan sosial dengan keuntungan yang diharapkan di pasar." Definisi ini menekankan gagasan bahwa modal sosial melibatkan sumber daya yang diakses melalui hubungan sosial dan manfaat

potensial yang dapat diperoleh dari hubungan tersebut. Definisi ini menyoroti aspek ekonomi dari modal sosial dan dampak potensialnya terhadap kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pasar.

Sementara Robison et. al., (2002) mendefinisikan modal sosial sebagai "simpati seseorang atau kelompok terhadap orang atau kelompok lain yang dapat menghasilkan potensi manfaat, keuntungan, dan perlakuan istimewa bagi orang atau kelompok lain di luar apa yang diharapkan dalam hubungan pertukaran." Definisi ini menekankan pada kapasitas transformatif modal sosial yang berada dalam hubungan antar manusia dan memisahkan konsep "simpati" dari potensi manfaat yang dapat diperoleh dari hubungan sosial. Definisi ini menyoroti gagasan bahwa modal sosial melibatkan potensi perlakuan istimewa dan keuntungan yang dapat diperoleh melalui hubungan sosial.

Modal sosial adalah sumber daya yang dapat dipandang sebagai investasi untuk mendapatkan sumber daya baru. Sumber daya tersebut dapat digunakan untuk dikonsumsi, disimpan, dan diinvestasikan. Inti dari telaah modal sosial terletak pada kemampuan masyarakat dalam suatu entitas atau kelompok untuk bekerjasama membangun suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama. Unsur-unsur modal sosial menurut Hasbullah meliputi partisipasi dalam suatu jaringan dan resiprocit (Hasbullah, 2006).

Proposisi utama dari modal sosial adalah bahwa 'hubungan itu penting' dan bahwa jaringan sosial adalah aset yang berharga. Modal sosial adalah aspek-aspek dari konteks sosial (bagian "sosial") yang memiliki manfaat produktif (bagian "modal"). Hal ini mencakup simpanan solidaritas atau niat baik antara orang-orang dan kelompok-kelompok orang. Anda dapat menganggapnya sebagai "bank kebaikan", meskipun ini hanya merangkum sebagian dari modal sosial. Penjelasan sederhana lainnya adalah sebagai perilaku suka menolong yang dihasilkan dari perasaan terima kasih, rasa hormat, dan persahabatan. Pepatah: "bukan hanya apa yang Anda ketahui,

tetapi siapa yang Anda kenal" berkaitan dengan efek kuat yang dapat dimiliki oleh modal sosial dan merupakan cara yang mudah untuk memahami konsep ini dalam konteks bagaimana modal sosial berdampak pada kehidupan kita sehari-hari.

Kita secara naluri memahami bahwa kita dapat memperoleh manfaat dari hubungan sosial kita dengan orang lain, entah itu sesederhana menemukan montir yang dapat diandalkan (yang dapat menghemat uang Anda) atau meminjam secangkir gula dari tetangga (yang dapat menghemat waktu Anda), atau menemukan pekerjaan atau klien baru (yang dapat menghasilkan uang bagi Anda). Ini hanyalah beberapa contoh nyata dari manfaat modal sosial, masih banyak lagi. Faktanya, modal sosial memungkinkan manusia untuk berkolaborasi, berkoordinasi, dan hidup berdampingan. Hal ini sangat penting bagi eksistensi sosial manusia.

Modal sosial telah digambarkan oleh beberapa penulis sebagai pelumas yang melumasi tatanan masyarakat dan memungkinkan ekonomi modern berfungsi secara efisien. Hal ini mungkin tampak seperti klaim yang muluk-muluk, namun tanpa modal sosial, manusia tidak akan dapat bekerja sama. Hal ini karena modal sosial adalah nilai-nilai, norma, kepercayaan, dan rasa saling memiliki yang memungkinkan terjadinya pertukaran sosial. Masyarakat, ekonomi, institusi, dan sistem politik kita tidak akan ada tanpa modal sosial. Oleh karena itu, modal sosial digambarkan sebagai perekat. Mengingat bahwa modal sosial adalah manfaat produktif dari sosialitas, maka segala sesuatu adalah manfaat dari modal sosial. Setiap manfaat dari hidup bermasyarakat dibandingkan hidup sebagai pertapa.

Namun perlu dicatat bahwa banyak penulis telah menemukan konsekuensi negatif dari modal sosial. Dalam hal ini, sangat disayangkan bahwa istilah modal sosial mengandung kata 'modal' karena menyiratkan bahwa modal sosial hanya bersifat baik. Penelitian telah menemukan bahwa fitur yang sama dari struktur sosial yang

kita sebut modal sosial juga dapat menjadi beban dalam arti dapat menghasilkan hasil yang tidak diinginkan. Korupsi dan kejahatan terorganisir bergantung pada modal sosial yang tinggi. Geng dan Mafia menggunakan modal sosial sebagai dasar struktur organisasi mereka. Kartel juga mengembangkan modal sosial dalam upaya mereka untuk mempertahankan kontrol atas sebuah industri untuk meraup lebih banyak keuntungan daripada yang seharusnya.

"Setiap fitur dari struktur sosial dapat menjadi modal sosial dalam arti menghasilkan hasil yang diinginkan, tetapi juga dapat menjadi beban dalam arti menghasilkan hasil yang tidak diinginkan". Potensi kerugian dari modal sosial meliputi:

- a. Mendorong perilaku yang memperburuk daripada meningkatkan kinerja ekonomi
- b. Bertindak sebagai penghalang inklusi sosial dan mobilitas sosial
- c. Memecah belah daripada menyatukan komunitas atau masyarakat
- d. Memfasilitasi daripada mengurangi kejahatan, rendahnya prestasi pendidikan dan perilaku yang merusak kesehatan.

Modal sosial dapat bersifat positif atau negatif dalam konteks yang berbeda atau dari perspektif yang berbeda. Bahkan, karena modal sosial bersifat multidimensi, modal sosial dapat bersifat positif dan negatif pada saat yang bersamaan. Pencantuman kata 'modal' merupakan sumber frustrasi atau kebingungan bagi sebagian orang. Menurut saya, hal ini tidak ideal, namun istilah ini sudah mapan dalam literatur, jadi kita harus menerimanya dan terus maju.

Modal sosial memiliki asal-usul teoretis yang telah dieksplorasi oleh para ahli teori dari ekonomi, sosiologi, ilmu politik, dan hampir semua ilmu sosial lainnya. Modal sosial dapat diterapkan oleh siapa saja yang menyelidiki kemampuan bersosialisasi dan kerja sama manusia, serta evolusinya. Oleh karena itu, modal sosial relevan

dengan berbagai paradigma teoritis seperti teori permainan dan socio-biologi evolusioner.

Pemahaman tentang dasar-dasar teori modal sosial membantu untuk menavigasi berbagai perspektif teoretis yang sekarang berlaku dalam literatur. Modal sosial sering kali diganggu oleh definisi dan konseptualisasi yang saling bersaing atau bertentangan. Kemampuan untuk mengidentifikasi tradisi atau perspektif teoretis yang digunakan oleh seorang penulis akan membantu kita untuk memahami konteks literatur tentang modal sosial.

Baru-baru ini, teori modal sosial sebagian besar berfokus pada dimensi-dimensi modal sosial yang dikembangkan oleh Nahapiet & Ghoshal (1998) berdasarkan teori keterlekatan (*embeddedness*) dari Granovetter (1992). Pengembangan teori awal biasanya dikreditkan kepada tiga penulis yang masing-masing mendekati modal sosial dari perspektif yang sangat berbeda dan menciptakan temuan teoritis dan konseptual yang berbeda.

1. Teori Modal (*Theory Of Capital*) - Pierre Bourdieu

Pierre Bourdieu (1930 - 2002) adalah seorang sosiolog dan intelektual publik asal Prancis yang terutama tertarik pada dinamika kekuasaan dalam masyarakat. Karyanya tentang sosiologi budaya terus menjadi sangat berpengaruh, termasuk teorinya tentang stratifikasi sosial yang berhubungan dengan status dan kekuasaan. Bourdieu sangat peduli dengan sifat budaya, bagaimana budaya direproduksi dan ditransformasikan, bagaimana budaya berhubungan dengan stratifikasi sosial dan reproduksi serta pelaksanaan kekuasaan. Salah satu kontribusi utamanya adalah hubungan antara berbagai jenis modal tersebut, termasuk ekonomi, budaya, sosial, dan simbolik.

Konseptualisasi Bourdieu (1986) tentang modal sosial didasarkan pada pengakuan bahwa modal tidak hanya bersifat ekonomi dan bahwa pertukaran sosial tidak semata-mata untuk kepentingan

diri sendiri dan harus mencakup 'modal dan keuntungan dalam segala bentuknya' (Bourdieu, 1986). Konseptualisasi Bourdieu didasarkan pada teori-teori reproduksi sosial dan kekuasaan simbolik (Dika dan Singh, 2002). Karya Bourdieu menekankan pada kendala struktural dan akses yang tidak setara terhadap sumber daya institusional berdasarkan kelas, gender, dan ras.

Bourdieu melihat modal sosial sebagai milik individu dan bukan milik kolektif. Modal sosial memungkinkan seseorang untuk menggunakan kekuasaan pada kelompok atau individu yang memobilisasi sumber daya. Bagi Bourdieu, modal sosial tidak tersedia secara seragam bagi anggota kelompok atau kolektif, tetapi tersedia bagi mereka yang memberikan upaya untuk mendapatkannya dengan mencapai posisi kekuasaan dan status dan dengan mengembangkan niat baik (Bourdieu, 1986). Bagi Bourdieu, modal sosial melekat secara tidak dapat direduksi pada kelas dan bentuk-bentuk stratifikasi lainnya yang pada gilirannya terkait dengan berbagai bentuk manfaat atau kemajuan (Fine, 2002a).

Bourdieu membingkai modal sosial sebagai sumber daya aktual atau virtual yang diperoleh individu atau kelompok melalui kepemilikan "hubungan yang kurang lebih dilembagakan dari hubungan saling mengenal dan pengakuan" (Bourdieu dan Wacquant, 1992). Oleh karena itu, modal sosial berada dalam diri individu sebagai hasil dari investasinya. Modal sosial Bourdieu tidak mencakup atribut-atribut kepemilikan kolektif, yang oleh Bourdieu disebut sebagai modal budaya. Oleh karena itu, modal sosial Bourdieu tidak mengacaukan tingkat observasi yang menjadi masalah umum pada pendekatan lain. Pendekatan Bourdieu sangat berbeda dengan konseptualisasi modal sosial yang ada saat ini. Bourdieu jarang dikutip untuk karyanya tentang modal sosial dibandingkan dengan James Coleman dan Robert Putnam. Hal ini mungkin disebabkan karena pendekatannya terlalu menuntut secara intelektual (Fine, 2002). Ada banyak konsep yang mendasari istilah-istilah yang

digunakannya yang memiliki makna yang spesifik dan signifikan (Poder, 2011). Pendekatannya didasarkan pada teori sosiologisnya yang lebih luas tentang habitus dan bidang-bidang praktik (Bourdieu, 2018). Ia menekankan fluiditas dan kekhususan dari objek studinya, yang berarti bahwa modal sosial sangat bergantung pada konteks ruang sosial tertentu (Markowska-Przybyła, 2012).

Teori Bourdieu tentang modal sosial didukung oleh seperangkat teori sosiologi yang kaya yang merangkul kompleksitas lingkungan sosial daripada mencari penyederhanaan dan reduksionisme. Fine (2002) menyatakan bahwa hal ini tidak sesuai dengan pandangan yang luas dan dangkal yang saat ini melekat pada modal sosial. Kesimpulan saya adalah bahwa teori modal sosial Bourdieu mungkin berada di luar jangkauan kebanyakan orang di luar sosiologi yang mungkin gagal untuk sepenuhnya memahami dan menghargai makna terminologinya.

2. Pendekatan Pilihan Rasional (*Rational-Choice Approach*) - James Coleman

James Coleman (1926 - 1995) adalah seorang sosiolog Amerika yang terutama tertarik pada sosiologi pendidikan dan kebijakan publik. Seperti Bourdieu, Coleman tertarik pada berbagai jenis modal dan interaksinya, yaitu modal manusia, fisik, dan sosial. Tujuan dari konsep modal sosial Coleman adalah untuk mengimpor prinsip ekonom tentang tindakan rasional untuk digunakan dalam analisis sistem sosial tanpa mengabaikan organisasi sosial dalam prosesnya (Forsman, 2005). Dengan demikian, Coleman menghubungkan sosiologi dan tindakan sosial individu dengan gagasan rasional para ekonom (Jordan 2015). Gabungan teori ini mewakili garis tengah antara dua tradisi teoretis (Tzanakis, 2013). Yang pertama adalah pandangan fungsionalis mengenai tindakan sosial yang dikondisikan oleh struktur sosial. Yang kedua adalah teori rasional yang menyatakan bahwa tujuan para aktor ditentukan oleh penge-

jaran utilitas yang memaksimalkan kepentingan pribadi mereka (Coleman, 1988). Coleman (1988) menghubungkan sosiologi dan tindakan sosial individu dengan gagasan rasional para ekonom bahwa individu bertindak secara independen dan untuk kepentingan pribadi (Jordan, 2015).

Seperti Bourdieu, Coleman melihat modal sosial pada dasarnya berada di dalam struktur sosial hubungan antar manusia. Namun, jika Bourdieu lebih memusatkan perhatian pada kekuasaan dan status serta distribusi modal sosial yang tidak merata di antara individu-individu, Coleman melihat modal sosial sebagai barang publik di mana tindakan-tindakan individu memberi manfaat bagi seluruh masyarakat (Tzanakis, 2013). Dengan demikian, Coleman mengkonseptualisasikan modal sosial sebagai aset kolektif kelompok dan tidak memberikan perhatian pada ketidaksetaraan yang mengakibatkan atau menyebabkan perbedaan kekuasaan dan status. Pengabaian terhadap kekuasaan dan konflik ini mungkin berasal dari keasyikan Coleman yang menganggap bahwa modal sosial sebagian besar merupakan produk dari struktur sosial. Hal ini merupakan perbedaan yang signifikan dari teori Bourdieu yang memperlakukan atribut properti kolektif dengan istilah modal budaya. Ini berarti bahwa teori Bourdieu dan Coleman tentang modal sosial pada dasarnya berbeda, dan hal ini mengakibatkan kebingungan dalam literatur tentang apa yang termasuk dan bukan termasuk modal sosial.

Bagi Coleman, individu terlibat dalam interaksi sosial, hubungan, dan jaringan selama manfaatnya masih ada (Jordan, 2015). Logika ini berasal dari teori pilihan rasional yang berusaha menjelaskan perilaku manusia melalui rasionalitas. Tindakan rasional ini diatur dalam konteks sosial tertentu yang tidak hanya memperhitungkan tindakan individu, tetapi juga pengembangan organisasi sosial.

Dalam hal ini, modal sosial merupakan barang privat dan publik yang menguntungkan semua orang dalam kelompok, tidak hanya

mereka yang berinvestasi dalam pengorganisasian asosiasi atau jaringan. Sebagai contoh, semua orang di suatu lingkungan mendapat manfaat ketika kelompok ronda dibentuk untuk membantu menurunkan tingkat kejahatan lokal, bahkan mereka yang tidak pernah berpartisipasi secara pribadi (Coleman, 1988). Kontribusi langsung dari para aktor akan menguntungkan secara keseluruhan, bukan hanya individu. Keluarga atau komunitas yang kuat diperoleh dari ikatan sosial yang kuat di antara para anggotanya.

Ketika Bourdieu melihat modal sosial sebagai reproduksi ketidaksetaraan sosial, Coleman memperlakukan modal sosial sebagai sesuatu yang hampir secara universal produktif, yaitu modal sosial digunakan agar para aktor dapat mencapai tujuan tertentu yang tidak mungkin dicapai tanpa modal sosial (Coleman, 1988). Ilustrasi yang baik untuk hal ini adalah contoh Coleman yang terkenal tentang pedagang grosir berlian di New York. Dalam konteks ini, sekantung berlian dipinjamkan untuk diperiksa tanpa kontrak formal atau asuransi, sehingga pemberi pinjaman berada dalam bahaya mene-rima berlian palsu atau berlian dengan kualitas lebih rendah ketika berlian dikembalikan. Meskipun peluang untuk melakukan ketidak-jujuran tidak jarang terjadi, namun kasus-kasus seperti ini hampir tidak pernah terjadi. Di sini, modal sosial mempengaruhi keputusan individu dalam hal kejujuran karena ketidakjujuran yang dilakukan oleh seorang pedagang berlian akan menimbulkan tanggapan dari orang lain yang berpengaruh pada penilaiannya dalam bertindak (Durlauf, 1999).

Dalam analisis awal Coleman, ia merujuk pada karya ekonom Glen Loury dan Ben-Porath, serta sosiolog Nan Lin dan Mark Granovetter. Integrasi ekonomi dan sosiologi ini jelas terlihat dalam karyanya dan merupakan salah satu aspek yang paling menarik dari teori ini karena memfasilitasi investigasi lintas dan interdisipliner.

3. Perspektif Demokratis atau Kewarganegaraan (*Democratic or Civic Perspective*) - Robert Putnam

Robert David Putnam (1941-) adalah seorang ilmuwan politik Amerika Serikat yang paling terkenal dengan publikasi kontroversialnya *Bowling Alone*, yang menyatakan bahwa Amerika Serikat telah mengalami keruntuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam kehidupan kewarganegaraan, sosial, pergaulan, dan politik (modal sosial) sejak tahun 1960-an, dengan konsekuensi negatif yang serius. Putnam secara umum dianggap sebagai orang yang mempopulerkan istilah modal sosial (Portes dan Vickstrom, 2015).

Putnam memperlakukan modal sosial sebagai barang publik-jumlah potensi partisipatif, orientasi kewarganegaraan, dan kepercayaan terhadap orang lain yang tersedia bagi kota, negara, atau bangsa (Putnam, 1994, 2000). Hal ini berbeda dengan teori Bourdieu tentang modal sosial, dengan definisi Coleman yang berada di tengah-tengah. Dalam konseptualisasi Putnam, modal sosial diangkat dari ciri individu menjadi ciri agregat populasi yang besar. Modal sosial menjadi sifat kolektif yang berfungsi di tingkat agregat (Tzanakis, 2013).

Putnam membuat argumen bahwa modal sosial pada dasarnya adalah 'jumlah' 'kepercayaan' yang tersedia dan merupakan modal utama yang mencirikan budaya politik masyarakat modern. Bagi Putnam (1993 h. 35; 1993) modal sosial mengacu pada 'fitur-fitur organisasi sosial, seperti jaringan, norma, dan kepercayaan yang memfasilitasi tindakan dan kerja sama untuk keuntungan bersama'. Putnam mengikuti keyakinan Coleman bahwa modal sosial adalah kualitas yang dapat menjadi fasilitator kerja sama antarpribadi. Dalam pandangan Putnam, ciri tersebut dapat dianggap sebagai sifat agregat sedemikian rupa sehingga dapat secara otomatis diperbandingkan di seluruh kota, wilayah, dan bahkan negara (Tzanakis, 2013).

Putnam telah dikritik secara luas karena kelemahan konseptual dan metodologis yang mendasar. Mungkin yang paling bermasalah adalah penyederhanaan yang berlebihan terhadap proses yang

kompleks dan saling terkait menjadi satu atau beberapa faktor saja, yaitu kepercayaan sebagai indikator agregat modal sosial. Hal ini semakin diperumit dengan adanya perputaran logis. Sebagai milik masyarakat dan bangsa, bukan milik individu, modal sosial merupakan sebab sekaligus akibat (Portes, 1998).

Ketika mempopulerkan konsep modal sosial, karya Putnam telah mengacaukan ketelitian teoretis dan metodologis sedemikian rupa sehingga banyak karya selanjutnya tentang modal sosial digambarkan sebagai keserjanaan yang vulgar (Fine, 2002). Menurut saya, karya Putnam menarik dan deskriptif, tetapi tidak banyak memberikan kerangka teoretis dan metodologis untuk penelitian di masa depan.

Dimensi Modal Sosial

Modal sosial dibagi ke dalam tiga dimensi, yaitu modal sosial struktural, kognitif, dan relasional. Perbedaan ketiga tersebut diciptakan oleh Janine Nahapiet dan Sumantra Ghoshal dan merupakan kerangka kerja yang paling banyak digunakan dan diterima untuk memahami modal sosial. Dimensi-dimensi tersebut merupakan pembedaan konseptual yang berguna untuk memudahkan analisis, namun pada praktiknya modal sosial melibatkan keterkaitan yang kompleks di antara ketiga dimensi tersebut. Modal sosial struktural menunjukkan adanya jaringan akses terhadap orang dan sumber daya, sementara modal sosial relasional dan kognitif mencerminkan kemampuan untuk melakukan pertukaran sumber daya (Andrews, 2010).

Modal sosial kognitif dan relasional mungkin terlihat serupa, namun kognitif berkaitan dengan interpretasi subjektif dari pemahaman bersama, sementara relasional adalah perasaan percaya yang dimiliki oleh banyak aktor dalam konteks sosial (kelompok, organisasi, komunitas). Dengan demikian, pandangan sederhana tentang modal sosial yang tinggi adalah hubungan yang kuat, tingkat kepercayaan yang tinggi, dan rasa memiliki misi yang sama.

Atau dengan kata lain, kita dapat memahami modal sosial dari tingkat keterkaitan, kualitas dan sifat dari hubungan-hubungan tersebut, dan tingkat kesamaan visi (Akram et al., 2016). Hal ini berkaitan dengan modal sosial sebagai dimensi struktural (hubungan antar pelaku), relasional (kepercayaan antar pelaku), dan kognitif (tujuan dan nilai bersama antar pelaku).

Perbedaan struktural/kognitif/relasional dibangun berdasarkan diskusi Granovetter (1992) tentang keterlekatan struktural dan relasional. Hal ini sesuai dengan pandangan umum bahwa modal sosial merupakan aspek-aspek dari struktur sosial, dan sifat hubungan sosial, terutama norma-norma. Dengan demikian, modal sosial 'struktural' dan 'relasional'.

Modal sosial struktural bersifat nyata dan dapat dengan mudah diamati dengan adanya ikatan jaringan (yaitu siapa tahu siapa) serta peran, aturan, preseden, dan prosedur. Namun, dimensi relasional tidak berwujud karena merupakan apa dan bagaimana orang berpikir dan merasa. Oleh karena itu, dimensi ini bersifat 'kognitif' karena merupakan fungsi dari kognisi manusia dan sering disebut demikian. Dalam literatur, sudah umum untuk menemukan referensi ke dua dimensi: struktural dan kognitif misalnya (van Bastelaer, 1999; Chou, Yuan 2006; Grootaert dkk. 2004; Krishna dan Shrader 1999; Uphoff, 2000). Sejak sekitar tahun 2004, telah menjadi jauh lebih umum untuk menemukan referensi ke tiga dimensi, struktural, kognitif, dan relasional, dan ini sekarang menjadi kerangka kerja yang paling banyak digunakan dan diterima.

Tabel 1. Perbedaan antara modal sosial struktural, kognitif, dan relasional

STRUKTURAL	KOGNITIF	RELASIONAL
<i>Struktur Sosial</i>	<i>Pemahaman Bersama</i>	<i>Sifat dan Kualitas Hubungan</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Ikatan dan konfigurasi jaringan • Peran, aturan, preseden, dan prosedur 	<ul style="list-style-type: none"> • Berbagi Bahasa, kode, dan narasi bersama • Berbagi Nilai, sikap, dan keyakinan bersama 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepercayaan dan dapat dipercaya • Norma dan sanksi • Kewajiban dan harapan • Identitas dan identifikasi

1. Modal Sosial Struktural

Modal sosial struktural adalah dimensi modal sosial yang berhubungan dengan sifat-sifat sistem sosial dan jaringan hubungan secara keseluruhan (Nahapiet dan Ghoshal, 1998). Istilah ini menggambarkan konfigurasi hubungan impersonal antara orang-orang atau unit-unit. Ini adalah konfigurasi dan pola hubungan antara orang-orang dan mencakup peran, aturan, preseden, dan prosedur yang merupakan ekspresi dari konfigurasi ini (Uphoff dan Wijayaratra, 2000). Modal sosial struktural bersifat nyata dan lebih mudah diamati dibandingkan dengan dimensi modal sosial lainnya. Modal sosial struktural adalah jaringan orang-orang yang dikenal oleh seseorang dan kepada siapa ia dapat memperoleh manfaat seperti informasi dan bantuan. Modal sosial struktural biasanya dianggap sebagai kepadatan, konektivitas, hirarki, dan kesesuaian jaringan hubungan dalam konteks tertentu seperti kelompok, organisasi, atau komunitas (Davenport dan Daellenbach, 2011). Aspek penting dari modal sosial struktural adalah jumlah ikatan yang dimiliki seseorang, dengan siapa dan seberapa kuat ikatan tersebut (Taylor, 2007).

Modal sosial struktural biasanya dipelajari dengan menggunakan pendekatan jaringan. Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan jaringan, frekuensi kontak dan jarak sosial yang dihasilkan di

antara para aktor di perusahaan atau bidang organisasi tertentu diplot untuk membentuk diagram seperti jaring yang menggambarkan pola interaksi para aktor (Edelman et al. 2002). Hal ini telah dianalisis dari berbagai perspektif yang mencakup kekuatan dan sentralitas ikatan, stabilitas dan ukuran jaringan (Lefebvre et al., 2016).

Dimensi struktural dari modal sosial berkaitan dengan sifat-sifat sistem sosial, berbagai bentuk organisasi sosial yang membentuk masyarakat. Modal sosial struktural adalah jaringan hubungan, tetapi bukan kualitas dari hubungan-hubungan ini karena kualitas hubungan adalah dimensi relasional.

Dalam konteks modal sosial struktural, banyak peneliti telah mengidentifikasi perbedaan antara modal sosial pengikat (*bonding*), penghubung (*bridging*), dan penghubung (*linking*) (misalnya Putnam, 1995; Svendsen dan Svendsen, 2003) untuk menggambarkan berbagai jenis ikatan jaringan (Lee dan Jones, 2008).

Modal sosial struktural memfasilitasi kondisi aksesibilitas ke berbagai pihak untuk bertukar dan mentransfer pengetahuan, dan untuk meningkatkan peluang pertukaran (Ansari, Munir, dan Gregg, 2012). Modal sosial struktural memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan akses ke rekan-rekan yang relevan dengan pengetahuan atau keahlian yang diinginkan (Andrews, 2010). Hal ini memudahkan orang untuk terlibat dalam tindakan kolektif yang saling menguntungkan dengan menurunkan biaya transaksi dan meningkatkan pembelajaran sosial (Uphoff dan Wijayaratna, 2000).

2. Modal Sosial Kognitif

Modal sosial kognitif adalah dimensi modal sosial yang menghubungkan sumber daya yang menyediakan representasi, interpretasi, dan sistem makna bersama di antara para pihak (Nahapiet dan Ghoshal, 1998). Modal sosial kognitif adalah skema kognitif dan sistem makna yang ditunjukkan dalam kosakata dan narasi bersama

(Davenport dan Daellenbach, 2011). Modal sosial kognitif adalah bahasa dan kode bersama yang menjadi dasar komunikasi (Gooderham, 2007).

Nahapiet dan Ghoshal (1998) pada awalnya mengaitkan modal sosial kognitif dengan bahasa yang digunakan bersama dan narasi yang digunakan bersama, namun penulis lain juga menggambarkan melalui tujuan atau visi bersama, dan budaya yang digunakan bersama (Inkpen dan Tsang, 2005; Tsai dan Ghoshal, 1998).

Sementara dimensi struktural dapat diamati dalam hubungan, peran, aturan, dan prosedur yang nyata, dimensi kognitif tidak berwujud karena berkaitan dengan interpretasi atas realitas bersama. Hal ini berkaitan dengan teori Bourdieu tentang habitus (Bourdieu, 1986) - seperangkat disposisi, refleks, dan bentuk-bentuk perilaku yang diperoleh orang melalui tindakan dalam masyarakat. Atau berkaitan dengan teori Habermas tentang dunia kehidupan (Sitton, 2003) - lingkungan "latar belakang" kompetensi, praktik, dan sikap yang dapat direpresentasikan dalam cakrawala kognitif seseorang.

Modal sosial kognitif sering kali dimanifestasikan dalam penggunaan bahasa dan kode-kode tertentu. Sebagai contoh, kata-kata tertentu di dalam suatu organisasi dapat memiliki arti yang berbeda, atau tidak memiliki arti sama sekali, di luar organisasi (Ansari et al. 2012).

Beberapa penulis mengkonseptualisasikan dua dimensi (struktural dan kognitif) daripada tiga dimensi (struktural, kognitif, dan relasional), misalnya (van Bastelaer 2001; Chou, Yuan 2006; Grootaert dkk. 2003; Krishna dan Shrader 1999; Uphoff 1999). Para penulis ini tidak membedakan antara modal sosial kognitif dan relasional dan mungkin menggunakan istilah kognitif atau relasional. Hal ini menyebabkan kebingungan tambahan dalam literatur mengenai apa yang termasuk dalam modal sosial kognitif dan apa yang termasuk dalam modal sosial relasional.

Sebagai contoh, Uphoff (1999) menyatakan bahwa norma-norma kepercayaan dan timbal balik adalah bentuk modal sosial kognitif. Namun, ia mengkonseptualisasikan modal sosial hanya dalam dua dimensi: struktural dan kognitif. Jadi, hal ini dapat mengakibatkan pembaca tanpa disadari memasukkan faktor-faktor ini sebagai modal sosial kognitif meskipun dalam pembedaan tiga arah, faktor-faktor ini merupakan modal sosial relasional.

Kebingungan ini diperparah oleh kemiripan dan tumpang tindihnya dimensi kognitif dan relasional. Kedua bentuk tersebut muncul dari dunia mental dan bukan dunia material, sehingga keduanya pada akhirnya bersifat kognitif. Perbedaan antara kedua dimensi tersebut adalah karakteristik dimensi relasional yang tertanam dalam, atau berhubungan secara khusus dengan, hubungan sosial. Hal ini agak berbeda dengan modal sosial kognitif yang menggambarkan konteks sosial yang lebih luas dan bukan merupakan karakteristik dari hubungan tertentu.

Pemahaman bersama dalam sebuah kelompok, organisasi, atau komunitas bersifat kognitif, sedangkan kepercayaan dan norma timbal balik bersifat relasional karena menggambarkan kualitas, atau tertanam di dalam, hubungan sosial.

Modal sosial kognitif adalah nilai-nilai atau paradigma bersama yang memungkinkan adanya pemahaman bersama mengenai cara-cara yang tepat untuk bertindak. Dengan demikian, modal sosial kognitif menyediakan seperangkat norma perilaku yang dapat diterima (Anderson dan Jack, 2002).

3. Modal Sosial Relasional

Modal sosial relasional adalah dimensi modal sosial yang berhubungan dengan karakteristik dan kualitas hubungan pribadi seperti kepercayaan, kewajiban, rasa hormat, dan bahkan persahabatan (Gooderham, 2007). Aspek-aspek kunci dari dimensi relasional modal sosial adalah kepercayaan dan keterpercayaan, norma dan sanksi,

kewajiban dan harapan, serta identitas dan identifikasi (Nahapiet dan Ghoshal, 1998).

Dimensi relasional dari modal sosial mengacu pada sifat dan kualitas hubungan yang telah berkembang melalui sejarah interaksi (Lefebvre et al. 2016) dan berperan dalam atribut perilaku seperti kepercayaan, norma kelompok bersama, kewajiban, dan identifikasi (Davenport dan Daellenbach, 2011).

Modal sosial relasional merupakan bagian afektif karena menggambarkan hubungan dalam hal kepercayaan antarpribadi, keberadaan norma bersama, dan identifikasi dengan individu lain. Dimensi relasional berhubungan dengan sifat atau kualitas jaringan atau hubungan (Cabrera dan Cabrera, 2005).

Nahapiet dan Ghoshal (1998) mengidentifikasi bahwa aspek-aspek kunci dari modal sosial relasional adalah kepercayaan dan keterpercayaan (Fukuyama, 1995; Putnam, 1995), norma-norma dan sanksi-sanksi (Coleman, 1990; Putnam 1995), kewajiban-kewajiban dan harapan-harapan (Burt, 1992; Coleman, 1990; Granovetter, 1985), dan identitas dan identifikasi (Hakansson dan Snehota 1995; Merton, 1968).

Dimensi relasional mendorong perilaku normatif berdasarkan kepercayaan, timbal balik, kewajiban, dan harapan (Lee dan Jones, 2008). Aspek inti dari modal sosial relasional adalah keterkaitan - kesediaan untuk menundukkan tujuan individu pada tujuan kolektif (Lazarova dan Taylor, 2009). Terdapat tumpang tindih antara modal sosial kognitif dan modal sosial relasional dan hal ini dapat menyebabkan kebingungan bagi sebagian orang. Sebagai contoh, kepercayaan dan kepercayaan biasanya digambarkan sebagai bagian dari dimensi relasional. Kepercayaan dapat menjadi atribut dari sebuah hubungan, namun keterpercayaan tetap menjadi atribut dari para pelaku yang terlibat (Anderson dan Jack, 2002) sehingga lebih tepat dikonseptualisasikan sebagai modal sosial kognitif. Baik modal sosial kognitif maupun modal sosial relasional tidak berwujud

dan berasal dari pengamatan, persepsi, dan opini sehingga sangat subjektif dan bervariasi antar individu dan konteks. Kedua bentuk tersebut muncul dari ranah mental daripada material, sehingga keduanya pada akhirnya bersifat kognitif, yang membuat beberapa penulis mengkonseptualisasikan kedua dimensi tersebut secara bersamaan sehingga hanya menghasilkan dua dimensi modal sosial: struktural dan kognitif.

Fungsi Modal Sosial–Mengikat (Bonding), Menjembatani (Brid-ging), Dan Menghubungkan (Linkin)

Perbedaan antara modal sosial pengikat dan penghubung berkaitan dengan sifat hubungan atau asosiasi dalam kelompok sosial atau komunitas. Modal sosial pengikat berada di dalam kelompok atau komunitas, sedangkan modal sosial penghubung berada di antara kelompok sosial, kelas sosial, ras, agama, atau karakteristik sosiodemografi dan sosioekonomi yang penting. Perbedaan *bonding/bridging* dapat dibuat dalam kaitannya dengan berbagai karakteristik hubungan dan jaringan. Tabel di bawah ini merangkum ciri-ciri utama dari masing-masing.

Tabel 2. Perbedaan Antara Modal Sosial yang Mengikat dan Menjembatani

MODAL SOSIAL MENGIKAT	MODAL SOSIAL MENJEMBATANI
<ul style="list-style-type: none"> • Dalam • Intra • Eksklusif • Tertutup • Melihat ke dalam • "Bertahan hidup" • Horisontal • Integrasi • Ikatan yang kuat • Orang-orang yang sama 	<ul style="list-style-type: none"> • Antara • Inter • Inklusif • Terbuka • Berwawasan ke luar • "Menjadi yang terdepan" • Vertikal • Keterkaitan • Ikatan yang lemah • Orang-orang yang berbeda

<ul style="list-style-type: none"> • Kepercayaan yang kental • Penutupan jaringan • Model barang publik 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepercayaan yang tipis • Lubang-lubang struktural • Model barang pribadi
--	--

Robert Putman dalam bukunya *Bowling Alone* membahas bahwa modal sosial yang bersifat mengikat (*bonding*) baik untuk "bertahan" dan menjembatani (*bridging*) sangat penting untuk "maju" (Putnam, 2000). Putnam memberikan kredit untuk istilah-istilah ini kepada Ross Gittel dan Avis Vidal (Gittel dan Vidal, 1998).

Para peneliti di Bank Dunia dikreditkan dengan menambahkan konsep menghubungkan modal sosial untuk menggambarkan hubungan di antara orang-orang atau lembaga-lembaga di berbagai tingkat hirarki kekuasaan masyarakat (Woolcock, 2001; Szreter dan Woolcock, 2004). Beberapa penulis memasukkan konsep *linking* untuk membuat perbedaan tiga arah antara modal sosial *bonding*, *bridging*, dan *linking*.

Perbedaan antara modal sosial yang mengikat dan menjembatani dibangun di atas karya penting Mark Granovetter (Granovetter 1973, 1985, 2000) tentang keterikatan. Pendekatan teori modal sosial ini disebut pendekatan jaringan dan paling sering digunakan oleh para peneliti yang mendekati modal sosial dari sudut pandang ekonomi. Penulis-penulis utama dalam tradisi teori ini dapat ditelusuri mulai dari James Coleman (Coleman 1988, 1990) hingga Ronald Burt (Burt 1982, 1997, 2000; Lin dkk. 2001), Nan Lin (Lin 2001; Lin dkk. 2001; Marsden dan Lin 1982), dan Alejandro Portes (Portes 1998, 2000, Portes dan Landolt 1996, 2000; Portes dan Sensenbrenner 1993).

Konsep-konsep modal sosial pengikat dan penghubung terkait dengan teori jaringan tentang lubang struktural dan penutupan jaringan (Adler dan Kwon, 2002). Teori-teori jaringan sosial menyediakan tradisi penelitian yang kaya yang menurut para ahli teori modal sosial sangat dapat diterapkan.

Penyempurnaan taksonomi dari *bonding* dan *bridging* telah digambarkan sebagai jenis modal sosial (Ramos-Pinto, 2012), sebagai bentuk modal sosial (Gooderham, Minbaeva, dan Pedersen, 2011; Widén- Wulff et al., 2008; Woolcock dan Narayan, 2000), sebagai dimensi modal sosial (Woolcock dan Narayan 2000), dan sebagai fungsi modal sosial (Seferiadis et al., 2015). Istilah-istilah ini sering digunakan secara bergantian, bahkan oleh penulis yang sama dalam satu publikasi.

Beberapa penulis telah mengkonseptualisasikan perbedaan antara modal sosial yang mengikat dan menjembatani sebagai jenis kepercayaan yang berbeda. Modal sosial yang menjembatani dapat dikonseptualisasikan sebagai kepercayaan yang digeneralisasikan (*earned trust*) dan modal sosial yang mengikat sebagai kepercayaan yang diasosiasikan (*ascribed trust*) (van Staveren dan Knorringa, 2007).

Dalam praktiknya, perbedaan antara modal sosial pengikat, penghubung, dan penghubung tidaklah mudah mengingat banyaknya hubungan yang dimiliki oleh setiap orang dengan orang lain (Healy, 2002). Meskipun populer dalam literatur akademis, perbedaan *bonding/bridging* berfokus pada struktur sosial sehingga tidak mencerminkan sifat multidimensi modal sosial (Engbers, Thompson, dan Slaper, 2017). Di masa lalu, beberapa penulis mengambil satu jenis, *bonding* atau *bridging*, sebagai pendekatan untuk penelitian mereka. Hal ini jarang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ketika para peneliti lebih memilih pendekatan yang lebih komprehensif.

1. Modal Sosial Ikatan (*Social Capital Bonding*)

Modal sosial ikatan adalah jenis modal sosial yang menggambarkan hubungan di dalam sebuah kelompok atau komunitas yang dicirikan oleh tingkat kesamaan yang tinggi dalam karakteristik demografis, sikap, serta informasi dan sumber daya yang tersedia. Modal sosial ikatan ada di antara 'orang-orang seperti kita' yang

'bersama-sama' dan biasanya memiliki hubungan dekat yang kuat. Contohnya adalah anggota keluarga, teman dekat, dan tetangga.

Modal sosial ikatan digambarkan sebagai hubungan yang kuat yang berkembang di antara orang-orang dengan latar belakang dan minat yang sama, biasanya mencakup keluarga dan teman, memberikan dukungan materi dan emosional, dan lebih bersifat ke dalam dan protektif. Modal sosial ikatan mengacu pada jaringan dengan kepadatan hubungan yang tinggi di antara para anggotanya, di mana sebagian besar, jika tidak semua, individu dalam jaringan tersebut saling terhubung karena mereka saling mengenal dan sering berinteraksi satu sama lain.

Pertemanan sering dianggap sebagai modal sosial yang mengikat, karena sering kali terbentuk di antara orang-orang yang memiliki karakteristik atau minat yang sama. Teman adalah orang yang kita datangi ketika kita berada dalam krisis, dan dengan siapa kita merasa dekat. Namun, pertemanan juga dapat berperan sebagai penghubung hubungan, karena pertemanan dapat terjalin di antara orang-orang dengan latar belakang budaya, sosio-ekonomi, atau usia yang berbeda, yang pada gilirannya dapat memberikan akses terhadap informasi dan kelompok-kelompok atau individu-individu lain yang sebelumnya tidak dikenal satu sama lain.

2. Modal Sosial yang Menjembatani (*Social Capital Bridging*)

Modal sosial menjembatani adalah jenis modal sosial yang menggambarkan hubungan yang menghubungkan orang-orang melintasi pembelahan yang biasanya memecah belah masyarakat (seperti ras, kelas, atau agama). Modal sosial ini merupakan asosiasi yang 'menjembatani' antar komunitas, kelompok, atau organisasi. Modal sosial penghubung berbeda dengan modal sosial pengikat yang berada di dalam kelompok sosial dan dicirikan oleh jaringan yang erat dengan orang-orang yang merasakan identitas dan rasa memiliki bersama. Perbedaan *bonding/bridging* dapat dibuat dalam

kaitannya dengan berbagai karakteristik hubungan dan jaringan. Tabel di bawah ini merangkum ciri-ciri utama dari masing-masing.

Bridging menggambarkan hubungan pertukaran sosial, sering kali berupa asosiasi antara orang-orang yang memiliki minat atau tujuan yang sama namun memiliki identitas sosial yang berbeda (Pelling dan High, 2005).

Meskipun pertemanan biasanya dianggap sebagai modal sosial pengikat, pertemanan juga dapat berperan sebagai jembatan, karena pertemanan bisa terjadi di antara orang-orang dengan latar belakang budaya, sosio-ekonomi, atau usia yang berbeda, yang pada gilirannya dapat memberikan akses informasi dan kelompok atau individu lain yang sebelumnya tidak dikenal (Edwards, 2004).

3. Modal Sosial Penghubung (*Social Capital Linking*)

Modal sosial penghubung adalah jenis modal sosial yang menggambarkan norma-norma penghormatan dan jaringan hubungan saling percaya antara orang-orang yang berinteraksi melintasi gradien kekuasaan atau otoritas yang eksplisit, formal atau terlembagakan dalam masyarakat (Szreter dan Woolcock, 2004). Hubungan-hubungan ini digambarkan sebagai hubungan 'vertikal' dan ciri utamanya adalah perbedaan posisi sosial atau kekuasaan. Contohnya adalah hubungan antara organisasi berbasis masyarakat dengan pemerintah atau penyandang dana lainnya.

Modal sosial penghubung adalah jenis modal sosial ketiga yang memperluas perbedaan ikatan/perjembatanan umum yang populer dalam pendekatan teori jaringan terhadap modal sosial. Modal sosial penghubung dapat dipandang sebagai perluasan dari modal sosial penghubung yang melibatkan jaringan dan ikatan dengan individu, kelompok atau pelaku korporasi yang terwakili di lembaga-lembaga publik, sekolah, kepentingan bisnis, lembaga hukum, dan kelompok agama/politik (Healy, 2002).

Para peneliti di Bank Dunia berjasa dalam menambahkan konsep menghubungkan modal sosial untuk menggambarkan hubungan di antara orang-orang atau lembaga-lembaga di berbagai tingkat hirarki kekuasaan masyarakat. Modal sosial penghubung berbeda dengan modal sosial penghubung karena perbedaan kekuasaan di antara para mitra merupakan bagian yang disadari dalam hubungan tersebut. Sementara *bridging social capital* mengembangkan kepercayaan horizontal di antara kelompok-kelompok yang berbeda, *linking social capital* melibatkan hubungan patron-klien atau mentor-mentee yang klasik (Schneider, 2006).

B. Nilai dan Norma

Nilai-nilai merupakan konstitutif bagi konsepsi diri individu dan kelompok. Identifikasi dengan nilai-nilai dasar menghasilkan tujuan dan komitmen yang substansial bagi komunitas sosial dan anggotanya. Dengan menerima nilai-nilai yang mengikat dan berusaha untuk mewujudkannya secara individu dan kolektif, aspirasi pribadi dan integrasi sosial menjadi terfokus dan bermakna.

Beberapa nilai secara praktis berlaku secara universal: kehidupan, kesehatan, cinta, kesejahteraan, keamanan, pengakuan sosial. Nilai-nilai lain tertanam dalam tatanan politik atau budaya tertentu: kebebasan, otonomi, realisasi diri, demokrasi, otoritas, tugas, kontrol diri, kesejahteraan materi, kesetaraan seksual. Selain itu, banyak nilai yang mengalami perkembangan dan perubahan yang kurang lebih dinamis. Saat ini, perubahan nilai dari "materialisme" menjadi "post-materialisme" atau dari "kolektivisme" menjadi "individualisme" sering didiagnosis (Inglehart, 2005).

Namun, terlepas dari isi dan karakteristik khusus dari nilai-nilai mereka, individu dan masyarakat harus menemukan cara dan sarana untuk mengubah orientasi nilai dasar mereka menjadi tindakan individu dan kolektif sehingga nilai-nilai yang diinginkan dapat di-

implementasikan secara nyata. Hal ini mencakup tuntutan untuk proses adaptasi yang efisien dalam menghadapi perubahan dan pergeseran nilai. Dalam konteks ini, norma-norma sosial memainkan peran sentral: norma-norma tersebut merupakan pendorong motivasi, menyelaraskan perilaku masyarakat dengan nilai-nilai yang secara sosial seharusnya dilayani. Dilihat dari pandangan ini, norma-norma sosial adalah instrumen untuk mewujudkan nilai-nilai tertentu.

Nilai dan norma memiliki sifat adaptif yang mengatur kognisi sosial dan memfasilitasi interaksi antara individu dan kelompok. Dalam hal ini, mereka terhubung dengan sifat-sifat paling penting dari budaya manusia yang kumulatif yang mengoordinasikan kehidupan sosial dan memungkinkan komunikasi yang bermakna dalam suatu kelompok. Budaya dipahami di sini sebagai perpanjangan dari kapasitas manusia untuk mengatur, menyimpan, mengambil, dan mengirimkan informasi yang memiliki makna kolektif yang melebihi kapasitas memori individu dan kebutuhan individu akan informasi untuk penggunaan pribadi. Sebagai produk dari kehidupan kolektif dan evolusi otak dan bahasa (operasi simbolis) dan didasarkan pada aktivitas intelektual intensif manusia, hal ini menghasilkan kapasitas manusia untuk menahan diri secara selektif dan melayani koordinasi interaksi sosial dan kelangsungan hidup kelompok.

Masyarakat manusia berfungsi berdasarkan gagasan yang disepakati secara intersubjektif tentang apa yang dihargai dan apa yang normatif. Nilai adalah gagasan motivasi yang tahan lama berdasarkan pengalaman akan sesuatu yang baik. Nilai biasanya dikonseptualisasikan sebagai gagasan yang dapat membentuk sistem yang terorganisir secara koheren dan ada dalam bentuk hierarki dalam hal penetapan tujuan (Schwartz & Bilsky, 1990). Asosiasi nilai yang diberlakukan dalam perilaku bertindak sebagai manifestasi modal dari suatu budaya. Dalam hal ini, budaya dapat dianggap sebagai pola yang terorganisir dari variasi wacana tentang apa yang baik; wacana kolektif tentang nilai-nilai.

Nilai-nilai didasarkan pada pengalaman akan sesuatu yang baik, dan dengan demikian berdampak pada preferensi (D'Andrade, 2008; D'Andrade, 2017). Konfigurasi nilai yang spesifik dalam budaya membantu memandu pemilihan dan evaluasi perilaku dan peristiwa [36; 37]. Karena mereka terhubung dengan evaluasi hal-hal yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, nilai-nilai memiliki kekuatan motivasi atau direktif dan dapat menetapkan tujuan dan mendorong perilaku. Mengingat kekuatan direktifnya, nilai-nilai yang dipelajari berinteraksi dengan sistem motivasi anak yang sedang berkembang selama sosialisasi (D'Andrade, 2008). Mencocokkan nilai-nilai seseorang secara intrinsik bermanfaat, hal itu membuat seseorang "merasa baik/indah". Dalam proses perkembangannya, nilai-nilai diinternalisasi menjadi "evaluasi yang dirasakan" (D'Andrade, 2005; D'Andrade, 2006), di mana nilai yang dipelajari menjadi bermuatan afektif dan terkait dengan motivasi untuk menerapkannya (Wan, et. al., 2007). Muatan afektif ini adalah bagian dari apa yang membuat nilai-nilai tahan lama dan dapat diterapkan pada banyak situasi. Komponen afektif yang melekat dalam mengalami sesuatu sebagai hal yang baik memfasilitasi internalisasi mereka. Secara metaforis, hal ini menggeser pengalaman subjektif kita dari 'saat ini terus menerus' ("Saya merasa baik ketika saya dikagumi") menjadi menjangkarkannya dalam mode 'saat ini tidak terbatas' ("Pengakuan itu penting bagi saya") melalui sikap proposisional yang diciptakan. Sikap proposisional adalah kondisi mental relasional yang menghubungkan seseorang dengan sebuah proposisi. Proposisi sering diasumsikan sebagai komponen pemikiran yang paling sederhana dan dapat mengekspresikan makna atau konten yang bisa benar atau salah (Richard, 1990; Anderson, & Owens, 1990). Hal ini secara keseluruhan membuat nilai-nilai menjadi lebih tahan lama dan melampaui penerapan situasional; dalam banyak kasus, lebih sah untuk berbicara tentang 'orientasi nilai' daripada 'nilai' tunggal. Nilai-nilai adalah

semacam 'variabel pola' (Parsons, 1951) yang membuatnya mirip dengan norma-norma, yang sekarang saya bahas.

Seperti yang diusulkan oleh D'Andrade (2017), nilai adalah konsep esensialisasi, formulasi dari kekuatan sebab akibat yang kuat di dalam jiwa manusia (D'Andrade, 2017). Norma memberikan aturan yang menggambarkan seperti apa perilaku yang seharusnya, dan nilai memberikan kriteria yang digunakan untuk menilai perilaku tersebut baik atau buruk. Karena sifat motivasi dan kapasitasnya untuk memengaruhi perilaku dan persepsi kita tentang dunia, baik nilai maupun norma telah lama menjadi fokus penelitian dalam ilmu sosial. Baik nilai maupun norma memberi makna pada pengalaman subjektif kita. Sama pentingnya, keduanya berkontribusi pada pemahaman kita tentang konvensi yang kita jalani sebagai batasan nyata, yang membebani hidup kita dengan semua substansi fakta yang tidak dapat disangkal. Pemaksaan norma-norma tersebut difasilitasi oleh sifat kolektivitas manusia. Peran tubuh sosial dalam pemadatan norma-norma ke dalam batas-batas seperti tembok batu bata antara yang dapat diterima (dan manusiawi) dan non-manusiawi yang tidak dapat diatur dan tidak terawat sulit untuk ditaksir terlalu tinggi. Sepanjang proses sosialisasi, kolektivitas membantu kita membentuk apa yang normal dan apa yang tidak normal (atau yang diinginkan secara sosial) dan membuat kesimpulan yang sesuai. Tanpa pernah mendapat tekanan, kita belajar apa yang perlu kita lakukan jika kita ingin tetap menjadi anggota kolektivitas yang dapat diterima. Norma-norma mudah dipelajari dan dapat dilacak dalam bahasa; bukti pemahaman prinsip-prinsip moral yang mendasari resep normatif ('penalaran deontik') ditemukan pada anak-anak di usia dini (Cummins, 1998).

Norma adalah gagasan yang melibatkan pengetahuan prosedural kolektif tentang bagaimana perilaku harus dibingkai. Hubungan yang dirasakan antara norma-norma bertindak sebagai manifestasi modal budaya (asalkan dapat diasumsikan bahwa norma dan nilai budaya

seseorang dipandang sebagai hal yang baik secara *default*. Norma-norma berhubungan dengan beberapa prinsip preskriptif yang dengan menyeragamkan individu menciptakan dunia sosial yang 'seharusnya' dimana individu terikat dalam beberapa kelompok yang terorganisir dan kolektivitas yang terstruktur.

Seperti yang ditunjukkan dengan tepat oleh John Searle, kekuatan yang menarik dari norma-norma muncul dari komitmen kolektif bersama anggota masyarakat untuk melaksanakannya (Searle, 1995). Karya-karya norma adalah cerminan dari pengakuan kita akan komitmen ini yang mencapai klimaksnya pada kemunculan institusi (misalnya uang, gereja, pernikahan, pendidikan, dll.) yang kita anugerahi hak, dengan semua implikasi yang terjadi (D'Andrade, 2017). Pengetahuan implisit kita tentang pemahaman orang lain mengenai sifat mengikat dari norma-norma menginformasikan realitas sosial yang kita tempati. Khususnya, karena representasi normatif memiliki hasil perilaku yang langsung dan dapat diamati, jauh lebih sulit untuk 'memalsukan' atau 'menyembunyikan' pene-gakan suatu norma daripada memalsukan atau secara munafik menyamarkan dukungan seseorang terhadap suatu nilai. Faktanya, norma-norma sosial tampaknya sangat terkait erat dengan tampilan perilaku mereka sehingga sering disalahartikan sebagai ciri-ciri kepribadian atau nilai-nilai (dalam kehidupan nyata dan dalam literatur etnografi). Dengan cara yang sama, pelanggaran norma jauh lebih jelas, dialami sebagai hal yang lebih ofensif dan menarik lebih banyak sanksi jika dibandingkan dengan 'kemurtadan' seseorang dari nilai-nilai (Sripada, & Stich, 2006); Young, 2003).

Ungkapan seperti 'norma mempengaruhi perilaku' mungkin terdengar cukup jelas dan bahkan berlebihan, namun kapasitas norma untuk membentuk konformitas, menimbulkan kepatuhan, dan membentuk frekuensi perilaku dalam kelompok-kelompok budaya, yang membuat norma mendapat perhatian dari para psikolog sosial dan sosiolog selama beberapa dekade (Cialdini & Trost, 1998). Norma

adalah sebuah konstruk yang membantu menggambarkan dan menjelaskan perilaku manusia; norma tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan memunculkan perilaku yang sesuai, untuk mendapatkan kata 3. Terlibat dalam mekanisme kontrol sosial, norma memiliki potensi besar untuk memformat perilaku dan menetapkan batas-batas, dan dengan demikian mereka dikonseptualisasikan sebagai fenomena sosial secara intrinsik. Tidak peduli seberapa anehnya resep normatif suatu budaya, norma-norma tersebut menuntut ketaatan dalam komunitas budaya di mana norma tersebut menjadi mata uang.

Dalam *The Grammar of Society*, Cristina Bicchieri meneliti norma-norma sosial, seperti keadilan, kerja sama, dan timbal balik, untuk memahami sifat dan tujuan mereka yang berevolusi (Bicchieri, 2005). Meneliti keberadaan dan kelangsungan hidup norma-norma yang tidak efisien, ia menunjukkan bagaimana norma-norma berevolusi dengan cara-cara yang bergantung pada disposisi psikologis individu dan bagaimana disposisi tersebut dapat merusak kesejahteraan kolektif. Sebaliknya, ia juga menunjukkan bagaimana kecenderungan psikologis tertentu secara alami dapat mengarahkan individu untuk mengembangkan norma-norma keadilan yang sangat mirip dengan norma-norma yang kita ikuti dalam masyarakat modern (Bicchieri, 2005).

Konsensus yang dipersepsikan tentang apa itu norma merupakan komponen penting dari fungsi norma. Implikasi praktis dari pengamatan ini dapat lebih dihargai dengan mempertimbangkan kasus-kasus konsensus yang salah dipersepsikan: konsensus yang salah tampaknya mempromosikan perilaku yang secara keliru dipandang sebagai normatif dengan keberhasilan yang sama dengan konsensus yang 'benar' (Miller & Prentice, 1994; Prentice & Miller, 1993). Norma muncul dan mengatur hubungan. Situasi normatif melibatkan interaksi beberapa agen, persepsi bersama mereka dan perilaku yang diatur secara normatif. Di tengah-tengah literatur tentang

norma - persepsi - perilaku adalah gagasan tentang norma deskriptif. Norma deskriptif berasal dari apa yang dilakukan orang lain dalam situasi tertentu. Konstruk kognitif dari norma deskriptif mengacu pada kognisi yang dimiliki secara pribadi tentang perilaku yang disetujui bersama dan telah dipelajari oleh psikolog sosial sejak lama (Cialdini & Trost 1998), untuk ditinjau]. Bukti yang berasal dari penelitian lapangan dan laboratorium menunjukkan bahwa norma deskriptif, dengan membangkitkan konsensus kelompok seputar norma tersebut, dapat memengaruhi aksesibilitas kognisi terkait (misalnya dalam aktivasi stereotip) dan niat perilaku (Rivis & Sheeran, 2003; Sechrist & Stangor, 2001; Shteynberg, et. al., 2009) untuk ditinjau]. Dalam penelitian lintas budaya, bukti serupa ditemukan untuk identifikasi dengan elemen-elemen yang menonjol dari pandangan dunia budaya (Wan, et. al., 2007). dan untuk peralihan kerangka budaya pada individu bikultural (Zou, et. al., 2009). Persepsi norma telah ditunjukkan sebagai kekuatan penyebab yang mendorong perbedaan budaya oleh Matsumoto (Matsumoto, 2007).

Menariknya, selain secara langsung memengaruhi perilaku, norma juga memiliki cara untuk memengaruhi neurofisiologi manusia. Hal ini menunjukkan serangkaian hubungan sebab akibat yang sama sekali baru yang sangat memperkaya dan memperumit gambaran sehubungan dengan peran evolusioner norma-norma dalam konsolidasi sifat-sifat budaya. Literatur yang tersedia menunjukkan kapasitas norma untuk memediasi perilaku manusia dan kondisi fisik (dengan membangkitkan kondisi emosi negatif, mempengaruhi hormon yang berhubungan dengan stres ketika pelanggaran norma disaksikan (Richerson & Boyd, 2005). Pengaruh negatif yang kuat (sering kali dapat direduksi menjadi emosi yang mendekati rasa jijik) dan perasaan yang serupa dengan rasa sakit fisik - keduanya merupakan penanda faktor penentu biologis adaptasi (Rozin, et. al., 1997) - menyertai pengalaman seseorang dalam mengalami pelanggaran norma. Selain itu, kegagalan seseorang untuk menye-

suaikan diri dengan standar budaya telah ditunjukkan secara empiris oleh William Dressler untuk memiliki efek negatif pada kesehatan fisik dan mental di beberapa sampel Amerika dan Brasil (Dressler, 2005; Dressler, 2007). Karena hampir tidak ada perilaku budaya yang tidak diatur oleh norma, tekanan resep normatif cukup kuat di setiap titik dalam lintasan kehidupan individu. Dengan demikian, norma-norma memang harus diperlakukan sebagai faktor yang kuat dalam penelitian sosial yang melibatkan perilaku dan interaksi manusia. Tidak mengherankan, mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang dampak tekanan normatif terhadap aspek biologis kehidupan manusia, dan implikasinya terhadap sejarah evolusi norma merupakan salah satu bidang penelitian yang paling menarik dalam penelitian norma saat ini. Terlepas dari ketertarikan ini, sangat sedikit yang telah dilakukan untuk merekonstruksi asal-usul norma dan menjelaskan mekanisme penyebarannya. Evolusi norma masih menjadi ranah yang sebagian besar belum dieksplorasi, termasuk dinamika proses ini, tujuan dan kondisi di mana norma-norma muncul, bagaimana norma-norma sosial muncul, dan apa saja 'tetangga' evolusioner norma-norma tersebut. Ini adalah beberapa isu yang harus kita cari tahu lebih lanjut.

C. Pola Pikir dan Perilaku Masyarakat

Pola pikir dan perilaku masyarakat merupakan aspek penting dalam kehidupan sosial dan budaya, yang membentuk cara individu berinteraksi, berkolaborasi, dan berkontribusi terhadap kesejahteraan bersama.

Pola pikir masyarakat terdiri dari beragam pola, diantaranya:

1. Nilai dan Norma Bersama

Pola pikir komunitas tumbuh subur di atas fondasi nilai-nilai dan norma-norma bersama. Prinsip-prinsip ini memandu tindakan individu dan mendorong rasa kohesi dan rasa memiliki. Con-

tohnya adalah nilai-nilai seperti kerja sama, rasa hormat, timbal balik, dan tanggung jawab sosial.

2. Identitas Kolektif

Individu dalam sebuah komunitas mengembangkan rasa identitas bersama, mengenali diri mereka sebagai bagian dari keseluruhan yang lebih besar. Hal ini menumbuhkan rasa persatuan dan tujuan, memotivasi individu untuk berkontribusi pada kesuksesan komunitas.

3. Tujuan dan Aspirasi Bersama

Masyarakat sering kali memiliki tujuan dan aspirasi bersama, yang bertindak sebagai kekuatan pendorong untuk tindakan kolektif. Tujuan-tujuan ini dapat berkisar dari meningkatkan infrastruktur lokal hingga melestarikan tradisi budaya atau mengatasi tantangan lingkungan.

Sementara, perilaku masyarakat termanifestasi ke dalam beberapa bentuk, diantaranya:

1. Partisipasi Sosial

Partisipasi aktif dalam acara-acara komunitas, inisiatif, dan proses pengambilan keputusan menjadi ciri komunitas yang dinamis. Keterlibatan ini memperkuat ikatan sosial dan memberdayakan individu untuk mempengaruhi arah komunitas.

2. Kerjasama dan Kolaborasi

Anggota komunitas bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, dengan memanfaatkan keterampilan dan sumber daya yang beragam. Semangat kolaboratif ini mendorong inovasi, pemecahan masalah, dan kemajuan bersama.

3. Saling Membantu dan Mendukung

Komunitas berkembang dengan sistem bantuan dan dukungan timbal balik. Individu siap membantu dan peduli satu sama lain, terutama pada saat dibutuhkan, menciptakan jaring pengaman dan menumbuhkan rasa saling percaya dan kasih sayang.

4. Menghargai Keberagaman

Komunitas inklusif merangkul dan merayakan keragaman anggotanya, mengakui nilai dari perspektif dan pengalaman yang berbeda. Hal ini menumbuhkan toleransi, pemahaman, dan identitas kolektif yang lebih kaya.

Pola pikir dan perilaku masyarakat saling terkait. Pola pikir komunitas yang kuat memotivasi individu untuk terlibat dalam perilaku komunitas yang positif, sementara perilaku ini, pada gilirannya, memperkuat nilai-nilai bersama dan rasa identitas yang mendukung pola pikir komunitas. Siklus positif ini menumbuhkan komunitas yang berkembang dan tangguh.

Untuk memperkuat keterlibatan positif masyarakat, maka perlu dipertimbangkan beberapa hal berikut:

1. Pengaruh faktor eksternal

Pola pikir dan perilaku masyarakat dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti norma budaya, kondisi sosial ekonomi, dan struktur politik.

2. Peran kepemimpinan

Pemimpin masyarakat yang efektif dapat memainkan peran penting dalam membentuk dan memelihara pola pikir dan perilaku masyarakat yang positif.

3. Pentingnya kepekaan budaya

Ketika bekerja dengan masyarakat yang beragam, sangat penting untuk peka terhadap budaya dan mengadaptasi pendekatan agar selaras dengan nilai dan norma yang berlaku di setiap komunitas.

Memahami dan memelihara pola pikir dan perilaku masyarakat sangat penting untuk membangun masyarakat yang kuat, tangguh, dan berkembang. Dengan mempromosikan nilai-nilai seperti kerja sama, tanggung jawab bersama, dan partisipasi aktif, kita dapat

menciptakan komunitas di mana individu merasa diberdayakan, terhubung, dan termotivasi untuk berkontribusi demi kebaikan bersama.

D. Struktur Sosial Masyarakat

Struktur sosial mengacu pada pola-pola dalam hubungan sosial yang memiliki semacam keterikatan. Dalam definisi umum ini, terdapat dua kelompok utama pendekatan yang lebih spesifik. Pertama, 'struktur' dapat digunakan untuk merujuk pada tingkat makro pada organisasi abstrak dari kategori-kategori sosial yang didefinisikan secara timbal balik yang dilihat sebagai suatu keseluruhan sosial. Kedua, istilah ini dapat digunakan untuk merujuk pada 'struktur sosial' berskala lebih kecil, yaitu konfigurasi hubungan konkret di antara individu-individu tanpa merujuk pada gagasan tentang totalitas masyarakat yang lebih besar.

Struktur sosial mengacu pada pola hubungan sosial dalam masyarakat. Struktur tersebut mengatur interaksi di antara anggota masyarakat, memberikan pedoman dalam norma-norma budaya untuk mencapai tujuan yang ditentukan oleh nilai-nilai budaya. Secara umum, struktur sosial menjaga stabilitas masyarakat. Namun, ketika struktur sosial dan nilai-nilai masyarakat menjadi tidak sesuai, struktur tersebut harus merangkul perubahan sosial agar masyarakat dapat bertahan dan melanjutkan pembangunan yang sehat. Meskipun berbagai pendekatan sosiologis telah berusaha untuk menggambarkan perkembangan dan pemeliharaan struktur sosial, memahami hubungan antara struktur dan perubahan sangat penting untuk pengembangan masyarakat dunia yang damai.

Struktur sosial adalah sistem hubungan sosial yang khas dan stabil yang ada di setiap masyarakat manusia. Struktur sosial tidak berkaitan dengan orang sebagai individu, kelompok, atau organisasi yang membentuk masyarakat, atau tujuan akhir dari hubungan mereka. Sebaliknya, struktur sosial berhubungan dengan organisasi

hubungan mereka: bagaimana hubungan-hubungan tersebut diatur ke dalam pola-pola. Dengan demikian, konsep struktur sosial mengasumsikan bahwa hubungan sosial manusia tidak terjadi secara acak atau kebetulan, melainkan mengikuti pola-pola tertentu yang dapat diidentifikasi.

Struktur sosial adalah kerangka kerja institusional yang menciptakan keteraturan dalam interaksi yang berulang dan berirama (baik harian, mingguan, maupun tahunan) di antara manusia. Kunci dari struktur sosial suatu masyarakat terletak pada pemahaman tentang lembaga-lembaga sosialnya dan kombinasi yang saling terkait. Institusi sosial menyediakan tatanan yang diperlukan untuk memungkinkan struktur sosial. Struktur sosial mengacu pada seperangkat lembaga sosial, kelompok, dan hubungan yang saling berhubungan yang bersama-sama membentuk masyarakat. Ini adalah hubungan berpola dan pengaturan sosial yang membentuk dan memengaruhi perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat.

Struktur sosial mengacu pada pola hubungan dan institusi yang terorganisir yang membentuk masyarakat atau kelompok. Struktur sosial mencakup berbagai institusi sosial, seperti keluarga, sekolah, dan pemerintah, serta berbagai peran dan status yang dimiliki oleh individu di dalam institusi-institusi tersebut. Struktur sosial juga mencakup berbagai norma dan nilai sosial yang memandu perilaku dalam masyarakat, serta pola kekuasaan dan ketidaksetaraan yang membentuk hubungan dan interaksi antara individu dan kelompok yang berbeda. Secara keseluruhan, struktur sosial memberikan kerangka kerja untuk memahami organisasi sosial suatu masyarakat dan cara-cara individu dan kelompok berinteraksi dalam masyarakat tersebut. Struktur sosial mencakup elemen-elemen seperti institusi sosial (seperti keluarga, pemerintah, pendidikan, dan agama), hierarki sosial (seperti kelas, ras, dan gender), dan jaringan sosial (seperti lingkaran pertemanan dan asosiasi profesional). Elemen-elemen ini membentuk bagaimana

individu berinteraksi satu sama lain dan bagaimana kekuasaan dan sumber daya didistribusikan di dalam masyarakat.

Struktur sosial tidak tetap atau statis, melainkan berevolusi dan berubah seiring waktu seiring perkembangan masyarakat dan budaya, yang dapat dianalisis dan dipelajari melalui berbagai metode ilmiah sosial, termasuk sosiologi, antropologi, dan ilmu politik. Struktur sosial adalah tentang pola-pola hubungan. Ada dua kelompok pendekatan utama yang memahami pola-pola ini secara berbeda. Yang pertama, pendekatan dari atas ke bawah, cenderung melihat organisasi global berasal dari budaya bersama yang sama. Yang kedua, pendekatan dari bawah ke atas, lebih memperhatikan proses aglomerasi yang dimulai dari individu-individu yang mungkin atau mungkin tidak dimulai dengan pola budaya yang sama (John dan Monica, 2015)

Baik "struktur mikro" maupun "struktur makro" dapat ditemukan di dalam struktur sosial. Struktur mikro adalah pola hubungan di antara elemen-elemen dasar kehidupan sosial yang tidak dapat dibagi lebih lanjut dan tidak memiliki struktur sosialnya sendiri (misalnya pola hubungan antara individu dalam kelompok yang terdiri dari individu-individu, di mana individu-individu tersebut tidak memiliki struktur sosial). Dengan demikian, struktur makro adalah semacam struktur "tingkat kedua", yaitu pola hubungan di antara objek-objek yang memiliki strukturnya sendiri (misalnya hubungan di antara partai-partai politik, karena partai-partai politik memiliki struktur sosialnya sendiri).

Beberapa karakteristik utama dari struktur sosial adalah:

1. Merupakan sistem yang berpola

Struktur sosial tidak acak, melainkan mengikuti pola-pola tertentu yang dibentuk oleh norma-norma, nilai-nilai, dan lembaga-lembaga sosial. Pola-pola ini memberikan kerangka kerja untuk memahami interaksi dan hubungan sosial.

2. Terorganisir secara hierarkis
Struktur sosial biasanya diorganisir ke dalam berbagai tingkat kekuasaan dan otoritas, seperti kelas, ras, dan gender. Hirarki ini membentuk distribusi sumber daya dan peluang dalam masyarakat.
3. Struktur sosial dibentuk oleh budaya dan sejarah
Struktur sosial dipengaruhi oleh konteks budaya dan sejarah suatu masyarakat. Masyarakat yang berbeda memiliki struktur sosial yang berbeda yang mencerminkan sejarah dan nilai-nilai budaya mereka yang unik.
4. Struktur sosial bersifat dinamis dan dapat berubah
Struktur sosial berevolusi dan berubah seiring dengan perubahan masyarakat dan budaya, lembaga sosial, norma, dan nilai yang baru dapat muncul, sementara yang lama dapat menghilang atau diubah.
5. Saling berhubungan
Struktur sosial terdiri dari berbagai institusi dan hubungan yang saling bergantung, seperti keluarga, sekolah, dan pemerintah. Institusi dan hubungan ini membentuk dan mempengaruhi satu sama lain, menciptakan jaringan interaksi sosial yang kompleks.
6. Struktur sosial dapat membatasi dan memungkinkan
Struktur sosial dapat membatasi dan memungkinkan perilaku dan pilihan individu. Meskipun norma dan institusi sosial dapat membatasi individu, mereka juga dapat memberikan peluang dan sumber daya yang dapat digunakan individu untuk mencapai tujuan mereka.

Ada beberapa teori penting yang terkait dengan struktur sosial, diantaranya:

1. Fungsionalisme struktural
Teori ini memandang struktur sosial sebagai sebuah sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terkait yang bekerja

sama untuk menjaga stabilitas dan ketertiban sosial. Teori ini menekankan peran penting yang dimainkan oleh lembaga-lembaga sosial, seperti keluarga, pemerintah, dan agama, dalam memastikan kelancaran fungsi masyarakat.

Fungsionalisme didasarkan pada karya Emile Durkheim, dan berpendapat bahwa setiap fenomena sosial dan budaya memenuhi fungsi tertentu. Pendekatan ini dikembangkan dalam kaitannya dengan struktur sosial oleh Radcliffe-Brown dan Talcott Parsons. Radcliffe-Brown menganggap sistem interaksi manusia sebagai pusat dalam pendekatan fungsionalis terhadap masyarakat. Masyarakat dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang terorganisir dari keseluruhan, yang masing-masing bergantung pada yang lain dan terintegrasi ke dalam keseluruhan. Bagian-bagian ini adalah individu-individu yang berpartisipasi dalam kehidupan sosial, menduduki status tertentu di dalam sistem. Individu pada gilirannya dikendalikan oleh norma-norma atau pola-pola. Pada beberapa masyarakat primitif, cerita rakyat berfungsi untuk mempertahankan norma-norma dan pola-pola ini; pada masyarakat lainnya, pendidikan, ritual keagamaan, atau adat istiadat tradisional lainnya menjalankan peran ini. Karena ia menjelaskan fenomena budaya melalui fungsi struktur sosial, cara berpikir Radcliffe-Brown dikenal sebagai "fungsionalisme struktural."

Talcott Parsons mengembangkan teori fungsionalisme struktural yang menyatakan bahwa manusia "bertindak" dengan cara yang tidak sukarela. Menurut pandangannya, masyarakat membentuk orang, menyebabkan mereka berpikir bahwa ada cara-cara tertentu yang dapat diterima untuk berperilaku dan hidup. Nilai-nilai dan norma-norma yang dianut bersama, institusi keluarga, dan cara-cara yang disepakati bersama untuk mencapai tujuan, semuanya dipandang oleh Parsons sebagai pola-pola

interaksi sosial yang berkontribusi pada fungsi masyarakat yang relatif lancar. Pola-pola tersebut memungkinkan bekerjanya masyarakat sebagai sebuah sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terkait, di mana perubahan pada salah satu bagian akan mempengaruhi bagian lainnya. Tujuan utama Talcott Parsons adalah untuk secara meyakinkan menggambarkan jenis hubungan sosial yang logis yang mencakup semua kelompok masyarakat, tidak hanya yang kaya atau miskin. Dengan demikian, teorinya mencakup penampang masyarakat dalam semua aspeknya.

2. Strukturalisme

Strukturalisme diperkenalkan ke dalam sosiologi oleh Claude Levi-Strauss yang awalnya berasal dari teori linguistik Ferdinand de Saussure. Pandangan ini lebih menyukai bentuk-bentuk struktural deterministik (yang mendefinisikan kekuatan) dari pada kemampuan individu untuk bertindak. Sama seperti bahasa yang terstruktur oleh aturan yang mengatur elemen-elemennya yang diikuti oleh penutur asli secara tidak sadar, demikian pula masyarakat dipandang terstruktur menurut aturan-aturan yang mendasarinya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pandangan struktural mendekati "matematisasi" dari suatu objek.

Setiap budaya membentuk dunia menurut struktur makna yang berbeda. Struktur yang dipelajari oleh Strauss dan yang lainnya termasuk pola kekerabatan, mitos, agama, dan berbagai kebiasaan budaya yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Seperti halnya strukturalisme linguistik yang menyatakan bahwa "struktur dalam" ada dalam tata bahasa semua bahasa, Strauss menyatakan bahwa struktur sosial berasal dari struktur dalam pikiran manusia dan dengan demikian mencerminkan hal yang universal dalam pemikiran manusia.

3. Teori konflik

Teori ini melihat struktur sosial sebagai hasil dari perjuangan yang sedang berlangsung antara kelompok-kelompok yang berbeda dengan kepentingan dan nilai-nilai yang bersaing. Teori ini menekankan pentingnya kekuasaan dan ketidaksetaraan dalam membentuk hubungan sosial dan menyoroti cara-cara di mana kelompok-kelompok dominan menggunakan lembaga-lembaga sosial untuk mempertahankan kekuasaan dan hak istimewa mereka.

4. Interaksionisme simbolik

Teori ini berfokus pada bagaimana individu menciptakan dan mempertahankan struktur sosial melalui interaksi mereka satu sama lain. Teori ini menekankan pentingnya makna, simbol, dan nilai bersama dalam membentuk hubungan sosial, serta melihat struktur sosial sebagai proses negosiasi dan interpretasi yang berkelanjutan.

5. Teori feminis

Teori ini memandang struktur sosial sebagai produk dari hubungan gender dan menyoroti cara-cara di mana norma-norma dan institusi sosial patriarki membentuk pengalaman dan kesempatan perempuan. Teori ini menekankan pentingnya menantang dan mengubah struktur sosial yang bias gender untuk mempromosikan kesetaraan gender.

6. Teori jaringan sosial

Teori ini berfokus pada cara-cara di mana struktur sosial dibentuk oleh pola koneksi sosial dan hubungan antara individu dan kelompok. Teori ini menekankan pentingnya jaringan sosial dalam membentuk interaksi sosial dan memengaruhi perilaku individu serta pengambilan keputusan.

Masyarakat dikelompokkan ke dalam struktur-struktur dengan fungsi, makna, atau tujuan yang berbeda. Dalam pengertian yang

lebih luas adalah "sistem sosial", yang dapat dipandang sebagai struktur sosial yang terdiri dari sistem ekonomi, sistem hukum, sistem politik, dan sistem budaya (semacam realitas bersama: bahasa, norma, nilai, dan lain-lain). Namun, struktur sosial lebih dari itu. Struktur sosial juga mencakup pendidikan, keluarga, agama, dan layanan sosial seperti perawatan kesehatan. Bahasa adalah saluran dasar untuk mengkomunikasikan informasi dan instruksi dalam masyarakat. Ada norma-norma budaya yang mempengaruhi pernikahan, melahirkan anak, dan membesarkan anak. Sistem politik tidak hanya mempengaruhi lingkungan politik individu tetapi juga sistem hukum tertentu, peraturan kekerasan (oleh kepolisian), hukum properti, aturan perdagangan, perawatan kesehatan, dan sebagainya. Masyarakat juga umumnya mengembangkan pembagian kerja yang disepakati.

Elemen-elemen yang berbeda ini saling berkaitan, seperti yang dapat dilihat dari contoh berikut ini: faktor ekonomi bertanggung jawab atas pergeseran perilaku populer, beberapa di antaranya melintasi batas-batas kelas. Sebagai hasil dari peningkatan produksi, kemakmuran meningkat, dan tren umum dalam standar hidup untuk sebagian besar kelompok meningkat, memungkinkan orang biasa untuk memperbaiki pola makan, perumahan, dan meningkatkan waktu luang. Para pekerja menuntut hari kerja 12 jam, kemudian sepuluh jam, dan pada awal abad ke-20, beberapa kelompok mulai menuntut waktu kerja yang lebih singkat lagi. Hari libur yang tersebar juga diperkenalkan, dan "akhir pekan Inggris", yang memungkinkan waktu libur pada hari Sabtu sore dan juga hari Minggu, menyebar luas.

Di antara beberapa elemen struktur sosial dan budaya, ada dua yang sangat penting. Pertama, terdiri dari tujuan, maksud, dan kepentingan yang ditetapkan secara budaya, yang dianggap sebagai tujuan yang sah bagi semua anggota masyarakat. Hal-hal tersebut adalah hal-hal yang "layak diperjuangkan". Meskipun beberapa dari

tujuan budaya ini mungkin secara langsung berkaitan dengan kebutuhan biologis manusia, mereka tidak selalu ditentukan oleh kebutuhan tersebut. Kedua, elemen struktur budaya yang mendefinisikan, mengatur, dan mengendalikan cara-cara yang dapat diterima untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Setiap kelompok sosial selalu mencocokkan tujuan budayanya dengan peraturan, yang berakar pada norma dan nilai, mengenai prosedur yang diperbolehkan untuk mencapai tujuan tersebut.

Secara umum, tidak ada masyarakat yang tidak memiliki norma yang mengatur perilaku. Namun, masyarakat berbeda dalam hal sejauh mana perilaku yang dapat diterima, adat istiadat sosial, dan kontrol institusional diintegrasikan secara efektif dengan tujuan dalam hirarki nilai-nilai budaya. Struktur sosial tetap utuh selama anggota masyarakat dapat mencapai tujuan mereka dalam kerangka cara-cara yang dapat diterima untuk mencapainya. Ketika nilai-nilai budaya dan struktur sosial menjadi tidak sesuai, perubahan dalam struktur sosial menjadi tidak terhindarkan.

Struktur sosial menggambarkan cara masyarakat diorganisasikan ke dalam hubungan dan pola interaksi sosial yang dapat diprediksi (cara orang merespons satu sama lain). Pola-pola ini sampai batas tertentu tidak bergantung pada individu tertentu, karena mereka mengerahkan kekuatan yang membentuk perilaku individu dan identitas masyarakat.

Masyarakat menggunakan norma-norma untuk mengontrol metode yang dapat diterima untuk mencapai nilai-nilai yang disetujui secara budaya (misalnya kekayaan). Ketika norma dan nilai ini bertentangan, struktur sosial dan peraturan menjadi tegang, dan hasilnya adalah perubahan sosial atau kerusakan dalam fungsi struktur sosial.

E. Keberagaman Masyarakat

Keragaman dalam masyarakat merupakan topik penting yang membahas dinamika yang berkaitan dengan variasi budaya, sosial, dan etnis. Di dunia yang semakin beragam, menjadi penting untuk memastikan interaksi yang harmonis di antara orang-orang dan kelompok-kelompok yang memiliki latar belakang budaya yang majemuk, bervariasi, dan dinamis. Memahami berbagai aspek keragaman dan dampaknya terhadap masyarakat adalah kunci dalam mengatasi masalah sosial. Hal ini mencakup pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan antara individu dan berbagai kelompok budaya dalam masyarakat. Selain itu, pertimbangan seperti inklusi dan kesetaraan memainkan peran penting dalam membingkai perspektif tentang keragaman. Implikasi etis dari berbagai pendekatan keragaman, termasuk kesetaraan, manajemen keragaman, dan inklusi, juga penting dalam diskusi masyarakat.

Pemahaman terhadap keragaman dalam masyarakat sangat penting karena hal ini membantu memperkuat hubungan antar-individu dan kelompok-kelompok yang memiliki latar belakang budaya, sosial, dan etnis yang beragam. Memahami keragaman berarti mengakui nilai-nilai, keyakinan, dan praktik yang berbeda-beda, serta menghormati perbedaan tersebut. Dengan memahami keragaman, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang inklusif, menjunjung tinggi kesetaraan, dan mendorong kolaborasi yang harmonis di antara beragam kelompok.

Pemahaman terhadap keragaman juga membantu mengatasi diskriminasi dan prasangka, serta mempromosikan toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. Dengan mengakui dan memahami keragaman, masyarakat dapat menciptakan kesempatan yang adil bagi semua orang dan mengurangi kesenjangan yang mungkin timbul akibat ketidakadilan sosial.

Selain itu, pemahaman yang mendalam terhadap keragaman membantu mendorong terciptanya kebijakan publik yang inklusif

dan berkelanjutan, serta memperkuat kemampuan masyarakat untuk merespons perubahan global dengan lebih efektif. Dengan demikian, pemahaman yang baik terhadap keragaman dalam masyarakat dapat membawa manfaat yang besar dalam menciptakan sebuah masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan bertoleransi.

Diversitas dalam masyarakat sangat penting untuk diperkuat melalui pemberdayaan masyarakat. Diversitas mencakup perbedaan budaya, etnis, agama, dan latar belakang sosial, sehingga pemberdayaan masyarakat dapat membantu menghargai dan memanfaatkan keberagaman ini untuk kebaikan bersama. Melalui pemberdayaan, masyarakat dapat memberikan ruang dan kesempatan bagi semua individu dan kelompok untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Pemberdayaan masyarakat juga dapat memperkuat pengakuan hak asasi manusia bagi semua individu, tanpa memandang latar belakangnya. Dalam konteks keragaman, pemberdayaan mencakup memberikan akses yang adil dan kesempatan yang sama bagi semua orang, tanpa diskriminasi. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, pemberian akses terhadap sumber daya, dan dukungan untuk kemandirian ekonomi.

Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga mencakup membangun jaringan sosial yang inklusif, menyediakan platform bagi beragam suara untuk didengar, serta mempromosikan kerja sama lintas budaya dan lintas kelompok. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat dapat menjadi alat yang efektif untuk memperkuat keragaman dalam masyarakat dan menciptakan lingkungan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan adalah sebuah proses yang berkelanjutan. Sebenarnya, tidak ada titik jenuh untuk pemberdayaan. Stimulasi awal untuk pemberdayaan harus datang dari diri Kita sendiri. Sungguh, ini adalah kondisi intuitif untuk bertindak, yang dimiliki setiap orang, baik secara sadar maupun tidak. Ini adalah sifat yang melekat yang ada di dalam diri Kita juga. Sekarang, Kita mungkin berpikir mengapa harus diberdayakan?.

Setiap orang memiliki kemampuan untuk melakukan berbagai hal sedemikian rupa untuk mencapai tujuan mereka. Seseorang mungkin memiliki karakter bawaan untuk mengambil inisiasi dan bertindak berdasarkan ide mereka sendiri. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Namun, jika sebagian dari mereka masih belum berdaya, bukan berarti mereka enggan untuk memberdayakan diri mereka sendiri. Alasannya bisa berbeda dari satu orang ke orang lain. Banyak orang yang tidak berada dalam posisi untuk memberdayakan diri mereka sendiri. Dalam hal ini, sebagian besar membutuhkan rangsangan dari luar untuk mengubah impian mereka menjadi kenyataan. Dalam proses pemberdayaan, Kita akan diberi kesempatan untuk:

1. Memahami dasar-dasarnya;
2. Mengklarifikasi keraguan Kita;
3. Memperluas visi Kita;
4. Memperluas pemikiran Kita; dan
5. Meningkatkan kapasitas Kita.

Proses pemberdayaan memiliki konotasi yang sempit dan luas. Dengan memberdayakan diri sendiri, dalam arti sempit, Kita memberdayakan diri Kita sendiri. Dalam arti yang lebih luas, kita memberdayakan masyarakat dan menjadi produktif bagi masyarakat. Melalui partisipasi masyarakat, pada akhirnya kita berkontribusi pada pembangunan nasional.

A. Memahami Pemberdayaan

Istilah "pemberdayaan" berasal dari kata kerja "empower", yang muncul pada pertengahan abad ketujuh belas di Inggris dan didefinisikan sebagai otoritas formal atau kekuasaan yang diberikan oleh seorang tokoh yang lebih tinggi. Namun, pada abad kesembilan belas, kata ini didefinisikan ulang sebagai kondisi dan tindakan dalam melegitimasi otoritas untuk memberikan kekuasaan (Soler et al. 2014). Oleh karena itu, sejak abad kesembilan belas, terdapat hubungan yang erat antara pemberdayaan dan kekuasaan. Konfigurasi konsep pemberdayaan dalam masyarakat sipil muncul pada tahun 60-an dan beberapa orientasi terdeteksi selama penggunaannya sesuai dengan pendekatan wacana di bidang pedagogis, psikologis, sosiologis, studi ekonomi, dll.

Pemberdayaan adalah proses meningkatkan kapasitas individu atau kelompok untuk membuat pilihan mereka sendiri dan mendorong sedemikian rupa untuk mengubah pilihan-pilihan tersebut menjadi tindakan dan hasil yang jelas. Kita harus memahami bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses, yang melibatkan penggalan potensi manusia dan peningkatan kemampuan manusia untuk kepentingan individu dan masyarakat.

Persepsi tentang pemberdayaan berbeda-beda di setiap negara karena perbedaan waktu, budaya, dan gaya hidup masyarakat. Apakah Kita berpikir bahwa negara maju dan negara berkembang memiliki tantangan yang sama tentang pemberdayaan? Tidak. Tantangan tentang pemberdayaan bervariasi dari satu negara ke negara

lain berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan cara ini, hal ini berbeda antara India dan Amerika Serikat, Inggris, dll.

Menurut Rowlands (1997), pemahaman konsep pemberdayaan bergantung pada interpretasi kekuasaan sesuai dengan konsep personal, politik, dan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan mengandung pengertian psikologis tentang kontrol pribadi yang terkait dengan pengaruh sosial yang nyata, kekuatan politik, dan hak-hak hukum. Pemberdayaan merupakan sebuah institusi bertingkat yang berlaku untuk individu, organisasi dan lingkungan (Rappaport, 1987).

Oleh karena itu, pemberdayaan juga didefinisikan sebagai proses yang digunakan oleh orang, organisasi, dan komunitas untuk mendapatkan kendali atas urusan mereka. Ada beberapa perbedaan signifikan antara pemberdayaan individu dan komunitas, meskipun dalam praktiknya keduanya saling berkaitan erat karena sebagian besar program yang ada berfungsi secara bergantian. Menurut Maton (2008), sebuah pemberdayaan pada umumnya bertujuan untuk mengurangi marginalisasi komunitas dan individu, dan meningkatkan hak-hak mereka. Skala sosial ini diperlukan dan, secara konkret memastikan bahwa masyarakat bertanggung jawab atas kehidupan mereka. Soler et. al. (2014) menyatakan bahwa istilah "pemberdayaan" dikaitkan dengan dampak yang diciptakan di lembaga-lembaga swasta dalam masyarakat.

"Pemberdayaan" secara harfiah berarti melengkapi kemampuan/bekal Kita dengan kesempatan, yaitu memungkinkan dan meningkatkan kemampuan yang sudah ada pada diri Kita namun belum disadari. Melalui proses pemberdayaan, Kita mendapatkan pengetahuan, mengembangkan keterampilan dan sikap untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang terus berubah. Di dunia nyata, perubahan adalah hal yang pasti, yang tidak dapat dihindari. Pada saat ini, yang dibutuhkan adalah mengubah diri Kita untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang dinamis dan menjadikan Kita kuat dan energik melalui proses pemberdayaan. Lebih dari itu, dengan memberdayakan diri sendiri, Kita membentuk bakat dan upaya Kita dengan cara yang

konstruktif untuk mencapai tujuan Kita. Pada akhirnya, Kita akan mendapatkan kekuatan dan otoritas dalam masyarakat dengan membangun kepercayaan diri dan memperoleh kemampuan tertentu.

Proses pemberdayaan hampir sama untuk semua sektor, baik pertanian, industri, maupun jasa. Dalam pemasaran ikan, pemberdayaan terjadi dengan adanya kesempatan yang cukup, dukungan dari lingkungan dan kemampuan untuk mengakses informasi dan pengetahuan teknis yang membuat Kita merasa nyaman.

Pemberdayaan telah didefinisikan dan diukur dengan berbagai cara. Selain banyak politisi dan pihak-pihak lain yang menggunakannya tanpa mendefinisikannya sama sekali, hal ini mungkin merupakan masalah terbesar dalam konsep ini. Pemberdayaan telah didefinisikan sebagai proses berkelanjutan yang disengaja dan berpusat pada komunitas lokal, yang melibatkan rasa saling menghormati, refleksi kritis, kepedulian, dan partisipasi kelompok, yang melaluinya orang-orang yang tidak memiliki bagian yang sama dari sumber daya yang berharga mendapatkan akses dan kontrol yang lebih besar terhadap sumber daya tersebut; atau suatu proses di mana orang mendapatkan kontrol atas kehidupan mereka, partisipasi demokratis dalam kehidupan masyarakat mereka, dan pemahaman kritis terhadap lingkungan mereka (Perkins & Zimmerman, 1995).

Elemen-elemen umum dalam definisi-definisi tersebut adalah bahwa pemberdayaan (a) merupakan sebuah proses, (b) terjadi di masyarakat (organisasi), (c) melibatkan partisipasi aktif, refleksi kritis, kesadaran, dan pemahaman (yaitu, peningkatan kesadaran tentang pengaruh struktur dan kepentingan politik dan ekonomi yang berkuasa), dan (d) melibatkan akses dan kontrol terhadap keputusan-keputusan dan sumber daya yang penting.

Menurut Gutierrez (1995), pemberdayaan adalah proses meningkatkan kekuatan personal, interpersonal, atau politik, bagi individu, keluarga, dan masyarakat untuk meningkatkan status keuangan dan ekonomi mereka. Pekerjaan sosial, psikologi komunitas, dan sektor kesehatan adalah beberapa cara yang digunakan untuk mengatasi

masalah-masalah populasi yang tidak berdaya dan untuk memediasi peran yang dimainkan dengan menciptakan dan melanggengkan masalah-masalah sosial (Swift & Levin, 1987; Rappaport, 1987); Gutierrez, 1990). Pemberdayaan telah digambarkan sebagai cara baru untuk mengembangkan program, kebijakan dan layanan. Meskipun berbagai studi literatur tentang pekerjaan sosial menggambarkan pemberdayaan sebagai metode yang digunakan untuk menggabungkan berbagai tingkat intervensi, beberapa berfokus pada pemberdayaan individu atau interpersonal (Parsons, 1991; Pinderhughes, 1990; Simon, 1990; Solomon, 1976; Staples, 1990).

Pemberdayaan juga diartikan sebagai pendelegasian kekuasaan atau tindakan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Menurut Simon (1990), pemberdayaan adalah kegiatan refleksi dan proses yang diprakarsai dan dipelihara oleh subjek yang mencari kekuasaan atau penentuan nasib sendiri. Sementara itu, proses lain digunakan untuk menyediakan iklim, hubungan, sumber daya dan perangkat prosedural, Pemberdayaan cenderung menyediakan, iklim, hubungan, sumber daya, dan perangkat prosedural yang diperlukan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang tinggal di suatu komunitas karena kemampuannya untuk berinteraksi dengan lingkungan sosial dan fisik. Oleh karena itu, pemberdayaan merupakan upaya yang digunakan untuk menegakkan suatu proses, kegiatan, dan makna lain yang tidak sesuai dengan pelimpahan kekuasaan atau kekuatan dalam masyarakat. Hal ini merupakan bagian dari proses perkembangan menuju pembelajaran budaya barat. Untuk memahami konsep pemberdayaan secara tepat, maka perlu diketahui latar belakang kontekstual yang terkait. Lebih lanjut, menurut Pranarka dan Vidhyandika (1996), konsep pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Yang pertama menekankan pada proses mencoba mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan, dan kemampuan kepada masyarakat. Proses ini dikenal sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. Sementara itu, kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi,

mendorong, dan memotivasi individu agar memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan hidupnya melalui suatu proses.

Pemberdayaan adalah sebuah proses untuk meningkatkan kapasitas individu atau kelompok melalui perluasan aset dan kemampuan. Pemberdayaan adalah "perluasan kemampuan orang untuk membuat pilihan-pilihan hidup yang strategis dalam konteks di mana kemampuan ini sebelumnya tidak dimiliki oleh mereka (Kabeer, 2001)." Individu yang diberdayakan akan memiliki kebebasan untuk memilih kemampuan-kemampuan ini dalam upaya untuk mempengaruhi jalan hidup mereka dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Pemberdayaan mencakup semua masalah yang berkaitan dengan ekonomi, sosial dan budaya dalam suatu masyarakat, dan bervariasi dalam hal waktu, tempat dan afiliasi sosial.

Kabeer (1999), mengkonseptualisasikan pemberdayaan berdasarkan model yang terdiri dari tiga dimensi yang saling terkait:

1. Akses terhadap sumber daya material, manusia, dan sosial (prakondisi untuk membuat pilihan strategis);
2. Agensi, yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk menentukan tujuan dan bertindak berdasarkan tujuan tersebut (proses aktual dalam menjalankan pilihan); dan
3. Pencapaian, seperti peningkatan kesejahteraan (hasil dari membuat pilihan).

Konseptualisasi pemberdayaan ini penting karena mendefinisikan pemberdayaan sebagai proses (1), pilihan (2) dan hasil (3), yang memunculkan pertanyaan apakah proses yang sama menghasilkan hasil yang sama dalam konteks yang berbeda.

Pemberdayaan adalah kekuatan dalam diri untuk mengartikulasikan, kekuatan untuk mengembangkan keterampilan, kekuatan yang memungkinkan tindakan kolektif dan kekuatan untuk mengubah ketidaksetaraan yang mendasarinya. Ini adalah kekuatan sosial, politik, ekonomi dan spiritual seorang individu, kepercayaan diri

untuk mengembangkan kemampuannya dan kesadaran bahwa kekuasaan dapat berubah.

Pemberdayaan didefinisikan sebagai memungkinkan individu atau kelompok untuk mendapatkan kendali atas kehidupan mereka dan bekerja secara kolektif. Menurut Laverack (2006), pemberdayaan diperoleh oleh mereka yang mengupayakannya dan tidak dapat diberikan oleh orang lain. Pemberdayaan masyarakat, yang merupakan komponen penting dalam pengembangan masyarakat (Laverack, 2006), melibatkan individu-individu yang memiliki kepentingan yang sama untuk bersama-sama membangun kekuatan kolektif mereka. Pemberdayaan masyarakat dapat mengatasi tantangan struktural, sosial, dan ekonomi, dengan para praktisi dan pelaku lainnya saling membantu untuk menghasilkan kekuatan melalui pengembangan kapasitas. Pengembangan kapasitas masyarakat membutuhkan keterlibatan warga yang memiliki aspirasi kolektif untuk mengambil keputusan dan mengimplementasikan program. Masyarakat yang aktif, berdaya, berkelanjutan, dan mampu dapat mengubah kehidupan mereka sendiri dan memperbaiki lingkungan tempat tinggal mereka (Zubaedi, 2013). Upaya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat sering kali mengikuti pendekatan pembangunan dari bawah ke atas yang memberdayakan masyarakat lokal, seperti pendekatan pariwisata berbasis masyarakat.

Pemberdayaan memperkuat kemampuan bawaan dengan cara memperoleh pengetahuan, kekuasaan dan pengalaman (Hashemi Schuler dan Riley, 1996). Pemberdayaan adalah proses memungkinkan atau memberi wewenang kepada individu untuk berpikir, mengambil tindakan, dan mengendalikan pekerjaan dengan cara yang otonom. Ini adalah proses di mana seseorang dapat memperoleh kendali atas nasibnya dan keadaan kehidupannya. Zimmerman (1995) membedakan antara proses dan hasil pemberdayaan. Proses pemberdayaan melibatkan individu yang belajar untuk mengendalikan nasib mereka, memperoleh akses, dan mendapatkan kendali atas kehidupan mereka. Para profesional memainkan peran kunci dalam

memberdayakan orang lain dengan melibatkan warga dalam pengembangan, implementasi, dan evaluasi proyek; mengembangkan identitas lingkungan dengan menjadi bagian dari masyarakat; memperlakukan anggota masyarakat sebagai mitra yang setara; dan menciptakan peluang bagi anggota masyarakat untuk mengembangkan keterampilan mereka dan mengurangi ketergantungan mereka pada para profesional. Hasil pemberdayaan mengacu pada efek dari intervensi dan investigasi terhadap proses pemberdayaan dan mekanisme terkait. Sederhananya, hasil adalah konsekuensi dari proses pemberdayaan.

Untuk menilai hasil pemberdayaan, konsep pemberdayaan dan tahapan terkait yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat harus didefinisikan. Tahapan-tahapan ini yang meliputi perencanaan, implementasi, dan evaluasi-memandu para praktisi pemberdayaan masyarakat selama proses pemberdayaan. Laverack (2006) telah mengidentifikasi sembilan langkah utama dalam pemberdayaan masyarakat.

1. Meningkatkan partisipasi,
2. Mengembangkan kepemimpinan lokal
3. Meningkatkan kapasitas penilaian masalah
4. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis
5. Membangun struktur organisasi yang memberdayakan
6. Memobilisasi sumber daya
7. Memperkuat hubungan dengan organisasi lain
8. Membangun hubungan yang setara dengan agen-agen eksternal
9. Meningkatkan kontrol terhadap manajemen program.

Pemberdayaan mengacu pada keadaan di mana orang merasa bahwa mereka dapat mengendalikan nasib mereka dan dapat mengambil tindakan untuk mencapai tujuan mereka (Hassanpoor, et. al., 2012) dan pada proses yang memungkinkan mereka untuk mencapai keadaan tersebut. Sebagian besar model teoritis pemberdayaan didasarkan pada premis bahwa semua orang memiliki

kapasitas untuk menghadapi tantangan dalam hidup mereka secara konstruktif (Freire, 1985; Rappaport, 1987; Hassanpoor, et. al., 2012; Adams, 2003), namun berbagai faktor eksternal dan/atau internal dapat menghalangi kapasitas tersebut untuk terpenuhi.

Pada awalnya, literatur profesional tentang pemberdayaan berfokus pada peningkatan kebijakan sosial dan layanan sosial, terutama bagi mereka yang kurang beruntung secara sosial (Lee, 2001; Rappaport, 1985; Shroff, 2010). Seiring berjalannya waktu, konsep pemberdayaan memiliki makna tambahan (Hassanpoor, et. al., 2012; Bartunek & Spreitzer, 2006; Roy, 2010), terutama untuk mencapai kondisi eksistensial yang diinginkan oleh individu, kelompok, atau masyarakat. Selain itu, istilah ini juga telah digunakan untuk menggambarkan berbagai metode dan proses intervensi ("intervensi yang memberdayakan") yang harus dilaksanakan untuk mencapai kondisi akhir yang diinginkan. Beberapa peneliti melihat pemberdayaan sebagai orientasi tertentu yang mencerminkan konsep dan proses (Miley, et. al., 2001).

Tujuan dari intervensi pemberdayaan adalah untuk mewujudkan dan mendukung proses di mana seseorang atau kelompok bergerak dari keadaan tidak berdaya atau pasif menjadi rasa kontrol yang lebih besar atas kehidupan mereka dan lebih mampu membuat keputusan, untuk secara aktif memengaruhi jalannya kehidupan mereka, dan untuk mencapai tujuan mereka (Adams, 2003; Shroff, 2010; Bogler & Somech, 2004; Lee-Rife, 2010; Myers, 1990; White, 2010; Zimmerman, et. al., 1992). Melalui intervensi berbasis pemberdayaan, orang dapat belajar untuk mengubah emosi mereka dan mengelola situasi sehingga dapat mempertahankan rasa kontrol (Hassanpoor, et. al., 2012; Murphy-Graham, 2010) dan mengembangkan keterampilan interpersonal, seperti kemampuan untuk bernegosiasi, mengekspresikan pikiran dan perasaan mereka dengan lebih jelas, dan mengelola kemarahan mereka dengan lebih baik (Roy, 2010; Murphy-Graham, 2010; Benjamin & Sullivan, 1999).

Proses pemberdayaan dapat mencakup perubahan pada tingkat intrapersonal, interpersonal, atau komunitas (Whiteside, 2009; Roy, 2010; Lee-Rife, 2010; Murphy-Graham, 2010). Pada tingkat intrapersonal, pemberdayaan melibatkan perolehan pengetahuan, keterampilan, dan alat untuk mengatasi masalah (misalnya, tindakan independen, negosiasi, kerja sama) yang diperlukan untuk pertumbuhan pribadi dan tindakan di arena sosial seseorang (Parsons, 1989; Roy, 2010; Murphy-Graham, 2010). Pada tingkat individu, hal ini meningkatkan harga diri seseorang (Janssens, 2010; Zoabi, 2012), kemampuan mengambil keputusan, dan rasa mampu untuk bertindak dan berprestasi (Hassanpoor, et. al., 2012; Bogler & Somech, 2004), yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam kemampuan mereka untuk mengelola kegagalan mereka dan memanfaatkan kekuatan batin mereka untuk melaksanakan tugas-tugas mereka (Blanchard, et. al., 2001). Manfaat lain yang diharapkan dari pemberdayaan adalah peningkatan motivasi (Hassanpoor, et. al., 2012; Liden, et. al., 2000) dan peningkatan efikasi diri (Bandura, et. al., 1999; Hemric, et. al., 2010). Pada tingkat interpersonal, pemberdayaan meningkatkan pemahaman seseorang tentang perlunya membangun interaksi dengan orang lain (Shroff, 2010; Liden, et. al., 2000) dan memerlukan pengembangan berbagai keterampilan interpersonal dan sosial (Shroff, 2010; Murphy-Graham, 2010; Janssens, 2010; Parsons, 1998), termasuk kerja sama dengan orang lain (Gutierrez, 1990; Janssens, 2010; Kieffer, 2014; Riessman, 1997) dan kemampuan untuk berkontribusi pada pekerjaan kelompok, organisasi, dan entitas sosial lainnya (Whiteside, 2009).

Di tingkat masyarakat, pemberdayaan berarti, antara lain, meningkatkan kesadaran seseorang akan perbedaan kekuasaan, pengaruh, dan/atau ketersediaan sumber daya yang ada di lingkungannya atau lingkungan masyarakatnya, dan mengembangkan pemahaman akan proses struktural atau faktor sistemik yang menciptakan hambatan yang harus dihadapi oleh individu atau kelompok (Whiteside, 2009; Murphy-Graham, 2010; Kane, 1987).

Hal ini juga berarti meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan, kegiatan swadaya dan gotong royong, serta kegiatan sosial dan kemasyarakatan, serta menjadi bagian dari kelompok-kelompok kegiatan di berbagai tingkatan (Whiteside, 2009).

Atas dasar pembahasan di atas, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa pemberdayaan adalah:

1. Memungkinkan setiap individu untuk membuat pilihan bebas dan mencapai seluruh kapasitas mereka.
2. Sebuah proses dan hasil. Proses di mana orang memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang memungkinkan mereka untuk pertama-tama menyadari perlunya perubahan, dan kemudian mengubah sesuatu dalam hidup mereka. Ini adalah proses membangkitkan potensi-potensi tertentu yang memungkinkan orang untuk mengambil tindakan, menyuarakan dan merumuskan kebutuhan, berbicara, mengadvokasi diri mereka sendiri, atau orang lain. Hasilnya mungkin hanya berarti mampu mengenali dan mengetahui kapan dan bagaimana membela diri sendiri atau orang lain.
3. Pemberdayaan berarti bahwa mereka yang diberdayakan memiliki kemampuan untuk mengendalikan hidup dan nasib mereka dengan bantuan pemerintah dan masyarakat sipil. Untuk menjadi berdaya, baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki hak dan keistimewaan yang sama dan kesempatan yang sama, terutama dalam pekerjaan dan pekerjaan yang layak.
4. Pemberdayaan berarti bahwa orang, individu memiliki suara dalam mengambil keputusan untuk diri mereka sendiri dan untuk masyarakat.
5. Mendukung orang sedemikian rupa sehingga memungkinkan mereka untuk mencapai tujuan yang akan meningkatkan kehidupan bagi semua.

6. Pemberdayaan adalah tentang tiga dimensi:
 - a. Bagaimana individu atau komunitas memandang dan menilai kapasitas mereka untuk berperan
 - b. Keinginan untuk memainkan peran yang berarti dalam masyarakat dan
 - c. Ruang dan peluang yang diciptakan dan disediakan untuk kapasitas tersebut.

Langkah pertama adalah membuat orang menyadari potensi mereka, pengetahuan dan keahlian khusus yang ada, dan memperkuat kapasitas mereka di berbagai bidang agar individu atau komunitas dapat memainkan peran yang berarti dalam pengembangan diri mereka sendiri atau komunitas/masyarakat mereka dan membuat pilihan (hidup). Ini adalah tentang perasaan subjektif (memperdayai diri sendiri) serta penemuan/realisasi kapasitas diri sendiri (berdasarkan gagasan bahwa setiap orang memiliki sesuatu yang berarti untuk disumbangkan). Penemuan kapasitas dan relevansi diri bagi orang lain dapat memicu keinginan untuk secara aktif membentuk lingkungannya. Orang merasa diberdayakan, karena mereka menyadari bahwa mereka dapat membuat perbedaan, yang pada gilirannya membuat mereka ingin membuat perbedaan. Perasaan tidak berdaya sering kali menyebabkan sikap pasif. Selain itu, pemberdayaan tentu saja terkait dengan kemungkinan obyektif dan ruang yang ada untuk berperan dan didengar.

7. Pemberdayaan adalah memberikan kepada orang atau kelompok kekuatan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk membantu mereka mengatasi hambatan mereka.
8. Memberdayakan berarti orang yang terintegrasi secara sosial dan memiliki kekuatan ekonomi, sosial dan politik terlepas dari situasi kehidupan, kondisi ekonomi dan ketidakmampuan fisik mereka.

9. Strategi dan tindakan yang meningkatkan otonomi dan penentuan nasib sendiri bagi masyarakat dan/atau komunitas dalam memperbaiki kondisi kehidupan mereka saat ini dan di masa depan, serta mengubah struktur/sistem politik, sosial-ekonomi yang dominan dan menindas."
10. Kekuatan untuk mencapai kesetaraan politik, sosial, dan ekonomi..."
11. Pemberdayaan adalah proses meningkatkan kapasitas individu atau kelompok untuk membuat pilihan dan mengubah pilihan-pilihan tersebut menjadi tindakan dan hasil yang diinginkan. Hal ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti peningkatan kapasitas (pelatihan) serta penyediaan sumber daya dalam bentuk materi dan atau dukungan finansial. Bisa juga berupa pemberian atau pendelegasian kekuasaan atau wewenang kepada individu atau kelompok yang memberikan mereka kemampuan/izin atau memungkinkan mereka untuk memulai atau melaksanakan berbagai tujuan.
12. Pemberdayaan adalah memberikan kepercayaan diri dan pendidikan kepada seseorang untuk menjadi yang terbaik yang mereka bisa.
13. Keseimbangan antara kebebasan dan kesetaraan (yang satu bisa meniadakan yang lain jika tidak seimbang) dan kebebasan berekspresi dan berpartisipasi.
14. Penghormatan terhadap martabat manusia dan semua hak asasi manusia; partisipasi yang berarti dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan dan program yang mempengaruhi kehidupan kita.
15. Pemberdayaan dapat dipahami dalam dua dimensi yang berbeda:
 - a) Untuk mengembangkan kompetensi dan kapasitas individu: mendidik dan memenuhi syarat individu, kelompok sasaran khusus seperti anak-anak, perempuan, orang tua dan/atau keluarga untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka sehingga mereka dapat menghasilkan pendapatan

- dan meningkatkan kualitas hidup mereka sehari-hari dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan masyarakat.
- b) Sarana untuk mengembangkan/memungkinkan prakondisi bagi individu: persyaratan dasar seperti perdamaian, kesetaraan gender, hak asasi manusia, atau ketersediaan pangan, akses terhadap tanah dan kredit mikro atau sistem pendidikan yang memadai diperlukan untuk memungkinkan individu, kelompok sasaran khusus seperti perempuan, orang lanjut usia dan/atau keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
16. Memunculkan gambaran tentang orang-orang yang mendapatkan kendali yang lebih besar atas kehidupan mereka. Ini adalah proses yang membantu menyebarkan kekuasaan di tingkat individu, kelompok dan masyarakat. Proses pemberdayaan membantu orang untuk mengembangkan keterampilan dan kapasitas, membangun kepercayaan diri dan membuat keputusan yang lebih baik sehingga meningkatkan peluang hidup mereka dan generasi berikutnya.
 17. Menjadi berdaya berarti mengetahui dan percaya bahwa Anda memiliki kendali penuh atas nasib Anda sendiri. Pemberdayaan menyiratkan kebebasan untuk memilih tanpa rasa takut.
 18. Pemberdayaan berarti memperkaya masyarakat dengan keterampilan dasar mata pencaharian melalui pendidikan, memberikan pelatihan berbasis keterampilan untuk mendapatkan mata pencaharian, memberdayakan pengetahuan dasar tentang kesehatan, kebersihan, dan pendidikan kepada masyarakat yang kurang mampu yang berhak untuk diberdayakan dengan pengetahuan penting ini untuk menjalani kehidupan yang lebih baik untuk dunia global yang lebih baik di masa depan yang lebih baik di mana semua orang setara.
 19. Istilah Pemberdayaan berarti bahwa seorang individu atau masyarakat memiliki kekuatan dan mampu menggunakan kekuatan tersebut dengan cara yang kreatif yang memungkinkan

kehidupan yang berkualitas untuk diri sendiri, masyarakat dan seluruh dunia termasuk Planet Bumi.

20. Pemberdayaan adalah memperoleh kemandirian ekonomi dan memiliki kendali yang lebih luas atas nasib sendiri. Memiliki suara yang benar untuk masa depan Anda dan keluarga serta komunitas Anda. Mendapatkan harapan.
21. Pemberdayaan adalah perluasan kebebasan untuk memilih dan bertindak. Ini berarti meningkatkan otoritas dan kontrol seseorang atas sumber daya dan keputusan yang mempengaruhi kehidupannya. Ketika orang melakukan pilihan yang nyata, mereka mendapatkan kontrol yang lebih besar atas kehidupan mereka. Pilihan masyarakat miskin sangat terbatas, baik karena kurangnya aset maupun karena ketidakberdayaan mereka untuk menegosiasikan persyaratan yang lebih baik untuk diri mereka sendiri dengan berbagai lembaga, baik formal maupun informal. Karena ketidakberdayaan melekat pada sifat hubungan kelembagaan, maka dalam konteks penanggulangan kemiskinan, definisi kelembagaan tentang pemberdayaan adalah tepat.

Istilah pemberdayaan memiliki arti yang berbeda dalam konteks sosial budaya dan politik yang berbeda, dan tidak dapat diterjemahkan dengan mudah ke dalam semua bahasa. Eksplorasi istilah-istilah lokal yang terkait dengan Pemberdayaan di seluruh dunia selalu menghasilkan diskusi yang hidup. Istilah-istilah tersebut antara lain kekuatan diri, kontrol, kekuatan diri, kemandirian, pilihan sendiri, hidup bermartabat sesuai dengan nilai-nilai yang dianut, mampu memperjuangkan hak-hak diri, kemandirian, pengambilan keputusan sendiri, bebas, kebangkitan, dan kapabilitas-untuk menyebutkan beberapa saja. Definisi-definisi ini tertanam dalam sistem nilai dan kepercayaan lokal.

22. Pemberdayaan adalah memanfaatkan keterampilan, pengetahuan, dan kepercayaan diri. Anda harus membuat pilihan untuk memaksimalkan peluang yang membantu Anda mewujudkan

potensi Anda. Tidak ada yang bisa memberdayakan orang lain, itu adalah sesuatu yang harus Anda lakukan untuk diri Anda sendiri, tetapi orang lain dapat membantu memfasilitasi prosesnya atau mendukung Anda untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan kepercayaan diri yang Anda perlukan untuk diberdayakan. Berdaya adalah kemampuan untuk memimpikan mimpi dan berjuang, mengatasi segala rintangan, untuk mewujudkan mimpi-mimpi tersebut.

23. Pemberdayaan berarti bahwa saya telah diberi alat, pendidikan, dan dukungan untuk mencapai tujuan saya. Ketika saya diberdayakan, saya dapat mencapai hal-hal ini sendiri tanpa dukungan dari luar, sehingga saya dapat merasa senang dengan pencapaian saya."
24. Pemberdayaan berarti membantu orang lain di masyarakat untuk mengadopsi keterampilan sederhana namun ampuh yang membantu mereka mengubah kualitas hidup mereka, juga membuat mereka bertanggung jawab dan memiliki peran aktif dalam masyarakat secara berkelanjutan. Semua ini akan membangun dunia yang lebih baik dan membuat perbedaan yang positif.
25. Pemberdayaan berarti memungkinkan seseorang untuk menjadi semua dan semua yang dia inginkan. Ini berarti membantu seseorang mengembangkan harga diri, kepercayaan diri, kemandirian, dan kemandirian sedemikian rupa sehingga dapat hidup dengan penuh makna dan damai.
26. Mendukung semua orang dalam martabat dasar manusia melalui akses setiap orang untuk berpartisipasi, mengambil keputusan, pendidikan, dan dapat berbagi dalam manfaat masyarakat.
27. Pemberdayaan berarti membantu orang untuk berpartisipasi penuh dalam produksi, budaya, ekonomi, dan tata kelola masyarakat, negara, dan dunia tempat mereka tinggal.
28. Membangun kapasitas orang lain untuk menemukan suara mereka dan mengambil alih kepemilikan atas diri mereka sendiri

- dan masa depan mereka dengan memberikan keterampilan dan pendidikan yang mereka butuhkan untuk melakukan hal tersebut.
29. Pemberdayaan adalah proses memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memberikan masukan dan mengambil keputusan. Ini berarti seorang pemimpin tidak boleh memberi tahu orang lain apa yang harus dilakukan, tetapi seorang pemimpin harus mencari masukan dari berbagai pemangku kepentingan untuk mengembangkan konsensus dan menghargai proses tersebut sebagai sesuatu yang positif dan berguna. Memberdayakan orang lain berarti seorang pemimpin melepaskan sebagian kekuasaannya, tetapi seorang pemimpin menikmati kekuasaan yang lebih besar dengan mendapatkan rasa hormat dan penghargaan dari orang lain.
 30. Pemberdayaan berarti kemampuan untuk mencapai apa yang diperlukan, sesuai dengan keadaan saya dalam kehidupan di masyarakat demokratis yang dibentuk secara konstitusional, untuk hidup secara sosial dan produktif dalam masyarakat tanpa rasa takut dan didorong oleh masyarakat untuk bekerja dan mendorong kebaikan bersama semua warganya.
 31. Pemberdayaan dapat didefinisikan dengan berbagai cara, pemberdayaan berarti motivasi; peningkatan pengetahuan dan pendidikan; pengakuan dan penerapan hak-hak dasar; dan juga berarti dorongan psikologis dan fisik.
 32. Pemberdayaan berarti orang-orang yang menemukan cara untuk mencapai potensi mereka. Ketika mereka memahami hak dan kewajiban mereka dan mulai bertindak sesuai dengan cara yang dapat mereka capai. Ini adalah pemahaman dan tindakan.
 33. Pemberdayaan berarti seseorang dapat membuat pilihan dan keputusan untuk dirinya sendiri. Memiliki kekuatan untuk memutuskan apakah akan menerima status quo atau mampu menciptakan perubahan. Pendidikan adalah kunci pemberdayaan. Komunikasi adalah kunci lainnya.

34. Istilah "pemberdayaan" adalah istilah psiko-sosial yang berarti emansipasi dan pembebasan manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Pemberdayaan bertujuan untuk membawa kelompok masyarakat yang lebih lemah, seperti kaum minoritas dan perempuan, pada posisi yang setara dengan yang lain, sehingga mereka dapat menggunakan pilihan-pilihan mereka dalam hidup sebebaskan mayoritas penduduk. Pemberdayaan sangat relevan dalam pengaturan demokratis untuk menegakkan Hak-hak Dasar kesetaraan. Kelompok-kelompok masyarakat yang lebih lemah dan rentan dapat diberdayakan melalui perumusan kebijakan dan kemudian penegakannya melalui pembentukan undang-undang dan aturan-aturan Konstitusi.
35. Pemberdayaan berarti memberikan masyarakat alat dan pengetahuan yang mereka butuhkan untuk dapat bertindak sendiri dalam mengambil keputusan yang tepat mengenai apa yang sedang terjadi dalam hidup mereka. Orang-orang yang tidak mengetahui hak-hak mereka sering kali diintimidasi untuk menyerahkan sesuatu yang seharusnya mereka pertahankan (misalnya, kepemilikan apartemen sampai pengadilan memerintahkan mereka untuk pergi). Jika seseorang memutuskan untuk pergi setelah mengetahui apa saja hak-haknya, karena itu adalah pilihan yang tepat baginya berdasarkan semua keadaan dalam situasi kehidupannya, setidaknya hal tersebut merupakan keputusan yang diketahui dan dibuat bukan karena rasa takut, tetapi karena pilihan.
36. Orang-orang menemukan suara mereka sendiri, mengenali masalah yang ada dan mencoba memberikan pengaruh untuk mengubah situasi tertentu. Untuk menemukan suara sendiri, dibutuhkan pendidikan, baik formal maupun informal, dan/atau pendampingan.
37. Pemberdayaan adalah proses meningkatkan kapasitas individu atau kelompok untuk membuat pilihan dan mengubah pilihan-pilihan tersebut menjadi tindakan dan hasil yang diinginkan.

Bank Dunia selanjutnya mendefinisikan kapasitas individu dan kelompok sebagai aset. Pemberdayaan lebih dari sekadar aset; pemberdayaan adalah fungsi dari sebuah sistem yang menghargai semua pihak sebagai pengambil keputusan yang cakap.

38. Pemberdayaan berarti memungkinkan individu dan kelompok untuk mencapai potensi tertinggi dengan menghilangkan hambatan dan meningkatkan aset. Aset mencakup pengetahuan umum dan khusus, keterampilan dan praktik yang dapat diterapkan di berbagai situasi yang menantang. Sebagai contoh, menyediakan akses yang sama terhadap pendidikan publik untuk semua pelajar diperlukan untuk membangun tenaga kerja yang kompeten. Contoh kedua adalah melatih semua orang untuk menjadi advokat mandiri yang efektif, yang mengakses dan menerapkan informasi kesehatan dan mendapatkan perawatan klinis untuk meningkatkan kesehatan dan mengurangi penyakit. Individu tidak boleh mengalami diskriminasi berdasarkan usia, jenis kelamin, pendapatan, status kesehatan, kemampuan fisik atau mental.
39. Pemberdayaan bermakna:
 - a) Memungkinkan masyarakat untuk memiliki kendali lebih besar atas nasib mereka dengan dapat memutuskan apa yang baik dan sesuai untuk mereka dan kebutuhan mereka, sejauh mana solusi yang dibawa oleh mitra eksternal relevan dengan kebutuhan, aspirasi, dan nilai-nilai mereka.
 - b) Memungkinkan kelompok-kelompok yang paling rentan untuk memiliki akses terhadap layanan dasar, memiliki kesempatan yang sama, merasa dihargai dan dilibatkan, serta dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.
 - c) Memberi masyarakat suara dan kapasitas untuk mempengaruhi kebijakan.
 - d) Memampukan manusia untuk mencapai potensinya

- e) Menghilangkan hambatan yang menghalangi mereka untuk menjadi yang terbaik
 - f) Memaksimalkan apa yang dapat mereka lakukan untuk kepentingan diri sendiri dan masyarakat."
40. Istilah "Pemberdayaan" dianggap sebagai kondisi pribadi yang memungkinkan seseorang untuk mengambil bagian secara aktif dalam setiap aspek kehidupannya di masyarakat. Hal ini mengacu pada pemberian kemungkinan kepada anggota masyarakat, dalam hal kemampuan dan pengetahuan pribadi, untuk memiliki pendapat tentang lebih banyak hal, baik itu sipil maupun politik, dan untuk dapat mendukung pendapat tersebut di tempat yang tepat melalui cara terbaik yang dapat diberikan oleh pihak berwenang. Memberdayakan masyarakat berarti membiarkan mereka memiliki tanggung jawab penuh atas masa depan mereka, yang dapat dicapai melalui kemungkinan menggunakan semua cara yang berharga. Selain itu, memberdayakan orang berarti memberi mereka pengetahuan dan keterampilan, agar mereka memiliki kesempatan untuk bercita-cita dan benar-benar memiliki kehidupan yang lebih baik, baik di tempat kerja maupun di lingkungan pribadi.
41. Pemberdayaan berarti bahwa seseorang dapat memetakan jalan mereka sendiri, tidak peduli di mana mereka tinggal, seperti apa penampilan mereka, atau bagaimana otak mereka terhubung [misalnya Asperger] dan sebagainya. Ini berarti bahwa ada peluang bagi setiap orang untuk mengetahui bagaimana mereka cocok dan berada di dunia, untuk mengetahui di mana mereka bersinar paling baik, dan untuk berkontribusi kepada dunia dan mencari nafkah. Ini berarti bahwa kita memperlakukan satu sama lain dengan hormat, kita saling mengajar, kita fokus pada kualitas terbaik yang dimiliki orang lain. Itu berarti kita bisa bersekolah dan tidak diintimidasi atau diremehkan, bekerja dan tidak dipermalukan untuk setiap kesalahan, dan dihormati karena bakat kita, tanpa harus menjadi sempurna.

42. Pemberdayaan berarti memberikan orang-orang yang terpinggirkan dan bahkan tidak memiliki hak untuk bersuara, bukan hanya suara, tetapi juga sarana untuk menentukan perkembangan mereka sendiri. Memampukan orang lain untuk memenuhi potensi mereka. Istilah ini dapat diterapkan pada upaya individu untuk bergabung dengan orang lain untuk memperjuangkan keadilan sosial yang lebih besar bagi suatu kelompok atau individu. Istilah ini dapat diterapkan pada individu atau organisasi yang bekerja dengan mereka yang "tidak berdaya" di daerah atau negara mereka sendiri untuk memungkinkan mereka mencapai potensi mereka secara hukum dan sosial. Hal ini melibatkan pendampingan bersama masyarakat dan membantu upaya mereka dengan bimbingan dan keahlian. Ini tidak berarti mengendalikan prosesnya.
43. Ada orang yang menginginkan dan membutuhkan kekuatan untuk mencapai tujuan ... kekuatan untuk BEBAS mengejar tujuan-tujuan dalam hidup mereka ... pemberdayaan adalah pengambilan langkah-langkah yang akan membantu orang miskin, orang yang membutuhkan, imigran, untuk mencapai tujuan-tujuan mereka. Untuk bebas mengejar tujuan-tujuan tersebut. "Memberdayakan" seseorang berarti mengambil langkah-langkah untuk membantu "yang lain" agar bebas. Orang-orang yang kita coba "berdayakan" sudah memiliki kekuatan untuk mencapai dan bebas. Pertanyaan yang sebenarnya adalah ini. Bagaimana kita membantu orang lain untuk menyadari bahwa mereka sudah berdaya?
44. Kemampuan untuk berdiri dan memperjuangkan apa yang menjadi milik Anda. Kemampuan untuk membuat keputusan sendiri. Kemampuan untuk mengatakan Ya atau Tidak. Kemampuan untuk menuntut layanan dari Pemerintah. Kemampuan untuk berkontribusi secara bermakna bagi komunitas Anda. Untuk memegang kendali atas masalah atau tantangan yang mempengaruhi Anda. Tidak bergantung pada orang lain; memiliki

kekuatan diri dan kekuatan diri; menjalani kehidupan yang bermartabat."

45. Menanamkan kesadaran kepada seseorang bahwa mereka memiliki kemampuan untuk melakukan tugas-tugas, membuat perbedaan, menjadi contoh bagi orang lain, menyumbangkan bakat mereka untuk tujuan yang dapat memberi manfaat bagi orang lain. Komponen penting dari pemberdayaan adalah pendidikan.
46. Suatu upaya atau proses pembangunan yang berkesinambungan, yang berarti dilaksanakan secara terorganisir, dan bertahap dimulai dari tahap permulaan hingga tahap kegiatan tindak lanjut dan evaluasi (*follow-up activity and evaluation*).
47. Suatu upaya atau proses memperbaiki (*to improve*) kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan masyarakat untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik.
48. Suatu upaya atau proses menggali dan memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga prinsip *to help the community to help themselves* dapat menjadi kenyataan.
49. Suatu upaya atau proses memandirikan masyarakat, dengan cara menggalang partisipasi aktif dalam masyarakat berupa bentuk aksi bersama (*group action*) di dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

B. Perspektif Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan konsep yang banyak dibahas dalam ilmu-ilmu sosial dan praktik-praktik yang terkait, serta literatur internasional yang luas. Akibatnya, konsep ini memiliki makna yang luas dengan konotasi individu dan sosial, dengan dimensi dan tingkatan yang berbeda, dengan perspektif perubahan dan implikasi sosial-politik yang berbeda.

Ada dua perspektif pemberdayaan, diantaranya:

1. Pemberdayaan diri orang-orang yang terpengaruh oleh ketidakberdayaan, kerentanan dan pengucilan.
1. Perspektif ini menekankan pada perolehan kekuasaan, energi, agensi, dan daya kreatif secara aktif oleh masyarakat sendiri sebagai individu dan kelompok. Dalam perspektif ini, pemberdayaan dilihat sebagai proses pembangunan kembali penentuan nasib sendiri, otonomi dan kontrol. Contohnya adalah Kelompok-kelompok swadaya masyarakat, gerakan warga, dll.
2. Pemberdayaan sebagai dukungan profesional untuk mendapatkan otonomi, penentuan nasib sendiri dan kapasitas untuk bertindak.

Inti dari perspektif ini adalah aspek dukungan dan promosi otonomi, penentuan nasib sendiri, dan kapasitas untuk bertindak melalui para penolong profesional. Contohnya adalah: intervensi sosial-psikologis, psikoterapi, pekerjaan sosial, intervensi dalam kerja sama internasional dan pekerjaan pembangunan, dll.

Apapun perspektif yang digunakan, dapat diamati bahwa istilah "pemberdayaan" digunakan untuk menunjukkan proses memberdayakan kelompok atau individu dan juga untuk menunjukkan hasil - seseorang atau kelompok diberdayakan. Pemberdayaan merupakan sebuah proses dinamis yang menghasilkan hasil berupa perluasan kapasitas individu dan kolektif serta lingkup tindakan.

Beberapa organisasi nasional dan internasional yang merupakan pemain kunci dalam kerja sama internasional dan pembangunan mendefinisikan pemberdayaan. Bank Dunia menekankan dalam definisinya bahwa: *"Pemberdayaan adalah proses peningkatan kapasitas individu atau kelompok untuk membuat pilihan dan mengubah pilihan-pilihan tersebut menjadi tindakan dan hasil yang diinginkan. Inti dari proses ini adalah tindakan-tindakan yang membangun aset individu dan kolektif, serta meningkatkan efisiensi dan keadilan konteks organisasi dan kelembagaan yang mengatur penggunaan aset-aset tersebut."* Sementara, Perserikatan Bangsa-

Bangsa, dalam Laporan Pembangunan Manusia 1995, menyatakan bahwa pemberdayaan adalah tentang partisipasi. *"Pemberdayaan. Pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat, bukan hanya untuk mereka. Masyarakat harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang membentuk kehidupan mereka."*

Berkenaan dengan pemberdayaan perempuan, PBB menekankan bahwa *"Berinvestasi pada kemampuan perempuan dan memberdayakan mereka untuk menggunakan pilihan mereka tidak hanya berharga dalam dirinya sendiri tetapi juga merupakan cara yang paling pasti untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan."* (PBB, 1995).

Oxfam International, sebuah federasi nirlaba non-pemerintah dengan 17 organisasi anggota yang bertujuan untuk bekerja sama demi dampak yang lebih besar di panggung internasional untuk mengurangi kemiskinan dan ketidakadilan. Selain menjadi pemimpin dunia dalam memberikan bantuan darurat, Oxfam International juga mengimplementasikan program-program pembangunan jangka panjang pada komunitas-komunitas yang rentan. Bagi Oxfam, *"Pemberdayaan berarti melawan bentuk-bentuk penindasan yang memaksa jutaan orang untuk berperan dalam masyarakat dengan syarat-syarat yang tidak adil, atau dengan cara-cara yang mengingkari hak-hak asasi mereka (Oxfam, 1995)"*.

Sedangkan *Heinrich Böll Stiftung*, Yayasan Politik Hijau Jerman dengan cakupan internasional, memahami pemberdayaan sebagai *"... Peningkatan kekuatan politik, sosial, ekonomi dan spiritual dari sebuah komunitas atau seseorang yang secara struktural kurang beruntung melalui konstruksi sosial seperti "ras", agama, gender, seksualitas, kelas, kecacatan dan usia. Untuk mendukung individu dan komunitas yang tidak memiliki kesempatan yang sama karena hambatan struktural untuk mewujudkan hak-hak mereka dan berpartisipasi dalam masyarakat di semua tingkatan."* Begitu juga dengan *Barrow Cadbury Trust*, sebuah yayasan amal independen yang berbasis di Inggris, melihat Pemberdayaan sebagai usaha untuk

menegakkan dan memperluas hak-hak kelompok yang terpinggirkan, untuk merefleksikan pengalaman akar rumput dari komunitas lokal dan mendukung mereka dalam membuat suara mereka didengar." (Situs web *Barrow Cadbury Trust*).

Beberapa aspek kunci yang disebutkan dalam definisi-definisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman tentang pemberdayaan didasarkan pada pendekatan multidisiplin. Hal ini ditafsirkan dan dibuktikan dalam ilmu-ilmu sosial, khususnya dalam psikologi, psikologi sosial, kedokteran, ilmu pendidikan, pedagogi sosial, kebijakan publik, ilmu politik dan bidang-bidang praktik terkait seperti pekerjaan sosial, pekerjaan intervensi krisis, penanganan trauma dan lain-lain.

Dalam pemahaman John Friedman (1992), pemberdayaan mengacu pada semua proses yang membuat orang mengambil kendali dan kepemilikan atas kehidupan mereka yang menurut Strandberg (2001), membutuhkan serangkaian peluang untuk dipilih. Pengertian pemberdayaan ini tumpang tindih dengan konsep pembangunan manusia yang didefinisikan sebagai proses untuk memperbesar pilihan-pilihan masyarakat. Strandberg (2001) mengkonseptualisasikan pemberdayaan lebih lanjut sebagai 'proses transformatif' yang dialami baik di tingkat pribadi maupun kolektif.

Pemberdayaan lebih dari sekedar 'partisipasi dalam pembangunan'. Hal ini membahas kebutuhan untuk mengubah pembangunan. Dalam refleksi mereka tentang "kekuasaan" - bagian penting dalam istilah pemberdayaan - Rodenberg dan Wichterich (1999) menyatakan bahwa "... kekuasaan dipahami dalam arti positif sebagai hak akses dan kontrol terhadap sumber daya serta kapasitas pengambilan keputusan dan struktural dalam rumah tangga serta dalam politik, ekonomi, dan budaya. Kekuasaan yang didefinisikan demikian tidak menghasilkan dominasi atas orang lain, melainkan kemampuan, energi, dan kapasitas struktural untuk bertindak dan bernegosiasi, untuk menolak dominasi, untuk menentukan dan memutuskan, untuk

membentuk dan memberi kompensasi. Kekuasaan adalah kekuatan untuk berubah... potensi untuk bertransformasi."

Terlepas dari penggunaan berbagai terminologi, ada kesamaan di antara berbagai pandangan yang berbeda. Friedman (1992) menyarankan untuk membedakan pemberdayaan psikologis, pemberdayaan sosial dan pemberdayaan politik. Dengan cara yang sebanding, Beck dan Weyermann (2006) mengidentifikasi tingkat individu ('kekuasaan di dalam'), tingkat konteks sosial yang dekat ('kekuasaan dengan') dan konteks yang lebih luas untuk mengubah hubungan kekuasaan sosial ('kekuasaan atas').

Perkembangan pada ketiga tingkatan tersebut, menurut definisi-definisi ini, saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Pada tingkat individu, pemberdayaan mencakup pengembangan pribadi yang terkait dengan peningkatan rasa percaya diri dan pendalaman pemahaman tentang situasi diri sendiri. Untuk mencapai pemberdayaan, sifat dan tingkat ketidakberdayaan harus dianalisis dengan cermat agar dapat berkembang dan mampu menggunakan sumber daya yang dimiliki dengan lebih baik.

Proses peningkatan kesadaran pribadi ini sering dianggap sebagai prasyarat penting untuk perubahan, namun pemberdayaan tidak dapat direduksi ke tingkat individu saja. Tingkat sosial dan politik sangat penting untuk menggunakan kekuasaan dan membuat pilihan-pilihan nyata. Tingkat kedua (pemberdayaan sosial/kekuatan dengan) mengakui fakta bahwa 'perubahan dapat terjadi ketika orang-orang bekerja sama. Hal ini melibatkan pemikiran, tindakan, dan jaringan dengan orang lain' (baik secara konvensional maupun dengan cara-cara baru melalui Media Sosial).

Pemberdayaan juga berarti melakukan sesuatu. Ini berarti partisipasi nyata dalam proses sosial dengan prospek yang realistis untuk mengubah struktur kekuasaan yang ada. Pada akhirnya, pemberdayaan juga mencakup tingkat makro, dan harus memperhatikan perubahan realitas dan hubungan kekuasaan.

Dalam analisis mereka terhadap proyek-proyek perempuan di negara-negara berkembang, Rodenberg dan Wichterich (1999) mengidentifikasi dimensi dan tingkat pemberdayaan lebih lanjut. Serupa dengan tiga tingkatan yang disebutkan di atas, mereka berbicara tentang 'pemberdayaan pribadi', 'pemberdayaan sosial', dan 'pemberdayaan politik'. Selain itu, mereka juga menciptakan istilah 'pemberdayaan budaya', 'pemberdayaan hukum', dan 'pemberdayaan ekonomi'. Pemberdayaan ekonomi yang dimaksud adalah literasi ekonomi, properti, jaminan sosial, kekuatan pengambilan keputusan terkait uang. Pemberdayaan hukum mencakup keamanan hukum, pengetahuan tentang hukum yang ada, dan kemampuan untuk mempengaruhi legislasi. Pemberdayaan budaya, akhirnya, mencakup kekuatan untuk membentuk definisi budaya dan mempengaruhi tatanan simbolik. Dalam pandangan mereka, proses pemberdayaan dapat mengarah pada perubahan hubungan sosial dan norma-norma sosial-budaya yang menimbulkan diskriminasi.

Dimensi-dimensi yang diidentifikasi tidak hanya digunakan untuk mendefinisikan pemberdayaan pada tingkat deskriptif, tetapi juga untuk mengembangkan kerangka referensial untuk pandangan yang komprehensif mengenai tujuan dan proses pemberdayaan - untuk menciptakan instrumen analitis untuk mengukur proses dan hasil yang berkaitan dengan pemberdayaan.

Tabel 3. Macam-macam Dimensi Pemberdayaan

DIMENSI	Catatan
PEMBERDAYAAN EKONOMI	Pemberdayaan ekonomi bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki keterampilan, kemampuan, dan sumber daya yang sesuai serta akses terhadap pendapatan dan mata pencaharian yang aman dan berkelanjutan. Terkait hal ini, beberapa organisasi sangat berfokus pada pentingnya akses terhadap aset dan sumber daya.

PEMBERDAYAAN MANUSIA DAN SOSIAL	Pemberdayaan sebagai proses sosial multi-dimensi yang membantu orang mendapatkan kendali atas kehidupan mereka sendiri. Ini adalah proses yang menumbuhkan kekuatan (yaitu, kapasitas untuk melaksanakan) dalam diri orang, untuk digunakan dalam kehidupan mereka sendiri, komunitas mereka dan masyarakat mereka, dengan kemampuan untuk bertindak atas isu-isu yang mereka anggap penting (Page dan Czuba, 1999).
PEMBERDAYAAN POLITIK	Kapasitas untuk menganalisis, mengorganisir dan memobilisasi. Hal ini menghasilkan tindakan kolektif yang dibutuhkan untuk perubahan kolektif. Hal ini sering kali terkait dengan pendekatan berbasis hak untuk pemberdayaan dan pemberdayaan warga negara untuk menuntut hak-hak mereka (Piron dan Watkins, 2004).
PEMBERDAYAAN BUDAYA	Pendefinisian ulang aturan dan norma serta penciptaan kembali praktik-praktik budaya dan simbolik (Stromquist, 1993). Hal ini dapat melibatkan fokus pada hak-hak minoritas dengan menggunakan budaya sebagai titik masuk

Dengan semakin meningkatnya minat dan investasi yang meningkat dalam pemberdayaan oleh sektor publik, independen dan swasta, pekerjaan analitik termasuk pengembangan instrumen dan indikator yang dapat digunakan untuk memantau dan mengevaluasi proses dan hasil pemberdayaan berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir dengan kontribusi yang signifikan dari ilmu-ilmu sosial dan didukung oleh berbagai pemain kunci dalam kerja sama internasional dan pekerjaan pembangunan, seperti Bank Dunia, *GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit*, kementerian-kementerian nasional, dan juga sejumlah yayasan besar yang independen.

Setiap kasus, konsep dan pendekatan pemberdayaan perlu direfleksikan dalam kerangka acuan normatif-etis dan pemahaman

konseptual khusus tentang manusia - "*Menschenbild*". Konsep pemberdayaan dengan demikian, juga merupakan kritik terhadap bagaimana klien program kesejahteraan sosial selama ini dipahami secara tradisional. Individu dan kelompok-kelompok ini biasanya didefinisikan berdasarkan kekurangannya dan bukan berdasarkan kapasitas, pengalaman dan aspirasi mereka. Akibatnya, mau tidak mau, ada hubungan kekuasaan yang melekat antara penyedia bantuan dan klien mereka yang membutuhkan yang bergantung pada bantuan. Pendekatan pemberdayaan dikembangkan untuk memutus hubungan kekuasaan ini dengan melihat kelompok-kelompok yang kurang beruntung sebagai aktor potensial untuk perubahan. Pendekatan ini didorong oleh kepercayaan yang melekat pada kekuatan masyarakat dan orientasi normatif pada prinsip-prinsip otonomi, keadilan sosial dan partisipasi demokratis (Bleckmann dan Krüger, 2007). Hal ini berarti bahwa konsep pemberdayaan memprakarsai pergeseran paradigma terkait pemahaman konseptual tentang manusia dan relasi kuasa - dari defisitorientation ke orientasi sumber daya, dari paternalisme ke hubungan yang saling menghormati dan setara. Sebagai contoh, para profesional yang terlibat dalam proses pemberdayaan seharusnya berperan sebagai fasilitator, bukan sebagai pengajar.

Tabel 4. Matriks Pemberdayaan

AREA	INDIVIDUAL	KOMUNITAS
<i>Personal - Sosial</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Identitas • Kepercayaan diri dan nilai-nilai • Keterampilan sosial • Hubungan pribadi 	<ul style="list-style-type: none"> • Citra dan identitas komunitas • Modal sosial
<i>Politik</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi aktif kaum muda • Keterampilan dan pengetahuan tentang partisipasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan mengorganisir diri dari masyarakat • Kesempatan berpartisipasi

		<ul style="list-style-type: none"> • Transparansi sektor publik
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan kerja, kewirausahaan • Keterampilan dan pengetahuan tentang ekonomi dan kehidupan kerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Kesempatan kerja dan pelatihan • Pembangunan ekonomi
Budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Identitas budaya • Nilai dan sikap • Rasa hormat • Pengetahuan antar budaya dan keterampilan 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrasi berbagai kelompok budaya • Kehidupan artistik/budaya yang kaya
Pendidikan dan Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> • Motivasi, kemampuan • Pendidikan formal dan keberhasilan pelatihan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peluang pendidikan • Kualitas sekolah (pendidikan umum dan kejuruan)
Legal	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan hukum 	<ul style="list-style-type: none"> • Hak-hak sipil
Kesehatan dan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Kesehatan mental dan fisik • Pengetahuan tentang kesehatan • Rasa hormat terhadap alam 	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan kesehatan • Lingkungan yang tidak tercemar • Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan

C. Dimensi Pemberdayaan

Sering kali, ada kesalahpahaman yang berlaku di antara sebagian besar orang, bahwa menghasilkan uang adalah pemberdayaan. Hal ini mungkin benar dalam sudut pandang pemberdayaan ekonomi. Namun, makna pemberdayaan akan terpuaskan ketika kita memiliki kesempatan untuk memilih cara kerja kita sendiri, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, dan sebagainya; secara keseluruhan, kita harus memiliki kebebasan untuk memilih. Namun, sebagian besar

dari mereka merasa puas ketika mereka mampu menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pada kenyataannya, itu bukanlah pemberdayaan yang sesungguhnya. Pemberdayaan adalah istilah yang lebih luas yang terdiri dari berbagai dimensi dan fokus dari semua aspek seperti profesional, keuangan, teknis, teknologi, budaya, sosial dan politik. Berbagai dimensi tersebut diilustrasikan pada Gambar berikut.

Gambar 1. Dimensi Pemberdayaan



Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Sekarang, mungkin kita sudah paham bahwa pemberdayaan tidak hanya berarti dalam satu dimensi ekonomi saja, tetapi juga mencakup berbagai dimensi. Hal ini membuat prosesnya menjadi lebih rumit. Kita tahu, ada berbagai inisiatif untuk memberdayakan kelompok sasaran.

D. Bentuk-Bentuk Pemberdayaan

Secara umum, pemberdayaan dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu pemberdayaan individu dan pemberdayaan kelompok. Rincian

dari kedua jenis pemberdayaan tersebut dijelaskan dan disajikan pada Gambar berikut.

Gambar 2. Bentuk-bentuk Pemberdayaan



1. **Pemberdayaan individu/personal**
Pemberdayaan individu adalah proses meningkatkan kemampuan individu menuju hasil yang diinginkan. Pemberdayaan individu lebih dikenal sebagai pemberdayaan diri. Orang yang diberdayakan telah memperoleh kemampuan untuk membangun kepercayaan diri, wawasan, dan pemahaman yang lebih baik tentang situasi nyata. Ini adalah pemberdayaan di tingkat mikro.
2. **Pemberdayaan masyarakat/komunitas**
Ini adalah proses meningkatkan kemampuan kelompok menuju hasil yang diinginkan. Setelah melakukan pemberdayaan, kelompok akan memiliki kemampuan untuk membangun kepercayaan, kerja sama dan komunikasi. Satu hal yang penting dalam kelompok adalah bahwa harus ada ketentuan untuk diskusi dan musyawarah. Ini adalah pemberdayaan di tingkat makro karena berkonsentrasi terutama pada kelompok secara keseluruhan. Salah satu contohnya adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan kegiatan-kegiatannya. Apakah Kita berpikir

bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan tanpa pemberdayaan individu? Jawabannya adalah tidak, karena pemberdayaan masyarakat bergantung pada individu yang merupakan satu-satunya kekuatan di balik pemberdayaan masyarakat. Individu harus diberdayakan terlebih dahulu. Dalam praktiknya, selain dua jenis di atas, ada dua jenis yang semakin populer, yaitu pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan pemuda. Kedua jenis pemberdayaan ini lebih diprioritaskan mengingat kelompok-kelompok sasaran yang diberdayakan.

Pemberdayaan masyarakat mengacu pada proses yang memungkinkan masyarakat untuk meningkatkan kendali atas kehidupan mereka. "Komunitas" adalah kelompok orang yang mungkin atau mungkin tidak terhubung secara spasial, tetapi memiliki kepentingan, kepedulian, atau identitas yang sama. Komunitas-komunitas ini dapat bersifat lokal, nasional, atau internasional, dengan kepentingan yang spesifik atau luas. "Pemberdayaan" mengacu pada proses dimana masyarakat mendapatkan kendali atas faktor-faktor dan keputusan yang membentuk kehidupan mereka. Ini adalah proses di mana mereka meningkatkan aset dan atribut mereka serta membangun kapasitas untuk mendapatkan akses, mitra, jaringan, dan/atau suara, untuk mendapatkan kendali. "Memberdayakan" menyiratkan bahwa orang tidak dapat "diberdayakan" oleh orang lain; mereka hanya dapat memberdayakan diri mereka sendiri dengan memperoleh lebih banyak bentuk-bentuk kekuasaan yang berbeda (Labonte dan Laverack, 2008). Pendekatan ini mengasumsikan bahwa masyarakat adalah aset mereka sendiri, dan peran agen eksternal ialah untuk mengkatalisasi, memfasilitasi, atau "menemani" masyarakat dalam memperoleh kekuasaan.

Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat lebih dari sekedar keterlibatan, partisipasi atau pelibatan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat menyiratkan kepemilikan dan tindakan masyarakat yang secara eksplisit bertujuan untuk perubahan sosial dan politik.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses negosiasi ulang kekuasaan untuk mendapatkan kontrol yang lebih besar. Proses ini mengakui bahwa jika beberapa orang akan diberdayakan, maka orang lain akan berbagi kekuasaan yang ada dan menyerahkan sebagian dari kekuasaan tersebut (Baum, 2008). Kekuasaan adalah konsep sentral dalam pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan selalu beroperasi dalam arena perebutan kekuasaan.

Pemberdayaan masyarakat harus membahas faktor penentu sosial, budaya, politik dan ekonomi yang mendasari kesehatan, dan berusaha membangun kemitraan dengan sektor lain dalam mencari solusi.

Globalisasi menambah dimensi lain dalam proses pemberdayaan masyarakat. Di dunia saat ini, dunia lokal dan global saling terkait erat. Tindakan di satu sisi tidak dapat mengabaikan pengaruh atau dampak di sisi lain. Pemberdayaan masyarakat mengakui dan secara strategis bertindak berdasarkan keterkaitan ini dan memastikan bahwa kekuasaan dibagi di tingkat lokal dan global.

Ketika konsep pemberdayaan masyarakat dipahami, penekanan diberikan pada kelompok masyarakat yang kurang mampu dan terbelakang secara ekonomi. Pemberdayaan masyarakat mengacu pada gerakan sosial yang komprehensif yang memberikan dukungan dan bantuan kepada individu-individu, terutama yang termasuk dalam kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan kurang mampu. Gerakan ini membutuhkan organisasi dan lembaga pemerintah, non-pemerintah, publik, swasta, politik, dan agama untuk mengatasi dan menghapus pengucilan sosial, stigma, perlakuan diskriminatif, kejahatan dan kekerasan, serta masalah-masalah lain yang terbukti menjadi penghalang dalam proses pencapaian kesempatan pemberdayaan.

Seperti yang dipahami secara komprehensif bahwa di antara individu-individu yang termasuk dalam kelompok masyarakat yang kurang beruntung, terpinggirkan, dan terbelakang secara sosial-ekonomi, masalah kemiskinan, buta huruf, ketidakpedulian, dan

pengangguran merupakan hal yang lazim terjadi. Mereka mengalami kelangkaan sumber daya dan berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ketika mereka mengalami masalah yang sangat besar, yang terbukti menjadi penghalang dalam mempertahankan kondisi kehidupan mereka, jelas bahwa mereka akan mengalami masalah dalam memperoleh peluang pemberdayaan.

Dalam mendorong pemberdayaan masyarakat, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Salah satu faktor yang penting adalah, perlu dipastikan bahwa individu-individu tersebut tidak terbebani oleh masalah kemiskinan, buta huruf dan pengangguran. Saat ini, di seluruh negeri, telah ada pendirian lembaga-lembaga pendidikan dan pusat-pusat pelatihan, yang mendorong pendaftaran individu. Selain itu, harus ada penyediaan kesempatan bagi para individu untuk mengasah keterampilan mereka dan memperoleh pekerjaan. Dengan cara ini, mereka dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi masalah psikologis agar tidak menjadi masalah besar. Individu harus terbebas dari masalah psikologis seperti kemarahan, depresi, stres, kecemasan, dan trauma agar dapat memahami arti dan pentingnya peluang pemberdayaan. Kesadaran dalam hal langkah-langkah, pendekatan dan praktik dianggap sangat penting bagi individu untuk memperkuat konsep pemberdayaan masyarakat.

E. Peran Pemberdayaan

Pemberdayaan memiliki peran yang berbeda berdasarkan kebutuhan orang-orang yang akan diberdayakan. Pemberdayaan memiliki peran sebagai katalisator, pemungkin, penguat, penghubung, dan pendorong

1. Peran katalisator

Proses pemberdayaan memandu masyarakat dengan informasi yang memadai dan sumber daya yang penting, dengan cara ini berperan sebagai katalisator pemberdayaan.

2. Peran yang memungkinkan

Dalam peran ini, pemberdayaan membantu Kita untuk mendapatkan pengetahuan hal-hal yang diperlukan dan memungkinkan Kita untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan Kita.

3. Peran Priming

Bakat Kita yang sudah ada akan terpicu melalui proses pembelajaran dan mempersiapkan Kita untuk menemukan solusi dengan mudah dalam situasi yang berbeda. Dengan cara ini, bakat dan pengetahuan Kita akan berguna bagi masyarakat, sehingga membuat Kita menjadi pemimpin di masyarakat.

4. Peran penghubung

Pemberdayaan memiliki kekuatan penghubung antara orang-orang yang berpikiran sama untuk interaksi dan pengembangan lebih lanjut. Ini adalah peran yang penting, karena membangun pembangunan tim dan kesadaran kelompok.

5. Peran yang melibatkan

Ketika Kita tumbuh lebih jauh dalam proses pemberdayaan, Kita akan terlibat dalam sebuah sistem. Dengan ini, Kita menerima tanggung jawab dalam melakukan pilihan pekerjaan Kita sendiri.

6. Peran yang mendorong

Pemberdayaan memberi Kita dorongan dalam hidup untuk melakukan sesuatu yang hebat. Peran pemberdayaan yang mendorong ini membantu Kita untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam hidup.

F. Makna dan Arti Penting Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah proses memfasilitasi masyarakat untuk meningkatkan kontrol atas kehidupan mereka. Hal ini dipahami secara komprehensif bahwa semua individu bercita-cita untuk memperoleh kemandirian. Individu tidak menyukai jika ada orang lain yang berusaha untuk mengendalikan mereka atau memberikan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan atau pencapaian tujuan dan sasaran yang diinginkan. Dengan kata

lain, individu bercita-cita untuk mandiri dan mengambil keputusan sendiri. Memberikan hak dan kesempatan kepada individu untuk mengambil keputusan dianggap sebagai salah satu cara penting untuk mendorong pemberdayaan perempuan. Pengambilan keputusan merupakan bagian integral dari kehidupan individu. Dalam beberapa kasus, proses pengambilan keputusan dilakukan dengan cara yang dapat diatur, sedangkan, dalam kasus lain, seseorang harus mengambil ide dan saran dari orang lain. Namun, ketika bantuan diambil dari orang lain dalam mengambil keputusan, seseorang perlu membentuk sudut pandang yang positif dan tidak boleh merasa bahwa ada halangan dalam proses pencapaian peluang pemberdayaan.

Dalam mempromosikan dan mengenali makna dan pentingnya pemberdayaan masyarakat, ada berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan. Hal ini termasuk, menerapkan metode dan prosedur dengan cara yang terorganisir dengan baik; membangun hubungan dan mendorong integrasi masyarakat dengan masyarakat umum; meningkatkan berbagai keterampilan, termasuk, komunikasi, manajemen waktu, pemikiran kritis, pemecahan masalah, analitis, kepemimpinan dan pengambilan keputusan; menghasilkan informasi di antara individu dalam hal moralitas dan etika dan memastikan bahwa mereka menanamkan sifat-sifat ketekunan, akal, dan kesadaran. Salah satu aspek yang sangat disayangkan, tetapi perlu disoroti adalah, masyarakat yang terpinggirkan dan kurang mampu cenderung terlibat dalam praktik-praktik yang tidak bermoral dan tidak etis untuk mempromosikan pemberdayaan masyarakat. Mereka biasanya tidak menyadari fakta bahwa untuk menghasilkan peluang mata pencaharian yang lebih baik dan memperkaya kehidupan mereka, mereka perlu mengadopsi praktik-praktik yang adil dan etis. Mereka perlu memahami bahwa meskipun mereka terlibat dalam pekerjaan minoritas, mereka perlu menanamkan sifat-sifat moralitas, etika, ketekunan, dan ketelitian.

Dengan memperoleh pemahaman yang efisien tentang pemberdayaan masyarakat, individu akan dapat mengenali potensi mereka sendiri dan mendapatkan kepercayaan diri. Dalam beberapa kasus, ketika individu terlibat dalam tugas dan fungsi apa pun, mereka merasa khawatir. Di sisi lain, ketika individu perlu berkomunikasi dan berhubungan dengan orang lain, mereka juga merasa rentan dan khawatir. Ketika mereka mendapatkan kesempatan pemberdayaan, mereka dapat memahami bahwa mereka perlu mengatasi rasa khawatir dan kerentanan serta menjalankan tugas dan kegiatan dengan percaya diri. Individu juga akan merasa bahwa mereka akan dapat memanfaatkan kompetensi dan kemampuan mereka dalam memungkinkan orang lain untuk mengenali makna dan pentingnya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dapat dimulai dari tingkat individu yang kemudian dapat menjangkau masyarakat di tingkat nasional. Seiring berjalannya waktu, perlu adanya transformasi di dalam masyarakat dan konsep pemberdayaan masyarakat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memungkinkan individu untuk melakukan transformasi. Hal ini harus bermanfaat bagi individu dan juga masyarakat secara keseluruhan.

Komunitas yang diberdayakan dapat memperluas jaringan mereka dan menjalin hubungan dengan orang-orang yang berpengaruh. Komunikasi yang efektif dengan orang lain dianggap sebagai hal yang sangat penting. Di sisi lain, ketika masyarakat diberdayakan, faktor sosial dan ekonomi dapat dipengaruhi. Dengan kata lain, individu tidak hanya mampu membawa perbaikan dalam kondisi kehidupan mereka, tetapi mereka juga dapat mengarah pada peningkatan di bidang lain, termasuk sosial, ekonomi, politik, budaya, dan agama. Konsep pemberdayaan masyarakat memungkinkan individu-individu untuk menjalankan fungsi perencanaan dan pengorganisasian dengan cara yang efisien. Mereka akan memastikan bahwa mereka melakukan berbagai tugas dan kegiatan dengan cara yang etis. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa ketika peluang pemberdayaan dipromosikan di antara anggota masyarakat, mereka

akan memberikan kontribusi yang signifikan tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, tetapi juga untuk mempromosikan niat baik di antara anggota masyarakat lainnya.

G. Elemen-Elemen Kunci Pemberdayaan Masyarakat

Elemen-elemen kunci dari pemberdayaan masyarakat, berfokus pada aspek-aspek yang akan mengarah pada perkembangan masyarakat yang kurang beruntung dan kurang mampu. Untuk mengarah pada pertumbuhan dan perkembangan yang efektif dari individu, masyarakat dan bangsa secara keseluruhan, perlu dipastikan bahwa individu tidak berada dalam kondisi kekurangan. Keterbatasan, kemiskinan, buta huruf, pengangguran, tunawisma, serta kejahatan dan kekerasan merupakan hambatan utama dalam proses pemberdayaan masyarakat.

Elemen-elemen tersebut memiliki fungsi utama untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan ini dan menerapkan langkah-langkah dan pendekatan untuk menghilangkannya. Informasi mengenai elemen-elemen tersebut diperoleh melalui penelitian mengenai konsep pemberdayaan masyarakat. Internet merupakan salah satu sumber yang sangat diperlukan untuk menyediakan informasi mengenai elemen-elemen pemberdayaan masyarakat. Elemen-elemen kunci tersebut adalah, bekerja dengan kelompok masyarakat yang kurang beruntung, membentuk lingkungan yang mendukung, beradaptasi dengan kebutuhan dan kerangka kerja lokal, mempromosikan kerangka kerja hak asasi manusia dan penerapan metode dan prosedur. Hal-hal tersebut dinyatakan sebagai berikut:

1. **Bekerja dengan Kelompok Masyarakat yang Kurang Beruntung**
Konsep pemberdayaan masyarakat perlu dipromosikan di antara kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Menurut studi penelitian, mereka adalah orang-orang yang terkena dampak dari masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, buta huruf, pengangguran, tunawisma, serta kejahatan dan kekerasan.

Oleh karena itu, organisasi, lembaga dan pekerja sosial perlu berfokus pada individu-individu ini untuk mempromosikan pemberdayaan masyarakat.

Kesadaran perlu dibangun di antara individu-individu ini dalam hal dampak yang merugikan dari masalah-masalah sosial ini. Mereka perlu memahami bahwa masalah-masalah ini akan berdampak buruk pada kehidupan mereka. Selain itu, harus ada implementasi langkah-langkah dan program, yang akan berkontribusi secara signifikan dalam memberikan solusi untuk meringankan masalah-masalah sosial dan mengarah pada peningkatan bagian masyarakat yang kurang beruntung. Pendidikan dianggap sebagai salah satu instrumen utama, yang akan memfasilitasi individu dalam memperkaya kehidupan mereka.

Oleh karena itu, setiap orang perlu menyadari arti dan pentingnya pendidikan. Ketika individu-individu terdidik dengan baik, mereka tidak akan mengalami masalah besar dalam memperoleh kesempatan kerja dan mempromosikan peluang mata pencaharian yang lebih baik. Oleh karena itu, ketika individu-individu ini terdidik dan dipekerjakan, mereka akan dapat mengatasi masalah kemiskinan, tunawisma, dan kejahatan serta kekerasan dengan cara yang tepat.

2. Membentuk Lingkungan yang Mendukung

Lingkungan yang mendukung yang tepat menetapkan hak dan aset semua individu, termasuk perempuan, anak-anak, orang tua, individu yang termasuk dalam kelompok masyarakat yang kurang beruntung, terpinggirkan dan terbelakang secara sosial-ekonomi, pemangku kepentingan, pekerja sosial, profesional, dan lain sebagainya, sambil memastikan kesetaraan lingkungan.

Lingkungan yang mendukung ditentukan oleh kebijakan dan undang-undang nasional, provinsi dan lokal yang memungkinkan mereka untuk fokus pada aspek-aspek lain, yang diperlukan dalam pembentukannya. Hal ini termasuk, pengelolaan sumber daya air, pengendalian berbagai bentuk polusi, mempromosikan

penghijauan dan lain sebagainya. Dengan kata lain, dalam pembentukan lingkungan yang mendukung, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan untuk mewujudkan perbaikan kondisi lingkungan fisik di semua komunitas dan wilayah.

Dalam lingkungan yang mendukung, individu-individu perlu memastikan bahwa bantuan dan dukungan diberikan kepada individu-individu, terutama mereka yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ketika masalah-masalah sosial akan mengambil bentuk yang besar dan menimbulkan hambatan dalam proses promosi pemberdayaan masyarakat, maka akan muncul masalah-masalah besar dalam proses pencapaian peluang pemberdayaan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pembentukan lingkungan yang mendukung merupakan elemen penting dalam menuju pemberdayaan masyarakat.

3. Beradaptasi dengan Kebutuhan dan Kerangka Kerja Lokal

Beradaptasi dengan kebutuhan dan kerangka kerja lokal merupakan elemen yang terutama difokuskan dalam mengidentifikasi hambatan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Selain itu, elemen ini juga berfokus pada identifikasi kebutuhan dan persyaratan individu dan merumuskan langkah-langkah untuk memenuhinya. Di dalam masyarakat, selain masalah sosial kemasyarakatan, ada juga masalah lain yang menimbulkan hambatan dalam proses promosi pemberdayaan masyarakat. Hal ini termasuk, ketidaksadaran, kurangnya materi dan sumber daya, komunikasi yang tidak efektif dan lain sebagainya.

Dalam hal beradaptasi dengan kebutuhan dan kerangka kerja lokal, satu atau lebih masalah diidentifikasi, yang menimbulkan efek yang tidak menguntungkan pada kehidupan individu. Misalnya, ketika individu-individu terbebani oleh masalah buta huruf, maka ada kebutuhan untuk mendirikan pusat pelatihan dan mengatur kelas untuk menambah keterampilan literasi di antara individu-individu dan memungkinkan mereka untuk memperoleh kemandirian.

Dalam beberapa kasus, diperlukan jangka waktu yang pendek, sedangkan dalam kasus lain, diperlukan jangka waktu yang panjang dalam mengimplementasikan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan dan kerangka kerja lokal serta identifikasi masalah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa beradaptasi dengan kebutuhan dan kerangka kerja lokal merupakan elemen penting dalam pemberdayaan masyarakat.

4. Mempromosikan Kerangka Kerja Hak Asasi Manusia

Mempromosikan dan melindungi kerangka kerja hak asasi manusia merupakan hal yang mendasar dalam proses pemberdayaan masyarakat. Hak asasi manusia didasarkan pada martabat, kesetaraan, dan rasa saling menghormati. Karakteristik utama dari hak asasi manusia adalah, hak asasi manusia bersifat esensial, fundamental, saling bergantung dan dapat dilanggar. Kemitraan yang telah dibangun di antara para individu telah diperkuat.

Dalam kerangka kerja pemajuan hak asasi manusia, setiap individu harus bekerja sama dan terintegrasi satu sama lain. Penyampaian informasi dalam berbagai faktor dan pertukaran ide serta sudut pandang merupakan faktor yang sangat penting. Hal-hal tersebut dianggap sebagai hal yang mendasar dalam menambah informasi dan pemahaman antar individu. Kegiatan utama yang perlu diperhatikan dalam mempromosikan kerangka kerja hak asasi manusia adalah, menghilangkan perlakuan diskriminatif, memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada semua orang, memobilisasi dukungan masyarakat, membangkitkan kesadaran, mengelola sumber daya, dan membawa transformasi dalam sudut pandang dan perspektif individu. Lebih jauh lagi, ketika ada perumusan undang-undang dan peraturan anti-diskriminasi, individu-individu tersebut diberikan layanan sosial, kesehatan, dan keuangan. Dengan kata lain, ada perumusan langkah-langkah dan layanan yang mengarah pada peningkatan masyarakat yang secara ekonomi lebih lemah. Oleh

karena itu, dapat dikatakan bahwa kerangka kerja pemajuan hak asasi manusia merupakan elemen penting dalam pemberdayaan masyarakat.

5. Penerapan Metode dan Prosedur

Penerapan metode dan prosedur dianggap sebagai salah satu elemen mendasar dari pemberdayaan masyarakat. Ketika individu-individu telah memberikan penekanan pada konsep pemberdayaan masyarakat, dan ketika mereka telah mengidentifikasi hambatan-hambatan dan telah memperhitungkan area-area yang perlu ditingkatkan, langkah selanjutnya adalah menerapkan metode dan prosedur dengan cara yang efisien. Ketika metode dan prosedur tersebut diterapkan, perlu dipastikan bahwa metode dan prosedur tersebut terbukti bermanfaat bagi para individu. Misalnya, ketika mereka diberi kesempatan untuk meningkatkan keterampilan teknis mereka, perlu dipastikan bahwa metode belajar-mengajar, materi belajar-mengajar, dan strategi instruksional harus diterapkan dengan cara yang efektif.

Salah satu faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam penerapan metode dan prosedur adalah, metode dan prosedur tersebut harus bersifat teknis dan perintis. Dengan kemajuan yang terjadi dan dengan munculnya modernisasi dan globalisasi, ada kebutuhan untuk menerapkan metode dan prosedur yang modern dan inovatif. Lebih jauh lagi, perlu dipastikan bahwa metode dan prosedur tersebut direncanakan dan diorganisir secara efektif. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa penerapan metode dan prosedur merupakan elemen penting dalam pemberdayaan masyarakat.

H. Langkah-langkah untuk Mendorong Pemberdayaan Masyarakat

Ada berbagai langkah yang perlu dilakukan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat. Individu perlu menekankan pada penguatan langkah-langkah ini secara teratur. Alasannya, konsep

pemberdayaan masyarakat perlu diperkuat dan untuk memperkuatnya, ada kebutuhan untuk menerapkan langkah-langkah yang efektif. Hal-hal tersebut dinyatakan sebagai berikut:

1. Keterampilan Pengembangan Diri

Keterampilan pengembangan diri adalah potensi dan kemampuan yang memungkinkan individu untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan yang efektif secara pribadi dan profesional. Ketika individu memahami dan berusaha untuk meningkatkan keterampilan ini, mereka dapat memanfaatkan potensi mereka dengan sebaik-baiknya. Keterampilan pengembangan pribadi dapat digunakan untuk mencapai tujuan pribadi dan profesional, membawa kemajuan dalam prospek karier, meningkatkan kekuatan, mengurangi kelemahan, mendorong mobilitas ke atas dan menemukan pemenuhan diri. Dalam lingkungan kerja, pemberi kerja perlu memberikan kesempatan kepada karyawan untuk meningkatkan keterampilan pengembangan pribadi. Ketika individu-individu menghasilkan informasi mengenai cara-cara untuk meningkatkan keterampilan pengembangan diri, mereka dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempromosikan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan kesempatan kepada semua individu, terlepas dari kategori dan latar belakang mereka untuk meningkatkan keterampilan pengembangan pribadi.

2. Mempromosikan Kerja Sama Tim

Dalam mengarah pada pemberdayaan masyarakat, setiap individu perlu mempromosikan kerja sama tim. Kerja sama tim adalah alat manajemen kerja dan proyek yang mengarah pada peningkatan kolaborasi, visibilitas, dan akuntabilitas (Focus on the Work that Matters, 2020). Mereka perlu bekerja dalam kolaborasi dan integrasi dengan orang lain. Ketika mereka bekerja secara individu, mereka perlu melakukan berbagai tugas dan aktivitas sendiri. Di sisi lain, ketika mereka bekerja dalam kelompok, mereka dapat memperoleh dukungan dan bantuan

dari orang lain dalam pelaksanaan tugas dengan cara yang memuaskan serta dalam memperoleh solusi untuk berbagai jenis masalah. Ketika individu membentuk sudut pandang bahwa mereka tidak melaksanakan tugas-tugas mereka sendiri dan memiliki dukungan dari orang lain, mereka merasa puas. Di lembaga pendidikan dari berbagai tingkat dan dalam berbagai jenis pengaturan kerja, instruktur dan supervisor menekankan pada kerja sama tim. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa mempromosikan kerja sama tim adalah salah satu langkah penting dalam mempromosikan pemberdayaan masyarakat.

3. Bangkitkan Kesadaran tentang Alternatif

Dalam kasus berbagai tugas, ada sejumlah alternatif yang tersedia. Individu perlu membangkitkan kesadaran dalam hal alternatif, dan melakukan analisis untuk memilih yang paling sesuai. Ketika individu perlu membuat keputusan dalam hal mengejar tujuan karir atau pelaksanaan tugas pekerjaan dengan cara yang teratur, cara dan metode harus sesuai. Pemilihan alternatif yang sesuai memungkinkan individu untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Ketika seseorang memilih alternatif, perlu dipastikan bahwa alternatif tersebut terbukti bermanfaat bagi individu dan masyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa membangkitkan kesadaran dan memilih alternatif yang sesuai tidak hanya memberikan kontribusi penting dalam memperkaya kehidupan individu dan membantu mereka dalam pencapaian tujuan pribadi dan profesional, tetapi juga untuk mencapai pemberdayaan masyarakat.

4. Mengelola Masalah Psikologis

Sangat penting bagi individu untuk menanamkan kompetensi dan kemampuan untuk mengelola masalah psikologis. Masalah psikologis berpengaruh pada suasana hati, pemikiran, dan perilaku individu (Penyakit Mental, 2020). Masalah psikologis seperti kemarahan, stres, depresi, frustrasi, dan kecemasan terbukti menjadi penghalang dalam proses pencapaian pem-

berdayaan masyarakat dan tumbuh menjadi warga negara yang produktif. Individu perlu menerapkan berbagai metode dan pendekatan, yang sangat penting dalam mengelola masalah psikologis.

Beberapa cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menerapkan cara-cara untuk meningkatkan kesehatan baik secara fisik maupun psikologis. Beberapa di antaranya termasuk, terlibat dalam latihan dan kegiatan fisik, membentuk lingkaran sosial, menetapkan tujuan yang realistis, menambah pengetahuan dan pemahaman seseorang, menanamkan sifat-sifat moralitas, etika, ketekunan dan ketelitian, menerapkan keterampilan manajemen waktu, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ketika individu belajar untuk mengelola masalah psikologis, mereka akan dapat berhasil mempromosikan pemberdayaan masyarakat.

5. Menanamkan Sifat Ketekunan dan Ketelitian

Pelaksanaan berbagai tugas dan kegiatan yang berhasil memungkinkan individu untuk menanamkan sifat-sifat ketekunan dan ketelitian. Ketika individu-individu tersebut tumbuh menjadi orang dewasa, mereka menyadari bahwa sangat penting bagi mereka untuk menanamkan sifat-sifat ini, sehingga mereka dapat menghasilkan hasil yang diinginkan, mencapai tujuan pribadi dan profesional, serta mempromosikan pemberdayaan masyarakat. Sifat-sifat ketekunan dan ketelitian memungkinkan individu untuk menghasilkan kesadaran dalam hal tugas dan tanggung jawab pekerjaan mereka dan tetap fokus.

Dalam mempromosikan pemberdayaan masyarakat, ada sejumlah faktor yang perlu dipertimbangkan, yang membutuhkan ketekunan dan ketelitian. Selain itu, mereka juga mampu berperilaku dengan cara yang tepat bahkan dalam situasi yang sulit dan menantang. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penanaman sifat-sifat ketekunan dan ketelitian akan memberikan kontribusi yang efektif dalam memfasilitasi perilaku dan mempromosikan pemberdayaan masyarakat.

6. Pembentukan Kondisi Lingkungan yang Aman

Kondisi lingkungan dianggap penting dalam mempromosikan pemberdayaan masyarakat. Individu-individu yang tergabung dalam komunitas yang berbeda perlu memberikan penekanan pada pembentukan kondisi lingkungan yang aman. Keamanan dalam kondisi lingkungan perlu dipromosikan di dalam rumah, lembaga pendidikan, tempat kerja, dan tempat umum. Dalam pembentukan kondisi lingkungan yang aman, faktor-faktor penting yang perlu dipertimbangkan adalah, menjaga lingkungan bebas dari berbagai jenis polusi, mempromosikan peluang pemberdayaan di kalangan perempuan, memperlakukan satu sama lain dengan hormat dan sopan, menghapuskan berbagai jenis tindakan kriminal dan kekerasan, memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada semua orang dan tidak membedakan individu dalam hal faktor apa pun, misalnya kasta, kepercayaan, ras, agama, etnis, jenis kelamin, usia, dan latar belakang sosial ekonomi.

Ketika individu-individu berada dalam lingkungan yang aman, mereka akan dapat berkontribusi secara efisien untuk mendorong pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan kondisi lingkungan yang aman dianggap sebagai langkah penting dalam mempromosikan pemberdayaan masyarakat.

7. Langkah-langkah untuk Mengatasi Masalah Sosial

Kita perlu menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi berbagai jenis masalah sosial. Masalah-masalah sosial utama yang lazim terjadi di negara ini adalah kemiskinan, buta huruf, pengangguran, tunawisma, serta kejahatan dan kekerasan. Masalah-masalah ini memiliki efek yang merugikan pada kesehatan dan kesejahteraan individu dan menimbulkan hambatan dalam pencapaian tujuan pribadi dan profesional mereka. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk merumuskan langkah-langkah untuk meringankan masalah-masalah sosial.

Langkah-langkah penting untuk meringankan masalah-masalah sosial adalah dengan memulai program-program, yang akan didedikasikan untuk menghilangkan semua masalah, yang akan berdampak buruk pada kehidupan individu. Di dalam masyarakat, individu-individu yang berfokus pada pengentasan masalah-masalah sosial perlu merumuskan langkah-langkah. Dengan cara ini, seseorang akan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempromosikan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa langkah-langkah untuk meringankan masalah sosial adalah salah satu langkah penting dalam mempromosikan pemberdayaan masyarakat.

8. Merawat Kondisi Kesehatan Seseorang

Kesehatan penting bagi semua individu, terlepas dari kelompok usia, kasta, kepercayaan, etnis, agama, pekerjaan, kategori, dan latar belakang mereka. Kita perlu fokus untuk mempromosikan kesehatan yang baik secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu, pemahaman perlu ditambah dalam hal cara-cara untuk menjaga kesehatan secara fisik maupun psikologis. Dalam menjaga kondisi kesehatan seseorang dengan cara yang efektif, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan.

Ini termasuk, diet dan nutrisi, terlibat dalam olahraga dan berbagai jenis kegiatan fisik, yoga dan meditasi, membentuk pemikiran positif, membangun persyaratan dan hubungan yang menyenangkan dan ramah dengan orang lain, kebersihan, mengenali tugas dan tanggung jawab pekerjaan seseorang, melakukan kunjungan ke pusat-pusat perawatan medis dan kesehatan jika ada masalah kesehatan dan penyakit, menerapkan langkah-langkah untuk menghilangkan masalah psikologis seperti stres, trauma, depresi, kecemasan dan frustrasi, serta perlu membentuk lingkaran sosial yang efektif untuk mengurangi rasa kesepian. Oleh karena itu, dipahami secara komprehensif,

ketika individu akan menjaga kondisi kesehatan yang baik, mereka akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempromosikan pemberdayaan masyarakat.

9. Keterampilan Berpikir Kritis

Keterampilan berpikir kritis adalah keterampilan yang perlu dipraktikkan untuk mendorong penilaian yang masuk akal dan pemikiran yang bijaksana. Seperti dalam mempraktikkan peluang pemberdayaan, individu perlu mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Hal ini melibatkan pemeriksaan fakta-fakta dalam membuat keputusan yang bijaksana atau sampai pada suatu kesimpulan. Hal ini meliputi, observasi, analisis, interpretasi, refleksi, evaluasi, kesimpulan, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan.

Ketika individu berfokus pada pelaksanaan berbagai tugas dan fungsi, mereka perlu berpikir kritis dalam hal berbagai alternatif. Alternatif yang perlu dijalankan haruslah yang bermanfaat dan konstruktif. Evaluasi terhadap alternatif-alternatif tersebut perlu dilakukan sebelum menentukan pilihan yang paling sesuai. Dalam mendorong pemberdayaan masyarakat, individu-individu perlu meningkatkan kemampuan berpikir kritis mereka. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa keterampilan ini sangat penting dalam mempromosikan pemberdayaan masyarakat, serta dalam memperkaya kehidupan seseorang.

10. Keterampilan Komunikasi

Sangatlah penting bagi setiap individu untuk memberikan perhatian terhadap peningkatan keterampilan komunikasi sepanjang hidupnya. Dalam keberhasilan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat, keterampilan ini perlu diterapkan. Komunikasi terjadi dalam bentuk lisan dan tulisan. Oleh karena itu, individu perlu meningkatkan keterampilan ini dalam kedua bentuk tersebut.

Dalam pelaksanaan komunikasi verbal, mereka perlu mempertimbangkan berbagai faktor, yaitu menjaga kontak mata,

menggunakan kata-kata yang baik dan bahasa yang sopan, menanamkan sifat-sifat moralitas dan etika dan nada suara harus fasih. Di sisi lain, ketika individu-individu berkomunikasi satu sama lain dalam bentuk tertulis, mereka perlu menggunakan kata-kata yang sopan dan menerapkan kejujuran, moralitas dan etika. Informasi yang disampaikan melalui komunikasi lisan maupun tulisan haruslah akurat. Oleh karena itu, keterampilan komunikasi dianggap sebagai salah satu keterampilan yang sangat diperlukan untuk mengarah pada perkembangan dan penguatan pemberdayaan masyarakat.

I. Strategi Pemberdayaan

Strategi pemberdayaan sangat penting untuk pertumbuhan pribadi dan pengembangan masyarakat. Strategi ini membantu individu dan masyarakat mendapatkan kepercayaan diri, mengatasi rintangan, dan mencapai tujuan mereka. Menjadi berdaya membutuhkan aspek-aspek dasar tertentu, dan kita harus memahami hal tersebut.

Pemberdayaan Sebagai Sebuah Sistem

Pemberdayaan sebagai sebuah sistem mengacu pada pemberian otonomi, sumber daya, dan dukungan kepada individu-masyarakat yang diperlukan agar mereka dapat menyuarakan kepentingannya secara efektif dan bertanggung jawab. Hal ini melibatkan pemberian informasi, alat, wewenang, dan akuntabilitas yang diperlukan untuk mengambil kepemilikan atas pekerjaan mereka, memecahkan masalah, membuat keputusan, dan pada akhirnya mempengaruhi lingkungan mereka. Ketika diterapkan dalam sebuah komunitas atau lembaga, sistem pemberdayaan menumbuhkan otonomi, harapan yang jelas, wewenang pengambilan keputusan, sumber daya, dan dukungan bagi individu.

Pendekatan ini mendorong komunikasi terbuka, umpan balik, dan pengakuan atas pencapaian seseorang atau komunitas, yang

mengarah pada peningkatan keterlibatan, inovasi, pengambilan keputusan yang lebih baik, dan tingkat retensi yang lebih tinggi.

Sistem adalah konsep holistik yang terdiri dari elemen-elemen dan keterkaitannya dengan elemen-elemen lain untuk mencapai tujuan atau sasaran bersama. Sistem ini dapat berupa sistem terbuka atau sistem tertutup. Dalam perspektif ini, pemberdayaan juga merupakan sebuah sistem yang bergantung pada keterkaitan antara kepentingan pribadi, lingkungan sekitar, dan kesempatan yang tersedia di masyarakat. Hal ini berlaku juga dalam proses pemberdayaan diri. Pemberdayaan bergantung pada hubungan dinamis antara aspek fisik, sosial dan psikologis individu. Meskipun ada banyak kesempatan di masyarakat, kesempatan tersebut tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan dari lingkungan dan minat pribadi. Lingkungan harus mendukung sistem.

Oleh karena itu, pemberdayaan tidak terjadi dalam ruang hampa; harus ada beberapa elemen yang mendukung agar sistem dapat berjalan. Tiga elemen yang dibahas di atas seperti minat pribadi, peluang dan lingkungan harus berinteraksi dengan elemen lain untuk prospek yang lebih baik.

Pemberdayaan, pada intinya, adalah tentang meningkatkan kapasitas individu atau kelompok untuk membuat pilihan dan mengambil tindakan. Ini bukan hanya tentang memberi seseorang kekuasaan, tetapi juga tentang menciptakan kondisi di mana mereka dapat menggunakan kekuasaan itu secara efektif.

Ketika kita berpikir tentang pemberdayaan sebagai sebuah sistem, kita dapat membaginya menjadi tiga komponen utama:

1. *Input*

Ini adalah sumber daya dan peluang yang memungkinkan orang untuk diberdayakan. Hal ini dapat mencakup hal-hal seperti:

- a. Pendidikan dan pelatihan

Memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan masyarakat untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan.

- b. Informasi dan akses ke data
Memberikan informasi yang dibutuhkan orang untuk memahami situasi mereka dan membuat pilihan.
 - c. Sumber daya keuangan
Menyediakan dana yang dibutuhkan orang untuk mengambil tindakan dan membuat perubahan.
 - d. Hubungan yang mendukung
Memiliki jaringan orang-orang yang dapat memberikan dorongan dan dukungan.
2. Proses
- Ini adalah cara-cara di mana sumber daya dan peluang diubah menjadi kekuatan. Hal ini dapat mencakup hal-hal seperti:
- a. Pengambilan keputusan
Memberi masyarakat kemampuan untuk membuat pilihan-pilihan mengenai kehidupan dan komunitas mereka.
 - b. Pemecahan masalah
Membantu masyarakat mengembangkan keterampilan yang mereka butuhkan untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah.
 - c. Advokasi dan negosiasi
Mengajarkan orang bagaimana membela diri mereka sendiri dan komunitas mereka.
 - d. Kepemimpinan dan mobilisasi
Mengembangkan keterampilan dan kapasitas untuk memimpin orang lain dan membawa perubahan.
3. Hasil
- Ini adalah hasil dari individu dan kelompok yang diberdayakan yang mengambil tindakan. Hal ini dapat mencakup beberapa hal seperti:
- a. Peningkatan kesejahteraan
Ketika orang diberdayakan, mereka cenderung lebih sehat, baik secara fisik maupun mental.

- b. Peningkatan partisipasi
Orang yang diberdayakan lebih mungkin untuk terlibat dalam komunitas dan proses pengambilan keputusan.
- c. Mengurangi ketidaksetaraan
Pemberdayaan dapat membantu menyamakan kedudukan dan menciptakan masyarakat yang lebih adil.
- d. Pembangunan berkelanjutan
Masyarakat yang diberdayakan akan lebih mampu mengelola sumber daya mereka dan membangun masa depan yang berkelanjutan.

Penting untuk dicatat bahwa komponen-komponen ini tidak bersifat linier. Ada lingkaran umpan balik yang konstan di antara mereka. Sebagai contoh, *output* dari sistem yang diberdayakan dapat menciptakan *input* baru, seperti sumber daya atau pengetahuan. Dan proses pemberdayaan dapat dipengaruhi oleh konteks di mana proses tersebut berlangsung.

Memikirkan pemberdayaan sebagai sebuah sistem dapat membantu kita memahami kompleksitas proses ini dan mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mempromosikannya. Hal ini juga dapat membantu kita untuk menghindari jebakan dari pendekatan pemberdayaan yang bersifat *top-down* dan paternalistik, dan sebagai gantinya berfokus pada penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat untuk memberdayakan diri mereka sendiri.

Berikut adalah beberapa contoh bagaimana pemberdayaan sebagai sebuah sistem dapat diterapkan dalam berbagai konteks:

- a. Dalam pendidikan: Sekolah dapat memberdayakan siswa dengan memberi mereka lebih banyak kendali atas pembelajaran mereka, memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, dan membantu mereka mengembangkan keterampilan berpikir kritis.
- b. Di tempat kerja: Organisasi dapat memberdayakan karyawan dengan memberi mereka wewenang untuk mengambil kepu-

- tusan, memberi kesempatan untuk belajar dan berkembang, serta menciptakan budaya saling percaya dan menghormati.
- c. Di masyarakat: Organisasi masyarakat dapat memberdayakan warga dengan menyediakan sumber daya dan pelatihan, membantu mereka mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan, serta mendukung mereka dalam upaya melakukan perubahan.

Dengan memahami pemberdayaan sebagai sebuah sistem, kita dapat bekerja untuk menciptakan dunia di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk mencapai potensi penuh mereka.

Proses Pemberdayaan

Proses pemberdayaan mengacu pada perjalanan yang ditempuh oleh individu atau kelompok untuk mendapatkan kontrol yang lebih besar atas kehidupan, keadaan, dan keputusan mereka. Ini bukan sekadar memberi seseorang kekuasaan, tetapi tentang menciptakan kondisi dan keterampilan yang diperlukan untuk memanfaatkan kekuasaan tersebut secara efektif.

Berikut ini adalah rincian dari tahapan-tahapan penting dalam proses pemberdayaan:

1. Kesadaran
Semuanya dimulai dengan mengenali situasi saat ini dan mengidentifikasi area di mana kontrol atau pengambilan keputusan yang lebih besar diinginkan. Hal ini dapat melibatkan analisis dinamika kekuasaan, ketidaksetaraan, dan keterbatasan yang dihadapi oleh diri sendiri atau masyarakat.
Dalam tahap kesadaran proses pemberdayaan, tindakan dimulai dengan visi, aspirasi mendorong keinginan untuk mendapatkan pengetahuan. Dengan demikian dalam tahap ini, kesadaran tentang subjek meningkat dengan lebih banyak informasi.
2. Pengembangan Pengetahuan dan Keterampilan
Tahap ini berfokus pada perolehan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menuju pemberdayaan. Tahap ini

dapat melibatkan pendidikan, pelatihan, akses informasi, eksplorasi sumber daya, dan pengembangan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Tahap ini memberikan berbagai bentuk peluang berdasarkan kebutuhan pemberdayaan. Seorang individu dapat meningkatkan hubungan sosial mereka, meningkatkan harga diri dan mengurangi perasaan terisolasi.

3. Pengembangan Kapasitas

Dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan, individu atau kelompok menjadi lebih siap untuk menangani tantangan dan peluang. Hal ini mencakup mengasah keterampilan kepemimpinan, membangun kepercayaan diri, menumbuhkan ketangguhan, dan membina jaringan pendukung yang kuat.

4. Aksi dan Partisipasi

Dengan peningkatan kapasitas, individu atau kelompok dapat menerjemahkan kesadaran dan pengetahuan mereka ke dalam tindakan. Hal ini dapat melibatkan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, advokasi untuk suatu tujuan, memprakarsai proyek, memobilisasi sumber daya, dan mengambil alih kepemilikan atas situasi mereka.

5. Refleksi dan Adaptasi

Proses pemberdayaan tidak bersifat linier. Mengevaluasi kemajuan secara teratur, merefleksikan keberhasilan dan tantangan, serta mengadaptasi strategi sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan. Hal ini memastikan prosesnya tetap relevan dan responsif terhadap perubahan keadaan.

6. Hasil Pemberdayaan

Pemberdayaan yang berhasil akan menghasilkan hasil yang positif. Hal ini dapat mencakup peningkatan kesejahteraan, peningkatan kemandirian, partisipasi yang lebih besar dalam masyarakat, pengurangan ketidaksetaraan, dan peningkatan kontrol atas nasib individu atau kolektif.

Penting untuk diingat bahwa proses pemberdayaan adalah:

- a. Individu dan kolektif
Baik individu maupun kelompok dapat menjalani pemberdayaan, meskipun kebutuhan dan strategi spesifiknya mungkin berbeda.
- b. Kontekstual
Langkah-langkah spesifik dan alat yang digunakan akan bervariasi tergantung pada konteksnya, seperti budaya, struktur sosial, dan dinamika kekuasaan yang ada.
- c. Iteratif dan Berkelanjutan
Pemberdayaan bukanlah pencapaian satu kali, tetapi merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan pembelajaran, adaptasi, dan tindakan yang terus menerus.

Memahami proses pemberdayaan memungkinkan kita untuk menjadi agen perubahan dalam kehidupan dan komunitas kita sendiri. Dengan membina kondisi dan keterampilan yang dibutuhkan, kita dapat bekerja menuju masa depan di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk mencapai potensi penuh mereka.

Pendekatan Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah konsep yang memiliki banyak aspek dan untuk mencapainya diperlukan pendekatan yang beragam. Pendekatan-pendekatan ini mempertimbangkan individu dan kelompok dalam konteks mereka, mengakui tantangan dan peluang unik yang ada dalam situasi yang berbeda. Berikut ini adalah tinjauan komprehensif tentang berbagai pendekatan menuju pemberdayaan:

1. Pendekatan yang berfokus pada individu
 - a. Pendidikan dan Pengembangan Keterampilan
Membekali individu dengan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan berpikir kritis akan memperkuat kapasitas pengambilan keputusan mereka. Hal ini dapat melibatkan akses ke pendidikan formal, pelatihan kejuruan, dan sumber daya informasi.

- b. Pengembangan Kapasitas
Menumbuhkan keterampilan kepemimpinan, ketahanan, dan kepercayaan diri memungkinkan individu untuk mengambil tanggung jawab dan menghadapi tantangan secara efektif. Hal ini dapat melibatkan lokakarya, program pendampingan, dan jaringan dukungan sebaya.
 - c. Pemberdayaan Psikologis
Mengatasi perasaan tidak berdaya dan membangun harga diri sangat penting bagi individu untuk mengklaim hak atas hidup mereka. Hal ini dapat melibatkan terapi, kelompok pendukung, dan kegiatan yang membangun efikasi diri.
2. Pendekatan yang berfokus pada kelompok
- a. Pengorganisasian dan Mobilisasi Komunitas
Menyatukan orang-orang di sekitar keprihatinan bersama dan memberdayakan mereka untuk secara kolektif mengadvokasi kebutuhan mereka yang mengarah pada tindakan kolektif dan perubahan struktural. Hal ini dapat melibatkan pembentukan organisasi masyarakat, pelatihan keterampilan advokasi, dan pengorganisasian kampanye.
 - b. Pembangunan Partisipatif
Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan mereka akan meningkatkan kontrol mereka terhadap sumber daya dan hasil-hasilnya. Hal ini dapat melibatkan penganggaran partisipatif, perencanaan proyek yang dipimpin oleh masyarakat, dan inisiatif tata kelola lokal.
 - c. Pendekatan Berbasis Hak
Memastikan akses terhadap hak-hak dasar manusia, seperti kesehatan, pendidikan, dan peluang ekonomi, memberikan landasan bagi pemberdayaan. Hal ini melibatkan advokasi untuk perubahan hukum dan kebijakan yang mempromosikan kesetaraan dan keadilan sosial.

3. Pendekatan Struktural

a. Mengatasi Ketidaksetaraan dan Ketidakseimbangan Kekuasaan

Menantang struktur dan praktik diskriminatif yang membatasi peluang bagi kelompok tertentu sangat penting untuk perubahan sistemik. Hal ini dapat mencakup mempromosikan kebijakan yang mengatasi ketidaksetaraan berdasarkan gender, ras, kelas, dan faktor lainnya.

b. Reformasi Kelembagaan

Membangun lembaga-lembaga demokratis dan memastikan akuntabilitas akan mendorong transparansi dan daya tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat mencakup penguatan supremasi hukum, mendorong media yang independen, dan mendorong partisipasi publik dalam proses pemerintahan.

c. Pemberdayaan Ekonomi

Memastikan akses terhadap pekerjaan yang layak, sumber daya keuangan, dan peluang ekonomi yang memberikan individu dan masyarakat kemampuan untuk membuat pilihan dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Hal ini dapat melibatkan promosi pengembangan usaha kecil, praktik perdagangan yang adil, dan program jaring pengaman sosial.

4. Pendekatan Lintas Sektoral

Mengakui bahwa individu memiliki berbagai identitas dan mengalami penindasan yang tumpang tindih membutuhkan pendekatan interseksional untuk pemberdayaan. Hal ini berarti mengatasi tantangan unik yang dihadapi oleh kelompok-kelompok terpinggirkan yang berada di persimpangan berbagai ketidaksetaraan, seperti perempuan kulit berwarna, masyarakat yang hidup dalam kemiskinan, atau masyarakat adat yang menghadapi degradasi lingkungan.

5. Sensitivitas Kontekstual

Pendekatan pemberdayaan yang efektif harus peka terhadap konteks spesifik, dengan mempertimbangkan norma-norma budaya, sumber daya lokal, dan dinamika kekuasaan yang ada. Hal ini membutuhkan fleksibilitas dan kolaborasi dengan masyarakat setempat untuk beradaptasi dan menyesuaikan intervensi untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi mereka.

6. Pemberdayaan yang berkelanjutan

Pemberdayaan bukanlah upaya sekali jadi; hal ini membutuhkan komitmen dan dukungan yang berkelanjutan untuk memastikan kemajuan jangka panjang. Hal ini melibatkan pembangunan kapasitas di dalam masyarakat, menciptakan lingkungan yang mendukung, dan mendorong mekanisme untuk pembelajaran dan adaptasi yang berkelanjutan.

Pendekatan terhadap pemberdayaan bukanlah satu pendekatan yang cocok untuk semua. Memahami berbagai pendekatan, kekuatan dan keterbatasannya, serta bagaimana pendekatan tersebut dapat diadaptasi ke dalam konteks yang berbeda sangatlah penting untuk mendukung individu dan masyarakat secara efektif dalam mencapai kendali yang lebih besar atas kehidupan dan nasib mereka.

Waktu Ideal untuk Pemberdayaan

Tidak ada waktu atau usia tertentu untuk diberdayakan. Ini adalah proses seumur hidup. Ada dua faktor yang mempengaruhi pemberdayaan, yaitu faktor spasial dan temporal, seperti di mana Anda tinggal dan kapan Anda melakukan upaya pemberdayaan?

1. Faktor spasial

Tempat adalah penentu penting dalam proses pemberdayaan. Kesempatan untuk memberdayakan diri sendiri akan bergantung pada tempat di mana Anda berada. Biasanya ada perbedaan antara orang yang tinggal di daerah perkotaan dan pedesaan dalam mendapatkan kesempatan untuk memberdayakan diri.

Akses informasi yang tinggi di daerah perkotaan lebih tinggi daripada di pedesaan yang memberikan kontribusi yang cukup penting dalam menentukan tingkat pemberdayaan.

2. Faktor temporal

Meskipun usia tidak dianggap sebagai alat yang penting dalam pemberdayaan, namun hal ini memiliki dampak yang cukup besar jika proses pemberdayaan dimulai sejak dini. Tingkat antusiasme dan pikiran yang dinamis untuk mengakses berbagai hal dengan sangat mudah lebih banyak dimiliki oleh kaum muda yang mencari jalan baru untuk melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda. Sementara orang yang lebih tua tidak berada dalam posisi untuk menerima perubahan karena mereka sangat peduli dengan status quo. Namun, anak muda sangat energik dan siap menerima perubahan.

Selain tempat dan usia, pendidikan juga memiliki pengaruh penting dalam pemberdayaan. Melalui pendidikan, Anda dapat dengan mudah menganalisis berbagai hal dengan benar, mendapatkan informasi latar belakang, keterampilan komunikasi, dll. Namun, ada bukti bahwa orang-orang yang buta huruf telah memberdayakan diri mereka sendiri dan juga masyarakat dengan cara yang panjang.

Tidak ada waktu yang ideal untuk pemberdayaan, karena ini adalah proses yang berkelanjutan yang dapat dan harus dipupuk sepanjang hidup. Namun, periode atau keadaan tertentu dapat memberikan peluang unik bagi individu dan komunitas untuk memulai perjalanan pemberdayaan yang lebih terfokus. Berikut adalah beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan:

1. Periode Transisi:

a. Masa kanak-kanak dan remaja

Membangun kepercayaan diri, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, dan menumbuhkan kemandirian selama masa-masa formatif ini akan menjadi fondasi yang kuat untuk pemberdayaan di masa depan.

- b. Perubahan Karier atau Kehilangan Pekerjaan
Transisi dalam kehidupan profesional dapat menjadi pendorong untuk memperoleh keterampilan baru, menjelajahi jalan yang berbeda, dan mengambil lebih banyak kepemilikan atas jalur karier seseorang.
 - c. Pensiun
Tahap ini dapat menjadi kesempatan untuk mengejar minat seumur hidup, terlibat dalam kegiatan komunitas, dan menyumbangkan keahlian atau pengalaman dengan cara yang baru.
2. Masa Krisis atau Tantangan
- a. Menghadapi kemunduran pribadi atau mengatasi kesulitan dapat membangun ketahanan dan sumber daya yang mengarah pada rasa yang lebih kuat dari agensi dan pemberdayaan diri.
 - b. Gejolak sosial atau politik dapat menciptakan celah untuk aksi kolektif dan advokasi, memberdayakan masyarakat untuk mendorong perubahan dan menuntut hak.
 - c. Tantangan lingkungan dapat memotivasi masyarakat untuk mengadopsi praktik-praktik berkelanjutan dan mengambil alih kepemilikan atas lingkungan setempat.
3. Periode Peningkatan Kesadaran
- a. Paparan terhadap informasi atau perspektif baru dapat memicu keinginan untuk berubah dan mendorong individu untuk mempertanyakan struktur kekuasaan atau ketidaksetaraan yang ada.
 - b. Berhubungan dengan jaringan yang mendukung atau mentor dapat memberikan dorongan, sumber daya, dan panduan untuk perjalanan pemberdayaan.
 - c. Berpartisipasi dalam lokakarya, program pelatihan, atau inisiatif komunitas dapat membekali individu dengan keterampilan dan pengetahuan untuk mengadvokasi diri mereka sendiri atau komunitas mereka.

Perlu diingat, bahwa Pemberdayaan adalah proses seumur hidup, bukan hanya sekali saja. Kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dapat muncul di setiap tahap kehidupan. Waktu yang ideal untuk pemberdayaan sering kali bersifat subyektif dan tergantung pada keadaan dan kebutuhan individu. Menciptakan lingkungan yang mendukung, membina hubungan yang saling mendukung, dan menyediakan akses ke sumber daya dan peluang sangat penting untuk pemberdayaan yang berkelanjutan.

Pada akhirnya, faktor yang paling penting adalah membuka diri terhadap peluang untuk berkembang dan mengambil inisiatif kapan pun memungkinkan. Terlepas dari waktu yang spesifik, setiap langkah menuju peningkatan kontrol, pengambilan keputusan, dan agensi akan membuka jalan menuju masa depan yang lebih berdaya.

Indikator Pemberdayaan

Mengukur pemberdayaan bisa jadi rumit, karena ini adalah konsep yang memiliki banyak sisi yang mencakup agensi individu dan kolektif, kontrol atas sumber daya dan keputusan, dan kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Namun, berbagai indikator dapat digunakan untuk memahami kemajuan dan dampak inisiatif pemberdayaan. Indikator-indikator ini memberikan wawasan tentang berbagai aspek pemberdayaan dan dapat digunakan untuk memantau, mengevaluasi, dan menyesuaikan strategi agar lebih efektif. Mereka bertindak sebagai penanda di sepanjang jalur pemberdayaan, memberikan wawasan tentang kemajuan dan area yang membutuhkan fokus lebih lanjut.

Berikut ini adalah beberapa kategori indikator pemberdayaan, dengan contoh-contohnya:

1. Indikator Tingkat Individu
 - a. Pemberdayaan Psikologis

Peningkatan harga diri dan kepercayaan diri. Rasa memiliki kendali atas hidup dan masa depan seseorang. Berkurangnya perasaan tidak berdaya dan ketidakberdayaan.

b. Keterampilan dan Kemampuan

Perolehan pengetahuan dan keterampilan baru (misalnya, melek huruf, melek digital, keterampilan kejuruan). Berpikir kritis dan kemampuan memecahkan masalah. Peningkatan kemampuan pengambilan keputusan dan komunikasi. Memiliki akses terhadap informasi dan mengembangkan keterampilan yang relevan akan memberdayakan individu untuk menavigasi kehidupan mereka dan membuat pilihan yang tepat. Indikatornya dapat berupa tingkat pendidikan, tingkat melek huruf, atau kemahiran dalam keterampilan tertentu seperti manajemen keuangan atau komunikasi.

c. Partisipasi dan Keagenan

Peningkatan partisipasi dalam kegiatan masyarakat dan proses pengambilan keputusan. Secara aktif mencari dan memanfaatkan sumber daya atau peluang. Mengambil inisiatif dan peran kepemimpinan dalam mengatasi tantangan.

d. Kesejahteraan dan Kualitas Hidup

Hasil kesehatan yang lebih baik (misalnya, penurunan angka kematian bayi, peningkatan usia harapan hidup). Peningkatan akses terhadap pendidikan, perawatan kesehatan, dan layanan penting lainnya. Berkurangnya kerentanan terhadap kemiskinan, eksploitasi, dan kekerasan.

e. Pengambilan keputusan

Ini termasuk kemampuan untuk membuat pilihan tentang kehidupan seseorang dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi mereka. Indikatornya dapat berupa partisipasi dalam pengambilan keputusan rumah tangga, memberikan suara dalam pemilihan umum, atau memilih jalur karier.

- f. Harga diri dan kepercayaan diri
Merasa percaya diri dan mampu mengambil tindakan sangat penting untuk pemberdayaan. Indikatornya dapat berupa tingkat efikasi diri yang dilaporkan sendiri, kemampuan untuk mengatasi tantangan, dan kemauan untuk mengungkapkan pendapat.
- g. Kemandirian ekonomi
Akses yang aman terhadap pendapatan dan sumber daya memungkinkan individu untuk membuat pilihan dan menjalani kehidupan yang bermartabat. Indikatornya dapat berupa status pekerjaan, tingkat pendapatan, atau kepemilikan aset seperti tanah atau properti.
- h. Kemandirian pribadi
Ini mencakup indikator seperti harga diri, kepercayaan diri, keterampilan mengambil keputusan, dan kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengejar tujuan.
- i. Pemikiran kritis
Kemampuan untuk menganalisis informasi, mengevaluasi pilihan, dan membuat pilihan yang tepat sangat penting bagi individu yang berdaya.
- j. Ketahanan
Mengatasi tantangan, beradaptasi dengan perubahan, dan bangkit kembali dari kemunduran menunjukkan kapasitas individu untuk kemandirian dan pemberdayaan.
- k. Akses ke sumber daya dan peluang
Indikator seperti pendidikan, perawatan kesehatan, pekerjaan, dan keamanan finansial memberi individu sarana untuk membuat pilihan dan menjalankan agensi.
- l. Partisipasi dan suara
Terlibat secara aktif dalam kegiatan masyarakat, proses pengambilan keputusan, dan mengadvokasi hak-hak individu atau kolektif merupakan ciri khas individu yang berdaya.

2. Indikator Tingkat Kelompok

a. Kohesi dan Solidaritas Masyarakat

Meningkatnya rasa saling percaya dan kerja sama dalam masyarakat. Rasa identitas kolektif yang kuat dan tujuan bersama. Jaringan dukungan sosial yang efektif dan mekanisme untuk saling membantu. Ikatan sosial yang kuat dan kepercayaan di antara anggota masyarakat mendorong kolaborasi dan dukungan. Indikatornya dapat berupa tingkat konflik sosial, kesediaan untuk membantu orang lain, dan partisipasi dalam aksi kolektif. Hubungan yang kuat, jaringan yang saling mendukung, dan rasa memiliki komunitas mendorong aksi kolektif dan pemberdayaan

b. Aksi Kolektif dan Advokasi

Pembentukan organisasi dan jaringan masyarakat untuk mengatasi masalah bersama. Peningkatan partisipasi dalam protes, kampanye, dan upaya advokasi kebijakan. Kemampuan untuk mempengaruhi keputusan dan alokasi sumber daya di tingkat lokal dan regional. Masyarakat yang mengorganisir, memobilisasi, dan mengadvokasi kebutuhan dan hak-hak mereka menunjukkan tingkat keberdayaan yang tinggi.

c. Akses yang adil terhadap sumber daya dan kesempatan

Berkurangnya diskriminasi gender, ras, atau bentuk-bentuk diskriminasi lainnya dalam akses pendidikan, pekerjaan, dan kepemilikan tanah. Distribusi sumber daya yang adil dan transparan di dalam masyarakat. Peningkatan representasi kelompok-kelompok yang terpinggirkan dalam badan-badan pengambilan keputusan. Akses yang adil terhadap sumber daya seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur memberdayakan masyarakat untuk berkembang. Indikatornya dapat berupa tingkat melek huruf, akses kesehatan, dan ketersediaan layanan dasar. Indikator

seperti sumber daya bersama, layanan publik, dan distribusi kekuasaan yang adil di dalam komunitas menunjukkan pemberdayaan.

d. Partisipasi masyarakat

Keterlibatan aktif dalam urusan masyarakat dan proses pengambilan keputusan menunjukkan agensi kolektif. Indikatornya dapat berupa partisipasi dalam organisasi masyarakat, menjadi sukarelawan, atau peran kepemimpinan dalam masyarakat. Memiliki suara dalam proses politik dan perwakilan dalam badan-badan pengambilan keputusan memastikan masyarakat memiliki suara dalam masa depan mereka. Indikatornya dapat berupa jumlah pemilih, representasi kelompok-kelompok yang terpinggirkan dalam pemerintahan, dan efektivitas upaya advokasi. Keterwakilan yang adil dalam proses pengambilan keputusan, inisiatif masyarakat, dan peran kepemimpinan menunjukkan masyarakat yang berdaya.

e. Peningkatan kesejahteraan

Peningkatan kualitas hidup, hasil kesehatan, dan berkurangnya kesenjangan merupakan indikator kemajuan masyarakat menuju pemberdayaan.

3. Indikator Tingkat Struktural

a. Tata Kelola dan Kelembagaan

Penguatan lembaga-lembaga demokratis dan supremasi hukum. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pejabat pemerintah. Perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar.

b. Kebijakan dan Perundang-undangan yang mendukung

Kebijakan yang mendorong kesetaraan gender, inklusi sosial, dan peluang ekonomi untuk semua. Investasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan jaring pengaman sosial. Kerangka hukum yang melindungi dari diskriminasi dan eksploitasi.

- c. **Pemberdayaan Ekonomi**
Peningkatan akses terhadap pekerjaan yang layak dan upah yang adil. Perluasan peluang untuk kewirausahaan dan pengembangan usaha kecil. Pemerataan manfaat ekonomi dan pengurangan ketimpangan pendapatan. Akses terhadap pekerjaan yang layak, upah yang adil, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam ekonomi memberdayakan individu dan masyarakat.
- d. **Kebijakan dan hukum**
Hukum dan kebijakan yang mempromosikan kesetaraan, hak asasi manusia, dan akses terhadap peluang menciptakan lingkungan yang mendukung pemberdayaan. Indikatornya dapat berupa undang-undang anti-diskriminasi, kebijakan kesetaraan gender, dan program-program jaring pengaman sosial. Tidak adanya hukum dan kebijakan yang diskriminatif berdasarkan gender, ras, kelas, atau faktor lainnya menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pemberdayaan.
- e. **Akuntabilitas dan transparansi kelembagaan**
Lembaga-lembaga yang dapat dipercaya dan proses tata kelola yang transparan memastikan kekuasaan tidak terkonsentrasi di tangan segelintir orang. Indikatornya dapat berupa ukuran korupsi, kebebasan berbicara dan berkumpul, dan efektivitas sistem peradilan. Lembaga-lembaga yang transparan dan akuntabel yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan merespons kebutuhan masyarakat berkontribusi pada pemberdayaan sistemik.
- f. **Ketimpangan sosial dan ekonomi**
Berkurangnya ketimpangan pendapatan, kekayaan, dan akses terhadap sumber daya akan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berdaya. Indikatornya dapat berupa koefisien Gini, tingkat kemiskinan, dan akses terhadap pendidikan dan perawatan kesehatan di berbagai kelompok.

- g. Kelestarian lingkungan
Praktik-praktik yang melindungi lingkungan dan memastikan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan berkontribusi pada pemberdayaan jangka panjang untuk generasi sekarang dan yang akan datang.
- h. Kerja sama internasional dan hak asasi manusia
Kolaborasi global dan penegakan standar hak asasi manusia internasional menciptakan kerangka kerja yang mendukung pemberdayaan lintas batas.

Untuk menyusun indikator pemberdayaan ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan penting, seperti:

1. Kekhususan Konteks
Indikator harus disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan spesifik dari populasi atau komunitas yang sedang dinilai.
2. Partisipasi dan Inklusi
Keterlibatan yang berarti dari anggota masyarakat dalam mengidentifikasi dan memilih indikator yang relevan sangat penting. Masyarakat dan individu harus dilibatkan dalam memilih dan memantau indikator untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya.
3. Multidimensi
Pemberdayaan memiliki banyak aspek, dan menggunakan kombinasi indikator dari berbagai kategori akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif, sehingga mengandalkan satu indikator saja tidaklah cukup. Diperlukan seperangkat indikator yang komprehensif di berbagai kategori.
4. Perspektif Jangka Panjang
Pemberdayaan adalah proses yang berkelanjutan, dan indikator harus dipantau dari waktu ke waktu untuk melacak kemajuan dan menginformasikan upaya yang sedang berlangsung. Mengukur dan memantau indikator harus menjadi proses yang berkelanjutan untuk melacak kemajuan, mengidentifikasi

tantangan, dan mengadaptasi strategi untuk pemberdayaan yang lebih besar.

Dengan menggunakan indikator-indikator ini dan mengadaptasinya ke dalam konteks tertentu, kita dapat memperoleh wawasan yang berharga tentang efektivitas intervensi pemberdayaan dan bekerja menuju masa depan yang lebih adil dan merata di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk mencapai potensi penuh mereka. Dengan memahami dan memanfaatkan indikator pemberdayaan, kita dapat memperoleh wawasan yang berharga tentang kemajuan yang telah dicapai dan bidang-bidang yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Pengetahuan ini memberdayakan kita untuk merancang intervensi yang efektif, mengadvokasi perubahan sistemik, dan pada akhirnya menciptakan dunia di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk mencapai potensi penuh mereka.

Pemberdayaan adalah istilah kualitatif; oleh karena itu tidak dapat diukur secara langsung. Namun, ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai tingkat pemberdayaan. Indikator-indikator ini diterima di sebagian besar tempat. Indikator-indikator tersebut adalah akses terhadap informasi, kemampuan analisis, kemampuan komunikasi, kerja sama dan kepercayaan diri.

1. Akses terhadap informasi

Ini adalah indikator pemberdayaan yang paling penting karena ini adalah dasar atau titik awal pemberdayaan. Jika Anda ingin melakukan suatu pekerjaan, Anda harus mengetahui tiga hal - apa yang harus dilakukan? bagaimana cara melakukannya? kapan melakukannya? Klarifikasi dari pertanyaan-pertanyaan ini terletak pada aksesibilitas informasi, yang akan membawa Anda ke depan pintu pemberdayaan.

2. Keterampilan analitis

Setelah Anda diberdayakan, Anda harus memiliki keterampilan analitis yang memberi Anda kemampuan untuk menganalisis

berbagai hal dan memulainya tepat waktu dengan cara yang akurat yang memberi Anda manfaat maksimal dari aktivitas Anda.

3. Keterampilan komunikasi
Interaksi dan diskusi Anda dengan orang lain akan membawa perubahan yang signifikan dalam diri Anda, melalui transfer pengetahuan yang saling menguntungkan melalui pemberdayaan.
4. Kerja sama
Hal ini akan meningkatkan kerja sama di antara orang-orang di dalam kelompok. Lebih penting dalam komunitas untuk membuat orang untuk bersama.
5. Percaya diri
Dengan pemberdayaan, Anda akan mendapatkan rasa percaya diri yang akan membedakan Anda dengan orang lain. Sekarang Anda akan dapat melakukan berbagai hal dengan kepercayaan diri dan pemahaman yang tepat.

Memberdayakan Kelompok Sasaran

Di sebagian besar negara-negara berkembang termasuk Indonesia, pemberdayaan didasarkan pada kelompok-kelompok yang ditargetkan, tergantung pada perkembangan sosial-ekonomi mereka. Dalam hubungan ini, fokus yang lebih besar diberikan kepada wanita (yang dianggap sebagai bagian paling rentan dalam masyarakat) dan pemuda (yang lebih energik dan antusias) untuk memanfaatkan layanan mereka untuk kepentingan masyarakat.

Pemberdayaan kelompok sasaran mengacu pada upaya yang disengaja dan berkelanjutan untuk meningkatkan kontrol, agensi, dan suara individu atau masyarakat yang menghadapi marginalisasi atau kerentanan. Proses ini bertujuan untuk membekali mereka dengan keterampilan, sumber daya, dan kesempatan untuk membuat pilihan berdasarkan informasi, mengadvokasi hak-hak mereka, dan berpartisipasi secara bermakna dalam masyarakat.

Memberdayakan kelompok sasaran adalah konsep multifaset yang mencakup upaya untuk meningkatkan kontrol, agensi, dan otonomi individu dan masyarakat yang menghadapi marginalisasi atau kerentanan. Pemberdayaan adalah tentang menciptakan kondisi di mana kelompok-kelompok ini dapat membuka potensi penuh mereka dan berpartisipasi secara bermakna dalam masyarakat. Memberdayakan kelompok-kelompok yang ditargetkan adalah proses penting dalam membangun masyarakat desa yang lebih adil dan setara. Pemberdayaan adalah tentang menyediakan alat dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk mencapai potensi penuh mereka dan berpartisipasi secara bermakna dalam masyarakat.

Mengapa Memberdayakan Kelompok Sasaran itu Penting? Berikut alasannya.

1. Mempromosikan keadilan sosial
Mengatasi ketidaksetaraan dan ketidakadilan, menciptakan lapangan bermain yang setara bagi semua individu dan masyarakat.
2. Meningkatkan kemampuan individu dan kolektif
Individu dan masyarakat yang diberdayakan memiliki kendali yang lebih besar atas kehidupan, keputusan, dan nasib mereka.
3. Memperkuat komunitas
Menumbuhkan kolaborasi, solidaritas, dan ketahanan di dalam masyarakat, sehingga memungkinkan mereka untuk mengatasi tantangan secara kolektif.
4. Mendorong pembangunan berkelanjutan
Masyarakat yang diberdayakan berkontribusi secara aktif terhadap tujuan pembangunan, mendorong pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kemajuan sosial.

Kelompok sasaran mencakup individu atau masyarakat yang menghadapi ketidakberuntungan karena berbagai faktor, termasuk:

- a. Pemberdayaan perempuan
Pemberdayaan perempuan adalah proses peningkatan kapasitas perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan di luar kegiatan rumah tangga sehari-hari. Pemberdayaan bangsa tidak akan terwujud kecuali jika perempuan diberdayakan. Perempuan memainkan peran penting dalam pembangunan keluarga dan negara.
- b. Pemberdayaan kaum muda
Pemberdayaan kaum muda adalah sebuah proses sikap, struktural dan kultural di mana kaum muda memperoleh kemampuan, otoritas dan agensi untuk membuat keputusan dan mengimplementasikan perubahan dalam kehidupan mereka sendiri dan membawa perubahan bagi masyarakat. Memberdayakan kaum muda berarti menciptakan dan mendukung kondisi yang memungkinkan kaum muda untuk bertindak atas nama mereka sendiri dan dengan cara mereka sendiri, bukan atas arahan orang lain.
- c. Ras dan etnisitas
Diskriminasi sistematis dan ketidakadilan historis dapat membatasi peluang dan akses ke sumber daya untuk kelompok ras atau etnis tertentu.
- d. Jenis kelamin
Stereotip dan ketidaksetaraan gender dapat membuat perempuan dan individu terstereotip dirugikan dalam berbagai aspek kehidupan.
- e. Status sosial ekonomi
Kemiskinan dan pencabutan hak ekonomi dapat secara signifikan membatasi akses terhadap pendidikan, perawatan kesehatan, dan pekerjaan yang layak.
- f. Disabilitas
Disabilitas fisik, mental, atau intelektual dapat menciptakan hambatan terhadap pendidikan, pekerjaan, dan inklusi sosial.

g. Usia

Anak-anak, remaja, dan orang dewasa yang lebih tua mungkin memiliki kebutuhan dan kerentanan khusus yang membutuhkan dukungan dan strategi pemberdayaan yang disesuaikan.

Inisiatif pemberdayaan yang berhasil akan memberikan hasil yang positif di tingkat individu, komunitas, dan masyarakat. Dampaknya adalah:

1. Peningkatan kesejahteraan
Peningkatan akses terhadap pendidikan, perawatan kesehatan, dan peluang ekonomi mengarah pada hasil kesehatan yang lebih baik, mengurangi ketidaksetaraan, dan meningkatkan kualitas hidup.
2. Peningkatan inklusi dan partisipasi
Pemberdayaan mendorong partisipasi aktif di bidang sosial, politik, dan ekonomi, yang mengarah pada masyarakat yang lebih inklusif dan adil.
3. Peningkatan ketahanan dan kapasitas adaptasi
Masyarakat yang diberdayakan untuk mengatasi tantangan dan beradaptasi terhadap perubahan keadaan berkontribusi terhadap stabilitas dan pembangunan masyarakat secara keseluruhan.

Memberdayakan kelompok-kelompok yang ditargetkan menuntut perhatian terhadap tantangan-tantangan khusus, seperti:

- a. Ketidaksetaraan antar kelompok
Mengenali dan mengatasi ketidakberuntungan yang tumpang tindih yang dihadapi oleh individu berdasarkan berbagai faktor seperti ras, gender, dan kelas sangat penting untuk intervensi yang efektif.
- b. Keberlanjutan dan komitmen jangka panjang
Pendanaan yang berkelanjutan, dukungan kelembagaan, dan pengembangan kapasitas yang berkelanjutan sangat penting

untuk memastikan dampak jangka panjang dan mencegah kemunduran.

c. Kepemilikan dan partisipasi masyarakat

Masyarakat yang berdaya akan terbangun jika kelompok-kelompok yang menjadi sasaran secara aktif berpartisipasi dalam mengidentifikasi kebutuhan, merancang solusi, dan mengimplementasikan inisiatif.

Dengan memahami tantangan yang dihadapi oleh kelompok sasaran, mendorong partisipasi inklusif, dan menerapkan pendekatan pemberdayaan yang beragam, kita dapat bekerja untuk menciptakan dunia di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk mencapai potensi penuh mereka dan berkontribusi secara bermakna bagi masyarakat.

Ini hanyalah sebuah titik awal untuk mengeksplorasi topik yang kompleks dan penting dalam memberdayakan kelompok-kelompok yang menjadi sasaran. Ingatlah bahwa memberdayakan orang lain bukan hanya menawarkan solusi, tetapi juga berjalan bersama mereka, mendukung agensi mereka, dan merayakan perjalanan mereka menuju masa depan yang lebih adil dan setara.

Memberdayakan kelompok sasaran adalah upaya berkelanjutan yang membutuhkan kolaborasi antara individu, komunitas, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah. Dengan mengadopsi strategi yang komprehensif, mengatasi tantangan secara efektif, dan mendorong pendekatan yang berkelanjutan, kita dapat bekerja menuju dunia di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk berkembang dan berkontribusi pada masyarakat yang adil dan setara.

Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan Metode Pemberdayaan

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan beberapa metode pemberdayaan seperti pengorganisasian masyarakat (*community organizing*), pembangunan berbasis masyarakat (*community-based development*), dan penyediaan layanan berbasis

masyarakat (*community-based service provision*) di lingkungan pedesaan. Beberapa faktor tersebut diantaranya: pentingnya pengembangan kepemimpinan, perencanaan strategis, dan pembangunan jaringan dalam memobilisasi masyarakat untuk memecahkan masalah bersama. Strategi penting yang direkomendasikan untuk mengatasi hambatan adalah membantu organisasi masyarakat memanfaatkan organisasi perantara seperti jaringan pengorganisasian dan pusat pelatihan yang telah muncul selama beberapa dekade terakhir (Dreier, 1996).

Berikut penjelasan beberapa metode pemberdayaan yang dimaksud di atas:

1. Pengorganisasian Masyarakat (*community organizing*)

Pengorganisasian masyarakat adalah sebuah proses yang melibatkan mobilisasi dan pemberdayaan warga masyarakat untuk mengatasi isu-isu dan masalah bersama di lingkungan mereka. Pengorganisasian masyarakat berfokus pada pembangunan kekuatan kolektif, pengembangan kepemimpinan, dan menciptakan perubahan yang berkelanjutan melalui upaya-upaya akar rumput. Pengorganisasian masyarakat bertujuan untuk mewujudkan perbaikan sosial, ekonomi, dan politik dengan melibatkan warga setempat dalam mengidentifikasi masalah, mengembangkan solusi, dan mengadvokasi hasil yang positif.

Pengorganisasian masyarakat melibatkan mobilisasi masyarakat untuk memerangi masalah-masalah bersama dan untuk meningkatkan suara mereka dalam lembaga-lembaga dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka dan masyarakat. Pengorganisasian masyarakat merupakan strategi kunci untuk mendorong pemberdayaan masyarakat dan mengatasi kondisi fisik, ekonomi, dan sosial di lingkungan pedesaan. Upaya pengorganisasian masyarakat yang berhasil sering kali mengarah pada perbaikan masalah sosial dan kondisi ekonomi di lingkungan pedesaan dan perkotaan yang tertekan.

2. Pembangunan Berbasis masyarakat (*community-based development*)

Pembangunan berbasis masyarakat mengacu pada pendekatan partisipatif untuk meningkatkan kondisi fisik, ekonomi, dan sosial di suatu wilayah atau lingkungan tertentu. Pendekatan ini melibatkan penduduk setempat, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan dalam mengidentifikasi dan menerapkan strategi untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan unik masyarakat. Inisiatif pembangunan berbasis masyarakat sering kali mencakup kegiatan seperti pembangunan atau rehabilitasi perumahan yang terjangkau, penciptaan lapangan kerja, dukungan usaha kecil, perbaikan infrastruktur, dan proyek-proyek lain yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan masyarakat secara keseluruhan. Pendekatan ini menekankan pada pemberdayaan lokal, kolaborasi, dan investasi masyarakat jangka panjang.

Pembangunan berbasis masyarakat melibatkan upaya-upaya berbasis lingkungan untuk meningkatkan kondisi fisik dan ekonomi suatu wilayah, seperti pembangunan atau rehabilitasi perumahan dan penciptaan lapangan kerja dan usaha bisnis. Ini adalah strategi lain untuk mempromosikan pemberdayaan masyarakat dan mengatasi kondisi fisik, ekonomi, dan sosial di lingkungan pedesaan maupun perkotaan. Pembangunan berbasis masyarakat sering kali merupakan langkah logis menuju agenda pemberdayaan masyarakat yang komprehensif, dan akan lebih efektif jika menjadi bagian dari strategi pengorganisasian masyarakat.

3. Layanan Berbasis Masyarakat

Penyediaan layanan berbasis komunitas mengacu pada pemberian layanan sosial kepada individu dan keluarga di wilayah geografis atau lingkungan tertentu. Pendekatan ini melibatkan kerja sama yang erat dengan penduduk setempat dan organisasi masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan

unik masyarakat serta mengembangkan layanan dan program yang ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Penyediaan layanan berbasis komunitas dapat mencakup berbagai layanan, seperti perawatan kesehatan, pendidikan, pelatihan kerja, penitipan anak, dan layanan dukungan lainnya. Pendekatan ini menekankan pentingnya pengetahuan lokal, kepekaan budaya, dan keterlibatan masyarakat dalam memberikan layanan yang efektif dan responsif kepada mereka yang paling membutuhkan.

Penyediaan layanan berbasis komunitas melibatkan upaya di tingkat lingkungan untuk memberikan layanan sosial kepada masyarakat. Hal ini dapat mencakup program penjangkauan dan konseling mengenai berbagai masalah seperti kredit pajak, konseling hipotek dan kredit, pengujian cat berbahan dasar timbal, pinjaman yang adil dan pengujian perumahan yang adil, konseling pekerjaan, imunisasi, pendaftaran pemilih, layanan administrasi kependudukan, dan layanan publik lainnya.

Pengorganisasian masyarakat yang sukses membutuhkan pelatihan kepemimpinan dan pengembangan kapasitas untuk memastikan bahwa para pengorganisir dan anggota masyarakat memiliki keterampilan, pengetahuan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mereka secara efektif. Hal ini melibatkan beberapa elemen kunci:

1. Pengembangan Kepemimpinan

Memberikan pelatihan dan dukungan untuk mengembangkan pemimpin yang kuat, terampil, dan berasal dari masyarakat adat. Hal ini termasuk memberdayakan individu untuk mengambil peran kepemimpinan, membina komunikasi yang efektif dan keterampilan pengambilan keputusan, dan mempromosikan rasa misi yang jelas dan kepentingan jangka panjang dalam masyarakat.

2. **Pengembangan Kapasitas Organisasi**
Memperkuat kapasitas organisasi masyarakat untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan mempertahankan inisiatif mereka. Hal ini dapat mencakup pengembangan struktur organisasi yang efektif, meningkatkan kemampuan penggalangan dana dan manajemen keuangan, meningkatkan kemampuan penjangkauan dan advokasi, serta membina kolaborasi dan jaringan dengan organisasi dan pemangku kepentingan lainnya.
3. **Pendidikan dan Peningkatan Kesadaran**
Mempromosikan kesadaran dan pemahaman tentang isu-isu sosial, dinamika masyarakat, dan strategi yang efektif untuk menciptakan perubahan positif. Hal ini termasuk memberikan pendidikan tentang topik-topik yang relevan, terlibat dalam dialog dan refleksi, dan meningkatkan kesadaran tentang akar penyebab tantangan masyarakat.
4. **Mobilisasi Sumber Daya**
Membangun kemampuan untuk memobilisasi sumber daya dan menghasilkan dukungan eksternal untuk kegiatan masyarakat dari berbagai sumber, termasuk pemerintah, organisasi filantropi, bisnis, dan masyarakat. Hal ini mencakup pengembangan keterampilan untuk mengadvokasi kebutuhan masyarakat dan mendapatkan sumber daya yang diperlukan untuk mengimplementasikan inisiatif masyarakat.

Dengan berinvestasi dalam pelatihan kepemimpinan serta pengembangan kapasitas, para pengorganisir dan organisasi masyarakat bisa meningkatkan efektivitas, keberlanjutan, dan dampaknya dalam mengatasi masalah-masalah umum dan memperbaiki kondisi masyarakat mereka (Dreier, 1996).

J. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

"*Principles for community empowerment*" mengacu pada seperangkat pedoman atau nilai-nilai yang bertujuan untuk mendukung

dan memajukan pemberdayaan masyarakat. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai kerangka kerja untuk memastikan upaya pemberdayaan dilaksanakan secara efektif, adil, dan berkelanjutan.

Beberapa prinsip utama yang umum ditemukan dalam konsep ini meliputi:

1. Kontrol komunitas

Masyarakat memiliki kendali atas keputusan dan tindakan yang mempengaruhi mereka. Mereka diberikan kekuatan untuk mengidentifikasi kebutuhan sendiri, mengembangkan solusi lokal, dan mengelola sumber daya sendiri.

Mendukung masyarakat agar berhasil mengambil kendali lebih besar atas keputusan dan aset. Badan-badan publik mendukung masyarakat untuk berhasil mengambil kendali yang lebih besar atas keputusan dan aset. Proses yang efektif tersedia dan badan-badan publik mendukung pendekatan yang adil dan berkelanjutan.

Apa saja yang termasuk di dalamnya?

- a. Memungkinkan masyarakat untuk mengambil bagian secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan penting, seperti menetapkan prioritas, membuat pilihan anggaran, dan merancang layanan.
- b. Mendukung masyarakat untuk mengambil pendekatan bertahap untuk mengambil kendali yang lebih besar, misalnya memberikan layanan atau mengambil alih pengelolaan, penyewaan, atau kepemilikan aset publik.
- c. Menerapkan proses tata kelola yang efektif ketika kontrol yang lebih besar dialihkan kepada masyarakat untuk mendorong pendekatan yang kuat dan berkelanjutan.
- d. Memperjelas tingkat pengaruh yang dimiliki masyarakat terhadap keputusan dan mengelola ekspektasi ketika terdapat kendala yang nyata.
- e. Membangun kapasitas di antara masyarakat, terutama kelompok yang jarang didengar, atau mereka yang merasa tidak memiliki suara, sehingga mereka dapat berpartisipasi penuh dan

didukung untuk melakukannya. Misalnya, melalui pendekatan pengembangan masyarakat.

- f. Mengakui bahwa masyarakat itu bervariasi, beragam, dan jarang berbicara dengan satu suara. Proses pemberdayaan masyarakat harus melibatkan seluruh bagian dari masyarakat, bukan hanya yang paling vokal, terartikulasi, atau memiliki sumber daya.
 - g. Menyediakan berbagai dukungan kepada masyarakat untuk mempromosikan pendekatan yang berkelanjutan. Hal ini mencakup dukungan finansial, bantuan dalam pengaturan tata kelola, saran dan penilaian profesional.
2. Kepemimpinan Sektor Publik

Lembaga publik, seperti pemerintah dan organisasi nirlaba, memiliki peran untuk mendukung dan memfasilitasi pemberdayaan masyarakat. Namun, mereka harus melakukannya dengan cara yang menghormati otoritas dan keahlian masyarakat.

Kepemimpinan yang kuat dan jelas dalam pemberdayaan masyarakat menentukan nada dan budaya organisasi. Para pemimpin memberikan pesan yang jelas dan konsisten, menetapkan tujuan dan prioritas yang jelas, mendorong ide dan inovasi, kepemimpinan masyarakat dan mendukung masyarakat untuk mengembangkan pendekatan yang berkelanjutan.

Apa saja yang termasuk di dalamnya?

- a. Para pemimpin memahami dan berkomitmen terhadap pemberdayaan masyarakat, memahami jenis-jenis keputusan di tingkat perusahaan dan layanan yang membutuhkan pemberdayaan masyarakat sebagai inti dari keputusan tersebut.
- b. Mempromosikan budaya di seluruh organisasi tentang kepercayaan, kesetaraan, dan hubungan kolaboratif dengan masyarakat dan mitra lokal.
- c. Secara jelas dan konsisten menanamkan pemberdayaan masyarakat dalam tujuan dan strategi organisasi dan kemitraan.
- d. Menghubungkan strategi terkait dengan kemiskinan dan ketidakberuntungan, dengan menjelaskan bagaimana pember-

dayaan masyarakat dapat membantu mencapai tujuan yang lebih luas dan mendukung pendekatan pencegahan.

- e. Melibatkan masyarakat setempat, termasuk kelompok-kelompok yang jarang didengar, dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.
- f. Mendukung kapasitas dan sumber daya yang sesuai di tingkat staf untuk memfasilitasi proses pemberdayaan masyarakat.
- g. Mendorong ide-ide baru dan pendekatan inovatif, menghargai manfaat dari cara-cara baru dalam bekerja. Mengakui bahwa akan ada risiko dalam menerapkan pendekatan baru, namun tetap terukur dan belajar dari pendekatan yang gagal.
- h. Menginvestasikan sumber daya yang tepat (keuangan dan non-keuangan) untuk membangun kapasitas masyarakat dan mendorong kepemimpinan masyarakat, terutama di antara kelompok-kelompok yang jarang didengar, untuk memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan.
- i. Memahami keberadaan individu-individu yang terampil di dalam organisasi dan mengerahkan mereka secara efektif untuk membantu mendukung dan menanamkan pemberdayaan masyarakat di seluruh organisasi. Memberdayakan semua staf untuk menjalankan peran dan perilaku yang diharapkan.

3. Hubungan yang efektif

Terjalin kolaborasi yang kuat dan saling menghormati antara masyarakat, lembaga publik, dan sektor swasta. Keterbukaan informasi dan komunikasi dua arah menjadi kunci.

Membangun hubungan kerja yang efektif antara badan publik, masyarakat lokal dan mitra lokal. Adanya hubungan kerja yang sehat antara masyarakat, badan publik, dan mitra lokal, yang ditandai dengan kepercayaan timbal balik, keterbukaan, dan transparansi.

Apa saja yang termasuk di dalamnya?

- a. Berkomunikasi dengan cara yang terbuka dan mudah diakses. Menghindari jargon dan meminimalkan birokrasi.

- b. Mengakui dan memanfaatkan kekuatan dan aset yang ada di semua bagian masyarakat, termasuk mereka yang secara tradisional kurang dilibatkan. Hal ini termasuk fokus pada aspek-aspek positif dari individu dan komunitas, menghargai kapasitas, keterampilan, pengetahuan dan koneksi mereka.
 - c. Mengikuti kecepatan komunitas. Menyadari bahwa dibutuhkan waktu dan investasi dalam bentuk dukungan finansial, praktis dan emosional bagi anggota masyarakat yang terlibat, terutama mereka yang paling rentan.
 - d. Bekerja secara efektif dengan mitra perencanaan masyarakat, sektor ketiga, sektor sosial dan mitra sukarelawan untuk memberdayakan masyarakat dengan fokus yang jelas pada upaya pencegahan. Banyak dari organisasi-organisasi ini yang sudah tertanam kuat di masyarakat, memiliki hubungan yang kuat dan pemahaman yang baik terhadap masyarakat, serta staf dan relawan dengan keterampilan yang tepat.
 - e. Memahami dan mengelola ekspektasi dari berbagai bagian masyarakat dan mengelola konflik secara efektif. Mencari konsensus, tetapi memahami bahwa konsensus tidak selalu tercapai.
 - f. Menghargai bahwa membangun hubungan dan kepercayaan antara masyarakat dan badan-badan publik membutuhkan waktu. Bersikap terbuka dan jujur tentang pengalaman dan menggunakan pembelajaran ini untuk terus meningkatkan pendekatan pemberdayaan masyarakat.
4. Peningkatan hasil
- Upaya pemberdayaan harus mengarah pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Penting untuk menetapkan indikator dan mengukur kemajuan secara reguler. Mengevaluasi apakah hasil untuk masyarakat lokal meningkat dan ketidaksetaraan berkurang
- Badan-badan publik terus meningkatkan pendekatan mereka terhadap pemberdayaan masyarakat, mengevaluasi hasil dan penga-

laman lokal dan belajar dari yang lain. Hal ini termasuk mengevaluasi dampak terhadap ketidaksetaraan lokal dan memahami serta belajar dari pengalaman kelompok-kelompok yang jarang didengar dalam masyarakat.

Apa saja yang termasuk di dalamnya?

- a. Mengevaluasi dampak pemberdayaan masyarakat dari sudut pandang masyarakat, memahami pengalaman mereka dalam proses tersebut dan apakah mereka merasa diberdayakan.
- b. Mengevaluasi hasil-hasil lokal dan apakah hasil-hasil tersebut telah meningkat, memahami bagaimana pemberdayaan masyarakat telah berkontribusi pada hasil-hasil tersebut, dan bagaimana pemberdayaan masyarakat membantu mewujudkan hasil-hasil nasional.
- c. Mengevaluasi dampak terhadap ketidaksetaraan di masyarakat lokal dan memahami serta belajar dari pengalaman kelompok-kelompok yang jarang didengar.
- d. Mengevaluasi dengan cara yang proporsional dan mudah diakses untuk mendorong partisipasi individu atau kelompok masyarakat yang memiliki sumber daya dan kapasitas yang terbatas.
- e. Berbagi pengalaman tentang proses dan hasil pemberdayaan masyarakat di seluruh organisasi dan dengan badan-badan publik lainnya, untuk meningkatkan pemahaman yang lebih besar tentang apa yang berhasil dan tantangan yang masih ada.
- f. Memanfaatkan pengalaman belajar ini untuk terus meningkatkan pendekatan organisasi terhadap pemberdayaan masyarakat.

5. Akuntabilitas

Semua pihak yang terlibat dalam proses pemberdayaan bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Masyarakat dan lembaga publik sama-sama memiliki kewajiban untuk transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Akuntabel dan transparan. Badan-badan publik jelas dan terbuka tentang pendekatan mereka terhadap pemberdayaan masyarakat

dan memberikan informasi secara teratur kepada masyarakat yang dapat dimengerti, bebas dari jargon dan dapat diakses. Badan-badan publik responsif terhadap komunitas lokal ketika mengambil keputusan dengan alasan yang jelas untuk mengambil keputusan yang sulit dan memberikan umpan balik secara teratur.

Apa saja yang termasuk dalam hal ini?

- a. Berkomunikasi dengan cara yang dapat dimengerti, bebas dari jargon dan mudah diakses.
- b. Bersikap jelas dan terbuka tentang pendekatan pemberdayaan masyarakat. Hal ini termasuk memberikan informasi tentang bagaimana masyarakat dapat terlibat, kontak-kontak utama dalam badan publik dan menjelaskan proses-prosesnya dengan jelas.
- c. Menyediakan informasi yang dapat diakses tentang arah dan prioritas strategis organisasi, hasil-hasil lokal dan rencana perbaikan dan bagaimana hal ini bertujuan untuk meningkatkan hasil bagi masyarakat.
- d. Terlibat secara teratur dengan masyarakat tentang apa yang penting bagi mereka dan bersikap jujur dan realistis tentang dukungan apa yang dapat diberikan dan jangka waktu untuk mencapai tujuan bersama.
- e. Bersikap terbuka mengenai anggaran untuk berbagai layanan, termasuk usulan pengurangan anggaran. Menetapkan pilihan dan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam menyampaikan pendapat mereka tentang apa yang terjadi pada mereka atau mengambil lebih banyak tanggung jawab dalam melaksanakannya.
- f. Menerapkan pengaturan tata kelola yang tepat untuk pengawasan dan pengambilan keputusan yang efektif tentang pemberdayaan masyarakat, tanpa terlalu birokratis atau menghindari risiko.

- g. Menunjukkan dengan jelas bagaimana keputusan dibuat, bagaimana pandangan masyarakat dipertimbangkan dan memberikan umpan balik secara teratur.
- h. Memberikan umpan balik secara berkala mengenai perkembangan pemberdayaan masyarakat dan hasil dari proses-proses seperti permohonan partisipasi, pengalihan aset masyarakat, penganggaran partisipatif.

Selain prinsip-prinsip dasar ini, berbagai organisasi dan lembaga mungkin memiliki pedoman spesifik yang disesuaikan dengan konteks dan fokus area tertentu. Beberapa contoh penerapan "*Principles for community empowerment*" dapat ditemukan dalam:

1. Perencanaan dan pembangunan desa
Melibatkan warga dalam pengambilan keputusan mengenai proyek infrastruktur, ruang publik, dan pembangunan ekonomi.
2. Pengelolaan sumber daya alam dan potensi desa
Memberdayakan masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam konservasi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
3. Pendidikan dan kesehatan
Melibatkan orang tua dan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait kurikulum sekolah orang tua hebat di desa dan program kesehatan masyarakat seperti posyandu, konvergensi stunting tingkat desa, desa siaga bencana, dan desa Tangguh.

Penerapan "*Principles for community empowerment*" secara efektif membutuhkan perubahan pola pikir dan praktik dari semua pihak yang terlibat. Ini menuntut komitmen yang kuat terhadap partisipasi, kolaborasi, dan keadilan sosial.

K. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan kemandirian masyarakat, diperlukan campur tangan atau intervensi yang terencana. Ada beberapa tahap

intervensi yang dipersiapkan untuk mencapai keberhasilan pemberdayaan tersebut. Langkah-langkah yang diambil cenderung lebih dekat sebagai bagian dari usaha pengembangan masyarakat. Harapannya, pengembangan masyarakat yang dijalankan akan menghasilkan pemberdayaan masyarakat yang efektif (Zubaedi, 2007).

Menurut Yoo, et. al. (2009), dalam artikelnya menyebutkan bahwa, proses pemberdayaan masyarakat ada enam tahapan, diantaranya:

1. Masuk ke dalam komunitas

Masuk ke dalam komunitas merupakan langkah awal dalam model 6 langkah pemberdayaan masyarakat. Langkah ini melibatkan penggunaan berbagai strategi untuk mendapatkan penerimaan masyarakat dan membangun hubungan dengan masyarakat. Hal ini mencakup kegiatan seperti menghadiri pertemuan masyarakat, musyawarah, dan lain-lain.

Tujuannya adalah untuk membangun kepercayaan, membangun hubungan baik, dan memperkenalkan gagasan untuk melakukan kegiatan pemberdayaan dalam rangka mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Langkah ini sangat penting untuk mendapatkan penerimaan masyarakat dan memulai proses pemberdayaan masyarakat.

2. Mengidentifikasi isu-isu yang menjadi minat atau perhatian masyarakat

Mengidentifikasi isu-isu yang menjadi minat atau perhatian masyarakat melibatkan proses kelompok partisipatif untuk menghasilkan percakapan di antara anggota masyarakat tentang gagasan dan keprihatinan mereka mengenai situasi yang dihadapinya. Langkah ini bertujuan untuk mengumpulkan masukan dari anggota masyarakat tentang masalah yang paling relevan dan penting bagi mereka. Langkah ini menggunakan diskusi kelompok partisipatif untuk memastikan bahwa isu-isu yang teridentifikasi mencerminkan prioritas dan perspektif anggota masyarakat. Pendekatan partisipatif ini sejalan dengan prinsip-

prinsip penelitian partisipatif berbasis masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, yang menekankan pentingnya masukan dan keterlibatan masyarakat dalam identifikasi masalah sosial.

3. Memprioritaskan isu-isu yang teridentifikasi

Memprioritaskan masalah yang teridentifikasi dengan cara melibatkan masyarakat dalam proses kelompok partisipatif guna menyusun prioritas masalah yang telah diidentifikasi merupakan hal yang penting.

Langkah ini bertujuan untuk menentukan tingkat kepentingan dari masalah yang telah diidentifikasi berdasarkan perspektif dan prioritas anggota masyarakat.

Langkah ini menggunakan diskusi partisipatif untuk mengambil keputusan guna menentukan masalah mana yang harus ditangani sebagai prioritas tindakan masyarakat. Pendekatan partisipatif ini memastikan bahwa masukan dan perspektif masyarakat akan memandu dalam penentuan prioritas masalah. Praktik tersebut tentu saja sejalan dengan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat dan penelitian partisipatif berbasis masyarakat.

4. Merumuskan strategi untuk mengatasi masalah prioritas

Merumuskan strategi untuk mengatasi masalah prioritas melibatkan pengembangan rencana aksi yang secara efektif mengatasi masalah-masalah yang hendak diselesaikan di desa. Langkah ini termasuk melibatkan anggota masyarakat dalam diskusi untuk mengeksplorasi bagaimana masalah prioritas mempengaruhi masalah dan kesejahteraan mereka, mengidentifikasi strategi yang telah digunakan di masa lalu untuk mengatasi masalah yang sama, dan membayangkan hasil yang diinginkan di masa depan.

Selain itu, model ekologi sosial diperkenalkan sebagai alat penyusunan strategi untuk mengatasi saling ketergantungan antara faktor-faktor penentu masalah. Anggota masyarakat bekerja secara kolaboratif untuk mengembangkan strategi

komprehensif yang mempertimbangkan konteks sosial dan budaya di mana masalah yang hendak diselesaikan terjadi.

Pendekatan partisipatif ini memastikan bahwa masyarakat secara aktif terlibat dalam merumuskan strategi untuk mengatasi masalah prioritas, sesuai dengan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat dan penelitian partisipatif berbasis masyarakat.

5. Mengembangkan dan mengimplementasikan rencana aksi untuk menyelesaikan masalah prioritas

Mengembangkan dan mengimplementasikan rencana aksi untuk menyelesaikan masalah prioritas melibatkan penerapan strategi yang telah dirumuskan ke dalam tindakan nyata. Langkah ini mencakup pengembangan rencana aksi yang terperinci yang menguraikan langkah-langkah spesifik yang perlu diambil untuk mengatasi masalah prioritas, memberikan tugas-tugas kepada anggota masyarakat, dan menetapkan jadwal untuk menyelesaikan setiap tugas.

Anggota masyarakat bekerja secara kolaboratif untuk mengimplementasikan rencana aksi, memanfaatkan keterampilan, pengetahuan, dan sumber daya yang mereka miliki untuk mengatasi masalah prioritas. Langkah ini melibatkan komunikasi dan kolaborasi yang berkelanjutan di antara anggota masyarakat untuk memastikan bahwa rencana aksi dilaksanakan secara efektif dan efisien. Anggota masyarakat juga mengevaluasi kemajuan rencana aksi dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan bahwa hasil yang diinginkan tercapai. Pendekatan partisipatif ini memastikan bahwa masyarakat secara aktif terlibat dalam pelaksanaan rencana aksi untuk mengatasi masalah prioritas, sesuai dengan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat dan penelitian partisipatif berbasis masyarakat.

6. Transisi ke isu dan kepemimpinan baru

Transisi ke isu dan kepemimpinan baru melibatkan pergeseran fokus upaya masyarakat dari menangani isu prioritas

saat ini menjadi mengidentifikasi dan menangani isu baru yang menjadi perhatian. Selain itu, langkah ini juga melibatkan pengalihan tanggung jawab fasilitasi dari fasilitator eksternal kepada para pemimpin masyarakat yang sudah ada atau yang baru muncul.

Langkah ini mengakui bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan proses yang berkelanjutan dan bahwa isu-isu baru dapat muncul ketika isu-isu sebelumnya ditangani. Langkah ini juga menekankan pentingnya membangun kapasitas anggota masyarakat untuk mengambil peran kepemimpinan dalam memandu proses pemberdayaan masyarakat.

Dengan bertransisi ke isu-isu baru dan kepemimpinan, masyarakat terus terlibat dalam proses partisipatif untuk mengatasi masalah yang muncul dan mempertahankan momentum upaya pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip penelitian partisipatif berbasis masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, yang menekankan pentingnya keterlibatan dan kepemimpinan masyarakat yang berkelanjutan dalam mengatasi masalah di desa.

Langkah-langkah ini berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mengoperasionalkan pemberdayaan masyarakat dan memandu proses kelompok dalam kegiatan kemitraan kolaboratif.

Sementara, Laverack (2006), dalam artikelnya menyebutkan bahwa, proses pemberdayaan masyarakat ada 9 tahapan, diantaranya:

1. Meningkatkan partisipasi

Domain "Meningkatkan partisipasi" berfokus pada strategi untuk meningkatkan keterlibatan dan keterikatan masyarakat. Sebagai contoh, dalam sebuah program pemberdayaan masyarakat desa yang menargetkan penyediaan air bersih dan sanitasi ramah lingkungan, praktisi memfasilitasi diskusi untuk mengidentifikasi minat dan kepedulian anggota komunitas, mengorganisir acara berdasarkan minat tersebut untuk men-

dorong partisipasi aktif. Pendekatan ini menekankan pentingnya melibatkan anggota masyarakat dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka, yang pada akhirnya menumbuhkan rasa kepemilikan dan komitmen terhadap program.

2. Mengembangkan kepemimpinan lokal

Domain "Mengembangkan kepemimpinan lokal" berfokus pada membangun kekuatan dan kapasitas masyarakat yang ada untuk mengembangkan pemimpin lokal. Sebagai contoh, dalam sebuah program komunitas yang menargetkan perumahan berpenghasilan rendah, praktisi menggunakan relawan perempuan lokal dengan jaringan yang baik, keterampilan memasak, mengorganisir, dan mengasuh anak untuk merencanakan kegiatan di lingkungan sekitar seperti piknik anak-anak. Para wanita ini menjadi pemimpin kegiatan yang akhirnya menjadi pendekatan yang lebih luas yang bertujuan untuk memperbaiki perumahan miskin. Pendekatan ini menekankan pentingnya mengidentifikasi dan membina para pemimpin lokal yang dapat secara efektif memobilisasi dan mengorganisir anggota masyarakat untuk mencapai tujuan program.

3. Meningkatkan kapasitas penilaian masalah

Domain "Meningkatkan kapasitas penilaian masalah" melibatkan anggota masyarakat dalam bentuk penilaian masalah yang lebih luas, dengan memasukkan kebutuhan langsung mereka dan isu-isu masyarakat yang lebih luas. Sebagai contoh, dalam sebuah program yang menasar perumahan masyarakat berpenghasilan rendah, praktisi membantu melibatkan anggota masyarakat dalam menganalisa kebutuhan mereka dan masalah masyarakat yang lebih luas, seperti keamanan dan pekerjaan. Informasi ini menjadi dasar untuk merencanakan kegiatan baru, baik jangka pendek maupun jangka panjang, untuk organisasi masyarakat. Pendekatan ini menyoroti pentingnya memberdayakan anggota masyarakat untuk menilai dan mengatasi

kebutuhan dan tantangan mereka sendiri, sehingga menumbuhkan rasa memiliki dan menentukan nasib sendiri.

4. Meningkatkan kemampuan untuk 'bertanya mengapa'
Ranah "Meningkatkan kemampuan untuk 'bertanya mengapa'" melibatkan peningkatan kesadaran kritis di antara anggota masyarakat. Sebagai contoh, dalam sebuah program yang menyasar perumahan berpenghasilan rendah, praktisi bekerja sama dengan anggota masyarakat dalam kelompok-kelompok kecil untuk menganalisa mengapa beberapa orang memiliki kondisi kesehatan dan kehidupan yang lebih buruk dibandingkan yang lain dan tindakan apa yang bisa dilakukan oleh desa, kabupaten/kota, provinsi dan negara untuk memperbaiki kondisi mereka. Hal ini membantu anggota masyarakat meningkatkan tingkat kesadaran kritis mereka. Pendekatan ini menekankan pentingnya memberdayakan anggota masyarakat untuk mempertanyakan alasan-alasan yang mendasari tantangan-tantangan yang mereka hadapi dan mengidentifikasi solusi-solusi yang potensial, sehingga menumbuhkan rasa memiliki dan menentukan nasib sendiri.
5. Membangun struktur organisasi yang memberdayakan
Domain "Membangun struktur organisasi yang memberdayakan" melibatkan penciptaan atau penguatan organisasi masyarakat yang mewakili anggota masyarakat dan memiliki proses internal yang baik serta partisipasi yang luas. Sebagai contoh, dalam sebuah program yang menyasar perumahan masyarakat berpenghasilan rendah, praktisi menggunakan kelompok kebugaran dan kegiatan-kegiatan di lingkungan sekitar untuk menyusun kerangka kerja bagi sebuah organisasi baru yang bertujuan untuk memperbaiki perumahan masyarakat miskin. Jika tidak ada organisasi yang cukup mewakili anggota masyarakat, organisasi baru mungkin harus dikembangkan. Pendekatan ini menekankan pentingnya menciptakan atau memperkuat organisasi masyarakat

yang secara efektif dapat memobilisasi dan mengorganisir anggota masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan program.

6. Meningkatkan mobilisasi sumber daya

Domain "Meningkatkan mobilisasi sumber daya" melibatkan identifikasi dan menarik sumber daya untuk inisiatif pengembangan masyarakat. Dalam sebuah program yang menyoal perumahan masyarakat berpenghasilan rendah, praktisi menggunakan sebagian waktu dan dananya sendiri untuk mendukung pengorganisasian yang lebih luas di masyarakat. Selain itu, para perempuan dan praktisi bekerja sama untuk menarik sumber daya untuk isu-isu yang berada di luar gagasan penyandang dana mengenai apa yang merupakan hasil yang sah untuk program pengembangan masyarakat di daerah perumahan berpenghasilan rendah. Pendekatan ini menyoroati pentingnya memberdayakan anggota masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mereka dan mendorong perubahan positif dalam komunitas mereka.

7. Memperkuat hubungan dengan organisasi dan orang lain

Memperkuat hubungan dengan organisasi dan orang lain mengacu pada proses membangun kemitraan dan menjalin hubungan dengan organisasi lokal dan internasional lainnya yang terlibat dalam pekerjaan serupa atau menjalankan program serupa. Hal ini membantu dalam menciptakan jaringan dukungan dan kolaborasi.

Hal ini melibatkan investasi pada sumber daya seperti komputer dan konektivitas internet untuk membangun kontak dan bertukar informasi dengan kelompok lain.

Praktisi berperan dalam membantu pusat atau organisasi dalam memperkuat hubungan ini dengan memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi dengan kelompok-kelompok lain.

Aspek pemberdayaan masyarakat ini penting karena memperluas sumber daya, pengetahuan, dan dukungan yang tersedia bagi

masyarakat, sehingga memungkinkan pendekatan yang lebih komprehensif dan efektif dalam mengatasi masalah.

8. Menciptakan hubungan yang adil dengan agen-agen luar
Menciptakan hubungan yang adil dengan pihak luar berarti membangun kemitraan atau interaksi yang adil dan seimbang dengan individu atau organisasi di luar komunitas. Hal ini mencakup memperlakukan semua pihak yang terlibat dengan hormat, menghargai masukan mereka, dan memastikan bahwa dinamika kekuasaan tidak condong ke salah satu pihak di atas pihak lainnya. Hal ini juga melibatkan promosi kolaborasi, transparansi, dan komunikasi terbuka antara komunitas dan agen-agen dari luar.

Praktisi memainkan peran penting dalam membantu pusat kegiatan untuk meningkatkan sumber daya, mengembangkan keterampilan dan kapasitas, mendapatkan akses ke politisi lokal dan pembuat kebijakan. Praktisi lebih lanjut mendukung pusat tersebut melalui kursus pelatihan dan dengan mengangkat isu-isu perempuan pada pertemuan pemerintah daerah.

Agen luar utama dalam program ini, yaitu praktisi, melakukan refleksi diri secara kritis terhadap peran mereka sendiri: Apakah mereka memaksakan kehendak? Memfasilitasi? Memberdayakan? Penilaian diri yang berkelanjutan ini didukung oleh manajer agensi mereka, dan dievaluasi secara berkala melalui diskusi dengan anggota masyarakat.

9. Meningkatkan kontrol atas manajemen program.
Meningkatkan kontrol atas pengelolaan program mengacu pada pemberdayaan masyarakat atau organisasi untuk memiliki lebih banyak wewenang dan kekuatan pengambilan keputusan dalam mengelola program. Hal ini dapat mencakup kegiatan-kegiatan seperti administrasi, keuangan, dan pengelolaan program secara keseluruhan.

Beberapa contoh bagaimana kontrol atas pengelolaan program dapat ditingkatkan antara lain:

- a. Kontrol secara bertahap oleh komunitas atau organisasi
Seiring berjalannya waktu, masyarakat atau organisasi mengambil kendali lebih besar atas kegiatan dan proses pengambilan keputusan mereka
- b. Struktur organisasi yang memberdayakan
Membangun struktur organisasi yang memberdayakan komunitas atau organisasi untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan terkait pengelolaan program.
- c. Mobilisasi sumber daya
Memperkuat kemampuan komunitas atau organisasi untuk memobilisasi sumber daya untuk program, yang dapat berkontribusi pada peningkatan kontrol atas pengelolaan program.
- d. Memperkuat hubungan dengan organisasi dan orang lain
Mengembangkan hubungan dan kemitraan dengan organisasi dan individu lain yang dapat mendukung komunitas atau organisasi dalam mengelola program.

Secara keseluruhan, meningkatkan kontrol atas pengelolaan program melibatkan pemberdayaan komunitas atau organisasi untuk memiliki lebih banyak wewenang dan otonomi dalam mengambil keputusan dan mengambil tindakan yang berkaitan dengan program. Hal ini dapat menghasilkan hasil program yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Model tahapan lainnya adalah Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Sebuah Kontinum 5 Titik. Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah kontinum lima titik terdiri dari elemen-elemen berikut: 1. Aksi pribadi; 2. Pengembangan kelompok-kelompok kepentingan kecil; 3. Organisasi masyarakat; 4. Kemitraan; dan 5. Aksi sosial dan politik (Labonte, 1990).

Kontinum ini menawarkan interpretasi yang sederhana dan linier tentang konsep yang dinamis dan kompleks, serta mengartikulasikan

berbagai tingkat pemberdayaan dari tingkat pribadi, organisasi, hingga aksi kolektif (masyarakat). Setiap titik pada kontinum dapat dilihat sebagai hasil dari sebuah proses, dan juga sebagai sebuah perkembangan menuju titik berikutnya. Jika tidak tercapai, hasilnya adalah stasis atau bahkan kembali ke titik sebelumnya pada kontinum. Kontinum ini telah digunakan para praktisi promosi kesehatan untuk menjelaskan bagaimana pemberdayaan masyarakat dapat dimaksimalkan untuk 'menutup kesenjangan implementasi' ketika masyarakat berkembang dari tindakan individu ke tindakan kolektif.

Gambar 3. Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah kontinum lima titik



1. Memberdayakan Individu Untuk Melakukan Tindakan Pribadi
 Proses pemberdayaan masyarakat dapat dimulai ketika seseorang mengalami 'ketidakberdayaan relatif' yang tinggi yang memicu respon emosional dan tindakan pribadi. Kemudian, dengan berpartisipasi dalam kelompok-kelompok kepentingan kecil, setiap anggota masyarakat akan lebih mampu mendefinisikan, menganalisis, dan bertindak berdasarkan isu-isu yang menjadi perhatian mereka.
2. Pengembangan Kelompok-Kelompok Kepentingan Kecil
 Pengembangan kelompok-kelompok kecil oleh individu-individu yang peduli merupakan awal dari aksi kolektif. Hal ini memberikan kesempatan bagi pemberdaya untuk membantu individu memperoleh keterampilan dan merupakan sarana untuk mengembangkan sistem dukungan sosial yang lebih kuat dan jaringan kesempatan, hubungan interpersonal dan kohesi sosial.

Peran praktisi pada titik kontinum ini adalah menyatukan orang-orang dalam kelompok-kelompok kecil di sekitar isu-isu yang mereka anggap penting bagi kehidupan mereka, dengan cara yang tidak terlalu mengontrol. Ini termasuk:

- a. Kelompok swadaya yang diorganisir di sekitar masalah tertentu seperti kelompok pengelola air bersih desa. Para anggotanya biasanya memiliki pengetahuan dan ketertarikan yang sama terhadap masalah tersebut, bersifat partisipatif dan suportif, serta sering kali dibentuk dan dikelola oleh para pesertanya;
- b. Kelompok kesehatan masyarakat yang biasanya berkumpul untuk mengkampanyekan masalah tertentu seperti Kader Posyandu dan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM). Orang-orang termotivasi untuk berkumpul baik untuk alasan reaktif maupun proaktif, biasanya untuk jangka waktu tertentu;
- c. Proyek-proyek pengembangan kesehatan masyarakat seperti proyek-proyek berbasis lingkungan yang dibentuk untuk mengatasi masalah-masalah yang menjadi perhatian lokal seperti Stunting, dan dengan dukungan pemerintah dan pekerja kesehatan masyarakat yang dibayar.

Melalui dukungan kelompok-kelompok kecil, banyak orang menemukan 'suara' dan dapat berpartisipasi dengan cara yang lebih formal untuk mencapai hasil pemberdayaan masyarakat. Namun, keanggotaan kelompok-kelompok kecil tidaklah homogen dan konflik terkait isu-isu internal dapat terjadi, terutama saat terjadi pergeseran dari orientasi ke dalam (swadaya) ke orientasi ke luar (aksi sosial).

Pengkajian masalah dapat membantu menyelesaikan konflik dan membangun kapasitas ketika identifikasi masalah, solusi untuk masalah dan tindakan untuk menyelesaikan masalah dilakukan oleh masyarakat. Ketika kemampuan-kemampuan

tersebut tidak ada atau lemah, maka peran praktisi adalah membantu masyarakat untuk melakukan penilaian terhadap masalahnya sendiri.

3. Pengembangan Organisasi Masyarakat

Sementara kelompok-kelompok kecil umumnya berfokus pada kebutuhan anggota-anggota langsungnya, organisasi masyarakat berfokus ke luar ke lingkungan yang lebih luas yang menciptakan kebutuhan-kebutuhan itu, atau menawarkan cara-cara (sumber daya dan kesempatan) untuk menyelesaikannya.

Struktur organisasi masyarakat meliputi kelompok agama dan pemuda, dewan masyarakat, koperasi dan asosiasi. Ini adalah elemen-elemen organisasi tempat orang-orang berkumpul untuk bersosialisasi dan juga mengatasi masalah mereka. Organisasi masyarakat tidak hanya lebih besar daripada kelompok kepentingan kecil, tetapi mereka memiliki struktur yang lebih mapan, kepemimpinan yang lebih fungsional, dan kemampuan untuk mengorganisir anggotanya untuk memobilisasi sumber daya.

Organisasi masyarakat merupakan langkah penting bagi kelompok-kelompok kecil untuk dapat melakukan transisi ke kemitraan dan kemudian ke aksi sosial dan politik. Yang terpenting, individu dapat menjadi lebih kritis terhadap isu-isu yang lebih luas dalam organisasi masyarakat di samping mempelajari keterampilan untuk menilai masalah-masalah yang dihadapi.

Strategi untuk mengembangkan keterampilan dalam meningkatkan kesadaran tentang isu-isu sosial dan politik yang lebih luas yang mempengaruhi faktor-faktor penentu masalah sosial didasarkan pada karya pendidikan Paulo Freire. Pemahaman tentang penyebab ketidakberdayaan adalah karakteristik yang menentukan dari pemberdayaan dan pendekatan praktis untuk mengembangkan keterampilan ini (Wang dan Pies, 2004).

Pengembangan organisasi masyarakat dan kepemimpinan lokal yang kuat sangat erat kaitannya. Masalah pemilihan kepemimpinan yang tepat dibahas oleh Goodman dkk (1998), yang menyatakan bahwa pendekatan yang pluralistik dalam masyarakat, dimana ada interaksi antara pemimpin posisional, yaitu mereka yang telah dipilih atau ditunjuk dan pemimpin yang memiliki reputasi, yaitu mereka yang secara informal melayani masyarakat, memiliki peluang yang lebih baik untuk meningkatkan kapasitas masyarakat.

4. Kemitraan

Agar efektif dalam mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan di tingkat yang lebih tinggi, organisasi masyarakat perlu menjalin hubungan dengan kelompok-kelompok lain yang memiliki keprihatinan yang sama. Organisasi masyarakat, dengan membentuk kemitraan, dapat memperkuat jaringan sosial, bersaing dengan lebih baik untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas dan meningkatkan partisipasi dalam keprihatinan organisasi anggota lainnya.

Tujuan dari kemitraan adalah untuk memungkinkan organisasi masyarakat tumbuh melampaui keprihatinan lokal mereka sendiri dan mengambil posisi yang lebih kuat dalam isu-isu yang lebih luas melalui jaringan dan advokasi. Isu pemberdayaan yang utama adalah tetap fokus pada kepedulian bersama yang menyatukan kelompok-kelompok tersebut dan bukan pada kebutuhan atau isu-isu individual dari kelompok-kelompok yang berbeda dalam kemitraan.

5. Aksi Sosial Dan Politik

Meskipun setiap orang dapat mempengaruhi arah dan pelaksanaan suatu program melalui masukan dan partisipasi aktifnya, hal ini tidak dapat disebut sebagai pemberdayaan masyarakat. Seperti yang telah dibahas, perbedaan antara pendekatan partisipatif dan pemberdayaan terletak pada agenda dan tujuan dari proses tersebut. Jika individu-individu

yang peduli tetap berada di tingkat kelompok kecil, kondisi yang menyebabkan ketidakberdayaan mereka tidak akan terselesaikan. Jika masyarakat hanya terlibat dalam bentuk-bentuk lobi yang umum dilakukan melalui pengorganisasian masyarakat dan pengembangan kemitraan tanpa aksi politik, maka mereka yang memiliki kekuasaan atas keputusan ekonomi dan politik tidak akan memiliki alasan untuk mendengarkan. Individu-individu berkembang di sepanjang kontinum dari posisi tindakan pribadi ke titik di mana mereka secara kolektif terlibat dalam memperbaiki penyebab yang lebih dalam yang mendasari keprihatinan mereka melalui tindakan sosial dan politik. Memperoleh kekuatan untuk mempengaruhi perubahan ekonomi, politik, sosial dan ideologi pasti akan melibatkan masyarakat dalam perjuangan melawan pihak-pihak yang telah memiliki kekuasaan. Dalam konteks program, peran lembaga promosi kesehatan, atas permintaan masyarakat, adalah membangun kapasitas, menyediakan sumber daya, dan membantu orang lain untuk memberdayakan diri mereka sendiri.

Sedangkan menurut Adi (2013) ada 7 tahapan dalam proses pengembangan masyarakat, yaitu: Tahap persiapan (*engagement*), Tahap pengkajian (*assessment*), Tahap perencanaan alternatif kegiatan (*planning*), Tahap formulasi rencana aksi (*formulation action plan*), Tahap implementasi kegiatan (*implementation*), Tahap evaluasi (*evaluation*), dan Tahap terminasi (*termination*).

1. Persiapan

Tahapan persiapan dalam kegiatan pengembangan masyarakat mencakup dua aspek utama, yakni kesiapan petugas dan kesiapan lapangan. Kesiapan petugas diperlukan untuk menciptakan pemahaman bersama di antara anggota tim mengenai pendekatan yang akan diambil dalam proses pengembangan masyarakat sebagai agen perubahan. Sementara itu, persiapan

lapangan melibatkan penilaian kelayakan daerah yang menjadi fokus, baik melalui pendekatan formal maupun informal. Setelah menentukan daerah yang akan dikembangkan, petugas perlu melibatkan diri dalam proses formal untuk memperoleh izin dari pihak berwenang. Di samping itu, menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh informal juga menjadi krusial agar interaksi dengan masyarakat dapat berlangsung secara optimal.

2. Pengkajian

Proses evaluasi dilakukan dengan mengidentifikasi masalah atau kebutuhan yang dinyatakan dan sumber daya yang dimiliki oleh komunitas target. Melibatkan masyarakat secara aktif bertujuan agar permasalahan yang muncul berasal dari perspektif mereka sendiri, sementara petugas bertugas memfasilitasi warga dalam menetapkan prioritas dari masalah yang mereka sampaikan. Hasil evaluasi ini akan diarahkan ke tahap selanjutnya, yaitu tahap perencanaan.

3. Perencanaan Alternatif Kegiatan

Pada langkah ini, petugas berupaya secara partisipatif mengajak warga untuk merenung tentang tantangan yang mereka hadapi, strategi mengatasi masalah tersebut, dan merancang beberapa alternatif program serta kegiatan yang dapat dilaksanakan.

4. Formulasi Rencana Aksi

Pada langkah ini, petugas membimbing setiap kelompok dalam merinci dan memilih program serta kegiatan yang akan dijalankan untuk menanggapi permasalahan yang dihadapi. Pada tahap ini, diharapkan baik petugas maupun masyarakat sudah mampu menggambarkan dan mencatat tujuan jangka pendek terkait pencapaian serta strategi untuk mencapai tujuan tersebut.

5. Implementasi Kegiatan

Langkah implementasi ini merupakan salah satu fase yang sangat krusial dalam proses pengembangan masyarakat, karena rencana yang telah disusun dengan baik dapat mengalami pergeseran saat diimplementasikan di lapangan tanpa adanya kerja sama

antara agen perubahan dan masyarakat, serta kerja sama di antara warga sendiri.

6. Evaluasi

Evaluasi berperan sebagai proses pengawasan yang dilakukan oleh warga dan petugas terhadap pelaksanaan program yang sedang berlangsung. Pada tahap ini, sangat dianjurkan untuk melibatkan warga dalam pengawasan internal guna membentuk suatu sistem keberlanjutan dalam masyarakat, yang memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai kemandirian. Evaluasi bertujuan memberikan umpan balik guna perbaikan kegiatan dalam jangka panjang.

7. Terminasi

Fase ini merupakan saat 'penutupan' secara resmi dari hubungan dengan komunitas sasaran. Terminasi dilakukan tidak selalu karena masyarakat dianggap sudah mandiri, melainkan karena proyek harus dihentikan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan sebelumnya, atau karena alokasi anggaran telah habis dan tidak ada pihak yang dapat atau bersedia melanjutkan program tersebut.

Ketujuh langkah intervensi di atas membentuk suatu siklus yang dapat berulang untuk mencapai perubahan yang lebih positif, khususnya setelah dilakukan evaluasi (*monitoring*) terhadap implementasi kegiatan. Siklus ini juga dapat mengalami perubahan arah di beberapa tahap, contohnya saat perumusan rencana aksi, jika petugas dan masyarakat merasakan ada anomali atau perkembangan baru di komunitas, sehingga mereka memilih untuk melakukan penilaian kembali (*reassessment*) terhadap langkah-langkah sebelumnya. Dengan fleksibilitas ini, tahap pengembangan masyarakat dapat dianggap sebagai suatu siklus atau spiral yang dinamis.

L. Pelaku Perubahan

Dalam upaya pemberdayaan, kehadiran pelaku perubahan atau agen perubahan sangat penting sebagai animator sosial yang memfasilitasi kelangsungan proses pemberdayaan. Agen perubahan berperan ganda sebagai *community worker* atau penyemangat (Ife, 2006). Seorang *community worker* diharapkan memiliki keterampilan sebagai berikut:

a. Keterampilan fasilitatif

Seorang agen perubahan diharapkan untuk menjalankan peran sebagai pendorong interaksi sosial, mediator dan negosiator, penyokong, pencipta kesepakatan bersama, fasilitator kelompok, pemanfaat sumber daya dan keterampilan, serta pengatur.

b. Keterampilan edukasional

Seorang agen perubahan juga diharapkan memiliki fungsi dalam memicu kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, menghadapi tantangan, dan memberikan pelatihan.

c. Keterampilan perwakilan

Dalam jabatan ini, diharapkan seorang agen perubahan memiliki tanggung jawab untuk mencari sumber daya, melakukan advokasi, memanfaatkan media, membangun hubungan masyarakat, mengembangkan jaringan, dan berbagi pengetahuan dengan masyarakat.

d. Keterampilan Teknis

Keterampilan teknis mencakup kemampuan melakukan penelitian, penguasaan komputer, penyampaian presentasi secara tertulis maupun lisan, serta keahlian dalam mengendalikan dan mengelola keuangan.

Sementara itu, menurut Zastrow (2010), terdapat peran yang dapat diemban oleh seorang pekerja sosial komunitas dalam membantu individu, kelompok, keluarga, organisasi, dan masyarakat mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Seorang pekerja sosial komunitas diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang

sesuai dengan berbagai peran. Pemilihan peran tertentu seharusnya didasarkan pada penilaian terhadap efektivitasnya, dan beberapa peran yang dapat diemban mencakup:

1. *Enabler* (pemungkin)
Merupakan peran untuk membantu individu atau kelompok untuk mengartikulasi atau menyatakan kebutuhan-kebutuhan mereka, menjelaskan dan mengidentifikasi masalah mereka, mencari strategi pemecahan masalah, serta memilih dan menerapkan strategi guna mengembangkan kapasitas mereka dalam menangani masalah secara efektif.
2. *Broker* (penghubung)
merupakan peran yang menghubungkan individu-individu dan kelompok yang perlu bantuan dan yang tidak tahu dimana bantuan tersebut bisa di dapat dari pelayanan masyarakat.
3. *Advocate* (pembela)
Merupakan peran memberikan kepemimpinan dalam mengumpulkan informasi, mengargumentasikan kebenaran, kebutuhan, dan permintaan klien. Hal tersebut dilakukan apabila seorang klien atau kelompok sedang membutuhkan bantuan. Advokasi sebagai aktivitas menolong klien untuk mencapai layanan ketika mereka ditolak suatu lembaga.
4. *Empower*
Bertujuan untuk membantu individu, keluarga, kelompok, organisasi, dan masyarakat meningkatkan pribadi mereka, interpersonal, sosial ekonomi, dan kekuatan politik.
5. *Activist* (aktivis)
Merupakan peran melakukan perubahan institusional, mereka peduli dengan ketidakadilan, ketidakmerataan, dan kemiskinan sosial. Taktik yang mereka gunakan berupa konflik, konfrontasi, dan negosiasi.
6. *Mediator* (penengah)
Merupakan peran melakukan intervensi jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak. Hal ini untuk membantu mereka

dalam mencapai kompromi, merekonsiliasi perbedaan, dan mencapai kesepakatan bersama.

7. *Negotiator* (penegosiasi)

Merupakan peran menyatukan mereka yang sedang berkonflik dengan suatu isu, berupaya menawarkan dan mendapatkan kesepakatan yang diterima oleh kedua belah pihak.

8. *Educator* (pendidik/instruktur)

Merupakan peran memberikan informasi kepada klien. Mengajar mereka dengan berbagai keterampilan

9. *Initiator* (inisiator atau penginisiatif)

Merupakan peran seorang *community worker* mengetahui potensi masalah dan mampu memberikan solusi.

10. *Coordinator* (koordinator) Merupakan peran menyatukan beberapa komponen secara bersama, dengan cara yang terorganisir.

11. *Reseracher* (peneliti)

Merupakan peran melakukan studi literatur terhadap berbagai topik penelitian

12. *Group facilitator* (fasilitator kelompok)

Community worker sebagai pemimpin dalam kelompok

13. *Public speaker* (juru bicara)

Merupakan peran berbicara di depan khalayak untuk menginformasikan berbagai pelayanan yang tersedia dan meminta dukungan bagi pelayanan baru.

Proses pengembangan masyarakat di dalam suatu komunitas melibatkan partisipasi tenaga pendamping lapangan (*fieldworker*) dan kader lokal (*indigenous worker*). Kader lokal merupakan anggota masyarakat yang secara sukarela terlibat dalam berbagai kegiatan pemberdayaan dan turut bertanggung jawab dalam usaha meningkatkan kesejahteraan komunitas (Adi, 2013). Keberadaan mereka sangat krusial, terutama saat mencapai tahap terminasi, di mana peran pemberdayaan dapat dilanjutkan oleh kader lokal. Penting bagi kader lokal ini untuk memiliki peran dan keterampilan sebagaimana

yang diuraikan oleh Jim Ife dan Zastrow. Meskipun tidak langsung dapat dikuasai, peran atau keterampilan ini dapat dipelajari oleh pelaku perubahan yang ada.

M. Indikator Keberhasilan Proses Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan suatu proses yang dapat diamati melalui indikator-indikator yang mengiringi perjalanan menuju keberhasilan. Untuk menilai pencapaian tujuan pemberdayaan secara operasional, penting untuk mengetahui berbagai indikator keberhasilan yang dapat mencerminkan tingkat kemandirian seseorang atau komunitas. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk fokus pada aspek-aspek tertentu dari target perubahan, seperti keluarga miskin, ketika melaksanakan program pemberdayaan sosial dan mengoptimalkan upaya yang dilakukan.

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat tercermin dalam tingkat kemandirian mereka, meliputi kemampuan ekonomi, akses terhadap kesejahteraan, serta kemampuan dalam ranah budaya dan politik. Ketiga aspek ini terkait dengan empat dimensi kekuasaan, yakni: 'kekuasaan di dalam' (*power within*), 'kekuasaan untuk' (*power to*), 'kekuasaan atas' (*power over*), dan 'kekuasaan dengan' (*power with*). Dengan merujuk pada kerangka dasar ini, terdapat sejumlah indikator yang dapat dikaitkan dengan tingkat keberhasilan pemberdayaan. Berikut indikator-indikator tersebut:

1. Kebebasan mobilitas
kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, ke rumah tangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendiri.
2. Kemampuan membeli komoditas kecil
kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak goreng, bumbu); kebutuhan dirinya (minyak rambut, shampo, rokok, bedak). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat

keputusan sendiri tanpa meminta ijin orang lain termasuk pasangannya, terlebih jika ia dapat membeli barang-barang dengan menggunakan uangnya sendiri.

3. Kemampuan membeli komoditas besar
kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, TV, radio, koran, majalah, pakaian keluarga. Seperti halnya indikator di atas, point tinggi diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin dari orang lain, terlebih jika ia dapat membeli dengan uangnya sendiri.
4. Terlibat dalam membuat keputusan-keputusan rumah tangga mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama (suami/istri) mengenai keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian kambing untuk ternak, memperoleh kredit usaha.
5. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga
responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang (suami, istri, anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa ijinnya, yang melarang mempunyai anak, atau melarang bekerja di luar rumah.
6. Kesadaran hukum dan politik
mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa/ kelurahan, seorang anggota DPRD setempat, nama presiden, mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.
7. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes
seseorang dianggap 'berdaya' jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes, misalnya terhadap suami yang memukul isteri; isteri yang mengabaikan suami dan keluarganya; gaji yang tidak adil; penyalahgunaan bantuan sosial; atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah.
8. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga

memiliki rumah, tanah, aset produktif, tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya (Edi Suharto, 2005).

Pembangunan Masyarakat Desa

Pembangunan masyarakat desa adalah perjalanan yang menuntut kolaborasi antara warga, pemerintah, dan pihak terkait untuk menciptakan transformasi positif dalam kehidupan sehari-hari penduduk pedesaan.

Desa, sebagai entitas yang hidup dan bernapas, memiliki karakteristik uniknya sendiri. Proses pembangunan masyarakat desa tidak hanya sebatas pembangunan fisik infrastruktur, tetapi juga mencakup aspek-aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam pandangan ini, pembangunan masyarakat desa menjadi lebih dari sekadar proyek pembangunan, melainkan sebuah perjalanan menuju peningkatan kesejahteraan dan keberlanjutan.

Pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi lokal, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta pelestarian budaya lokal menjadi elemen-elemen kunci dalam upaya mencapai pembangunan yang holistik dan berkelanjutan. Keberhasilan pembangunan masyarakat desa tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari peningkatan kualitas hidup dan kemandirian masyarakat.

A. Pembangunan Masyarakat

Langkah awal dalam mendefinisikan pembangunan masyarakat adalah mendefinisikan "komunitas". Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, komunitas dapat merujuk pada suatu lokasi (*communities of place*) atau kumpulan individu yang memiliki ketertarikan atau ikatan yang sama, baik yang berdekatan maupun yang terpisah jauh (*communities of interest*).

Istilah "pembangunan masyarakat" sebagai evolusi terencana dari semua aspek kesejahteraan masyarakat (ekonomi, sosial, lingkungan, dan budaya). Ini adalah proses di mana anggota masyarakat berkumpul bersama untuk mengambil tindakan kolektif dan menghasilkan solusi untuk masalah bersama (Frank & Smith, 1999).

Istilah-istilah lain yang serupa, seperti pembangunan ekonomi masyarakat dan pembangunan ekonomi berbasis masyarakat, digunakan di dalam masyarakat dan, sering kali, istilah-istilah tersebut digunakan tanpa pemahaman yang jelas tentang maknanya. Ada banyak kebingungan tentang istilah-istilah ini karena mungkin memiliki arti yang sedikit berbeda bagi setiap orang yang menggunakannya.

Tidak ada definisi yang mutlak dan jarang sekali semua orang setuju dengan kata-kata yang tepat untuk istilah-istilah yang umum digunakan. Mungkin ada definisi yang berbeda dan bahkan lebih baik daripada yang disediakan, dan definisi tersebut juga dapat berubah seiring berjalannya waktu. Itulah sifat alamiah dari bekerja di komunitas dengan orang-orang dan belajar cara-cara yang lebih baik untuk mengekspresikan diri kita.

Sebuah tinjauan literatur yang dilakukan oleh Mattessich dan Monsey (2004) menemukan banyak definisi komunitas, antara lain:

- a. Orang-orang yang tinggal di dalam suatu wilayah yang terdefinisi secara geografis dan memiliki ikatan sosial dan psikologis satu sama lain dan dengan tempat tinggal mereka.
- b. Sekelompok orang yang tinggal berdekatan satu sama lain dan disatukan oleh kepentingan bersama dan saling membantu.
- c. Kombinasi dari unit-unit dan sistem sosial yang menjalankan fungsi-fungsi sosial utama (dan) pengorganisasian kegiatan-kegiatan sosial.

Definisi-definisi ini merujuk pertama-tama pada manusia dan ikatan yang mengikat mereka dan kedua pada lokasi geografis. Definisi-definisi tersebut mengingatkan kita bahwa tanpa manusia dan

hubungan di antara mereka, sebuah komunitas hanyalah kumpulan bangunan dan jalan. Dalam konteks ini, pembangunan masyarakat mengambil peran untuk mengembangkan "komunitas" yang lebih kuat dari orang-orang dan ikatan sosial dan psikologis yang mereka miliki. Memang begitulah pembangunan masyarakat didefinisikan dalam banyak literatur. Diskusi yang merefleksikan aspek ini berfokus pada pembangunan masyarakat sebagai proses pendidikan untuk memampukan masyarakat mengatasi masalah melalui pengambilan keputusan secara berkelompok (Long 1975 dikutip dalam Mattessich dan Monsey 2004: 58). Atau, mereka dapat menggambarkan pembangunan masyarakat sebagai keterlibatan dalam suatu proses untuk mencapai perbaikan dalam beberapa aspek kehidupan masyarakat di mana biasanya tindakan tersebut mengarah pada penguatan pola hubungan antarmanusia dan kelembagaan masyarakat (Ploch, 1976 dikutip dalam Mattessich dan Monsey 2004).

Semua konsep pembangunan masyarakat ini berfokus pada proses mengajarkan masyarakat bagaimana bekerja sama untuk memecahkan masalah bersama. Penulis lain mendefinisikan pembangunan masyarakat lebih dalam bentuk tindakan, hasil, atau keluaran: pengambilan keputusan lokal dan pembangunan program yang menghasilkan tempat yang lebih baik untuk hidup dan bekerja (Huie 1976 dikutip dalam Mattessich dan Monsey 2004: 58); atau sekelompok orang yang memprakarsai tindakan sosial untuk mengubah situasi ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan mereka (Christenson dan Robinson 1989 dikutip dalam Mattessich dan Monsey 2004: 57).

Konsepsi-konsepsi ini menunjukkan bahwa pembangunan masyarakat harus dilihat sebagai sebuah proses dan hasil. Oleh karena itu, definisi pembangunan masyarakat secara sederhana namun luas adalah sebuah proses: mengembangkan dan meningkatkan kemampuan untuk bertindak secara kolektif, dan sebuah hasil: (1) mengambil tindakan kolektif dan (2) hasil dari tindakan tersebut

untuk perbaikan dalam sebuah komunitas di salah satu atau semua bidang: fisik, lingkungan, budaya, sosial, politik, ekonomi, dll.

Setelah sampai pada definisi pembangunan masyarakat yang komprehensif, fokusnya sekarang dapat beralih ke hal-hal yang memfasilitasi atau mengarah pada pembangunan masyarakat. Literatur pembangunan masyarakat umumnya menyebut hal ini sebagai modal sosial atau kapasitas sosial, yang menggambarkan kemampuan warga untuk mengorganisir dan memobilisasi sumber daya mereka demi tercapainya tujuan-tujuan yang telah disepakati bersama (Christenson dan Robinson, 1989 dikutip dalam Mattessich dan Monsey 2004:61), atau sumber daya yang tertanam dalam hubungan sosial di antara orang-orang dan organisasi yang memfasilitasi kerja sama dan kolaborasi di dalam masyarakat (Komite Pembangunan Ekonomi 1995 dikutip dalam Mattessich dan Monsey 2004:62).

Secara sederhana, modal sosial atau kapasitas sosial adalah sejauh mana anggota masyarakat dapat bekerja sama secara efektif untuk mengembangkan dan mempertahankan hubungan yang kuat; memecahkan masalah dan membuat keputusan kelompok; dan berkolaborasi secara efektif untuk merencanakan, menetapkan tujuan, dan menyelesaikan sesuatu. Terdapat banyak literatur mengenai modal sosial dengan beberapa ahli yang membedakan antara modal pengikat dan modal penghubung (Agnitsch et al., 2006). *Bonding capital* mengacu pada ikatan dalam kelompok-kelompok homogen (misalnya, ras, etnis, komite aksi sosial, atau orang-orang dengan status sosial-ekonomi yang sama), sementara *bridging capital* mengacu pada ikatan di antara kelompok-kelompok yang berbeda.

Ada empat bentuk lain dari "modal masyarakat" yang sering disebut dalam literatur pembangunan masyarakat (Green dan Haines, 2002):

1. Modal manusia: pasokan tenaga kerja, keterampilan, kemampuan dan pengalaman, dll.

2. Modal fisik: bangunan, jalan, infrastruktur, dll.
3. Modal keuangan: lembaga keuangan masyarakat, dana pinjaman mikro, bank pembangunan masyarakat, dll.
4. Modal lingkungan: sumber daya alam, cuaca, kesempatan rekreasi, dll.

Keempat jenis modal masyarakat ini penting. Namun, sulit untuk membayangkan sebuah komunitas dapat mencapai banyak kemajuan tanpa adanya modal sosial atau kapasitas tertentu. Semakin banyak modal sosial yang dimiliki sebuah komunitas, semakin besar kemungkinan komunitas tersebut dapat beradaptasi dan mengatasi kekurangan pada jenis-jenis modal komunitas lainnya. Ketika melakukan penilaian masyarakat (lihat Bab 9), akan sangat berguna jika kita berpikir dalam kerangka lima jenis modal masyarakat ini.

Sejauh ini, telah tersedia definisi yang dapat digunakan untuk mendefinisikan masyarakat, pembangunan masyarakat, dan modal sosial. Untuk melengkapi persamaan pembangunan masyarakat, perlu diidentifikasi bagaimana menciptakan atau meningkatkan modal sosial atau kapasitas. Proses ini secara umum disebut sebagai pembangunan modal sosial atau peningkatan kapasitas: sebuah upaya komprehensif yang berkelanjutan untuk memperkuat norma-norma, dukungan, dan sumber daya pemecahan masalah di masyarakat (Komite Pembangunan Ekonomi 1995 dikutip dalam Mattessich dan Monsey 2004: 60).

Perhatikan bahwa hal ini terdengar seperti definisi proses pembangunan masyarakat yang diberikan di atas. Kita telah sampai pada lingkaran penuh. Proses pembangunan masyarakat adalah modal sosial/pembangunan kapasitas yang mengarah pada modal sosial yang pada gilirannya mengarah pada hasil pembangunan masyarakat.

Pembangunan masyarakat adalah evolusi terencana dari semua aspek kesejahteraan masyarakat (ekonomi, sosial, lingkungan dan budaya). Ini adalah proses di mana anggota masyarakat berkumpul

bersama untuk mengambil tindakan kolektif dan menghasilkan solusi untuk masalah bersama. Ruang lingkup pembangunan masyarakat dapat bervariasi mulai dari inisiatif kecil dalam kelompok kecil, hingga inisiatif besar yang melibatkan seluruh masyarakat. Terlepas dari ruang lingkup kegiatannya, pembangunan masyarakat yang efektif haruslah upaya jangka panjang, direncanakan dengan baik, inklusif dan adil, holistik dan terintegrasi ke dalam gambaran yang lebih besar, diprakarsai dan didukung oleh anggota masyarakat, bermanfaat bagi masyarakat, dan didasarkan pada pengalaman yang mengarah pada praktik terbaik.

Hasil utama dari pembangunan masyarakat adalah peningkatan kualitas hidup. Pembangunan masyarakat yang efektif menghasilkan keuntungan bersama dan tanggung jawab bersama di antara anggota masyarakat dan mengakui:

- a. Hubungan antara masalah sosial, budaya, lingkungan, dan ekonomi;
- b. Keragaman kepentingan di dalam masyarakat; dan
- c. Hubungannya dengan pembangunan kapasitas.

Pembangunan masyarakat membutuhkan dan membantu membangun kapasitas masyarakat untuk mengatasi masalah dan memanfaatkan peluang, menemukan kesamaan dan menyeimbangkan kepentingan yang saling bersaing. Hal ini tidak terjadi begitu saja - ini membutuhkan usaha yang sadar dan sungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu (atau banyak hal) untuk meningkatkan komunitas.

Apa itu Pembangunan Masyarakat? Pembangunan masyarakat adalah sebuah proses "akar rumput" dimana masyarakat menjadi:

- a. Lebih bertanggung jawab
- b. Mengorganisir dan merencanakan bersama
- c. Mengembangkan pilihan-pilihan yang sehat
- d. Memberdayakan diri mereka sendiri
- e. Mengurangi ketidaktahuan, kemiskinan dan penderitaan

- f. Menciptakan lapangan kerja dan kesempatan ekonomi; dan
- g. Mencapai tujuan-tujuan sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan.

Pembangunan masyarakat melibatkan cara kerja yang memberdayakan individu dan kelompok masyarakat untuk membuat perubahan di komunitas mereka dalam isu-isu yang mempengaruhi mereka.

Pada dasarnya, pembangunan masyarakat merupakan seni menyatukan orang-orang yang disatukan oleh kepedulian atau kesempatan yang sama dan memilih untuk bekerja sama untuk menciptakan perubahan.

Proses bekerja bersama menghubungkan orang, kelompok, dan organisasi dengan tujuan dan makna yang lebih besar. Proses ini juga memiliki potensi yang lebih besar untuk menghasilkan dampak kolektif. Proses ini didasarkan pada cara dan sarana untuk menciptakan koneksi dan rasa memiliki. Semuanya dibangun dari sana.

Ada banyak definisi untuk pembangunan masyarakat seperti halnya perbedaan dalam masyarakat. Konsep ini menggabungkan ide 'komunitas' dan 'pembangunan' - dengan penggabungan ini menandakan bahwa komunitas itu sendiri yang memimpin pembangunannya sendiri. Bentuk-bentuk lain dari 'pembangunan' yang melibatkan 'ahli' dari luar yang menetapkan aturan untuk penduduk setempat dan tidak menyertakan perspektif atau kekuatan lokal, berbeda dengan pendekatan ini.

Pembangunan masyarakat adalah sebuah tindakan kolaboratif dan kolektif yang dilakukan oleh masyarakat setempat untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan jangka panjang di komunitas mereka. Tujuan utama pembangunan masyarakat adalah untuk menciptakan kualitas hidup yang lebih baik secara keseluruhan bagi semua orang di masyarakat.

Pembangunan masyarakat adalah ketika sebuah komunitas menggunakan proses di mana orang-orang berkumpul; berkemu-

nikasi; mengidentifikasi kebutuhan prioritas; merencanakan dan mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah dan mencapai hasil yang diinginkan oleh komunitas.

Menurut PBB, pembangunan Masyarakat adalah suatu proses aksi sosial di mana masyarakat suatu komunitas mengorganisir diri mereka sendiri untuk merencanakan dan bertindak; mendefinisikan kebutuhan bersama dan individu serta memecahkan masalah mereka; melaksanakan rencana dengan ketergantungan maksimum pada sumber daya komunitas; dan melengkapi sumber daya ini bila diperlukan dengan layanan dan materi dari lembaga pemerintah dan non-pemerintah di luar komunitas dan untuk membantu masyarakat mengembangkan komunitas yang layak secara ekonomi dan sosial yang dapat membantu, memperkuat, dan mendukung pertumbuhan individu dan keluarga secara memadai serta meningkatkan kualitas hidup.

Dengan menggabungkan kedua istilah tersebut, Pembangunan masyarakat - berarti bahwa masyarakat itu sendiri terlibat dalam sebuah proses yang bertujuan untuk meningkatkan situasi sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat. Masyarakat adalah sarana sekaligus tujuan dari Pembangunan masyarakat. Komunitas itu sendiri yang mengambil tindakan dan berpartisipasi bersama. Melalui tindakan inilah masyarakat menjadi lebih vital, tidak hanya secara ekonomi tetapi juga sebagai komunitas yang berfungsi dengan baik. Pembangunan Masyarakat telah didefinisikan dalam beberapa cara yang berbeda dan beberapa definisi tersebut tercantum di bawah ini:

1. Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikan Pembangunan masyarakat sebagai "sebuah proses di mana anggota masyarakat berkumpul bersama untuk mengambil tindakan kolektif dan menghasilkan solusi untuk masalah bersama". Ini adalah konsep yang luas, yang diterapkan pada praktik-praktik para pemimpin masyarakat, aktivis, warga yang terlibat, dan para profesional untuk meningkatkan berbagai aspek masyarakat,

yang biasanya bertujuan untuk membangun masyarakat lokal yang lebih kuat dan lebih tangguh.

2. Pembangunan masyarakat juga dipahami sebagai sebuah disiplin ilmu, dan didefinisikan oleh *International Association for Community Development* (www.iacdglobal.org), jaringan global praktisi dan akademisi Pembangunan masyarakat, sebagai "profesi berbasis praktik dan disiplin akademis yang mendorong demokrasi partisipatif, pembangunan berkelanjutan, hak-hak, kesempatan ekonomi, kesetaraan dan keadilan sosial, melalui pengorganisasian, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat di dalam komunitasnya, baik yang memiliki lokalitas, identitas, maupun kepentingan, baik di lingkungan perkotaan maupun perdesaan." Pembangunan masyarakat dapat berupa sebuah organisasi (seperti pekerja Pembangunan masyarakat di pemerintah daerah) dan sebuah cara untuk bekerja dengan masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk membangun masyarakat berdasarkan keadilan, kesetaraan dan saling menghormati.
3. Pembangunan masyarakat melibatkan perubahan hubungan antara masyarakat biasa dan orang-orang yang memiliki kekuasaan, sehingga setiap orang dapat mengambil bagian dalam isu-isu yang mempengaruhi kehidupan mereka. Hal ini dimulai dari prinsip bahwa di dalam setiap komunitas terdapat banyak pengetahuan dan pengalaman yang, jika digunakan dengan cara-cara kreatif, dapat disalurkan ke dalam tindakan kolektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh komunitas. "Praktisi Pembangunan masyarakat bekerja bersama masyarakat untuk membantu membangun hubungan dengan orang-orang dan organisasi-organisasi penting dan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang sama. Mereka menciptakan peluang bagi masyarakat untuk mempelajari keterampilan baru dan, dengan memungkinkan orang bertindak bersama, praktisi Pembangunan masyarakat membantu mendorong inklusi dan kesetaraan sosial.

4. Pembangunan Masyarakat adalah profesi berbasis praktik dan disiplin akademis yang mempromosikan demokrasi partisipatif, pembangunan berkelanjutan, hak-hak, peluang ekonomi, kesetaraan dan keadilan sosial, melalui pengorganisasian, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat di dalam masyarakat, baik lokalitas, identitas, maupun kepentingan, di perkotaan dan pedesaan." Pembangunan masyarakat adalah sebuah profesi berbasis praktik dan disiplin akademis yang berkaitan dengan pengorganisasian, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat di dalam komunitas mereka.
5. Pembangunan masyarakat adalah sebuah proses di mana masyarakat bersatu dengan otoritas pemerintah untuk meningkatkan kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat dan masyarakat diintegrasikan ke dalam kehidupan bangsa yang memungkinkan mereka untuk berkontribusi penuh terhadap kemajuan nasional. - (Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam Biggs, 1999).

Sanders (1958) melihat Pembangunan masyarakat sebagai sebuah proses yang bergerak dari satu tahap ke tahap lainnya; sebuah metode untuk mencapai suatu tujuan; sebuah program prosedur dan sebagai sebuah gerakan yang menyapu emosi dan keyakinan masyarakat.

Menurut Rubin dan Rubin (2001), Pembangunan masyarakat terjadi ketika masyarakat memperkuat ikatan di dalam komunitas atau lingkungan mereka, membangun jaringan sosial, dan membentuk organisasi mereka sendiri untuk menyediakan kapasitas jangka panjang dalam memecahkan masalah. Hal ini melibatkan:

- a. Kemampuan untuk berpikir
- b. Kemampuan untuk memutuskan
- c. Kemampuan untuk merencanakan
- d. Kemampuan untuk mengambil tindakan dalam menentukan kehidupan mereka

Pembangunan masyarakat ialah sebuah pendekatan konseptual untuk meningkatkan keterhubungan, pengelolaan aktif dan kemitraan di antara anggota masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat dan organisasi-organisasi dalam rangka meningkatkan tujuan-tujuan sosial, ekonomi dan lingkungan (alami dan terbangun) dari masyarakat. Pendekatan ini merupakan perpaduan antara tindakan '*bottom up*' yang digerakkan oleh masyarakat dalam kemitraan dengan sumber daya '*top down*', fasilitasi dan koordinasi oleh pemerintah daerah.

Pendekatan Pembangunan masyarakat didasarkan pada keyakinan bahwa ada nilai nyata dan intrinsik dalam memiliki individu, kelompok masyarakat, dan organisasi yang kuat dan tangguh. Pembangunan masyarakat yang membangun dan memperkuat kapasitas terdiri dari berbagai elemen, yang digabungkan dengan cara yang berbeda, sesuai dengan konteks lokal.

Elemen-elemen komunitas yang kuat meliputi:

- a. partisipasi dan kebanggaan warga
- b. mekanisme masukan dari masyarakat
- c. mekanisme untuk mengembangkan hubungan yang kuat dan efektif yang dibangun di atas kepercayaan dan rasa hormat
- d. mekanisme distribusi pengaruh masyarakat
- e. keterampilan dan akses ke sumber daya
- f. rasa kebersamaan dan kohesi sosial dan keterlibatan masyarakat
- g. jaringan sosial dan antar organisasi, serta
- h. nilai-nilai dan sejarah masyarakat.

Pembangunan masyarakat didasarkan pada pentingnya dan kemampuan masyarakat untuk bertindak bersama dalam mempengaruhi dan menegaskan kendali atas isu-isu sosial, ekonomi dan politik yang mempengaruhi mereka. Dalam hal ini, pembangunan masyarakat berfokus pada hubungan antara masyarakat dengan berbagai institusi dan pengambil keputusan (publik dan swasta) yang mengatur pengalaman mereka sehari-hari.

1. Pembangunan masyarakat bertujuan untuk mewujudkan pembagian kekuasaan dan menciptakan struktur yang memberikan partisipasi dan keterlibatan yang tulus.
2. Pembangunan Masyarakat adalah tentang melibatkan keterampilan, pengetahuan dan pengalaman masyarakat dalam mengambil inisiatif untuk menanggapi masalah-masalah sosial, ekonomi dan politik.
3. Pembangunan Masyarakat harus memimpin dalam menghadapi sikap individu dan praktik-praktik lembaga yang mendiskriminasi kelompok-kelompok yang kurang beruntung.

Pembangunan Masyarakat sebagai pendekatan "dari bawah ke atas" dan serangkaian praktik didedikasikan untuk:

- a. Meningkatkan kekuatan dan efektivitas kehidupan masyarakat dan membangun modal sosial
- b. Memperbaiki kondisi lokal, terutama bagi masyarakat yang kurang beruntung, dan mengatasi pengucilan sosial
- c. Memampukan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik dan mencapai kontrol jangka panjang yang lebih besar atas keadaan mereka

Pembangunan Masyarakat sebagai konsep reformasi sosial, pendidikan, budaya, dan ekonomi bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan dan mempertahankan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara umum
- b. Mengembangkan kemampuan masyarakat untuk mengambil inisiatif dan tindakan
- c. Memberdayakan partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan perubahan

Pembangunan masyarakat dilakukan melalui promosi:

- a. Kesetaraan kesempatan
- b. Inklusi sosial

- c. Hak asasi manusia
- d. Menghargai keragaman, dan
- e. Demokrasi

Pembangunan masyarakat merupakan sebuah proses dan hasil, seperti yang terlihat dalam berbagai definisi yang ada dalam literatur. Pembangunan masyarakat dalam semua upaya ini terdiri dari tindakan-tindakan untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengidentifikasi prioritas dan peluang, serta mendorong dan mempertahankan perubahan lingkungan yang positif" (Chaskin, 2001). Pembangunan masyarakat adalah pembangunan aset yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah hingga menengah, di mana masyarakat didefinisikan sebagai lingkungan atau wilayah multi-lingkungan" (Ferguson dan Dickens, 1999). Pembangunan masyarakat didefinisikan sebagai upaya terencana untuk menghasilkan aset yang dapat meningkatkan kapasitas penduduk untuk meningkatkan kualitas hidup mereka" (Green dan Haines, 2007). Pembangunan masyarakat adalah pendekatan berbasis tempat: pendekatan ini berkonsentrasi pada penciptaan aset yang bermanfaat bagi masyarakat di lingkungan miskin, sebagian besar dengan membangun dan memanfaatkan hubungan dengan sumber daya eksternal (Vidal dan Keating 2004).

B. Masyarakat

Seringkali ketika kita memikirkan istilah komunitas, kita berpikir dalam istilah geografis. Komunitas kita adalah lokasi (misalnya kota, kota kecil atau desa) tempat kita tinggal. Ketika komunitas didefinisikan melalui lokasi fisik, komunitas dapat didefinisikan dengan batas-batas yang tepat yang mudah dipahami dan diterima oleh orang lain.

Namun, mendefinisikan komunitas dalam hal geografi hanyalah salah satu cara untuk melihatnya. Komunitas juga dapat didefinisikan berdasarkan kesamaan warisan budaya, bahasa, dan kepercayaan atau minat yang sama. Hal ini terkadang disebut komunitas minat.

Bahkan ketika komunitas merujuk pada lokasi geografis, tidak selalu mencakup semua orang di dalam area tersebut. Sebagai contoh, banyak komunitas Aborigin merupakan bagian dari geografi non-Aborigin yang lebih besar. Di pusat-pusat kota yang lebih besar, komunitas sering kali didefinisikan dalam istilah lingkungan tertentu.

Sebagian besar dari kita merupakan bagian dari lebih dari satu komunitas, baik kita menyadarinya atau tidak. Sebagai contoh, seseorang dapat menjadi bagian dari komunitas lingkungan, komunitas keagamaan, dan komunitas dengan minat yang sama pada saat yang bersamaan. Hubungan, baik dengan orang lain maupun dengan tanah, mendefinisikan sebuah komunitas bagi setiap individu.

Ada banyak cara yang berbeda-beda untuk mengidentifikasi komunitas. Definisi dan contoh berikut ini akan memberi Anda gambaran tentang berbagai cara menggunakan istilah komunitas. Sebuah komunitas dapat berupa:

1. Sekelompok orang yang tinggal di area lokal tertentu di mana mereka memiliki kepemilikan bersama. Jenis komunitas ini mencakup desa dan distrik di mana suatu kelompok masyarakat memiliki kepemilikan bersama atas tanah dan sumber dayanya.
2. sekelompok negara yang memiliki kepentingan bersama, misalnya ASEAN yang terdiri dari 10 negara yang secara sukarela setuju untuk menjadi komunitas negara-negara dengan kepentingan bersama;
3. Distrik pemukiman di mana orang tinggal di tempat tinggal pribadi. Distrik pemukiman ini biasanya berupa kota kecil atau bagian dari kota yang sebagian besar terdiri dari penduduk. Yang terakhir ini biasanya disebut sebagai pinggiran kota tempat tinggal dan dapat terdiri dari populasi etnis yang beragam dan orang-orang dari semua lapisan masyarakat dan keyakinan agama
4. Kelompok organisme yang berbagi lingkungan.

5. sekelompok orang yang berkumpul bersama untuk bekerja dan hidup.
6. sekelompok orang yang disatukan oleh objek cinta yang sama.
7. sekelompok orang yang bekerja sama secara aktif untuk mencapai tujuan bersama.
8. entitas hidup yang unik dan terus berubah secara fisik dan psikologis.
9. kelompok sosial dalam berbagai ukuran yang anggotanya tinggal di suatu wilayah tertentu, berbagi pemerintahan, dan sering kali memiliki warisan budaya dan sejarah yang sama.
10. sekelompok orang yang tinggal berdekatan satu sama lain, yang tertarik pada hal-hal yang sama, yang memiliki masalah yang sama, yang saling bergantung satu sama lain, dan yang menyadari bahwa mereka adalah bagian penting dari masyarakat.

Setidaknya ada tiga elemen dalam masyarakat, diantaranya:

- a. Sebuah unit sosial dimana ruang menjadi bagian yang tidak terpisahkan.
- b. Komunitas menunjukkan sebuah konfigurasi mengenai cara hidup, baik bagaimana orang melakukan sesuatu dan apa yang mereka inginkan - institusi dan tujuan kolektif mereka.
- c. Sebuah tindakan kolektif

Adapun ciri-ciri sebuah masyarakat adalah:

1. Tinggal di wilayah yang sama.
2. Mereka saling mengenal satu sama lain.
3. Melakukan berbagai hal bersama-sama.
4. Memiliki masalah, kebutuhan dan keprihatinan yang sama.
5. Saling bergantung satu sama lain.
6. Memiliki adat istiadat, budaya, kebiasaan, upacara, kepercayaan, dan hukum yang sama.
7. Mereka berbicara dalam bahasa yang sama.

8. Dalam suatu kelompok mungkin terdapat sub kelompok berdasarkan usia, jenis kelamin, agama, pekerjaan, dan pendidikan.
9. Para anggota komunitas menyadari bahwa mereka adalah seni yang penting dalam kelompok.

C. Memahami Pembangunan

Istilah pembangunan sering kali membawa asumsi pertumbuhan dan ekspansi. Selama era industri, pembangunan sangat terkait dengan peningkatan kecepatan volume dan ukuran. Saat ini banyak yang mempertanyakan konsep pertumbuhan karena berbagai alasan. Ada kesadaran bahwa lebih banyak tidak selalu lebih baik. Semakin banyak orang yang menghargai untuk mengurangi ketergantungan pada pihak luar dan menurunkan tingkat konsumerisme. Oleh karena itu, istilah pembangunan tidak selalu berarti pertumbuhan; namun, istilah ini selalu menyiratkan perubahan.

Proses pembangunan masyarakat bertanggung jawab atas kondisi dan faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dan mengubah kualitas hidup anggotanya. Pembangunan masyarakat adalah alat untuk mengelola perubahan dan, oleh karena itu, bukan merupakan perbaikan cepat atau respons jangka pendek:

- a. perbaikan cepat atau tanggapan jangka pendek terhadap masalah tertentu dalam suatu komunitas,
- b. sebuah proses yang berusaha untuk mengecualikan anggota masyarakat dari partisipasi,
- c. atau sebuah inisiatif yang terjadi secara terpisah dari kegiatan masyarakat terkait lainnya.

Pembangunan masyarakat adalah tentang pembangunan masyarakat, dengan proses yang sama pentingnya dengan hasilnya. Salah satu tantangan utama pembangunan masyarakat adalah menyeimbangkan antara kebutuhan akan solusi jangka panjang dengan realitas sehari-hari yang membutuhkan keputusan segera dan tindakan jangka pendek.

Pembangunan atau pembangunan adalah memunculkan kemampuan masyarakat dan membawanya ke kondisi yang lebih maju dan efektif. Pembangunan masyarakat berbicara tentang cara meningkatkan, mengubah, dan membuat sesuatu menjadi lebih baik. pembangunan bukan hanya berbicara tentang pertumbuhan semata.

Pembangunan adalah sebuah proses yang meningkatkan pilihan. Hal ini berarti adanya pilihan-pilihan baru, diversifikasi, berpikir tentang isu-isu yang ada secara berbeda dan mengantisipasi perubahan (Christenson et.al., 1989). Pembangunan melibatkan perubahan, perbaikan dan vitalitas, sebuah upaya yang terarah untuk meningkatkan partisipasi, fleksibilitas, kesetaraan, sikap, fungsi institusi dan kualitas hidup. Pembangunan adalah penciptaan kekayaan, -kekayaan yang berarti hal-hal yang dihargai oleh masyarakat, bukan hanya uang (Shaffer, 1989).

Istilah pembangunan sering kali mengandung asumsi pertumbuhan dan perluasan, yang selalu menyiratkan perubahan. Pembangunan adalah suatu proses yang menciptakan pertumbuhan, kemajuan, perubahan positif atau penambahan komponen fisik, ekonomi, lingkungan, sosial dan demografi.

D. Asumsi-Asumsi Kerja Pembangunan Masyarakat

Pembangunan masyarakat sebagai sebuah disiplin ilmu atau profesi dipandu oleh beberapa asumsi. Karena asumsi-asumsi ini dianggap benar, maka asumsi-asumsi ini memiliki pengaruh besar terhadap arah dan penekanan disiplin ilmu tersebut. Asumsi-asumsi tersebut dapat dimodifikasi seiring berjalannya waktu, namun asumsi-asumsi yang dianggap sah ketika profesi atau disiplin ilmu tersebut masih dalam tahap perkembangannya, paling tidak memiliki antecedent historis yang sangat penting. Asumsi-asumsi yang sangat penting bagi Pembangunan masyarakat meliputi:

- a. Masyarakat mampu berperilaku rasional
- b. Perilaku yang signifikan adalah perilaku yang dipelajari

- c. Perilaku yang signifikan dipelajari melalui interaksi
- d. Masyarakat mampu memberikan arahan pada perilaku mereka

E. Elemen-Elemen Pembangunan Masyarakat

Perhatian harus diberikan pada kebutuhan dan keinginan orang-orang yang terlibat dan pada bidang-bidang usaha yang ditetapkan oleh orang-orang yang terlibat. Orang-orang dapat menjadi partisipan aktif yang berarti dalam proses pembangunan dan memiliki kendali yang cukup besar atas proses tersebut.

Konsep swadaya sangat penting dalam proses Pembangunan masyarakat. Pembangunan masyarakat tidak memiliki program yang telah ditentukan sebelumnya untuk dibawa ke lapangan untuk meyakinkan masyarakat tentang apa yang baik bagi mereka. Program Pembangunan masyarakat memungkinkan masyarakat untuk membuat program mereka sendiri dengan bantuan dari berbagai sumber, dengan menyadari bahwa masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk menerima atau menolak bantuan dan saran tersebut.

Program Pembangunan masyarakat memungkinkan masyarakat untuk mengerjakan berbagai proyek dan kegiatan yang berbeda, mulai dari Pembangunan industri/ekonomi, seni, pendidikan dasar, perumahan, hingga reorganisasi politik. Namun demikian, sebuah proyek tertentu tidak menentukan apakah proyek tersebut merupakan Pembangunan masyarakat atau bukan. Bagaimana proyek tersebut dikembangkan, siapa yang mengendalikan proyek tersebut, dan bagaimana proyek tersebut berhubungan dengan masyarakat secara keseluruhan lebih menentukan apakah sebuah proyek merupakan Pembangunan masyarakat atau bukan.

F. Prinsip-prinsip Pembangunan Masyarakat

Secara prinsip pembangunan masyarakat adalah memandu proses bukan memberi resep atau menyusun preskripsi. Pempa-

ngunan masyarakat adalah tentang cara mengajak orang untuk bersatu dan menjalankan sebuah kemungkinan.

Pembangunan masyarakat memiliki sejumlah prinsip yang harus diperhatikan oleh pelaku atau para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses pembangunan masyarakat. Prinsip-prinsip itu diantaranya:

- a. Mempromosikan perubahan oleh masyarakat, untuk masyarakat
- b. Menghargai pengetahuan lokal, keterampilan lokal, budaya lokal, sumber daya lokal, dan proses lokal
- c. Menyatukan masyarakat untuk menemukan dukungan dan hubungan sosial
- d. Merupakan proses yang dapat dimiliki, dikendalikan dan dipertahankan oleh masyarakat itu sendiri
- e. Merupakan proses yang dinamis, dengan perjalanannya sendiri sama pentingnya dengan hasilnya - proses yang baik adalah kunci untuk pembangunan masyarakat yang baik
- f. Lebih dari sekedar proses perencanaan - ini adalah proses pembelajaran yang berkelanjutan di mana sikap, ide dan jaringan baru berkembang dari tindakan dan refleksi bersama
- g. Merupakan pendekatan yang inklusif, adil dan responsif untuk menciptakan solusi di masyarakat
- h. Mendorong partisipasi aktif, konsultasi dan keterlibatan masyarakat luas dalam perancangan, pembangunan, pelaksanaan dan evaluasi proyek
- i. Mendorong kemampuan masyarakat untuk secara kolektif membuat keputusan tentang penggunaan sumber daya di komunitas mereka
- j. Adalah tentang mengikuti energi dan motivasi orang-orang yang terlibat - anda mungkin awalnya berencana untuk pergi dari titik a ke titik b, tetapi anda berakhir di c atau j - dan tidak masalah jika anda mengikuti energi dan masukan dari masyarakat
- k. Adalah tentang melepaskan 'kekuasaan' anda sebagai pekerja dan berkolaborasi dengan orang lain

- l. Menyediakan sarana bagi orang-orang untuk bertindak atas keprihatinan masyarakat
- m. Membangun keterampilan, pengalaman, potensi, dan semangat komunitas yang ada sambil terus menumbuhkan kepemimpinan, kewirausahaan, pembelajaran, dan kolaborasi
- n. Partisipasi dalam pengambilan keputusan publik harus bebas dan terbuka bagi semua pihak yang berkepentingan
- o. Keterwakilan yang luas dan peningkatan keluasan perspektif merupakan kondisi yang kondusif bagi Pembangunan masyarakat
- p. Pembangunan konsensus: penerimaan pemahaman dan konsensus merupakan dasar untuk melakukan perubahan sosial dan teknis
- q. Penghargaan terhadap pandangan individu: setiap orang berhak untuk didengar pendapatnya dalam diskusi terbuka, baik yang setuju maupun yang tidak setuju dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat
- r. Setiap orang boleh ikut serta dalam menciptakan dan menciptakan tatanan sosial dimana ia menjadi bagian dari tatanan sosial itu sendiri
- s. Keberhasilan, sekecil apa pun, harus diakui dan dirayakan,

G. Etika, Prinsip, dan Nilai-nilai Dasar Pembangunan Masyarakat

Etika dasar, prinsip-prinsip, dan nilai-nilai inti dari Pembangunan masyarakat yang telah dijelaskan lebih lanjut secara rinci di bawah ini meliputi:

- a. Proses demokratis;
- b. Perlindungan terhadap hak-hak minoritas;
- c. Pembangunan kapasitas; yang berfokus pada kekuatan;
- d. Penerimaan, rasa hormat, dan kepekaan terhadap sudut pandang yang beragam;
- e. Struktur yang tidak otoriter dan tidak hirarkis;
- f. Swadaya dan kemandirian;
- g. Kepemilikan masyarakat; - Partisipasi masyarakat;

- h. Bekerja dengan jaringan alamiah dan mengembangkan/memperluas jaringan;
- i. Layanan masyarakat yang bermanfaat direncanakan, dikembangkan, dan dipantau oleh anggota masyarakat;
- j. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan; dan
- k. Mendorong keadilan sosial dan pemerataan

H. Nilai dan Keyakinan dalam Pembangunan Masyarakat

Hal-hal ini menentukan fokus Pembangunan Masyarakat:

- a. Masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kesejahteraan mereka
- b. Demokrasi partisipatif merupakan metode yang lebih unggul dalam menjalankan pemerintahan
- c. Masyarakat memiliki hak untuk berusaha menciptakan lingkungan yang mereka inginkan
- d. Masyarakat memiliki hak untuk menolak lingkungan yang dipaksakan dari luar
- e. Memaksimalkan interaksi antarmanusia dalam masyarakat akan meningkatkan potensi Pembangunan manusia
- f. Setiap disiplin ilmu dan/atau profesi memiliki potensi untuk menjadi kontributor dalam proses Pembangunan masyarakat
- g. Motivasi tercipta dalam diri manusia melalui hubungan dengan lingkungannya
- h. Pembangunan masyarakat "berkepentingan" untuk mengembangkan kemampuan manusia dalam memenuhi dan menghadapi lingkungannya

I. Sumberdaya Pembangunan Masyarakat

Istilah sumber daya digunakan dalam banyak konteks. Istilah ini sering kali dipahami sebagai uang; namun, dalam konteks pembangunan masyarakat, istilah ini dapat berarti lebih dari itu. Pembangunan masyarakat mencakup sumber daya alam, manusia, keuangan, dan infrastruktur.

Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam. Seringkali, pembangunan masyarakat berfokus pada industri sumber daya alam yang mengekstraksi sumber daya alam, menciptakan lapangan kerja dan kekayaan, namun jika tidak dikelola dengan baik, sumber daya alam tersebut tidak akan berkelanjutan dari waktu ke waktu. Bagian dari pembangunan masyarakat yang efektif adalah menjadi pengelola lahan yang baik dan menjaga keseimbangan yang sehat antara usaha lingkungan, ekonomi dan sosial di masyarakat. Sumber daya alam mencakup hal-hal seperti:

- a. tanah, udara, dan air;
- b. mineral dan logam serta bijih di permukaan/bawah permukaan;
- c. minyak, gas, dan minyak bumi;
- d. pepohonan dan tanaman lainnya;
- e. satwa liar; dan
- f. standar, undang-undang, serta kebijakan yang berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas.

Sumber daya manusia adalah tentang manusia. Manusia adalah inti dari semua masalah masyarakat dan, dengan demikian, mereka sangat penting bagi keberhasilan. Namun, melibatkan orang saja tidaklah cukup. Dalam pembangunan masyarakat, penting untuk memiliki orang yang tepat dalam pekerjaan yang tepat dengan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang tepat. Hal ini bukanlah hal yang mudah karena seringkali kita tidak yakin siapa yang harus melakukan apa, apa keterampilan yang dibutuhkan, atau di mana mendapatkan keterampilan yang diperlukan jika keterampilan tersebut tidak ada.

Menempatkan orang pada peran yang tepat dan membangun keterampilan atau mengembangkan kapasitas manusia disebut pembangunan sumber daya manusia. Kadang-kadang disebut juga sebagai membangun atau meningkatkan modal sosial. Apa pun itu, hal ini mengakui nilai manusia dan bakat mereka dan mengakui bahwa jenis pembangunan ini sama pentingnya dengan pembangu-

nan sumber daya alam. Tidak seperti sumber daya alam lainnya di planet ini, manusia dapat diperbaharui dan harus diperlakukan sebagai sumber daya yang paling berharga dalam sebuah komunitas.

Sumber daya manusia mencakup hal-hal seperti:

- a. keluarga dan gaya hidup yang sehat;
- b. pembangunan keterampilan, pendidikan dan pelatihan;
- c. perencanaan karier dan pekerjaan;
- d. praktik perekrutan yang efektif dan legal;
- e. kompensasi dan pensiun pekerja; dan
- f. Hak asasi manusia serta undang-undang ketenagakerjaan.

Istilah sumber daya keuangan sudah dipahami dengan baik. Kita tahu bahwa itu berarti uang dan sering kali menyiratkan kemampuan untuk mendapatkannya. Yang menjadi rumit adalah bagaimana menemukan dan berhasil menarik jenis dan jumlah sumber daya keuangan untuk inisiatif pembangunan masyarakat. Sama seperti memiliki orang yang tepat untuk melakukan pekerjaan yang tepat, penting juga untuk memiliki uang yang tepat pada waktu yang tepat. Secara tradisional, pembangunan masyarakat didanai (sebagian atau seluruhnya) melalui saluran pembangunan ekonomi, pajak atau hibah pemerintah. Hal ini menyisakan sedikit kekuatan atau kendali di tangan masyarakat yang ingin atau perlu melakukan hal-hal yang tidak ada dalam agenda pemerintah atau sektor swasta. Penggalangan dana dan pencarian hibah telah menjadi pekerjaan penuh waktu bagi banyak organisasi dan kelompok yang terlibat dalam pelayanan dan pembangunan masyarakat.

Sumber daya keuangan mencakup hal-hal seperti:

- a. penggalangan dana dan pencarian hibah;
- b. Bank dan lembaga keuangan lainnya;
- c. Dana pinjaman masyarakat dan lingkaran peminjaman;
- d. Akses ke modal dan pendanaan investasi;
- e. Pinjaman pemerintah dan dana program;
- f. Koperasi dan bentuk-bentuk investasi lainnya; dan

- g. Kebijakan dan pedoman yang terkait dengan pinjaman serta pelaporan keuangan.

Infrastruktur adalah bagian dari sumber daya yang dibutuhkan untuk menjadi efektif dalam pembangunan masyarakat dan mencakup hal-hal yang jelas seperti:

- a. Bangunan dan struktur fisik;
- b. Transportasi dan akses;
- c. Sistem komunikasi; dan
- d. Listrik, air, pembuangan limbah, sampah, dan pemanas.

Namun, infrastruktur juga mengacu pada sistem politik dan kepemimpinan yang diperlukan untuk mendukung masyarakat, serta kebijakan, standar dan hukum yang ditetapkan dalam masyarakat. Tanpa infrastruktur, tidak akan ada komunitas fisik. Ketika mempertimbangkan sumber daya untuk inisiatif pembangunan masyarakat, penting untuk mempertimbangkan infrastruktur apa yang dibutuhkan, apa hubungannya dengan apa yang sudah ada saat ini dan apakah ada kebijakan atau sistem pendukung yang ada yang perlu dihubungi atau dipatuhi.

Sebuah usaha pembangunan masyarakat seringkali memiliki infrastrukturnya sendiri, seperti kepemimpinan atau bangunan fisik, namun harus ada dalam hubungan yang sehat dengan apa yang sudah ada.

J. Pendekatan-pendekatan dalam Pembangunan Masyarakat

Pembangunan masyarakat mengacu pada proses bekerja secara kolaboratif dengan anggota masyarakat untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah, membangun kapasitas, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan dalam suatu komunitas. Ini adalah istilah yang luas yang mencakup berbagai kegiatan, termasuk pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, dan politik.

Pembangunan masyarakat adalah sebuah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup individu dan kelompok di wilayah geografis atau komunitas tertentu. Proses ini melibatkan berbagai kegiatan, inisiatif, dan strategi yang memberdayakan anggota masyarakat, memenuhi kebutuhan mereka, dan mendorong keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pembangunan masyarakat berupaya membangun masyarakat yang lebih kuat, lebih tangguh, dan mandiri.

Pembangunan masyarakat mengacu pada proses yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan dari suatu komunitas atau kelompok masyarakat tertentu. Proses ini melibatkan berbagai kegiatan yang dirancang untuk memberdayakan dan membangun kapasitas individu, kelompok, dan organisasi dalam suatu komunitas untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan dan sasaran bersama.

Ada beberapa pendekatan untuk pembangunan masyarakat, termasuk:

1. *Needs-Based Community Development (NBCD)*

Ada dua metode utama dalam melakukan pendekatan terhadap Pembangunan masyarakat. Pendekatan konvensional atau tradisional adalah mengidentifikasi isu, masalah, dan kebutuhan masyarakat. Di banyak lingkungan berpenghasilan rendah, sangat mudah untuk menunjukkan masalah - rumah-rumah kosong dan terbengkalai, ruko-ruko yang tidak terawat, lahan kosong yang dipenuhi sampah, dan banyak lagi yang lainnya. Dengan berfokus pada masalah, para peneliti komunitas cenderung berkonsentrasi hanya pada apa yang kurang dalam sebuah komunitas. Sebagai contoh, sebuah lingkungan mungkin menunjukkan masalah seperti tingkat pengangguran yang tinggi atau kurangnya kesempatan berbelanja dan mengidentifikasi kebutuhan akan lebih banyak pekerjaan dan bisnis. Jika para pengamat masyarakat hanya berfokus pada upaya untuk mengatasi masalah yang mereka lihat, mereka mungkin akan melewatkan atau mengabaikan penyebab dari masalah-masalah tersebut.

Banyak masalah yang teridentifikasi, seperti kemiskinan atau pengangguran, merupakan masalah yang terlalu besar untuk diselesaikan oleh satu komunitas saja. Dengan berfokus pada penyebab masalah, warga masyarakat mungkin akan berpangku tangan atau menyerah karena terlalu besarnya masalah yang dihadapi. Pendekatan ini dapat menciptakan ekspektasi yang tidak masuk akal yang dapat berujung pada kekecewaan dan kegagalan dari waktu ke waktu. Selain itu, pendekatan ini dapat menunjukkan begitu banyak masalah dan kebutuhan sehingga orang merasa kewalahan, dan oleh karena itu, tidak ada yang dilakukan.

2. *Asset-Based Community Development (ABCD)*

Pendekatan ini menekankan pada kekuatan dan aset yang dimiliki oleh masyarakat, bukan hanya berfokus pada kebutuhan dan kekurangannya. Pendekatan ini melibatkan identifikasi dan pembangunan sumber daya yang ada, seperti keterampilan dan pengetahuan anggota masyarakat, bisnis lokal, dan organisasi masyarakat.

ABCD berfokus pada identifikasi dan mobilisasi aset, kekuatan, dan sumber daya yang ada di dalam komunitas. ABCD menekankan pentingnya keterampilan, pengetahuan, hubungan, dan bakat anggota masyarakat sebagai aset yang berharga untuk pembangunan. ABCD mendorong swadaya dan kemandirian dengan mendorong penduduk setempat untuk memimpin dalam mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pendekatan ini berfokus pada identifikasi dan pemanfaatan kekuatan dan aset suatu komunitas, termasuk masyarakat, organisasi, dan lembaga-lembaganya. Pendekatan ini melibatkan identifikasi keterampilan, pengetahuan, dan sumber daya yang ada di dalam komunitas dan menggunakannya untuk menciptakan perubahan positif.

ABCD (*Asset-Based Community Development*) adalah sebuah pendekatan pembangunan masyarakat yang berfokus pada identifikasi dan mobilisasi aset, keterampilan, dan sumber daya yang ada

di dalam masyarakat untuk mendorong perubahan dan pembangunan yang positif. Pendekatan ini menekankan pada kekuatan dan kemampuan masyarakat daripada kekurangan dan kebutuhannya. Berikut adalah beberapa alasan mengapa ABCD merupakan pendekatan yang penting dalam pembangunan masyarakat:

a) Pemberdayaan:

ABCD memberdayakan masyarakat dengan mengenali dan membangun kekuatan, aset, dan sumber daya yang ada. Pendekatan ini mendorong masyarakat untuk mengambil alih kepemilikan atas proses pembangunan mereka, yang dapat menghasilkan perubahan yang berkelanjutan dan tahan lama.

b) Keberlanjutan:

ABCD berfokus pada membangun aset yang sudah ada daripada menciptakan aset baru. Artinya, upaya pembangunan masyarakat akan lebih mungkin untuk berkelanjutan karena didasarkan pada sumber daya dan kapasitas yang sudah ada di dalam masyarakat.

c) Kolaborasi:

ABCD mendorong kolaborasi dan kemitraan di antara anggota masyarakat dan organisasi. Pendekatan ini mengakui bahwa tidak ada satu orang atau organisasi yang memiliki semua jawaban, dan bahwa tindakan kolektif diperlukan untuk pembangunan masyarakat.

d) Pola pikir positif:

ABCD mendorong pola pikir positif dengan berfokus pada kekuatan dan kemampuan masyarakat. Pendekatan ini dapat membantu membangun kepercayaan diri, harapan, dan rasa kemungkinan di antara anggota masyarakat.

e) Dipimpin oleh masyarakat:

ABCD adalah pendekatan pembangunan yang dipimpin oleh masyarakat. Artinya, anggota masyarakat secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan memiliki suara dalam menentukan arah pembangunan mereka sendiri.

Secara keseluruhan, ABCD merupakan pendekatan yang penting dalam pembangunan masyarakat karena pendekatan ini mengakui dan membangun kekuatan, aset, dan sumber daya yang ada di masyarakat. Pendekatan ini dapat memberdayakan masyarakat, mendorong keberlanjutan, mendorong kolaborasi, menumbuhkan pola pikir positif, dan memastikan bahwa upaya pembangunan dipimpin oleh masyarakat.

3. *Participatory Community Development (PCD)*

Pendekatan ini menekankan pentingnya partisipasi aktif dan keterlibatan anggota masyarakat dalam proses pembangunan. Pendekatan ini melibatkan pemberdayaan anggota masyarakat untuk mengambil alih proses pembangunan dan membuat keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Pendekatan ini menitikberatkan pada keterlibatan aktif anggota masyarakat dalam proses pembangunan. Pendekatan ini melibatkan masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas mereka sendiri, dan bekerja sama untuk mengembangkan dan mengimplementasikan solusi.

Pembangunan Masyarakat Partisipatif (*Participatory Community Development/PCD*) adalah sekelompok metode yang membantu masyarakat lokal bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah. PCD adalah mekanisme intervensi masyarakat yang memungkinkan anggota untuk mengidentifikasi kebutuhan, masalah, dan prioritas masing-masing daerah. Ini adalah proses di mana kelompok dan masyarakat menentukan prioritas pembangunan mereka dan merancang solusi melalui dialog dan konsensus yang inklusif. Para peserta bertanggung jawab untuk mengimplementasikan solusi tersebut. PRA adalah sebuah proses bagi masyarakat lokal untuk memecahkan masalah-masalah masyarakat. Proses ini melibatkan:

- a. Menyadarkan masyarakat agar lebih responsif terhadap program pembangunan
- b. Mendorong inisiatif dan swadaya masyarakat setempat

- c. Melibatkan masyarakat sebanyak mungkin secara aktif dalam proses pengambilan keputusan
- d. Mengorganisir aksi kelompok

Proyek-proyek PCD dapat meningkatkan dampak keseluruhan dalam membangun demokrasi lokal, masyarakat sipil, dan kapasitas masyarakat setempat. Pembangunan Masyarakat Partisipatif (*Participatory Community Development/PCD*) adalah sebuah metode yang membantu masyarakat setempat, dalam kemitraan dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah, untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi proyek-proyek yang menghasilkan pendapatan, makanan, dan layanan baru. PCD terdiri dari kegiatan-kegiatan yang:

- a. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peluang pembangunan;
- b. Meningkatkan kemampuan peserta untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yang memungkinkan mereka untuk merancang proyek yang sesuai dengan kebutuhan mereka;
- c. Membantu pelaksanaan proyek yang menghasilkan pendapatan dan layanan baru;
- d. Meningkatkan kapasitas peserta untuk membangun konsensus dan menjalin kemitraan dalam rangka mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan; dan
- e. Mendorong keberlanjutan proyek-proyek yang melayani kebutuhan masyarakat.

4. *Sustainable Development (SDGs)*

Pendekatan ini menekankan perlunya solusi jangka panjang dan berkelanjutan untuk masalah-masalah masyarakat, bukan perbaikan jangka pendek. Pendekatan ini melibatkan identifikasi dan penanganan penyebab utama masalah masyarakat, bukan hanya mengobati gejalanya saja.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dari Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan kerangka kerja global untuk mengatasi

berbagai tantangan pembangunan masyarakat, seperti kemiskinan, kelaparan, pendidikan, kesetaraan gender, air bersih, dan kelestarian lingkungan. Masyarakat dapat menyelaraskan upaya mereka dengan tujuan-tujuan ini untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang.

5. *Integrated Community Development (ICD)*

Pendekatan ini melibatkan penanganan berbagai aspek pembangunan masyarakat secara simultan, bukan hanya berfokus pada satu isu saja. Pendekatan ini mengakui adanya keterkaitan antara berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Pendekatan ini mengambil pendekatan holistik untuk pembangunan masyarakat, dengan menyadari bahwa faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan semuanya saling berhubungan. Pendekatan ini melibatkan kerja lintas sektor dan disiplin ilmu untuk mengatasi tantangan yang kompleks dan saling terkait yang dihadapi masyarakat.

6. *Advocacy-Based Development*

Pendekatan ini melibatkan upaya untuk memberdayakan kelompok-kelompok yang terpinggirkan atau kurang terwakili dalam masyarakat dan mengadvokasi kebutuhan dan kepentingan mereka. Pendekatan ini melibatkan identifikasi dan tantangan terhadap isu-isu sistemik yang berkontribusi terhadap ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Pada akhirnya, pendekatan pembangunan masyarakat akan bergantung pada kebutuhan dan keadaan spesifik masyarakat, serta tujuan dan sumber daya organisasi dan individu yang bekerja untuk memfasilitasi proses pembangunan.

7. *Participatory Rural Appraisal (PRA) and Participatory Action Research (PAR):*

PRA dan PAR melibatkan keterlibatan aktif anggota masyarakat dalam penelitian dan proses pengambilan keputusan. Pendekatan-pendekatan ini menghargai pengetahuan dan perspektif lokal serta menekankan keterlibatan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah, menetapkan prioritas, dan mengimplementasikan solusi.

Pendekatan ini sering kali menggunakan alat partisipatif seperti pemetaan, pemeringkatan, dan diskusi kelompok untuk mengumpulkan wawasan dari anggota masyarakat.

Participatory Rural Appraisal (PRA) Pendekatan penilaian dan pembelajaran yang memberdayakan masyarakat setempat untuk menganalisis kondisi kehidupan, masalah, dan potensi mereka sendiri. PRA digunakan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam pembangunan internasional. Alat-alat PRA digunakan untuk memfasilitasi proses partisipatif.

Sebuah metodologi penelitian kualitatif yang melibatkan peneliti dan partisipan yang berkolaborasi untuk memahami isu-isu sosial dan mengambil tindakan untuk membawa perubahan sosial. PAR memprioritaskan nilai dari pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman untuk mengatasi masalah yang disebabkan oleh sistem sosial yang timpang dan merugikan.

Participatory Rural Appraisal (PRA) dan *Participatory Action Research (PAR)* merupakan pendekatan yang berpusat pada warga yang digunakan dalam pembangunan masyarakat dan proyek penelitian untuk memberdayakan masyarakat setempat dan menggabungkan pengetahuan dan pendapat mereka dalam proses pengambilan keputusan. Pendekatan-pendekatan ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dengan melibatkan penduduk lokal dalam mengidentifikasi masalah, menerapkan solusi, dan memantau serta mengevaluasi hasilnya. PRA secara khusus berfokus pada daerah pedesaan, sementara PAR memiliki aplikasi yang lebih luas yang mencakup berbagai lingkungan masyarakat.

PRA telah berevolusi dari metode penelitian partisipatoris aktivis sebelumnya dan berakar pada gagasan bahwa penduduk setempat yang terlibat secara aktif dan diberdayakan sangat penting untuk keberhasilan pembangunan masyarakat pedesaan. Pada awalnya, metode ini disebut dengan istilah *Rapid Rural Appraisal (RRA)*, metode ini menekankan pada pembelajaran secara langsung dari masyarakat pedesaan dan membawa "pembalikan pembelajaran", yang mengakui

pentingnya pengetahuan lokal dan kebutuhan masyarakat untuk menganalisis realitas mereka sendiri. Seiring berjalannya waktu, istilah RRA berganti dengan istilah lain, termasuk PRA dan pembelajaran dan aksi partisipatoris (*participatory learning and action/PLA*).

Di sisi lain, PAR merupakan pendekatan penelitian yang telah digunakan sejak tahun 1940-an, yang melibatkan peneliti dan partisipan yang bekerja sama untuk memahami situasi yang bermasalah dan melakukan perubahan positif. PAR berfokus pada perubahan sosial yang mendorong demokrasi, menantang ketidaksetaraan, menjawab kebutuhan spesifik kelompok tertentu, dan merupakan siklus berulang dari penelitian, aksi, dan refleksi. Hal ini bertujuan untuk "membebaskan" para peserta agar memiliki kesadaran yang lebih besar terhadap situasi mereka dan mengambil tindakan.

Teknik-teknik dan alat-alat partisipatoris yang digunakan dalam PRA dan PAR mencakup metode-metode seperti survei, pengambilan sampel, wawancara, pemetaan komunitas, dan memahami dinamika kelompok. Teknik-teknik ini sedapat mungkin menghindari penulisan, dan lebih mengandalkan komunikasi lisan dan visual, seperti gambar, simbol, benda-benda fisik, dan ingatan kelompok, untuk memastikan partisipasi yang lebih luas.

Keberhasilan PRA dan PAR bergantung pada kemampuan mereka untuk memberdayakan masyarakat lokal dan mengenali serta memanfaatkan pengetahuan dan kemampuan anggota masyarakat dalam proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Namun demikian, sangat penting untuk memperhatikan potensi jebakan, seperti kebutuhan untuk mengevaluasi secara hati-hati tingkat keikutsertaan masyarakat dalam proses tersebut dan menghindari menerima proyek-proyek pembangunan partisipatoris begitu saja. Ketelitian metodologis, komitmen terhadap partisipasi yang tulus, dan fokus pada pemberdayaan masyarakat setempat sangat penting untuk keberhasilan pendekatan ini.

8. *Community-Based Organizations (CBOs):*

Organisasi berbasis masyarakat adalah entitas akar rumput yang dibentuk oleh anggota masyarakat untuk mengatasi masalah tertentu atau menyediakan layanan. Mereka memainkan peran penting dalam memobilisasi sumber daya, mengadvokasi perubahan, dan mengimplementasikan proyek-proyek komunitas. Contohnya adalah rukun tetangga, kelompok swadaya masyarakat, dan klub pemuda.

Community-Based Organizations (CBOs) adalah entitas integral yang digerakkan oleh warga masyarakat dalam berbagai aspek keberadaannya. Mereka biasanya mewakili komunitas atau segmen penting dari suatu komunitas dan menyediakan layanan pendidikan atau layanan terkait kepada individu dalam komunitas tersebut.

Community-Based Organizations (CBOs) memprioritaskan area masalah berdasarkan masukan dari warga, mengembangkan solusi melalui kolaborasi dengan masyarakat, dan melibatkan warga dalam desain, implementasi, dan evaluasi program, memastikan bahwa warga setempat memiliki peran yang signifikan dalam badan pemerintahan dan staf

Community-Based Organizations (CBOs) memainkan peran penting dalam menangani pertimbangan kesetaraan untuk akses ke kegiatan seperti vaksinasi COVID-19 dan penyebaran informasi di masyarakat yang kurang terlayani. Mereka berfungsi sebagai entitas terpercaya dengan hubungan yang mapan, menawarkan layanan khusus kepada masyarakat atau populasi yang ditargetkan dalam masyarakat.

CBOs merupakan komponen penting dari infrastruktur masyarakat, menyediakan layanan penting, menjaga moral dan kohesi masyarakat, dan menjembatani kesenjangan antara petugas dan masyarakat setempat.

9. *Social Capital and Networking*

Membangun modal sosial melibatkan penguatan ikatan sosial, jaringan, dan hubungan dalam sebuah komunitas. Modal sosial dipandang sebagai sumber daya yang penting untuk pemecahan masalah, kolaborasi, dan tindakan kolektif. Upaya pembangunan

masyarakat sering kali berfokus pada peningkatan hubungan sosial dan kepercayaan di antara warga.

Modal sosial adalah nilai yang diperoleh individu dan masyarakat dari hubungan sosial mereka dan norma-norma kepercayaan serta timbal balik yang muncul dari hubungan tersebut. Jaringan sosial adalah hubungan nyata antara individu atau kelompok. Modal sosial terkait erat dengan jaringan. Jejaring adalah contoh utama bagaimana modal sosial bekerja dalam konteks bisnis. Jaringan dan penggunaan internet memungkinkan para profesional untuk membentuk hubungan sosial dalam berbagai variasi.

Modal sosial mengacu pada jaringan hubungan di antara orang-orang yang tinggal dan bekerja di masyarakat tertentu, yang memungkinkan masyarakat tersebut berfungsi secara efektif. Modal sosial dapat digunakan untuk menggambarkan kontribusi terhadap keberhasilan organisasi yang dapat dikaitkan dengan hubungan dan jaringan pribadi, baik di dalam maupun di luar organisasi. Jejaring berkontribusi pada modal sosial dengan memfasilitasi transfer informasi yang membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota jaringan, terutama melalui hasil pasar tenaga kerja yang lebih baik. Modal sosial mengacu pada sumber daya seperti informasi, dukungan, dan kontrol sosial yang mengalir melalui jaringan, bukan pada struktur jaringan itu sendiri. Oleh karena itu, jaringan membantu dalam membangun dan memelihara hubungan sosial, yang pada gilirannya mengarah pada hasil sosial yang produktif. Hal ini dapat mencakup hasil pasar tenaga kerja yang lebih baik dan kesejahteraan ekonomi.

10. *Community Economic Development (CED)*

Community Economic Development (CED) adalah bidang studi yang melibatkan keterlibatan masyarakat dalam membangun komunitas, industri, dan pasar yang kuat. Ini adalah pendekatan komprehensif yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. CED adalah sebuah proses di mana masyarakat meningkatkan kualitas hidup penghuninya

dengan menciptakan kekayaan komunitas dan bisnis baru. Ini adalah pendekatan terhadap pembangunan ekonomi lokal yang didorong oleh prioritas sosial, lingkungan, dan ekonomi masyarakat.

CED mengatasi masalah ekonomi masyarakat melalui proyek-proyek yang direncanakan dan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang diatur oleh dewan dengan keterlibatan masyarakat. Masalah-masalah ini termasuk pengangguran, kurangnya perumahan yang terjangkau, atau kurangnya ritel yang memadai dan layanan lainnya. Keberagaman dan inklusi sangat penting bagi CED. Keduanya tidak hanya memperbaiki kesalahan masa lalu, namun juga meningkatkan kemampuan ekonomi untuk memberikan manfaat yang lebih adil bagi semua orang.

CED adalah sebuah proses di mana masyarakat meningkatkan kualitas hidup penghuninya dengan menciptakan kekayaan komunitas dan bisnis baru serta membangun kapasitas warga untuk mengendalikan masa depan ekonomi mereka sendiri. Pembangunan ekonomi masyarakat (*community economic development/CED*) adalah pendekatan komprehensif yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inisiatif dan strategi didorong oleh prioritas sosial, lingkungan, dan ekonomi masyarakat.

11. *Sustainable Community Development (SCD)*

Pendekatan ini berfokus pada penciptaan perubahan jangka panjang dan berkelanjutan di masyarakat. Pendekatan ini melibatkan identifikasi dan penanganan akar masalah, membangun kapasitas lokal, dan mengembangkan strategi yang berkelanjutan secara lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Pembangunan masyarakat yang berkelanjutan adalah pendekatan multi-segi yang bertujuan untuk mendapatkan hasil yang seimbang dan berkelanjutan. Pendekatan ini mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, memastikan bahwa proyek-proyek pembangunan bersifat inklusif, adil, dan ramah lingkungan.

Empat pilar keberlanjutan adalah: Manusia, Sosial, Ekonomi, Lingkungan.

Masyarakat yang berkelanjutan cenderung berfokus pada:

- a. Keberlanjutan lingkungan dan ekonomi
- b. Infrastruktur perkotaan
- c. Kestaraan sosial
- d. Pemerintah kota

Istilah ini terkadang digunakan secara sinonim dengan "kota hijau", "komunitas ramah lingkungan", "kota layak huni", "kota berkelanjutan", dan "desa berkelanjutan".

Beberapa prinsip pembangunan masyarakat yang berkelanjutan meliputi:

- a. Integritas ekologi
- b. Kestaraan sosial
- c. Efisiensi ekonomi
- d. Kestaraan antar generasi
- e. Alokasi sumber daya dan peluang yang adil
- f. Menghilangkan hambatan terhadap partisipasi masyarakat
- g. Memperbaiki ketidakadilan di masa lalu

Masyarakat yang berkelanjutan juga mempertimbangkan prinsip-prinsip berikut:

- a. Udara bersih
- b. Air bersih
- c. Permukaan dan tanah yang bersih
- d. Tempat tinggal manusia
- e. Kestaraan inklusi sosial manusia

Komunitas yang berkelanjutan juga dapat mempertimbangkan keberlanjutan budaya, yang meliputi:

- a. Mendukung dan mengakui budaya dan tradisi

- b. Secara aktif melestarikan situs-situs warisan dan lokasi-lokasi penting
- c. Melestarikan budaya

Komunitas berkelanjutan harus menciptakan dan memelihara lingkungan sosial, ekonomi, dan alam yang akomodatif untuk kualitas hidup yang diinginkan, dari waktu ke waktu, tanpa batas waktu. Komunitas yang berkelanjutan tidak berkembang secara alami dari pengejaran kepentingan ekonomi individu; komunitas tersebut harus diciptakan dan ditopang oleh keputusan sadar dan terarah dari orang-orang yang bekerja sama untuk kebaikan bersama.

Desa yang berkelanjutan harus terus menilai kembali aset ekologi, sosial, dan ekonomi masyarakatnya, dan melalui proses pemerintahan desa, memupuk budaya keberlanjutan yang berkelanjutan. Proses perencanaan pembangunan masyarakat adalah penting, tetapi perencanaan dapat menjadi efektif hanya jika dipandu oleh tujuan yang sama dan pemahaman yang sama tentang prinsip-prinsip yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Setiap komunitas berbeda, dengan sumber daya, kapasitas, visi, dan kemampuan yang berbeda. Oleh karena itu, tujuan, rencana, dan strategi pembangunan setiap desa harus disesuaikan dengan komunitasnya. Namun, tujuan dasar dan prinsip-prinsip keberlanjutan bukanlah sesuatu yang sembarangan atau bersifat sukarela. Mereka adalah hukum alam yang tidak dapat diganggu gugat, yang harus memandu semua masyarakat untuk membangunnya secara berkelanjutan. Pembangunan masyarakat yang berkelanjutan harus direncanakan dan dipandu oleh seperangkat prinsip yang sama.

12. *Empowerment-based Community Development (EBCD)*

Pendekatan ini berfokus pada pembangunan kekuatan dan kapasitas masyarakat yang terpinggirkan atau kurang beruntung

untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan menciptakan perubahan positif. Pendekatan ini melibatkan promosi partisipasi, kemandirian, dan tindakan kolektif di antara anggota masyarakat.

EBCD adalah pendekatan pembangunan masyarakat yang melibatkan peningkatan pengaruh masyarakat terhadap struktur dan kebijakan yang mempengaruhi masyarakat dan anggotanya.

Pemberdayaan adalah sebuah orientasi nilai dan model teoritis untuk memahami proses dan konsekuensi dari upaya untuk menggunakan kontrol dan pengaruh atas keputusan yang mempengaruhi kehidupan seseorang. Pemberdayaan adalah proses interpersonal dalam menyediakan alat, sumber daya, dan lingkungan yang tepat untuk membangun, mengembangkan, dan meningkatkan kemampuan dan efektivitas orang lain dalam menetapkan dan mencapai tujuan-tujuan individu.

Beberapa prinsip pemberdayaan masyarakat meliputi: Kontrol masyarakat, Kepemimpinan sektor publik, Hubungan yang efektif, Meningkatkan hasil, dan Akuntabilitas.

Program pemberdayaan masyarakat dipimpin oleh anggota masyarakat di setiap tahap. Beberapa manfaat dari program pemberdayaan masyarakat antara lain: Meningkatkan kualitas hidup, Pengurangan kemiskinan, dan Pembangunan di tingkat lokal.

Pemberdayaan masyarakat bisa mengatasi tantangan struktural, sosial, dan ekonomi. Pemberdayaan masyarakat juga dapat membantu masyarakat untuk mengambil kendali atas tindakan dan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pemberdayaan (*Empowerment-based Community Development/EBCD*) adalah sebuah strategi yang bertujuan untuk mendorong pembangunan yang digerakkan oleh masyarakat secara berkelanjutan dengan mengenali dan memobilisasi aset yang ada di dalam masyarakat. Pendekatan ini berpusat pada konsep pemberdayaan anggota masyarakat untuk mengambil peran utama dalam mendorong inisiatif pembangunan, daripada hanya mengandalkan intervensi eksternal. Gagasan utamanya

adalah untuk membangun modal sosial dan meningkatkan kepemimpinan di dalam masyarakat itu sendiri, yang mengarah pada proses pembangunan yang berkelanjutan dan mandiri.

Salah satu elemen kunci dari EBCD adalah pergeseran peran pejabat kota dan lembaga pemerintah. Alih-alih hanya berfokus pada penyediaan layanan, mereka didorong untuk mendengarkan dan terlibat dengan warga, serta menghormati dan menyertakan para pemimpin dari berbagai situasi masyarakat.

EBCD sering kali melibatkan pelaksanaan inisiatif seperti "Dana Hibah", yang memberikan dana hibah kecil untuk proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat. Inisiatif ini bertujuan untuk memberdayakan warga, membangun kelembagaan masyarakat, dan mempromosikan pengarahannya sebagai pencapaian utama.

EBCD adalah tentang cara memanfaatkan potensi masyarakat, menumbuhkan kepemimpinan dari dalam, mendorong swadaya dan penentuan nasib sendiri. Pendekatan ini menekankan pada pembangunan kembali dan revitalisasi masyarakat melalui partisipasi aktif dan kolaborasi dari anggota masyarakat itu sendiri.

13. *Community-Driven Development (CDD)*

Adalah sebuah inisiatif yang bertujuan untuk memberdayakan warga negara dan masyarakat agar dapat mengendalikan proses pembangunan, sumber daya, dan pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang telah diidentifikasi sendiri. Bank Dunia telah memainkan peran penting dalam mendukung program CDD, dengan fokus pada peningkatan penyediaan layanan, mengatasi kemiskinan, dan meningkatkan kondisi kehidupan kelompok miskin dan rentan di berbagai negara.

Model ini biasanya melibatkan penyediaan dana langsung kepada masyarakat miskin, yang kemudian memutuskan bagaimana memanfaatkan sumber daya tersebut untuk memenuhi kebutuhan mendesak mereka. Pendekatan ini telah menunjukkan bahwa aturan yang jelas dan transparan, akses terhadap informasi, serta dukungan teknis dan keuangan yang tepat memungkinkan masyarakat untuk

secara efektif mengorganisir, mengidentifikasi prioritas, dan mengatasi masalah-masalah lokal dengan membangun infrastruktur berskala kecil dan menyediakan layanan dasar. Aspek kunci dari program CDD adalah dukungan bagi pemerintah daerah dan lembaga lain dalam bermitra dengan masyarakat untuk melaksanakan proyek dan memberikan layanan.

Prinsip-prinsip dan perangkat dasar CDD:

- a. Fokus pada masyarakat dan/atau kelompok masyarakat penerima manfaat atau penerima hibah adalah agen masyarakat;
- b. Perencanaan partisipatif masyarakat dilibatkan dalam mengidentifikasi dan memprioritaskan kebutuhan dan pilihan investasi; menyiapkan rencana pembangunan masyarakat/lokal;
- c. Kontrol masyarakat terhadap sumber daya sumber daya diarahkan langsung kepada masyarakat;
- d. Pelaksanaan dan manajemen yang dipimpin secara lokal organisasi berbasis masyarakat yang bermitra dengan pemerintah daerah sebagai pelaksana bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan kontraktor; pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur; kontribusi masyarakat dalam bentuk tenaga kerja atau dana.
- e. Memfasilitasi pemantauan dan evaluasi partisipatif, pengaturan tata kelola yang baik, akses informasi dan inovasi dalam hubungan akuntabilitas; pemantauan partisipatif, kartu penilaian masyarakat, dll.

14. *Area Based Development (ABD)*

ABD bertujuan untuk "Menargetkan dengan intervensi pembangunan pada wilayah geografis tertentu di suatu negara (wilayah lintas batas), yang dicirikan oleh masalah pembangunan yang kompleks, melalui pendekatan yang terintegrasi, inklusif, partisipatif dan fleksibel".

ABD bertujuan untuk:

- a. Mempromosikan kerja sama dan rekonsiliasi sub-nasional (lintas batas) di wilayah yang menjadi sasaran
- b. Berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di suatu daerah dengan menerapkan langkah-langkah spesifik dan mendukung nilai tambah dan efek katalisator dalam ekonomi pedesaan
- c. Memperkuat kerja sama antara administrasi publik, badan-badan publik lainnya dan LSM di bidang pembangunan lokal dan kerja sama teritorial dengan membangun kapasitas lintas batas lokal dan regional.

Prinsip utama ABD adalah bahwa semua masalah utama dalam suatu wilayah tertentu harus dimasukkan dalam latihan penetapan prioritas, mulai dari masalah yang berkaitan dengan ekonomi, infrastruktur, perlindungan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, pelayanan publik, dan pengurangan kemiskinan hingga masalah pengucilan sosial dan isu-isu minoritas.

ABD adalah:

- a. spesifik untuk daerah tertentu (bukan untuk negara)
- b. terintegrasi (lintas sektor)
- c. inklusif (masyarakat)
- d. partisipatif (berpusat pada masyarakat)
- e. fleksibel (responsif terhadap perubahan)

ABD adalah proses yang mencakup langkah-langkah utama berikut ini sebagai alat untuk mengimplementasikan proses tersebut:

- a. Identifikasi suatu wilayah dengan seperangkat masalah umum yang harus ditangani untuk membalikkan kemerosotan sosial-ekonomi di wilayah tersebut
- b. Identifikasi pemangku kepentingan setempat dan pembentukan kelompok pemangku kepentingan yang berpartisipasi

- c. Menghasilkan studi awal tentang wilayah tersebut yang mengidentifikasi peluang-peluang, kelemahan dan hambatan pembangunan (SWOT) sebagai dasar diskusi dalam kelompok pemangku kepentingan
 - d. Menyusun dan menyepakati strategi pembangunan daerah dan rencana aksi - Mempersiapkan dan mengelola jalur proyek (dokumen proyek) dengan membentuk sekretariat permanen (PMU)
 - e. Pemantauan dan koordinasi yang berkesinambungan - Dukungan dan fasilitasi dari pemerintah pusat.
15. Mobilisasi Masyarakat

Merupakan upaya untuk menyatukan sumber daya manusia dan non-manusia untuk melakukan kegiatan pembangunan dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan. Mobilisasi masyarakat adalah suatu proses di mana tindakan dirangsang oleh masyarakat itu sendiri, atau oleh orang lain, yang direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi oleh individu, kelompok, dan organisasi masyarakat secara partisipatif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesehatan, kebersihan, dan tingkat pendidikan sehingga dapat meningkatkan standar hidup masyarakat secara keseluruhan. Sekelompok orang telah melampaui perbedaan mereka untuk bertemu dengan persyaratan yang sama untuk memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang partisipatif.

Dengan kata lain, hal ini dapat dipandang sebagai proses yang memulai dialog di antara anggota masyarakat untuk menentukan siapa, apa, dan bagaimana isu-isu diputuskan, dan juga untuk memberikan jalan bagi setiap orang untuk berpartisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka secara positif. Mobilisasi masyarakat adalah istilah yang sering digunakan dalam sektor pembangunan. Belakangan ini, mobilisasi masyarakat telah terbukti sebagai konsep yang berharga dan efektif yang memiliki berbagai implikasi dalam menangani masalah-masalah dasar seperti kesehatan dan kebersihan, kependudukan, polusi dan gender.

Mobilisasi masyarakat membutuhkan banyak sumber daya analitis dan pendukung yang bersifat internal (di dalam masyarakat) maupun eksternal (di luar masyarakat) dan ini mencakup Kepemimpinan, Kapasitas organisasi, Saluran komunikasi, Keterampilan penilaian, Keterampilan pemecahan masalah, Mobilisasi sumber daya serta manajemen administratif dan operasional.

16. *Community Action*

Strategi ini berfokus pada pengorganisasian mereka yang terkena dampak negatif dari keputusan atau non-keputusan badan-badan publik dan swasta serta karakteristik struktural yang lebih umum dari masyarakat. Strategi ini bertujuan untuk mendorong aksi kolektif untuk menantang struktur dan proses sosial-politik dan ekonomi yang ada, untuk mengeksplorasi dan menjelaskan realitas kekuasaan dalam situasi masyarakat dan, melalui pendekatan dua cabang ini; mengembangkan perspektif kritis terhadap status quo dan basis kekuasaan dan aksi alternatif.

17. Melibatkan Organisasi Masyarakat

Kolaborasi antara lembaga-lembaga masyarakat atau kesejahteraan yang terpisah dengan atau tanpa partisipasi tambahan dari pihak berwenang, dalam mempromosikan inisiatif bersama. Pendekatan ini secara umum mengasumsikan bahwa perubahan sosial harus melibatkan konflik dan perjuangan sosial untuk menghasilkan kekuatan kolektif bagi mereka yang tidak berdaya.

18. Keterlibatan Masyarakat

Berfokus pada hubungan yang intinya memfasilitasi "pemahaman dan evaluasi, keterlibatan, pertukaran informasi dan pendapat, tentang suatu konsep, isu atau proyek, dengan tujuan membangun modal sosial dan meningkatkan hasil sosial melalui pengambilan keputusan

19. Perencanaan partisipatif

Mencakup perencanaan berbasis masyarakat (*community-based planning/CBP*); melibatkan seluruh masyarakat dalam proses strategis

dan manajemen perencanaan kota; atau, proses perencanaan di tingkat masyarakat.

20. Perencanaan Sosial

Hal ini melibatkan penilaian kebutuhan dan masalah masyarakat serta perencanaan strategi yang sistematis untuk memenuhinya. Perencanaan sosial terdiri dari analisis kondisi sosial, kebijakan sosial dan layanan lembaga; penetapan tujuan dan prioritas; desain program layanan dan mobilisasi sumber daya yang tepat; dan implementasi dan evaluasi layanan dan program.

21. Pembentukan modal sosial

Berfokus pada manfaat yang diperoleh dari kerja sama antara individu dan kelompok.

22. Perluasan Layanan

ini adalah strategi yang berupaya memperluas operasi dan layanan lembaga dengan membuatnya lebih relevan dan mudah diakses. Hal ini termasuk memperluas layanan ke dalam masyarakat, memberikan layanan ini dan staf yang bertanggung jawab atas layanan tersebut hadir secara fisik di masyarakat.

23. Pembangunan Kapasitas

untuk mengembangkan kemampuan kelompok dan jaringan lokal agar dapat berfungsi dan berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi. Kapasitas Kelompok Besar juga merupakan pendidikan orang dewasa dan pendekatan psikologi sosial yang didasarkan pada aktivitas individu dan psikologi sosial kelompok besar yang berfokus pada kelompok peserta yang menganggur atau setengah menganggur, yang banyak di antaranya memiliki Tingkat Keaksaraan Fungsional Rendah.

24. Kelompok Swadaya Masyarakat Perempuan

Berfokus pada kontribusi perempuan dalam kelompok-kelompok pemukiman.

25. Pembangunan kapasitas masyarakat

Berfokus pada upaya membantu masyarakat untuk mendapatkan, memperkuat, dan mempertahankan kemampuan untuk menetapkan dan mencapai tujuan pembangunan mereka sendiri.

26. Aksi langsung tanpa kekerasan

Ketika sekelompok orang melakukan aksi untuk mengungkapkan masalah yang ada, menyoroti sebuah alternatif, atau mendemonstrasikan solusi yang mungkin untuk masalah sosial yang tidak ditangani melalui lembaga-lembaga sosial tradisional (pemerintah, organisasi keagamaan atau serikat pekerja yang sudah mapan) untuk memuaskan para peserta aksi langsung.

27. Pembangunan masyarakat berbasis agama

Memanfaatkan organisasi berbasis agama untuk mewujudkan hasil Pembangunan masyarakat.

28. Penelitian partisipatif berbasis masyarakat (*Community-based participatory research/CBPR*).

Pendekatan kemitraan untuk penelitian yang secara adil melibatkan, misalnya, anggota masyarakat, perwakilan organisasi, dan peneliti dalam semua aspek proses penelitian dan di mana semua mitra menyumbangkan keahlian dan berbagi pengambilan keputusan serta kepemilikan, yang bertujuan untuk mengintegrasikan pengetahuan ini dengan hasil Pembangunan masyarakat.

29. Pembangunan berbasis bahasa atau Revitalisasi Bahasa

Berfokus pada penggunaan bahasa sehingga dapat melayani kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat melibatkan pembuatan buku, film, dan media lain dalam bahasa tersebut. Tindakan ini membantu komunitas bahasa kecil untuk melestarikan bahasa dan budaya mereka.

30. Metodologi

Berfokus pada komponen pendidikan dalam Pembangunan masyarakat, termasuk pemberdayaan masyarakat yang menciptakan peningkatan kesempatan pendidikan.

Metodologi yang menangani masalah dan tantangan kesenjangan Digital, membuat pelatihan yang terjangkau dan akses ke komputer dan Internet, menangani marjinalisasi komunitas lokal yang tidak dapat terhubung dan berpartisipasi dalam komunitas Online global.

K. Kapan Pembangunan Masyarakat Terjadi?

Pembangunan masyarakat adalah proses terencana yang membutuhkan prasyarat tertentu. Pembangunan masyarakat yang efektif paling sering terjadi ketika:

- a. ada tantangan atau peluang yang muncul dengan sendirinya, dan masyarakat menanggapi;
- b. anggota masyarakat sadar akan kekuatan mereka untuk bertindak bersama demi kepentingan komunitas mereka;
- c. ada keinginan untuk membangun keragaman dan menemukan kesamaan; dan/atau
- d. perubahan sedang terjadi dan pembangunan masyarakat dipahami sebagai pendekatan yang positif untuk mengelola perubahan ini.

Masing-masing situasi ini dijelaskan di bawah ini. Di akhir bagian ini terdapat serangkaian pertanyaan yang akan membantu menentukan apakah komunitas Anda memiliki sumber daya yang dapat mendukung pembangunan masyarakat atau tidak.

1. Menanggapi Tantangan atau Peluang

Krisis yang mengancam kelangsungan hidup masyarakat atau peluang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sering kali menjadi pendorong untuk melakukan aksi berbasis masyarakat. Anggota masyarakat merasa bahwa tindakan harus diambil. Banyak keadaan yang dapat terjadi yang menyebabkan masyarakat merespons.

Contoh keadaan negatif yang dapat memotivasi masyarakat untuk mempertimbangkan pendekatan pembangunan masyarakat adalah:

- a. Penutupan tempat kerja yang menjadi tumpuan hidup sebagian besar anggota masyarakat,
- b. Komunitas yang menghadapi masalah sosial yang signifikan namun tidak banyak yang dapat dicapai sampai masalah kesehatan dan kesejahteraan masyarakat ditangani,
- c. Terlalu banyak anak muda yang meninggalkan komunitas,
- d. Penarikan dana pemerintah untuk sebuah inisiatif yang sangat bergantung pada masyarakat, atau
- e. Frustrasi dengan hasil dari upaya sebelumnya dan keinginan untuk menggunakan pendekatan yang berbeda.

Pembangunan masyarakat tidak semata-mata dilakukan sebagai respons terhadap keadaan negatif atau krisis. Pembangunan masyarakat semakin dipandang sebagai cara untuk membangun kekuatan (kapasitas) dan memanfaatkan peluang. Beberapa komunitas memandang proses pembangunan masyarakat sebagai cara untuk memanfaatkan berbagai kekuatan, keterampilan, dan kemampuan anggota masyarakat.

Contoh keadaan positif yang dapat menghasilkan pembangunan masyarakat adalah:

- a. keinginan untuk membangun hubungan yang lebih kuat antara anggota masyarakat;
- b. minat untuk menciptakan inisiatif akar rumput untuk menanggapi minat atau bakat di dalam masyarakat (misalnya barter, koperasi, festival seni);
- c. potensi untuk mendiversifikasi kegiatan ekonomi di dalam komunitas;
- d. kebutuhan untuk membantu anggota masyarakat membantu diri mereka sendiri (kebun masyarakat, dapur kolektif, perumahan koperasi); atau

- e. kesempatan untuk membuat program atau fasilitas untuk anak-anak, manula atau orang lain di masyarakat.

Terlepas dari apakah masyarakat menanggapi ancaman atau peluang yang dirasakan, motivasi untuk melakukan pendekatan pembangunan masyarakat berasal dari keyakinan bahwa masyarakat itu sendiri tidak hanya memiliki solusi, tetapi juga kemampuan untuk menerjemahkan ide-ide mereka ke dalam tindakan.

2. Kesadaran Masyarakat - Kekuatan untuk Bertindak

Pembangunan masyarakat berawal dari keyakinan bahwa masyarakat itu sendiri memiliki atau mampu mengembangkan solusi untuk masalah dan peluang di dalam masyarakat. Daripada menunggu orang lain, anggota masyarakat percaya pada kemampuan mereka sendiri untuk bertindak.

Beberapa orang mungkin perlu diyakinkan bahwa mereka sebenarnya memiliki kekuatan untuk bertindak dan bahwa kontribusi yang dapat mereka berikan sangat berharga. Terlalu sering kita melihat para ahli atau profesional dari luar sebagai pihak yang memiliki jawaban dan tunduk pada mereka. Pembangunan masyarakat membutuhkan kesadaran dari para anggota bahwa mereka juga memiliki keahlian tentang komunitas mereka. Meskipun bantuan dari luar mungkin diperlukan, bantuan tersebut seharusnya hanya sebagai alat untuk mengembangkan tanggapan yang digerakkan oleh masyarakat dengan cara yang sesuai dengan masyarakat.

Diskusi dalam komunitas mungkin diperlukan untuk menciptakan kesadaran bahwa:

- a. anggota masyarakat adalah para ahli dalam hal kebutuhan, harapan, dan impian komunitas mereka;
- b. akan bermanfaat jika bertindak bersama untuk mencapai hasil;
- c. semua anggota masyarakat memiliki keterampilan, pengetahuan dan kemampuan untuk berkontribusi.

Tanpa kesadaran dan keyakinan bahwa anggota masyarakat memiliki kekuatan untuk bertindak dan membawa perubahan positif, maka motivasi untuk pembangunan masyarakat akan berkurang. Motivasi bukanlah satu-satunya syarat untuk keberhasilan pembangunan masyarakat, namun motivasi merupakan sebuah fondasi.

3. Keinginan untuk Membangun Keberagaman dan Menemukan Kesamaan

Komunitas terdiri dari individu-individu dengan latar belakang budaya, kepercayaan, minat, dan kepedulian yang beragam. Salah satu tantangan terbesar adalah menemukan kesamaan dari keragaman tersebut. Keberhasilan membutuhkan partisipasi yang baik dari seluruh anggota komunitas.

Proses inklusif adalah proses yang:

- a. bersifat terbuka dan partisipatif;
- b. menghargai perbedaan dan menghargai semua kontribusi;
- c. mengajukan pertanyaan dan bukan memaksakan jawaban;
- d. mencari solusi dan area yang disepakati;
- e. meruntuhkan hambatan dalam komunikasi seperti penggunaan jargon dan stereotip; dan
- f. menyediakan berbagai kesempatan untuk berpartisipasi

Contoh cara masyarakat melibatkan berbagai kalangan dalam proses pembangunan masyarakat adalah:

- a. pertemuan balai kota,
- b. kelompok-kelompok fokus,
- c. acara minum kopi dan makan malam bersama,
- d. makalah diskusi yang memberi kesempatan untuk memberi tanggapan,
- e. kuesioner tentang masalah-masalah masyarakat,
- f. survei yang mengidentifikasi keterampilan dan kemampuan anggota masyarakat,
- g. laporan media lokal,

- h. email dan *chat room*,
- i. lokakarya perencanaan, dan
- j. mewawancarai orang-orang yang memegang peranan penting dalam kepemimpinan.

Kegagalan untuk melibatkan seluruh anggota dan kepentingan masyarakat akan melemahkan upaya pembangunan masyarakat Anda. Agar efektif, semua sektor harus dilibatkan. Undanglah para pemimpin masyarakat untuk berpartisipasi, dan rancanglah strategi untuk menyatukan individu-individu yang biasanya tidak berpartisipasi dalam proses-proses masyarakat. Pastikan bahwa ini adalah waktu yang tepat dan ada cukup minat untuk melanjutkannya.

Pembangunan masyarakat bukanlah satu kelompok kepentingan dalam masyarakat yang memaksakan solusi atau tindakan kepada orang lain. Pembangunan masyarakat adalah proses yang demokratis dan melibatkan partisipasi aktif dari berbagai orang.

Kekuatan dari pembangunan masyarakat adalah bahwa hal ini merupakan pendekatan yang menyatukan individu-individu dengan beragam kepentingan untuk mencapai tujuan bersama.

4. Memahami Perubahan

Pembangunan masyarakat melibatkan perubahan. Masyarakat harus memahami bahwa pembangunan masyarakat akan membawa perubahan dan juga mengatasi masalah yang telah terjadi. Beberapa perubahan akan diantisipasi, tetapi yang lainnya akan terjadi sebagai bagian dari proses dan mungkin tidak dapat diramalkan.

Pembangunan masyarakat dapat membawa perubahan yang signifikan dalam masyarakat. Hal ini dapat melibatkan penataan ulang, pergeseran kekuasaan, hubungan baru, dan kegiatan ekonomi atau kegiatan masyarakat yang baru.

Bahkan perubahan positif pun dapat menimbulkan stres dan perlu dikelola. Bagaimana kita menanggapi, mengatasi, atau mena-

ngani perubahan dikenal sebagai mengelola transisi dan merupakan bagian dari proses pembangunan masyarakat.

Pembangunan masyarakat biasanya diprakarsai oleh individu-individu yang memiliki semangat dan visi. Namun, jika struktur berbasis masyarakat tidak dibentuk untuk mendukung hal ini, upaya terbaik sekalipun dapat gagal.

Struktur untuk mendukung perubahan dapat bervariasi, tergantung pada ukuran dan kompleksitas usaha. Struktur-struktur di bawah ini adalah contohnya:

- a. rencana pembangunan masyarakat,
- b. strategi komunikasi, dan
- c. pusat individu atau organisasi yang dibentuk sebagai titik fokus pembangunan masyarakat.

Pembangunan masyarakat sering kali didukung oleh struktur organisasi yang lebih formal seperti kantor pembangunan masyarakat, perusahaan pembangunan masyarakat, atau organisasi nirlaba. Struktur formal mungkin tidak diperlukan setiap saat. Yang terbaik adalah menunggu untuk menentukan apa yang paling tepat untuk situasi tersebut. Hal penting yang perlu diingat adalah bahwa struktur pendukung diperlukan untuk mengelola proses pembangunan masyarakat serta perubahan yang diciptakannya. Karena ini adalah proses yang berkelanjutan, struktur tersebut tidak akan statis.

Struktur tersebut akan berubah dan beradaptasi seiring dengan perkembangan komunitas. Pastikan bahwa Anda melihat struktur yang Anda ciptakan sebagai mekanisme untuk mendukung aksi Anda, bukan sebagai tujuan itu sendiri.

5. Memeriksa Kesiapan Komunitas Anda

Sebelum memulai proses pembangunan masyarakat, Anda perlu menentukan apakah kondisi-kondisi yang baru saja dijelaskan pada bagian sebelumnya sudah ada di dalam komunitas Anda. Untuk

menentukan apakah komunitas Anda sudah siap, kumpulkan informasi yang cukup sehingga Anda dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a) Apakah ada masalah atau tantangan bersama yang dihadapi komunitas anda?
- b) Apakah anggota komunitas sadar akan kekuatan mereka untuk bertindak bersama demi kepentingan komunitas?
- c) Dapatkah anda memikirkan contoh-contoh di mana anggota komunitas telah bertindak bersama untuk mencapai tujuan bersama?
- d) Apakah ada potensi bagi proses pembangunan komunitas untuk menjadi inklusif?
- e) Apakah anda percaya bahwa ada kesediaan dalam komunitas anda untuk mengidentifikasi kesamaan daripada berfokus pada perbedaan?
- f) Apakah pembangunan komunitas dipahami sebagai sebuah proses yang akan menghasilkan perubahan?

Jika jawabannya "ya" untuk semua pertanyaan di atas, maka komunitas Anda berada dalam posisi yang kuat untuk mempertimbangkan inisiatif pembangunan masyarakat.

Namun, jika jawaban dari beberapa atau semua pertanyaan di atas adalah "tidak", maka Anda harus mempertimbangkan secara serius apakah waktu yang tepat untuk melakukan pembangunan masyarakat. Masyarakat bersifat dinamis dan situasi saat ini akan berubah seiring berjalannya waktu. Pikirkan tindakan apa yang diperlukan. Tanyakan pada diri Anda sendiri apakah Anda dapat mengambil peran aktif dalam menciptakan beberapa kondisi ini.

Berikut ini adalah beberapa indikator bahwa komunitas Anda mungkin tidak berada dalam posisi yang kuat untuk memulai pendekatan pembangunan masyarakat:

- a) masyarakat telah menggunakan pendekatan atau proses yang berbeda untuk menyelesaikan masalah-masalah yang menjadi

perhatian utama, dan tidak ada ketertarikan terhadap pendekatan pembangunan masyarakat; kemarahan serta konflik mencirikan hubungan yang ada di antara kepentingan-kepentingan masyarakat;

- b) anggota-anggota masyarakat menentang atau tidak menerima perlunya perubahan;
- c) para pemimpin masyarakat dan sukarelawan terlibat dalam proyek-proyek lain sehingga tidak dapat memberikan komitmen terhadap proses pembangunan masyarakat; dan/atau
- d) kapasitas masyarakat sangat terbatas akibat masalah-masalah kesejahteraan dan kesehatan, dan masalah-masalah tersebut harus diatasi sebelum memulai proses pembangunan masyarakat.

Kesiapan adalah masalah utama. Kekuatan dari pembangunan masyarakat adalah bahwa hal ini merupakan pendekatan jangka panjang. Penting untuk memulai proses pembangunan masyarakat dengan fondasi yang kuat. Dibutuhkan waktu untuk membangun kondisi yang mendukung pembangunan masyarakat. Jangan menyiapkan diri Anda untuk gagal. Mulailah dari kondisi komunitas Anda dan bangunlah berdasarkan kekuatannya.

6. Kebutuhan akan Katalisator

Banyak komunitas yang tampaknya memiliki karakteristik yang mendukung pembangunan masyarakat, namun belum ada inisiatif atau rencana pembangunan masyarakat. Alasannya adalah karena kondisi yang mendukung pembangunan masyarakat tidak cukup untuk memulai pembangunan masyarakat. Dibutuhkan percikan atau katalisator. Katalisator pembangunan masyarakat adalah individu atau kelompok yang percaya bahwa perubahan itu mungkin terjadi dan bersedia mengambil langkah pertama yang diperlukan untuk menciptakan minat dan dukungan.

Katalisator pembangunan masyarakat menciptakan visi tentang apa yang mungkin terjadi. Mereka mengajukan pertanyaan dan mendorong diskusi di antara anggota masyarakat. Dengan menciptakan minat, energi, dan motivasi untuk bertindak, katalisator membuat pembangunan masyarakat menjadi lebih hidup.

Siapa saja yang termasuk dalam kategori katalisator? Katalisator adalah:

- a. orang-orang yang memegang pekerjaan yang memiliki mandat pembangunan masyarakat atau fungsi pengaturan - staf pemerintah kota, Kepala dan Dewan, staf organisasi nirlaba, dsb.;
- b. para pemimpin bisnis - Kamar Dagang, klub bisnis;
- c. staf, sukarelawan, atau dewan direksi lembaga-lembaga kemasyarakatan - lembaga nirlaba, perkumpulan rekreasi, klub layanan, lembaga sosial, dewan tenaga kerja, kelompok perempuan;
- d. praktisi dan konsultan pembangunan masyarakat yang memberikan bantuan teknis; dan/atau
- e. anggota masyarakat yang mempunyai minat atau kepedulian khusus atau yang hanya menginginkan tindakan.

Masalah siapa yang akan berperan sebagai katalisator biasanya ditentukan oleh sifat kegiatan pembangunan masyarakat, tahap evolusi dalam proses, atau sumber daya yang tersedia. Organisasi dan individu dapat mengambil peran sebagai katalisator pembangunan masyarakat baik sebagai sukarelawan maupun sebagai bagian dari peran atau mandat yang dibayar. Beberapa komunitas sering kali memiliki sumber daya untuk mempekerjakan individu dengan keahlian pembangunan masyarakat untuk membantu mereka merancang dan memulai proses tersebut.

Katalisator pembangunan masyarakat yang efektif memiliki:

- a. kredibilitas di dalam dan pengetahuan tentang komunitas;
- b. visi jangka panjang, atau pengakuan bahwa visi tersebut dibutuhkan, dan kesadaran bahwa visi tersebut dapat diciptakan oleh komunitas itu sendiri;

- c. keyakinan akan kemampuan komunitas untuk bertindak;
- d. kemampuan untuk berkomunikasi dan keterbukaan terhadap ide-ide orang lain;
- e. kemampuan untuk memotivasi orang lain dan berbagi kekuasaan;
- f. energi untuk memulai dan mempertahankan tindakan;
- g. keterbukaan terhadap pembelajaran; dan
- h. kemampuan untuk mengidentifikasi dan terhubung dengan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan.

Dapatkah Anda Mengambil Peran sebagai Katalisator Komunitas?. Mengambil peran sebagai katalisator pembangunan masyarakat adalah penting dan membutuhkan pemikiran yang matang. Jangan memulai peran tersebut jika Anda tidak akan mampu menindaklanjutinya.

Sebagai individu, Anda perlu memikirkan pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

- a. Apakah nilai-nilai, keyakinan, dan sikap pribadi Anda sesuai dengan karakteristik pembangunan masyarakat?
- b. Apakah Anda memiliki visi untuk komunitas Anda yang ingin Anda bagikan kepada orang lain?
- c. Apakah ada orang lain yang saat ini menjalankan peran ini yang dapat Anda ajak bekerja sama?
- d. Dapatkah Anda memotivasi orang lain dan mengekspresikan ide-ide dengan baik?
- e. Apakah tindakan Anda sebagai katalisator akan menghasilkan situasi konflik kepentingan yang nyata atau yang dirasakan?
- f. Apakah Anda dapat menyeimbangkan peran sebagai katalisator komunitas dengan tanggung jawab pribadi dan pekerjaan Anda yang lain?
- g. Apakah Anda memiliki fleksibilitas dan waktu untuk berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan yang mungkin berada di luar jam kerja standar?

- h. Apakah Anda menyadari bahwa pembangunan komunitas membutuhkan waktu dan Anda mungkin tidak akan melihat hasil yang instan?
- i. Apakah Anda yakin bahwa Anda memiliki kredibilitas di dalam komunitas Anda?

Jika Anda akan menjalankan peran katalisator atas nama organisasi, Anda juga harus memikirkan pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

- a. Apakah nilai-nilai dan budaya organisasi Anda sesuai dengan karakteristik pembangunan masyarakat?
- b. Apakah organisasi Anda memiliki visi untuk masyarakat yang ingin dibagikan kepada orang lain?
- c. Apakah ada organisasi lain yang saat ini menjalankan peran ini atau yang dapat bekerja sama dengan baik dalam sebuah kemitraan?
- d. Apakah organisasi Anda akan menghargai peran Anda sebagai katalisator dan menyediakan waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakannya secara efektif?
- e. Apakah organisasi Anda bertindak sebagai katalisator akan menimbulkan situasi konflik kepentingan yang nyata atau yang dirasakan?
- f. Apakah organisasi Anda memahami fleksibilitas yang akan dibutuhkan dalam hal jam kerja?
- g. Apa ekspektasi organisasi dalam hal hasil? Apakah ada pemahaman bahwa pembangunan masyarakat membutuhkan waktu dan Anda mungkin tidak akan melihat hasil yang segera?
- h. Apakah Anda yakin bahwa organisasi Anda memiliki kredibilitas di dalam masyarakat?
- i. Apakah organisasi bersedia untuk mempromosikan dan mendukung sebuah proses di mana mereka akan berbagi kekuasaan dan pengambilan keputusan dengan berbagai individu?

Anda mungkin tidak dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan ini sendirian, atau Anda mungkin ingin mengkonfirmasi jawaban Anda dengan orang lain dalam organisasi Anda sebelum melanjutkan.

Katalisatornya adalah seorang pemimpin. Anggota masyarakat sering kali membuat komitmen awal untuk pembangunan masyarakat karena kredibilitas dan visi katalisator.

Jika Anda tidak siap untuk mempertahankan apa yang telah Anda mulai, menanggapi hal-hal yang tidak terduga, dan melakukan beberapa kerja keras yang diperlukan untuk memulai, yang terbaik adalah tidak mengambil peran sebagai katalisator. Namun, sejak awal proses, penting bagi anggota komunitas lainnya untuk memahami bahwa peran pemimpin tidak berarti melakukan semuanya sendiri.

Jika Anda siap untuk mengambil peran ini, proses yang dijelaskan di bagian selanjutnya akan berguna.

L. Proses Pembangunan Masyarakat (*Community Development*)

Karena pembangunan masyarakat bersifat dinamis, maka cetak biru yang tetap untuk proses pembangunan masyarakat yang sempurna tidaklah realistis. Lebih baik merencanakan sebuah kerangka kerja yang memberikan panduan dan mengadaptasinya sesuai dengan perkembangan situasi.

Kerangka kerja berikut ini memberikan arahan yang luas dan mengidentifikasi isu-isu proses utama. Kerangka kerja ini didasarkan pada pengalaman nyata para praktisi dan masyarakat itu sendiri. Komponen utama dari kerangka kerja pembangunan masyarakat diuraikan dalam empat bagian berikut: 1) Membangun Dukungan, 2) Membuat Rencana, 3) Melaksanakan dan Menyesuaikan Rencana, dan 4) Mempertahankan Momentum.

1. Membangun Dukungan

Hal yang mendasar dalam pembangunan masyarakat adalah peningkatan masyarakat dan pembangunan kapasitas. Keduanya merupakan proses yang melibatkan pembelajaran dan inklusi, dan dalam banyak kasus, prosesnya sama artinya dengan hasilnya. Sebagai permulaan, semua komunitas memiliki sejarah yang penting untuk dipahami dan dihormati. Bagi banyak dari kita, kegembiraan dan antusiasme kita terhadap pembangunan masyarakat dapat membuat kita menjadi impulsif. Kita ingin segera bertindak dan melihat hasilnya. Akan tetapi, lebih baik jika kita melihat kembali apa yang telah dilakukan, mengakui dan menghargai kontribusi orang lain, membangun kesuksesan komunitas sebelumnya, dan melibatkan berbagai macam anggota dan kepentingan.

Langkah pertama adalah menciptakan kesadaran, pemahaman, dan dukungan untuk proses pembangunan masyarakat. Untuk membangun dukungan bagi pembangunan masyarakat di komunitas Anda, Anda harus mengetahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

- a. Mengapa Anda percaya bahwa pendekatan pembangunan masyarakat harus dimulai?
- b. Apa manfaat yang akan diperoleh dari pendekatan ini?
- c. Langkah-langkah pertama apa yang perlu dilakukan?
- d. Siapa saja orang-orang dan/atau organisasi kunci yang harus mengambil peran kepemimpinan?
- e. Apa saja implikasi jangka panjang dari inisiatif ini?

Anda mungkin berpikir bahwa menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas akan memakan waktu dan sulit, namun, seperti yang diilustrasikan oleh contoh di halaman berikutnya, tidak demikian.

Komitmen terhadap proses atau tindakan jangka panjang tidak boleh dibuat tanpa memahami apa yang akan dilakukan, mengapa hal itu dilakukan, manfaat yang diharapkan dan siapa yang akan

terlibat. Pembangunan masyarakat merupakan konsep yang luas, sehingga masyarakat mungkin mengalami kesulitan untuk mengetahui dari mana harus memulai dan apa yang diharapkan dari mereka. Inilah sebabnya mengapa mengidentifikasi langkah-langkah pertama dalam proses ini sangat penting. Ketika minat telah tercipta, Anda menginginkan cara segera untuk mengubah minat ini menjadi eksplorasi dan komitmen lebih lanjut. Membangun dukungan untuk inisiatif pembangunan masyarakat merupakan tugas yang berkelanjutan.

Siapa yang Harus Dilibatkan?

Pembangunan masyarakat adalah proses yang inklusif. Anggota masyarakat yang memiliki visi yang sama dan rasa memiliki terhadap komunitas mereka biasanya memulai proses pembangunan masyarakat. Namun, penting agar proses tersebut diperluas untuk mencakup berbagai kepentingan (misalnya ekonomi, sosial, lingkungan) dan organisasi (misalnya pemerintah, tenaga kerja, bisnis, layanan sosial) yang merupakan bagian dari masyarakat. Jangan membuat asumsi tentang peran dan tanggung jawab tradisional atau tingkat kepentingan. Sebagai contoh, banyak bisnis sektor swasta yang semakin tertarik dengan isu-isu pembangunan sosial dan beberapa lembaga pemerintah kini menjalin kemitraan dengan organisasi masyarakat untuk menyediakan program dan layanan yang efektif yang mencakup berbagai macam kepentingan.

Susunan individu dalam suatu komunitas mempengaruhi siapa yang perlu dilibatkan dan kegiatan apa yang akan dianggap sah. Memastikan bahwa budaya dan kepentingan yang berbeda dihormati dan dilibatkan (dengan cara yang berarti) adalah penting. Misalnya, menghormati tradisi budaya dan hari besar keagamaan, menyadari gaya komunikasi yang berbeda dan memastikan bahwa para penyandang disabilitas bisa berpartisipasi secara penuh adalah cara-cara yang bisa dilakukan untuk membangun kredibilitas dan dukungan.

Gambar 4. Pemangku Kepentingan yang bisa Dilibatkan dalam Pembangunan Masyarakat



Berikut ini adalah beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan ketika ada berbagai macam kepentingan:

- a. salah memahami keheningan atau nada suara dalam presentasi dan tanggapan;
- b. menyampaikan gagasan dan bukannya meminta masukan;
- c. mengasumsikan kebutuhan dan bukannya menyelidiki dan/atau mengklarifikasinya;
- d. memperlakukan interaksi sebagai kompetisi dan bukan sebagai kesempatan belajar;
- e. mengembangkan kerangka kerja yang tidak menyertakan contoh-contoh yang tepat atau pola berpikir;
- f. menilai atau membuat stereotip terhadap orang lain berdasarkan jenis kelamin, penampilan, atau masa lalunya; dan
- g. memberikan lebih banyak kepercayaan dan perhatian pada para pemimpin yang diakui secara resmi.

Selain keragaman yang dibawa oleh anggota masyarakat itu sendiri, kepentingan politik, mandat organisasi, dan struktur yang ada merupakan faktor-faktor yang harus diakui dan dibangun ke dalam proses pembangunan masyarakat. Jika Anda tidak yakin bagaimana memasukkan kepentingan-kepentingan tersebut ke dalam kegiatan pembangunan masyarakat, tanyakan kepada mereka bagaimana mereka ingin terlibat.

Menciptakan Proses Lokal yang Bernilai

Untuk menciptakan proses pembangunan masyarakat yang unik dan bernilai, manfaatkanlah pemahaman Anda tentang masyarakat Anda. Hal ini akan memungkinkan Anda untuk mengembangkan sebuah proses yang sesuai dengan kondisi Anda. Anda tidak bisa begitu saja mengambil proses yang berhasil dengan baik di tempat lain dan menerapkannya pada komunitas Anda sendiri, Anda harus mengambil pengetahuan, pengalaman, dan saran dari orang lain dan menjadikannya milik Anda sendiri dengan menyesuaikan dan mengubahnya untuk memenuhi kebutuhan spesifik komunitas Anda pada saat ini.

Merancang proses pembangunan masyarakat lokal meliputi:

- a. memahami komunitas Anda;
- b. belajar dari kisah-kisah sukses pembangunan masyarakat lainnya;
- c. belajar dari upaya-upaya masa lalu yang tidak berhasil dengan baik;
- d. mengenali upaya, pengetahuan, keterampilan dan kemampuan semua pihak yang terlibat; dan
- e. bersikap tanggap dan fleksibel agar prosesnya dapat berkembang.

Karena pendekatan pembangunan masyarakat hanya akan berhasil jika anggota masyarakat melihatnya sebagai proses yang

sah dalam kegiatan dan prioritas yang ada, maka pendekatan tersebut harus:

- a. dihargai oleh masyarakat,
- b. melibatkan anggota masyarakat,
- c. memiliki kepemimpinan yang kredibel, dan
- d. memberikan hasil yang sesuai dengan masyarakat.

Ketika membangun dukungan masyarakat, kenali individu dan organisasi yang mendukung dan tidak mendukung. Berikut ini adalah beberapa saran tentang bagaimana Anda dapat melakukannya.

Dekati organisasi/individu yang Anda yakini akan mendapatkan dukungan. Anda mungkin ingin memulai percakapan tentang ketertarikan mereka terhadap inisiatif pembangunan masyarakat dan mengembangkannya. Undanglah orang-orang yang tertarik untuk mengambil peran kepemimpinan dan menjadi aktif dalam pembuatan rencana pembangunan masyarakat.

Sebagai langkah kedua, dekati organisasi-organisasi yang mungkin tidak terlalu tertarik atau mendukung. Ingatlah bahwa pembangunan masyarakat membawa perubahan, pergeseran kekuasaan dan menghasilkan hubungan yang baru. Beberapa orang mungkin tidak dapat menerima konsep pembangunan masyarakat atau mungkin merasa terancam olehnya, jadi cobalah untuk mengantisipasi mengapa mereka menolak atau tidak mendukung. Mungkin Anda dapat memberikan informasi atau penjelasan yang dapat menjawab kekhawatiran mereka. Pembangunan masyarakat adalah sebuah proses yang terbuka. Jaga agar mereka yang tidak tertarik tetap terinformasi dengan baik dan terus undang mereka untuk berpartisipasi dalam proses tersebut. Carilah kepentingan bersama dan bukan faktor-faktor yang menyebabkan perpecahan atau perselisihan.

Membangun dukungan akan menjadi fondasi bagi proses pembangunan masyarakat. Anda menciptakan inti minat dan dasar komitmen dalam komunitas Anda yang akan terus berkembang. Hal ini membutuhkan waktu, terutama jika masyarakat tidak memiliki

pengalaman dengan jenis pembangunan masyarakat kolektif atau partisipatif seperti ini.

Pembangunan masyarakat adalah proses yang hidup. Banyak komunitas yang memulai dengan kuat namun gagal mempertahankan sifat partisipatif dari proses tersebut. Untuk mempertahankan minat dan dukungan dari waktu ke waktu, inklusi dan partisipasi lokal harus dibangun ke dalam sifat dasar proses dan harus dipertahankan sepanjang waktu.

Hal ini dapat dilakukan dengan cara:

- a. memikirkan dan merencanakan prosesnya terlebih dahulu;
- b. mengevaluasi proses saat dilaksanakan dan membuat adaptasi sesuai kebutuhan; n berkomunikasi dengan jelas;
- c. menantang diri sendiri untuk berhasil dengan berfokus pada kesamaan;
- d. mengembangkan jaringan informal dengan berbicara kepada masyarakat tentang rencana pembangunan masyarakat dan manfaat yang akan dihasilkan;
- e. mengadakan pertemuan balai desa secara berkala untuk memberi informasi kepada masyarakat dan menciptakan kesempatan untuk berdiskusi;
- f. meminta individu atau organisasi yang dikenal sebagai pendukung kuat pembangunan masyarakat untuk menyebarkan berita dan mempromosikan inisiatif Anda;
- g. mengidentifikasi individu atau organisasi yang mungkin bukan pendukung kuat pembangunan masyarakat - dengarkan keprihatinan mereka dan undang mereka untuk berpartisipasi;
- h. memberikan tugas dan peran konkret yang dapat dikejar oleh individu dan organisasi; dan
- i. mengakui kontribusi individu dan organisasi serta merayakan keberhasilannya.

Mengembangkan Dukungan

Inisiatif pembangunan masyarakat dapat gagal karena kurangnya dukungan atau dukungan dari anggota masyarakat dan organisasi. Ketika proses partisipatif diinginkan dengan tulus, dan individu serta organisasi percaya bahwa mereka didengarkan dan diikutsertakan, Anda telah melangkah jauh dalam membangun rasa memiliki, dukungan, dan legitimasi masyarakat. Meskipun tidak diragukan lagi bahwa membangun dukungan atau dukungan ini dapat memakan waktu yang lama dan melibatkan kerja keras, namun mengembangkan dan mempertahankan minat dan keterlibatan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses tersebut.

Kesalahan-kesalahan umum yang dapat terjadi adalah:

- a. kegagalan untuk meluangkan waktu di awal yang diperlukan untuk mengembangkan dukungan bagi pembangunan masyarakat;
- b. memaksakan visi kepada anggota masyarakat;
- c. gagal melibatkan semua kepentingan dan sektor dalam masyarakat dalam proses perumusan visi;
- d. merancang proses yang tidak inklusif atau terbuka sehingga gagal membangun momentum;
- e. memulai dengan kuat namun kemudian gagal memberi informasi dan melibatkan anggota dan organisasi masyarakat secara berkelanjutan dan bermakna;
- f. pemimpin yang memegang kendali dan gagal membangun rasa memiliki masyarakat; dan
- g. sukarelawan dan/atau staf yang dibayar untuk mengambil peran aktif dan melihat aksi atau inisiatif sebagai milik mereka dan bukan milik masyarakat.

2. Membuat Rencana

Mengembangkan rencana komunitas melibatkan penilaian alternatif secara sistematis dan membuat pilihan dalam konteks visi komunitas yang telah ditetapkan. Perencanaan adalah sebuah

proses yang membantu anggota masyarakat dalam menerjemahkan pengetahuan, keprihatinan, dan harapan ke dalam tindakan.

Rencana komunitas adalah dokumen tertulis yang dibuat oleh anggota komunitas. Dokumen ini menguraikan hal-hal berikut ini:

- a. posisi anda sekarang (kekuatan, kelemahan, sumber daya komunitas);
- b. posisi yang anda inginkan (masa depan yang ideal bagi komunitas anda);
- c. arah umum yang ingin anda ambil untuk menutup kesenjangan antara posisi anda sekarang dengan posisi yang anda inginkan;
- d. tindakan-tindakan khusus dalam setiap arah umum yang diperlukan untuk menutup kesenjangan tersebut;
- e. masalah-masalah sumber daya dan kapasitas yang perlu ditangani; dan
- f. seperti apakah keberhasilan itu, dan bagaimana cara untuk mengetahui bahwa anda telah berhasil.

Rencana komunitas dikembangkan berdasarkan logika dan struktur proses perencanaan strategis. Logika dari proses ini membawa Anda dari visi yang luas ke tindakan-tindakan spesifik dan rencana-rencana aksi. Proses ini menghubungkan visi, tujuan, sasaran dan aksi ke dalam struktur yang logis dan saling terkait.

Pembangunan rencana komunitas membutuhkan sumber daya dan pemimpin yang berdedikasi. Penting untuk menentukan apakah Anda memiliki apa yang diperlukan untuk membuat rencana sebelum Anda benar-benar memulainya. Memulai proses dan gagal menyelesaikannya dapat merugikan komunitas Anda dan melemahkan komitmen anggota komunitas terhadap pendekatan pembangunan di masa depan.

Perencanaan pembangunan masyarakat berguna untuk beberapa hal yang berbeda, seperti menyatukan masyarakat dan mencari solusi. Rencana dan prosesnya haruslah:

- a. terpadu
- b. inklusif
- c. realistis
- d. tepat guna
- e. berbasis hasil
- f. berbasis masyarakat dan
- g. mudah dipahami.

Tidak semua inisiatif pembangunan masyarakat memerlukan rencana formal. Banyak hasil yang berharga telah diperoleh melalui proses yang bersifat ad hoc atau kurang terstruktur. Di sisi lain, banyak inisiatif yang berpotensi berhasil telah gagal karena tidak ada rencana atau rencana yang dibuat sangat buruk. Tergantung pada kompleksitas situasi dan sumber daya yang terlibat, kebutuhan akan rencana formal akan bervariasi. Terlepas dari formalitas proses perencanaan, aksi pembangunan masyarakat tidak mungkin dilakukan tanpa adanya visi dan tujuan yang sama.

Manfaat Rencana Komunitas

Manfaat dari sebuah rencana komunitas adalah:

- a. menciptakan kerangka kerja jangka panjang untuk pengambilan keputusan dan tindakan;
- b. menyediakan pendekatan yang holistik dan komprehensif untuk pembangunan masyarakat;
- c. meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengambil keputusan yang tepat mengenai pembangunannya;
- d. menyediakan sumber daya yang berharga untuk mengkomunikasikan visi dan tindakan kepada individu-individu di dalam dan di luar masyarakat;
- e. mengidentifikasi tujuan-tujuan dan tindakan-tindakan yang bisa diukur dari waktu ke waktu; dan
- f. mengintegrasikan berbagai sudut pandang dari berbagai anggota masyarakat.

Tujuh Langkah dalam Proses Perencanaan Komunitas

Proses perencanaan melibatkan tujuh langkah berikut ini:

- 1) **Buatlah Visi Komunitas** - yang akan membantu menciptakan gambaran tentang apa yang Anda inginkan.

Visi komunitas menggambarkan apa yang diharapkan dan dihargai oleh komunitas dengan menciptakan gambaran masa depan yang ideal. Pilihlah proses pembuatan visi yang memungkinkan semua usia dan kemampuan untuk berpartisipasi, karena visi tersebut akan membangun dukungan dan minat yang berkelanjutan.

- 2) **Menilai Situasi Saat Ini** - yang akan menunjukkan posisi Anda saat ini dan menentukan kapasitas masyarakat yang ada.

Menilai situasi saat ini melibatkan faktor-faktor di luar komunitas dan juga faktor-faktor di dalamnya. Proses ini melibatkan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan. Bangunlah upaya-upaya dan kekuatan yang telah dilakukan sebelumnya sebagai dasar penilaian.

- 3) **Tetapkan Tujuan** - yang merupakan arahan yang luas untuk menutup kesenjangan antara kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan.

Tujuan menguraikan cara-cara yang akan digunakan untuk mencapai visi Anda. Jika Anda menganggap visi sebagai tujuan, maka tujuan adalah jalur untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan tersebut harus jelas dan mudah dimengerti.

- 4) **Tetapkan Sasaran** - yang secara spesifik menguraikan bagaimana tujuan akan dicapai.

Sasaran adalah pernyataan yang spesifik, terukur, dan saling berhubungan dari tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Biasanya beberapa sasaran diperlukan untuk mencapai sebuah tujuan. Ketika kita menganggap tujuan sebagai jalan untuk mencapai visi, sasaran adalah batu loncatan yang digunakan untuk menciptakan jalan tersebut.

- 5) Kembangkan Rencana Aksi - yang merupakan siapa, apa, kapan, dan bagaimana di sekitar rencana tersebut.

Rencana aksi memberikan langkah-langkah konkret yang diperlukan untuk memenuhi setiap tujuan. Rencana aksi menguraikan individu yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut, kerangka waktu pelaksanaan dan sumber daya yang dibutuhkan.

- 6) Menerapkan Rencana Aksi Implementasi melibatkan pelaksanaan komitmen dan kegiatan yang diuraikan dalam rencana aksi Anda.

Sebuah rencana hanyalah sebuah rencana sampai rencana tersebut diimplementasikan - barulah ia merupakan pembangunan masyarakat.

- 7) Mengevaluasi Kemajuan dan Hasil - yang merupakan cara untuk memastikan Anda berada di jalur yang benar dan mencapai tujuan.

Evaluasi adalah penilaian kemajuan dan hasil yang membantu untuk menentukan apakah Anda bergerak menuju tujuan, sasaran, dan visi Anda. Penting untuk memikirkan seperti apa kesuksesan itu dan hasil apa yang diinginkan di awal serta selama kegiatan berlangsung.

Faktor-faktor yang Berkontribusi pada Keberhasilan Perencanaan

Berikut ini adalah hal-hal yang diperlukan untuk memastikan keberhasilan pembangunan rencana komunitas:

- a. visi bersama;
- b. komitmen jangka panjang;
- c. kepemimpinan;
- d. sumber daya - keuangan, fisik dan manusia;
- e. dukungan - masyarakat dan politik;
- f. penilaian yang realistis terhadap situasi saat ini;
- g. keinginan untuk membangun dari pencapaian dan upaya-upaya di masa lalu;

- h. proses yang inklusif dan kemampuan untuk bekerja dalam sebuah tim;
- i. komitmen yang kuat dan disiplin untuk meluangkan waktu yang diperlukan untuk bekerja melalui logika proses perencanaan;
- j. dorongan untuk melampaui pendekatan tradisional dan apa yang nyaman untuk mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan inovatif dan pilihan-pilihan untuk dipertimbangkan; dan
- k. komitmen untuk menggunakan rencana tersebut sebagai alat dan untuk memodifikasi dan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan.

Ketika Anda mengembangkan rencana pembangunan masyarakat dan mulai mengambil keputusan mengenai kegiatan dan sumber daya, akan ada perbedaan pendapat. Visi akan membantu mendasari dan mengarahkan keputusan-keputusan sulit ini, dan tujuan akan membantu Anda tetap berada di jalur yang benar dan fokus pada hasil yang ingin Anda capai.

3. Melaksanakan dan Menyesuaikan Rencana

Membuat rencana pembangunan masyarakat yang inklusif dapat menjadi proses yang memakan waktu. Hasil dari investasi waktu dan energi ini akan terbayar ketika Anda mulai mengimplementasikan rencana tersebut. Namun, implementasi memiliki tantangan tersendiri. Proses implementasi harus direncanakan dengan baik dan dikelola dengan baik agar berhasil. Tantangan-tantangan implementasi meliputi:

- a. mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai tugas dan kegiatan,
- b. menjadi pengelola sumber daya yang baik,
- c. membantu individu untuk tetap fokus pada gambaran besar,
- d. tetap positif dan tidak patah semangat oleh hal-hal yang tidak terduga atau oleh kenyataan bahwa segala sesuatunya tidak berjalan sesuai dengan yang dibayangkan,

- e. mengidentifikasi dan mengembangkan kapasitas masyarakat,
- f. mengambil keputusan yang sulit saat sumber daya terbatas,
- g. mengatur waktu agar kegiatan-kegiatan tersebut dapat saling melengkapi, bukan bersaing dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain,
- h. menjaga agar para anggota masyarakat tetap termotivasi dan saling terhubung,
- i. memastikan rasa memiliki masyarakat tetap kuat, serta
- j. mengomunikasikan dan merayakan hasil-hasil yang telah dicapai.

Keberhasilan mengelola kegiatan-kegiatan di atas membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan struktur untuk mendukung pelaksanaannya. Ketika Anda memulai proses pembangunan masyarakat, Anda mungkin telah menemukan bahwa ada sekelompok orang yang sangat aktif dalam hampir semua kegiatan yang dilakukan. Sebagai sebuah kelompok kecil, komunikasi informal dan pengaturan organisasi mungkin merupakan hal yang dibutuhkan untuk bekerja sama secara efektif. Ketika Anda bergerak menuju implementasi rencana pembangunan masyarakat, tingkat dan sifat kegiatan Anda mungkin tidak lagi memungkinkan untuk melakukan pendekatan yang biasa-biasa saja. Sebuah struktur atau organisasi yang mendukung upaya Anda mungkin diperlukan.

Kegagalan untuk memiliki struktur yang solid dapat menyebabkan:

- a. kelelahan para pemimpin masyarakat,
- b. usaha yang sia-sia,
- c. kebingungan,
- d. konflik dan/atau
- e. hilangnya kredibilitas dan legitimasi.

Peran-peran yang Mungkin Dilakukan

Implementasi yang efektif membutuhkan struktur dan proses dengan peran dan tanggung jawab yang jelas. Penting untuk dicatat bahwa ada lebih dari satu peran yang dapat dilakukan oleh organisasi

pembangunan masyarakat. Beberapa contoh dari peran-peran ini adalah:

- a. pelaksana utama yang bertanggung jawab atas rancangan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan masyarakat;
- b. fasilitator atau koordinator yang menyatukan dan mengkoordinasikan organisasi dan sumber daya masyarakat yang diperlukan untuk merencanakan dan melaksanakan inisiatif pembangunan masyarakat;
- c. mitra yang merupakan salah satu dari beberapa organisasi yang telah membentuk kemitraan dengan masyarakat untuk merancang dan melaksanakan kegiatan pembangunan masyarakat;
- d. promotor yang mempromosikan dan mendukung kegiatan pembangunan masyarakat dengan pengetahuan, keahlian, tenaga dan antusiasme; dan
- e. lembaga pendanaan yang mendanai kegiatan pembangunan masyarakat.

Pertanyaan-pertanyaan kunci yang perlu dipertimbangkan saat struktur organisasi dibuat untuk mendukung upaya Anda adalah:

- a. Siapa saja yang harus dilibatkan?
- b. Apa peran utama dari struktur organisasi yang sedang dikembangkan? n Peran apa saja yang harus dijalankan?
- c. Seberapa formal struktur organisasi tersebut?
- d. Sumber daya apa saja yang dapat digunakan untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan rencana dan untuk mendukung struktur organisasi?
- e. Apakah ada kemitraan yang dapat dikembangkan untuk mendukung pelaksanaan proses pembangunan masyarakat?

Tidak ada jawaban yang benar atau salah untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Namun secara umum, semakin besar dan komprehensif upaya pembangunan masyarakat Anda, semakin besar pula

kemungkinan Anda membutuhkan struktur organisasi formal agar efektif.

Membagi Beban

Seperti dalam banyak aspek pembangunan masyarakat lainnya, sangat penting untuk memperjelas sifat proyek untuk memastikan bahwa anggota masyarakat memahami apa yang sedang dilakukan dan bagaimana mereka dapat terlibat. Sulit untuk mengundang partisipasi jika tujuan, tugas dan harapan tidak jelas. Kemitraan adalah sarana yang sangat berguna untuk berbagi beban, untuk mengimplementasikan rencana pembangunan masyarakat dan untuk melaksanakan beberapa peran yang mungkin dilakukan. Tinjauan umum tentang kemitraan dan manfaatnya dapat ditemukan di bagian selanjutnya dalam buku ini di bawah "Menjaga Momentum".

Ingatlah untuk menggunakan rencana pembangunan masyarakat Anda untuk membumikan kegiatan dan mendorong partisipasi. Terlalu sering masyarakat membuat rencana pembangunan masyarakat, memulai suatu kegiatan dan kemudian kehilangan jejak visi dan tujuan yang ingin mereka capai. Ketika hal ini terjadi, akan sulit untuk membuat orang lain tertarik.

4. Mempertahankan Momentum

Menciptakan fondasi yang kuat untuk pembangunan masyarakat dan mengambil langkah pertama dalam proses jangka panjang adalah hal yang menarik. Sama menariknya, namun lebih menantang, adalah membangun dan mempertahankan momentum. Bagian ini menguraikan tujuh bidang utama yang memerlukan pemikiran yang cermat ketika mengembangkan pendekatan untuk mempertahankan momentum bagi upaya pembangunan masyarakat Anda. Area-area kunci tersebut adalah a) kepemimpinan, b) kemitraan, c) membangun kapasitas masyarakat, d) pendanaan, e) meninjau dan mengadaptasi rencana pembangunan masyarakat, f) komunikasi, dan g) menggunakan dukungan teknis dan keahlian.

Kepemimpinan

Kepemimpinan yang konsisten dan terampil sangat penting untuk pembangunan masyarakat yang efektif. Peran pemimpin pembangunan masyarakat adalah untuk membangun kapasitas masyarakat dari waktu ke waktu yang terbuka terhadap perubahan dan adaptasi. Tujuan dari pemimpin adalah untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, bukan untuk mengendalikannya.

Pemimpinlah yang:

- a. mengkomunikasikan visi komunitas secara efektif,
- b. memfokuskan energi pada hasil dan inklusi,
- c. memotivasi individu dan organisasi untuk bertindak bersama demi tujuan bersama, dan
- d. mengembangkan proses yang efektif untuk mengatasi masalah dan konflik.

Sebagai pemimpin pembangunan masyarakat, Anda harus secara sadar membangun dan memelihara hubungan dalam masyarakat. Jika anggota masyarakat merasa bahwa Anda mewakili kepentingan tertentu atau memiliki agenda tersembunyi, mereka tidak akan menganggap upaya Anda sebagai sesuatu yang sah.

Keterbukaan adalah unsur utama dalam kepemimpinan pembangunan masyarakat. Ini berarti bahwa Anda dan organisasi Anda harus terlihat dan dapat diakses oleh anggota masyarakat. Mereka harus mengetahui siapa Anda, di mana Anda dapat dihubungi, dan memahami motivasi Anda untuk mengambil peran kepemimpinan pembangunan masyarakat. Proses dan hubungan baru dibangun berdasarkan kepercayaan. Siapa Anda, nilai-nilai dan keyakinan Anda, serta nilai-nilai dan keyakinan organisasi Anda akan dinilai. Agar berhasil, Anda tidak hanya harus mengkomunikasikan nilai-nilai dari proses pembangunan masyarakat, tetapi juga harus menghayatinya. Agar prosesnya berhasil, Anda harus "menjalankannya".

Untuk memastikan inisiatif pembangunan masyarakat Anda memiliki kepemimpinan yang kuat, hal-hal berikut ini harus dipertimbangkan:

- a. mengidentifikasi keterampilan kepemimpinan yang Anda perlukan dan mencari individu yang memiliki keterampilan dan kemampuan tersebut;
- b. memastikan bahwa mereka yang memegang peran kepemimpinan memiliki pemahaman yang jelas mengenai apa yang diharapkan dari mereka dan apa yang dapat didelegasikan kepada orang lain;
- c. berupaya memastikan bahwa harapan masyarakat sejalan dengan apa yang dapat dicapai secara wajar;
- d. mendukung para pemimpin dengan proses yang baik, struktur organisasi yang tepat dan pembangunan keterampilan - bentuklah sub-komite jika diperlukan;
- e. memastikan bahwa visi, tujuan dan sasaran rencana pembangunan masyarakat jelas dan dipahami dengan baik;
- f. memberikan umpan balik yang konstruktif kepada mereka yang memegang peran kepemimpinan;
- g. mengakui keberhasilan dan mendiskusikan apa yang tidak berhasil dan mengapa;
- h. mengembangkan kapasitas kepemimpinan yang berkelanjutan di masyarakat; dan
- i. tidak mengharapkan mereka yang memegang peran kepemimpinan untuk melakukan semuanya.

Kurangnya kepemimpinan atau kepemimpinan yang buruk dapat membahayakan seluruh proses pembangunan masyarakat dan dapat terjadi karena beberapa alasan, seperti:

- a. kelelahan
- b. kurangnya keterampilan dan kemampuan
- c. kurangnya dukungan
- d. keadaan pemimpin dan/atau masyarakat yang berubah-ubah

- e. kurangnya kejelasan sehubungan dengan visi dan tujuan
- f. kurangnya kesinambungan, dan
- g. orang-orang yang menjadi sukarelawan atau dipilih karena alasan yang salah (misalnya pilih kasih, karena orang tersebut membutuhkan pekerjaan, atau orang tersebut telah menjadi sukarelawan dan tidak seorang pun tahu bagaimana mengatakan tidak).

Para pemimpin harus menjaga diri mereka sendiri. Pembangunan masyarakat dapat menjadi proses yang intens dan banyak hal yang diharapkan dari para pemimpin. Agar efektif, pastikan bahwa:

- a. harapannya realistis;
- b. Anda memiliki dukungan dan sumber daya yang dibutuhkan;
- c. Anda tidak mengambil kepemilikan pribadi untuk proses tersebut, tetapi membangun kepemilikan komunitas; dan
- d. Anda mengembangkan pemimpin potensial untuk masa depan.

Kemitraan

Kemitraan merupakan sarana yang baik untuk membangun proses dan struktur pembangunan masyarakat yang efektif. Kemitraan didefinisikan sebagai hubungan di mana dua pihak atau lebih yang memiliki tujuan yang sama membentuk kesepakatan untuk berbagi pekerjaan, risiko, dan hasil atau keuntungan. Kemitraan dapat dibentuk untuk berbagai alasan, namun kemitraan memiliki ciri-ciri yang konsisten, yaitu:

- a) berbagi wewenang
- b) memiliki investasi sumber daya bersama
- c) menghasilkan keuntungan bersama, dan
- d) berbagi risiko, tanggung jawab, dan akuntabilitas.

Kemitraan bukanlah sebuah proses di mana:

- a. hanya ada sekelompok orang yang ingin melakukan sesuatu;
- b. ada motivasi tersembunyi;
- c. tidak ada kepercayaan atau kebutuhan akan kemitraan;

- d. tidak ada pembagian risiko, tanggung jawab, akuntabilitas, dan manfaat;
- e. satu orang memiliki semua kekuasaan dan/atau menggerakkan proses;
- f. masyarakat atau kelompok diminta untuk bekerja sama untuk mendapatkan pendanaan.

Ada banyak manfaat dari mengembangkan kemitraan yang kuat. Kemitraan yang kuat memiliki beberapa manfaat, seperti:

- a. merupakan sarana untuk menemukan solusi bagi masalah-masalah yang kompleks;
- b. menggabungkan upaya-upaya untuk berbagi kesempatan;
- c. memungkinkan kelompok-kelompok untuk melakukan lebih banyak hal dengan lebih sedikit biaya dengan berbagi biaya, sumber daya dan ketrampilan;
- d. menghilangkan tumpang tindih dan duplikasi upaya;
- e. mengintegrasikan gagasan, kegiatan dan tujuan dengan yang lain; dan
- f. memanfaatkan dengan baik pengetahuan dan gagasan yang dimiliki bersama.

Kami menyebut kemitraan sebagai "kemitraan berbasis masyarakat" jika kemitraan tersebut terjadi di dalam masyarakat, melibatkan anggota masyarakat, dan secara langsung memberikan dampak atau manfaat bagi masyarakat. Pada dasarnya, kemitraan pembangunan masyarakat ada ketika kemitraan tersebut:

- a. menuntut partisipasi dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- b. memiliki inklusi dan kepemimpinan yang terencana;
- c. meningkatkan keterampilan lokal dan kolektif;
- d. mendukung wirausahawan dan bisnis lokal;
- e. untuk masyarakat, oleh masyarakat; dan
- f. sering kali mengintegrasikan beberapa bidang pembangunan (sosial, ekonomi, lingkungan, dan budaya).

Para anggota kemitraan berbasis masyarakat tidak hanya mempertimbangkan keterlibatan dan kontribusi mereka sendiri, namun juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Siapa lagi yang perlu dilibatkan?
- b. Kapan pihak-pihak lain harus dilibatkan?
- c. Bagaimana hal ini harus dilakukan?
- d. Apa yang diharapkan oleh mereka yang tidak terlibat dalam kemitraan dari mereka yang terlibat?
- e. Bagaimana cara agar anggota masyarakat mendapatkan informasi tentang kegiatan kemitraan?

Kemitraan yang kuat dan layak tidak terjadi begitu saja. Keterampilan, pengetahuan dan pengalaman dibutuhkan ketika kita menyatukan orang-orang untuk membentuk kemitraan yang bermanfaat dan produktif. Untuk memiliki kemitraan yang efektif, Anda harus:

- a. mengetahui apa yang ingin Anda lakukan sebagai mitra
- b. memutuskan siapa yang akan melakukan apa
- c. membuat rencana dan mengikutinya, dan
- d. mengevaluasi hasil dan melakukan adaptasi seiring berjalannya waktu.

Logika dan keterampilan yang digunakan dalam proses perencanaan masyarakat serupa dengan logika dan keterampilan yang digunakan untuk membangun dan memelihara kemitraan yang efektif. Semakin banyak upaya yang Anda lakukan dalam pembangunan kemitraan di awal, semakin kuat kemitraan tersebut.

Pertanyaan-pertanyaan kunci yang harus diajukan adalah:

- a. Apa visi kita dan apa tujuan bersama yang ingin kita capai?
- b. Apa yang akan dikontribusikan oleh masing-masing pihak dalam kemitraan?
- c. Bagaimana kita akan mengambil keputusan dalam kemitraan kita?

- d. Proses apa yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat atau konflik?
- e. Bagaimana kita akan membagi manfaat atau hasil dari kemitraan?

Organisasi atau kelompok yang melakukan kemitraan biasanya memiliki identitas dan pekerjaan mereka sendiri di samping apa yang mereka lakukan sebagai bagian dari kemitraan. Oleh karena itu, tidak semua mitra harus terlibat pada tingkat yang sama dalam kemitraan. Kuncinya adalah peran dan tanggung jawab masing-masing mitra diidentifikasi, dipahami, dan disepakati sebelumnya.

Kemitraan yang berhasil memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. visi, misi dan sasaran bersama untuk kemitraan
- b. keanggotaan yang didefinisikan dengan jelas dengan peran dan tanggung jawab
- c. komitmen yang kuat terhadap visi dan misi
- d. rencana aksi yang terperinci
- e. proses komunikasi yang efektif
- f. sumber daya yang memadai, dan
- g. komitmen untuk evaluasi dan adaptasi.

M. Masalah Umum dan Solusi dalam Pembangunan Masyarakat

Bagian ini mengidentifikasi beberapa tantangan dan kesulitan yang paling umum yang dialami masyarakat dalam membangun kapasitas dan melakukan proses pembangunan masyarakat. Memikirkan masalah-masalah umum terlebih dahulu akan membantu menghindari beberapa kesulitan yang dialami oleh komunitas lain.

Setiap komunitas berbeda, sehingga masalah yang muncul mungkin sedikit berbeda, dan solusi yang Anda temukan mungkin lebih baik daripada yang ditawarkan. Bagian ini hanyalah sebuah panduan untuk membantu diskusi dan mengembangkan pemahaman yang lebih baik mengenai tantangan-tantangan yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat dan pembangunan kapasitas.

Masalah yang paling umum tampaknya terjadi di sekitar isu-isu berikut ini, yang diuraikan dan kemudian dijelaskan di bawah ini:

1. Tidak memahami komunitas anda sendiri

Asumsi sering kali dibuat tentang apa itu komunitas dan apa yang mendukung atau menentangnya. Ketika melakukan inisiatif pembangunan masyarakat, berasumsi atau menebak-nebak tidaklah cukup. Penting untuk mengetahui komunitas Anda dan dapat memberikan informasi yang akurat tentangnya. Penilaian komunitas adalah sebuah proses yang dirancang untuk mengumpulkan informasi dan data komunitas. Tujuan dari penilaian komunitas adalah untuk membantu memahami sifat komunitas Anda dan mengembangkan basis informasi bersama di antara anggota komunitas. Akan sulit untuk mengembangkan pemahaman bersama mengenai lingkungan dan isu-isu yang dihadapi masyarakat tanpa informasi ini.

Untuk beberapa komunitas, pengkajian melibatkan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, sementara untuk komunitas lain, hal ini dapat berarti analisis yang sangat rinci terhadap semua sektor kehidupan masyarakat. Jumlah rincian yang Anda perlukan dalam mengembangkan pemahaman tentang komunitas Anda akan sangat tergantung pada posisi Anda dalam proses pembangunan masyarakat.

Tantangan umum yang dihadapi masyarakat ialah mengembangkan proses pengkajian yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka. Masyarakat dapat jatuh ke dalam perangkap mengumpulkan informasi hanya karena informasi tersebut tersedia. Proses pengkajian menjadi tujuan itu sendiri dan bukan sebagai cara untuk meningkatkan pemahaman bersama.

Penting untuk diingat bahwa Anda mengumpulkan informasi untuk suatu tujuan. Banyak sekali informasi mengenai masyarakat atau lingkungan umum yang mungkin ada, tetapi mengumpulkan informasi tanpa fokus dan tujuan tidak akan membantu.

Titik awal dalam proses penilaian adalah membuat gambaran tentang komunitas Anda, seperti:

- a. Demografi - saat ini dan proyeksi, n isu-isu dan tren sosial
- b. Isu-isu dan tren ekonomi
- c. Isu-isu dan tren lingkungan
- d. Peluang dan isu-isu dari sudut pandang anggota masyarakat
- e. Peluang dan isu-isu dari sudut pandang pemimpin masyarakat, dan
- f. Tren dan isu-isu di luar masyarakat yang telah atau akan berdampak pada masyarakat.

Sumber-sumber informasi umum yang bisa digunakan adalah:

- a. Laporan dan studi dari pemerintah provinsi dan lokal
- b. Informasi dari Lembaga-lembaga terkait
- c. Universitas dan perguruan tinggi
- d. Artikel koran dan majalah
- e. Wawancara pribadi
- f. Kelompok-kelompok diskusi terarah; dan
- g. Percakapan informal.

Ingatlah bahwa anggota komunitas dan organisasi adalah para ahli tentang komunitas Anda. Jika Anda ingin mengetahui tentang tren sosial, tanyakan kepada organisasi dan individu yang terlibat dalam pemberian layanan sosial dan di sektor sukarelawan untuk mendapatkan informasi. Jika Anda tertarik dengan tren ekonomi, tanyakan kepada orang-orang yang aktif di sektor swasta dan serikat pekerja.

Memahami komunitas Anda merupakan proses yang berkelanjutan Karena sifat perubahan yang cepat dalam masyarakat kita, apa yang benar hari ini mungkin tidak benar besok. Menganggap bahwa Anda mengetahui semua hal yang perlu diketahui tentang komunitas Anda adalah hal yang berbahaya. Mengambil inventarisasi dan menilai komunitas secara teratur

akan memastikan bahwa asumsi dan pemahaman Anda tentang komunitas Anda adalah yang terkini.

2. Beralih dari perencanaan ke aksi

Jika Anda baru pertama kali membuat rencana pembangunan masyarakat, langkah-langkah pembuatan visi, tujuan, sasaran, dan rencana aksi bisa jadi terasa seperti tidak ada habisnya. Ingatlah bahwa pekerjaan ini akan membuahkan hasil dalam jangka panjang. Bersabarlah. Jangan terburu-buru di awal proses. Mendapatkan keterlibatan dan dukungan dari berbagai anggota masyarakat sangat penting untuk kesuksesan jangka panjang Anda. Penting juga untuk diingat bahwa perencanaan tidak terjadi dalam ruang hampa. Kegiatan dan kesempatan masyarakat terjadi bersamaan dengan proses perencanaan; oleh karena itu, Anda harus membiarkan akal sehat dan visi masyarakat memandu tindakan Anda.

Namun, banyak komunitas yang merasa bahwa proses perencanaan dapat membuat frustrasi jika tidak ada fokus tindakan atau hasil yang jelas. Jika Anda menemukan bahwa Anda terjebak dalam perencanaan, dan frustrasi karena kurangnya tindakan nyata, maka:

- a. Memprioritaskan tujuan dan sasaran anda, dan memfokuskan energi dan kapasitas anda pada bidang-bidang tersebut;
- b. Tanyakan pada diri anda sendiri apakah anda mencoba untuk menjadi segala-galanya bagi semua orang dan apakah fokus kegiatan pembangunan masyarakat anda perlu dipersempit agar dapat dikelola dan sesuai dengan kemampuan masyarakat saat ini;
- c. Meminta ide dan saran dari mereka yang terlibat dalam proses tersebut tentang bagaimana melangkah maju;
- d. Meninjau kembali situasi yang ada, dan melihat apakah perekrutan dukungan teknis atau keahlian dapat memajukan Anda; dan/atau

- e. Memanfaatkan peluang yang muncul dengan sendirinya, tetapi melakukannya dengan cara yang konsisten dengan pekerjaan pembangunan masyarakat yang telah dilakukan.

Perubahan dan penyesuaian merupakan bagian yang berkelanjutan dari proses pembangunan masyarakat. Jangan takut untuk mendefinisikan kembali pendekatan awal Anda jika ternyata pendekatan tersebut tidak berhasil. Namun, seimbangkan hal ini dengan kebutuhan untuk meluangkan waktu untuk melakukan pekerjaan awal yang diperlukan untuk membuat rencana pembangunan masyarakat.

3. Gagal mengevaluasi hasil

Banyak komunitas gagal mengevaluasi hasil dengan cara yang sistematis. Hal ini sering terjadi karena mereka tidak memikirkan seperti apa keberhasilan itu atau informasi apa yang diperlukan untuk mengevaluasi hasil dari upaya mereka. Hal-hal tersebut harus dilakukan sebagai bagian dari proses perencanaan, bukan sebagai pemikiran setelahnya. Dengan kata lain, ketika Anda menjalankan rencana Anda, Anda perlu mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi hasil dari rencana tersebut. Menilai keberhasilan rencana Anda berdasarkan informasi yang tidak lengkap atau bias yang kebetulan tersedia di tengah-tengah atau di akhir proses implementasi tidaklah kredibel atau bermakna.

Beberapa komunitas menolak evaluasi karena mereka menganggapnya sebagai pekerjaan yang sulit dan rumit dan/atau akan melibatkan "orang luar" yang akan membuat penilaian terhadap komunitas mereka. Penting untuk menghilangkan mistik dari evaluasi. Evaluasi hanyalah sebuah alat yang membantu Anda memahami apakah Anda berada di jalur yang benar dan mencapai hasil yang akan menggerakkan Anda menuju visi Anda. Ini bukan tentang menentukan tindakan apa yang "benar" dan tindakan apa yang "salah" dan tidak harus terlalu teknis dan rumit.

Dalam evaluasi, Anda perlu mengeksplorasi empat pertanyaan dasar:

- a. Apa yang berhasil dan mengapa?
- b. Apa yang tidak berhasil dan mengapa?
- c. Apa yang dapat dilakukan dengan cara yang berbeda?
- d. Penyesuaian dan perubahan apa yang diperlukan saat ini?

Proses yang Anda kembangkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini tergantung pada kompleksitas kegiatan pembangunan masyarakat Anda dan kedalaman pengetahuan serta pemahaman yang Anda perlukan. Evaluasi pembangunan masyarakat dapat menjadi sebuah tantangan karena harus memiliki sisi kuantitatif dan kualitatif. Informasi konkret tentang apa yang telah dilakukan adalah penting, namun demikian juga informasi tentang persepsi anggota masyarakat tentang proses, hasil yang dicapai dan manfaat pembangunan masyarakat secara keseluruhan.

Pembangunan masyarakat memang memiliki risiko dan, seringkali, melibatkan cara-cara baru dalam melakukan sesuatu. Penting untuk mengakui bahwa risiko-risiko tersebut diambil dan bahwa kesalahan-kesalahan kemungkinan besar akan terjadi. Evaluasi memungkinkan masyarakat untuk belajar dari kesalahan-kesalahan tersebut. Hal ini memastikan bahwa informasi yang diperlukan tersedia untuk menyesuaikan dan mengadaptasi kegiatan Anda dan, oleh karena itu, meminimalkan risiko.

Evaluasi mendukung komitmen komunitas untuk tetap berada di jalur yang benar dan mencapai hasil. Selain itu, informasi evaluatif merupakan elemen penting dalam proposal pendanaan. Lembaga pendanaan sering kali ingin mengetahui apa yang telah anda capai di masa lalu, untuk menilai apakah mereka harus mendukung proyek baru. Evaluasi mungkin merupakan salah satu area di mana anda mungkin ingin memanfaatkan keahlian dari luar untuk membantu anda memulai.

4. Kurangnya sumber daya keuangan

Sangat sedikit inisiatif pembangunan masyarakat yang bebas biaya. Selama bertahun-tahun, pendanaan telah menjadi tantangan utama bagi banyak inisiatif pembangunan masyarakat karena sering kali tidak sesuai dengan jenis program, hibah, atau pinjaman yang tersedia. Biasanya, pendekatan berbasis proyek, yang telah diadopsi oleh banyak penyandang dana dan lembaga keuangan, bertentangan dengan tujuan jangka panjang atau upaya yang akan menghasilkan peningkatan masyarakat yang substantif.

Pendanaan dan pembiayaan yang komprehensif, baik untuk inisiatif berskala besar maupun yang lebih kecil, dapat menjadi sulit karena beberapa alasan. Sepuluh alasan yang paling umum adalah:

- a. kurangnya sumber pendanaan untuk upaya pembangunan masyarakat tertentu;
- b. kurangnya inisiatif pendanaan yang menyediakan dana awal untuk mendukung langkah awal proses pembangunan masyarakat;
- c. pendekatan pinjaman dan hibah yang bersifat jangka pendek dan berisiko rendah dari penyandang dana;
- d. kriteria kelayakan yang membingungkan dan berubah-ubah dari hibah dan program pemerintah;
- e. proses pengajuan dana yang sulit dan/atau membingungkan;
- f. keterbatasan kemampuan organisasi pembangunan masyarakat untuk mencocokkan dana atau memberikan uang muka;
- g. permintaan dana atau rencana proyek yang tidak ditulis dengan baik;
- h. kurangnya pengalaman dalam penggalangan dana;
- i. tidak memiliki rekam jejak, kredibilitas yang terbatas di mata penyandang dana dan/atau tidak memiliki peringkat kredit; dan
- j. terlalu banyak persaingan untuk mendapatkan sumber daya keuangan/sumbangan yang terbatas.

Beberapa dari masalah ini ada pada penyandang dana dan bagaimana mereka merancang dan mendistribusikan pendanaan, namun ada juga yang berada di bawah kendali komunitas. Untuk menghindari masalah pendanaan ini, banyak kelompok masyarakat yang melakukan pendekatan pendanaan sebagai pekerjaan yang membutuhkan staf yang terampil dan rencana. Keterampilan yang dibutuhkan untuk peran ini termasuk keterampilan perencanaan proyek, keterampilan menulis proposal, pengetahuan tentang hibah dan pemberi pinjaman, pengalaman dalam penggalangan dana, pemahaman tentang kemitraan investasi, dan yang paling penting adalah keyakinan yang kuat akan validitas pekerjaan yang harus didanai.

Rencana proyek, permintaan pendanaan dan proposal akan bervariasi tergantung pada audiens dan jumlah uang yang diminta. Beberapa di antaranya sangat rumit dan mencakup prospektus organisasi dan rencana strategis yang terperinci serta diagram alir dan proyeksi keuangan untuk pendapatan dan pengeluaran. Permohonan lainnya berupa ikhtisar dua atau tiga halaman tentang kegiatan dan alasan pendanaan.

Berikut ini adalah beberapa pertanyaan dasar yang harus dipertimbangkan ketika menyusun permohonan pendanaan:

- a. Siapa organisasi yang mensponsori? Apa jenis badan hukumnya?
- b. Siapa yang terlibat? Siapa yang akan bertindak sebagai penghubung dan bertanggung jawab atas dana tersebut?
- c. Untuk apa dana yang dibutuhkan? Kebutuhan apa yang sedang diatasi oleh pekerjaan yang sedang dilakukan?
- d. Bagaimana hal ini sesuai dengan gambaran yang lebih besar atau melengkapi kegiatan atau layanan masyarakat yang sudah ada?
- e. Siapa yang mendukung atau mengakui kelompok ini atau permintaan ini?
- f. Ekuitas atau aset apa yang dibawa ke dalam inisiatif ini dari sponsor atau pihak lain?

- g. Bagaimana dana akan dikelola? Apakah ada proses evaluasi dan akuntabilitas?
- h. Hasil apa yang diharapkan dan kapan?

5. Kebingungan peran dan perebutan kekuasaan

Kebingungan peran dan perebutan kekuasaan dapat muncul dalam proses pembangunan masyarakat. Hal ini terutama terjadi jika inisiatif pembangunan masyarakat memiliki cakupan yang luas. Pembangunan masyarakat membawa perubahan, membentuk hubungan baru dan menggeser kekuasaan. Beberapa anggota masyarakat mungkin merasa kehilangan kekuasaan atau terancam oleh hubungan baru yang mereka lihat sedang dikembangkan. Menolak atau merasa terancam oleh perubahan seperti ini adalah hal yang wajar.

Meskipun kebingungan peran dan perebutan kekuasaan mungkin tidak dapat dihindari sepenuhnya, berikut ini adalah beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meminimalkan masalah ini:

- a. Sadarilah bahwa pembangunan masyarakat melibatkan perubahan. Antisipasi di mana perubahan ini akan terjadi dan bicarakan hal ini dengan mereka yang akan terkena dampaknya.
- b. Kaji situasi masyarakat, terutama di mana kebingungan peran dan perebutan kekuasaan kemungkinan besar akan terjadi, dan identifikasi tindakan yang dapat dilakukan untuk meminimalkan hal tersebut.
- c. Berusahalah untuk membangun kepercayaan dan mendorong komunikasi dua arah.
- d. Kembangkan dialog terbuka agar mereka yang resisten terhadap perubahan mengetahui apa yang terjadi dan mengapa.
- e. Mempromosikan visi dan misi dari rencana pembangunan masyarakat Anda untuk menciptakan tujuan dan fokus yang sama.
- f. Mengundang dan mendorong mereka yang paling mungkin terkena dampak dari proses pembangunan masyarakat untuk mengambil peran kepemimpinan dan berpartisipasi secara aktif.

- g. Memastikan bahwa struktur dan prosedur yang dibuat untuk menyelesaikan pekerjaan meminimalisir perpecahan dan bukannya menonjolkannya.

Kekuatan dari pembangunan masyarakat adalah sifatnya yang holistik dan inklusif. Namun, ketika kita ingin menyelesaikan pekerjaan, kita harus membagi pekerjaan tersebut menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola. Cara kita membagi dan mengelola pekerjaan dapat berdampak besar pada kebingungan peran dan perebutan kekuasaan. Dengan niat yang baik dan itikad yang baik, anggota komunitas atau organisasi mungkin melakukan pekerjaan yang berdampak pada orang lain tanpa mereka sadari. Jika Anda melihat adanya ketegangan atau kebingungan atas tanggung jawab kelompok atau individu, periksalah secara serius bagaimana pekerjaan tersebut telah diorganisir.

Kepribadian atau karakter seseorang, bagaimanapun juga, dapat menyebabkan perebutan kekuasaan. Penting untuk mencoba menerapkan saran-saran di atas, tetapi ingatlah bahwa solusi yang tepat mungkin adalah seseorang meninggalkan proses atau kegiatan. Jika ini yang terjadi, tujuan Anda adalah mengelola proses ini dengan sesedikit mungkin perasaan sulit.

6. Konflik yang tidak terselesaikan

Konflik dan perselisihan dapat terjadi dalam setiap usaha manusia. Dengan sendirinya, hal ini bukanlah hal yang buruk; tergantung bagaimana cara mengelolanya. Sebaiknya ketidaksepakatan diungkapkan dengan jelas dan terbuka. Ketidaksepakatan menjadi berbahaya jika ditekan. Menghindari atau mengabaikan konflik berarti mengambil risiko eskalasi masalah dan peningkatan perpecahan.

Kunci untuk menyelesaikan konflik atau ketidaksepakatan dengan sukses adalah dengan:

- a. mengidentifikasi dengan jelas penyebab masalah, bukan gejalanya;

- b. memahami masalahnya dan siapa saja yang terlibat;
- c. memisahkan orang yang terlibat dari masalah;
- d. mengidentifikasi opsi-opsi yang memungkinkan untuk menyelesaikan masalah; dan
- e. memilih satu opsi dan menindaklanjutinya.

Konflik dan perlawanan bisa jadi merupakan sinyal bahwa Anda belum mengembangkan proses yang inklusif. Anggota masyarakat mungkin menentang atau menolak elemen-elemen proses karena mereka tidak dilibatkan dalam pembangunan kegiatan-kegiatan tersebut dan/atau kurang memahami apa yang sedang dilakukan. Jangan terjebak dalam pemikiran bahwa proses inklusif itu terlalu sulit atau bahwa elemen-elemen tertentu dalam komunitas Anda tidak benar-benar tertarik dan, oleh karena itu, tidak perlu dilibatkan. Lakukan kerja keras yang diperlukan untuk mempromosikan inklusi. Libatkan seluruh kepentingan dan perspektif dalam komunitas Anda dalam proses pembangunan daripada harus menangani isu-isu yang menjadi perhatian dan konflik setelah kejadian.

7. Tidak menggunakan alat dan teknik secara efektif

Melaksanakan proses pembangunan masyarakat tidak hanya membutuhkan alat dan teknik, tetapi juga pemahaman tentang bagaimana menggunakannya. Salah satu alasan paling umum untuk tidak menggunakan alat dan teknik dengan benar adalah karena tidak mengetahui apa itu alat dan teknik. Alat bantu adalah serangkaian langkah proses tertentu, latihan atau daftar periksa yang dapat diuraikan secara rinci dan kemudian diterapkan dalam berbagai situasi. Contoh alat adalah kuesioner penilaian masyarakat, inventarisasi keterampilan, dan daftar periksa proposal pendanaan. Teknik adalah sesuatu yang kurang nyata dan merupakan metode atau cara untuk melaksanakan tugas yang telah ditetapkan. Contoh teknik adalah pendekatan visi komunitas, kiat-kiat tentang cara berkomunikasi

secara efektif, dan ide-ide untuk mendorong fasilitasi kelompok yang efektif.

Alat dan teknik yang digunakan dalam pembangunan masyarakat berkembang dan berubah. Apa yang berhasil dengan baik di satu komunitas mungkin tidak akan berhasil dengan baik di komunitas lain. Oleh karena itu, seperangkat alat dan teknik yang dijamin cocok untuk semua keadaan tidak dapat diidentifikasi. Masyarakat dapat dan harus belajar dari pengalaman orang lain, tetapi harus menyesuaikan dan menyempurnakan apa yang berhasil di tempat lain dengan situasi dan kondisi mereka sendiri.

Penting bagi Anda untuk mengeksplorasi berbagai alat dan teknik yang tersedia dan menerapkannya pada situasi Anda sendiri. Ketika Anda mengeksplorasi berbagai alat dan teknik untuk komunitas Anda, tanyakan pada diri Anda sendiri pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

- a. Apakah pekerjaan prasyarat yang diperlukan telah dilakukan untuk membuat alat atau teknik tersebut berguna dan efektif?
- b. Apakah penggunaan alat atau teknik tersebut akan memajukan proses pembangunan masyarakat?
- c. Apakah anggota masyarakat akan memahami kebutuhan akan alat atau teknik tersebut dan hasil yang diharapkan?
- d. Apakah alat atau teknik tersebut memerlukan adaptasi agar efektif di masyarakat anda?
- e. Adakah individu atau kelompok yang dapat menggunakan alat atau teknik tersebut secara efektif?
- f. Setelah penggunaan alat atau teknik tersebut berhasil, apakah langkah selanjutnya?

Ada banyak sekali alat dan teknik yang tersedia dalam bentuk materi cetak/video dan kebijaksanaan para pengembang masyarakat lainnya. Bagian VI dari buku panduan ini memberikan beberapa titik awal untuk mulai mengeksplorasi kekayaan materi yang tersedia. Banyak alat dan teknik yang Anda temukan akan dijual. Terlepas dari

apakah Anda membayar untuk materi tersebut atau tidak, perhatikan dan hormati masalah hak cipta. Jika Anda mengadaptasi materi dari orang lain, penting untuk mengakui kontribusi yang mereka berikan pada pemikiran Anda.

Jika Anda menghubungi pengembang komunitas lain, Anda juga harus menghormati waktu dan keadaan mereka. Perjelas apa yang ingin Anda ketahui dan pastikan bahwa ekspektasi Anda masuk akal. Sebagai contoh, bertanya kepada seseorang apakah mereka dapat mengidentifikasi beberapa sumber daya yang efektif untuk Anda adalah hal yang masuk akal, tetapi meminta seseorang untuk membuat proses pembangunan komunitas untuk Anda melalui telepon adalah hal yang tidak masuk akal. Banyak organisasi dan individu pembangunan masyarakat bekerja berdasarkan kontrak atau *fee-for-service*; oleh karena itu, apa pun di luar pertanyaan awal mungkin memerlukan pengaturan *fee-for-service*. Jika seseorang menyumbangkan waktu dan upaya untuk mencari sumber daya dan/atau memberikan arahan, hargailah kontribusi tersebut.

Advokasi Pembangunan Desa; Panduan Untuk Menciptakan Dampak

Advokasi adalah dukungan aktif terhadap suatu gagasan atau tujuan yang diekspresikan melalui strategi dan metode yang mempengaruhi opini dan keputusan orang dan organisasi. Dalam konteks pembangunan sosial dan ekonomi, tujuan advokasi adalah untuk menciptakan atau mengubah kebijakan, hukum, peraturan, distribusi sumber daya, atau keputusan lain yang mempengaruhi kehidupan masyarakat dan untuk memastikan bahwa keputusan tersebut dapat diimplementasikan.

Advokasi adalah tindakan berargumen untuk mendukung suatu tujuan, ide, atau kebijakan. Secara umum, tujuan akhirnya adalah untuk berkomunikasi secara langsung dan konstruktif dengan para pengambil keputusan. Advokasi sering dilihat sebagai bekerja "di dalam sistem". Advokasi bekerja di sekitar komponen-komponen seperti hubungan, kebijakan yang baik, dan rasa hormat. Advokasi dapat digambarkan sebagai pengaruh yang bersifat pre-emptif - advokasi dapat bersifat proaktif atau reaktif. Advokasi yang bersifat proaktif umumnya memiliki pendekatan yang tidak bersifat permusuhan atau "soft touch" dalam menjangkau; misalnya, mengadvokasi alokasi anggaran, perubahan perpajakan, pengembangan kebijakan, dan lain-lain.

Advokasi, pemberdayaan, dan kemitraan adalah beberapa langkah yang digunakan untuk mendukung pembangunan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti kesehatan.

Advokasi adalah upaya mendekati, mendampingi, dan memengaruhi para pembuat lain secara bijak, sehingga mereka sepakat untuk memberi dukungan terhadap pembangunan kesehatan. Kegiatan advokasi melibatkan berbagai aktivitas seperti lobbi politik, berbicara menyampaikan informasi atau kampanye, dan lakukan tindak lanjut. Masyarakat merupakan subjek, pelaku, dan bukan hanya sebagai objek dalam pembangunan. Pemerintah perlu mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengembangkan.

Advokasi pemberdayaan adalah upaya untuk mendekati, mendampingi, dan memengaruhi para pembuat kebijakan secara bijak, sehingga mereka sepakat untuk memberi dukungan terhadap pembangunan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat melibatkan kolaborasi dan kemitraan dengan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk menghasilkan ruang termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, yang berfungsi sebagai tempat berinteraksi dan berkolaborasi dalam pembangunan. Advokasi dan pemberdayaan masyarakat digunakan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan pembangunan, seperti meningkatkan kesehatan masyarakat.

Advokasi dapat membantu masyarakat dalam pemberdayaan dengan beberapa cara, seperti:

- a. Mendapatkan Dukungan Kebijakan
Melalui advokasi, masyarakat dapat memengaruhi para pembuat kebijakan untuk mendukung inisiatif pemberdayaan masyarakat, termasuk dalam bidang kesehatan
- b. Membangun Konsensus dan Solusi Berkelanjutan
Advokasi dapat membantu membangun konsensus dan solusi berkelanjutan untuk tantangan pembangunan yang kompleks, dengan melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil
- c. Mengidentifikasi Kebutuhan dan Kapasitas Masyarakat

Melalui advokasi, masyarakat dapat difasilitasi dalam mengidentifikasi kebutuhan dan kapasitas mereka, sehingga dapat terlibat secara aktif dalam pembangunan dan pemberdayaan

Dengan demikian, advokasi memainkan peran penting dalam memfasilitasi pemberdayaan masyarakat, dengan melibatkan berbagai pihak untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat melalui advokasi memiliki beberapa manfaat, antara lain:

- a. Mendapatkan Dukungan Kebijakan
Melalui advokasi, masyarakat dapat memengaruhi para pembuat kebijakan untuk mendukung inisiatif pemberdayaan masyarakat, termasuk dalam bidang Kesehatan
- b. Membangun Konsensus dan Solusi Berkelanjutan
Advokasi dapat membantu membangun konsensus dan solusi berkelanjutan untuk tantangan pembangunan yang kompleks, dengan melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil
- c. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat
Pemberdayaan masyarakat melalui advokasi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sehingga masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam proses pembangunan
- d. Meningkatkan Kapasitas Masyarakat
Pemberdayaan masyarakat melalui advokasi dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengidentifikasi masalah dan mencari solusi, sehingga masyarakat dapat hidup mandiri dan berkelanjutan

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat melalui advokasi dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, termasuk dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

A. Definisi Advokasi

Advokasi adalah serangkaian tindakan strategis yang dirancang untuk mempengaruhi mereka yang memiliki kekuasaan pemerintah, politik, ekonomi atau swasta untuk menerapkan kebijakan dan praktik-praktik publik yang menguntungkan mereka yang memiliki kekuatan politik dan sumber daya ekonomi yang lebih sedikit (kelompok yang terkena dampak).

Kampanye advokasi adalah serangkaian kegiatan jangka panjang yang mencakup penelitian, perencanaan, tindakan, pemantauan, dan evaluasi upaya advokasi kami. Mengentaskan kemiskinan, melawan penindasan, melawan ketidakadilan, atau mendukung pembangunan berkelanjutan merupakan tema-tema umum kampanye advokasi.

Ada banyak sekali diskusi tentang apa arti "advokasi" dan hal ini telah menghasilkan berbagai macam definisi, pendekatan dan strategi. Beberapa definisi advokasi mengacu pada perubahan kebijakan yang sebenarnya, beberapa lagi mengacu pada kegiatan, sementara definisi lain mengacu pada siapa yang melakukan advokasi dan siapa yang seharusnya menerima advokasi. Beberapa definisi advokasi yang dimaksud diantaranya:

- a. Advokasi adalah sebuah proses yang bertujuan untuk membalikkan, memperbaiki, mengubah atau menahan situasi yang ada.
- b. Advokasi adalah sebuah strategi, tindakan atau proses yang bertujuan untuk membawa perubahan sikap, kebijakan, tradisi, hukum dan ideologi untuk sebuah hasil positif yang diinginkan.
- c. Advokasi adalah berbicara atas nama individu atau kelompok mengenai isu-isu tertentu yang mempengaruhi mereka.
- d. Advokasi adalah upaya yang dilakukan terhadap para pengambil keputusan untuk mengubah kebijakan atau hukum tertentu pada tingkat yang berbeda.
- e. Advokasi adalah berbicara, menarik perhatian masyarakat terhadap suatu isu penting, dan mengarahkan para pengambil keputusan untuk mencari solusi. Advokasi adalah bekerja sama

dengan orang dan organisasi lain untuk membuat perubahan (CEDPA: *A Handbook for Women Leaders*)

- f. Advokasi didefinisikan sebagai promosi suatu tujuan atau mempengaruhi kebijakan, aliran dana atau kegiatan lain yang ditentukan secara politis (Advocates for Youth: *Advocacy* 101).
- g. Advokasi yang berpusat pada warga negara adalah proses politik terorganisir yang melibatkan upaya terkoordinasi dari orang-orang untuk mengubah kebijakan, praktik, ide, dan nilai-nilai yang melanggengkan ketidaksetaraan, prasangka, dan pengucilan. Advokasi memperkuat kapasitas warga negara sebagai pengambil keputusan dan membangun lembaga-lembaga kekuasaan yang lebih akuntabel dan adil. VeneKlasen dan Miller: *Jalinan Baru Kekuasaan, Rakyat dan Politik* (Vene Klasen and Miller: *New Weave of Power, People and Politics*).
- h. Advokasi adalah upaya untuk mempengaruhi hasil - termasuk kebijakan publik dan keputusan alokasi sumber daya dalam sistem dan lembaga politik, ekonomi, dan sosial - yang secara langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat (David Cowen: *Advocacy for Social Justice*).
- i. Advokasi adalah serangkaian tindakan yang dirancang untuk membujuk dan mempengaruhi mereka yang memegang kekuasaan pemerintahan, politik, atau ekonomi sehingga mereka akan mengadopsi dan menerapkan kebijakan publik dengan cara yang menguntungkan mereka yang memiliki kekuatan politik dan sumber daya ekonomi yang lebih sedikit (*Advocacy Institute*).
- j. Advokasi adalah bekerja dengan orang dan organisasi lain untuk membuat perubahan. (CEDPA, 1995).
- k. Advokasi adalah menempatkan suatu masalah dalam agenda, memberikan solusi untuk masalah tersebut dan membangun dukungan untuk bertindak atas masalah dan solusi tersebut.
- l. Advokasi dapat bertujuan untuk mengubah sebuah organisasi secara internal atau untuk mengubah keseluruhan sistem.

- m. Advokasi dapat melibatkan banyak kegiatan spesifik jangka pendek untuk mencapai visi perubahan jangka panjang.
- n. Advokasi terdiri dari berbagai strategi yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan di tingkat organisasi, lokal, provinsi, nasional dan internasional.
- o. Strategi advokasi dapat mencakup lobi, pemasaran sosial, informasi, pendidikan dan komunikasi (KIE), pengorganisasian masyarakat, atau berbagai taktik lainnya.
- p. Advokasi adalah proses dimana masyarakat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.
- q. Advokasi adalah tindakan yang ditujukan untuk mengubah kebijakan, posisi, atau program dari semua jenis institusi.
- r. Advokasi adalah memohon, membela, atau merekomendasikan sebuah ide di hadapan orang lain.
- s. Advokasi adalah berbicara, menarik perhatian masyarakat terhadap suatu isu penting, dan mengarahkan para pengambil keputusan untuk mencari solusi.
- t. Advokasi adalah serangkaian tindakan strategis yang dirancang untuk mempengaruhi mereka yang memiliki kekuasaan pemerintah, politik, ekonomi atau swasta untuk melakukan perubahan.

B. Masyarakat dan Advokasi

Masyarakat Sipil mengacu pada asosiasi dan/atau kelompok warga negara individu yang mewakili berbagai sektor masyarakat yang tidak termasuk dan independen dari kontrol pemerintah. Masyarakat sipil meliputi, antara lain, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi berbasis masyarakat (Ormas), asosiasi profesi, organisasi filantropi dan keagamaan, lembaga akademis, media, serikat pekerja, dan individu biasa maupun elit. Secara keseluruhan, masyarakat sipil mewakili keragaman identitas, isu, dan perspektif. Masyarakat sipil dapat memperoleh kekuatan dari keragamannya,

meskipun tidak dapat berbicara untuk kepentingan semua orang setiap saat, atau bahkan hanya pada waktu tertentu saja.

Masyarakat sipil menciptakan dan menggunakan ruang-ruang publik yang bebas untuk berkumpul, berpikir, bertukar dan menyempurnakan pandangan, mengorganisir dan mengambil tindakan. Sebagai bagian dari proses ini, semua peserta menerima perdebatan dan ketidaksepakatan, kompromi dan negosiasi. Partisipasi bersifat terbuka dan/atau representatif. Organisasi masyarakat sipil dan kepemimpinannya harus independen dari otoritas pemerintah, bahkan ketika mereka bekerja untuk mengembangkan hubungan dengan para pemimpin pemerintah. Organisasi Masyarakat Sipil memiliki peran kunci dalam pengembangan kebijakan dan hukum yang mempengaruhi warga negara. Mereka dapat melakukan hal ini melalui partisipasi dalam ruang dan kesempatan yang "diciptakan" seperti Komite Parlemen dan audiensi publik. Mereka juga dapat menuntut pemerintah untuk mengambil tindakan melalui kampanye advokasi yang terorganisir.

Jenis-jenis Organisasi Masyarakat Sipil yang mungkin terlibat dalam pekerjaan advokasi:

a. LSM

Organisasi yang misinya adalah membantu melayani masyarakat luas dan telah mengidentifikasi peran mereka sebagai organisasi yang peduli dengan masalah demokrasi dan pemerintahan

b. Organisasi Terkait Ketenagakerjaan

Organisasi keanggotaan yang mewakili orang-orang dalam profesi atau perdagangan tertentu (misalnya Kamar Dagang dan asosiasi profesi)

c. LSM Penyedia Layanan

Organisasi-organisasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat yang telah mengidentifikasi peran mereka dalam menyediakan layanan bagi kelompok-kelompok masyarakat yang terpinggirkan atau bagi warga negara secara keseluruhan.

d. Organisasi Orang-Orang yang Kurang Beruntung

Organisasi yang dibentuk untuk membantu mereka yang menderita ketidakberuntungan yang sama - yang mungkin berupa kecacatan, atau mungkin hanya sebuah kelompok di dalam masyarakat, seperti wanita yang mengalami diskriminasi

e. Organisasi Berbasis Masyarakat

Organisasi yang saling menguntungkan yang secara geografis sangat lokal dan peduli dengan isu-isu swadaya di wilayah mereka.

f. Koalisi

Pengelompokan formal organisasi yang memiliki isu dan agenda yang sama dan memperoleh kekuatan dengan menggabungkan dan berbagi sumber daya

Untuk memahami advokasi, kita perlu memahami demokrasi. Idealnya, semua masyarakat memiliki tiga lingkup pengaruh: negara, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Dalam demokrasi yang berfungsi, ketiga lingkungan tersebut berbagi kekuasaan dan bekerja sama. Masyarakat sipil terdiri dari warga negara dan organisasi swasta yang bekerja sama untuk memajukan kepentingan publik. Contoh: Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serikat pekerja, kelompok berbasis masyarakat, kelompok agama, atau partai politik. Sedangkan Negara terdiri dari entitas publik yang bekerja untuk memajukan kepentingan publik. Contoh: Pejabat pemerintah, birokrat, militer, sekolah, polisi, dan pengadilan. Sementara, Sektor swasta terdiri dari orang-orang dan organisasi swasta yang bekerja untuk memajukan kepentingan pribadi, contoh: perusahaan, usaha kecil, media, pabrik.

C. Tujuan Advokasi

Advokasi, bersama dengan kampanye dan lobi, dapat terjadi pada setiap tingkat, dari situasi yang paling lokal hingga arena global, dan alasan mengapa advokasi itu penting adalah karena advokasi dapat:

1. Mempengaruhi perubahan kebijakan dan pola pikir

2. Mengamankan sumber daya dengan memastikan bahwa sumber daya yang cukup dialokasikan untuk pelaksanaan program dan pemberian layanan
3. Membangun gerakan yang dapat menyatukan komitmen dan aktivisme dari semua tingkatan seperti lokal, nasional, regional, dan internasional
4. Melindungi pencapaian sebelumnya karena advokasi dapat berperan sebagai pengawas untuk memastikan bahwa pemerintah dan para pemimpin menjunjung tinggi komitmen mereka

Siapapun yang memiliki semangat untuk suatu isu atau tujuan dapat menjadi seorang advokat. Faktanya, merupakan hak asasi manusia bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka dan agar suara mereka didengar oleh para pembuat kebijakan. Melalui hal ini, kita dapat memimpin perubahan di sekitar kita dan membuat 'efek riak' yang menginspirasi orang lain yang menginspirasi orang lain dan seterusnya.

D. Komponen-Komponen Advokasi

Apa pun jenis perubahan kebijakan publik yang kita inginkan, semua kampanye advokasi yang berhasil memiliki karakteristik yang sama. Mereka adalah:

1. Strategis
Kita harus melakukan riset dan merencanakan kampanye kita dengan hati-hati.
2. Serangkaian Aksi
Advokasi bukan hanya satu panggilan telepon, satu petisi, atau satu pawai, melainkan serangkaian kegiatan yang terkoordinasi.
3. Dirancang untuk Persuasi
Kita harus menggunakan ide-ide atau memberikan argumen-argumen yang dapat meyakinkan masyarakat bahwa perubahan yang diinginkan adalah penting dan mereka akan mendukungnya.

4. Target

Kita harus mengarahkan upaya persuasi kita kepada orang-orang tertentu yang memiliki kekuatan untuk membuat kampanye advokasi kita berhasil.

5. Membangun Aliansi

Kita harus bekerja sama dengan banyak pemangku kepentingan untuk meningkatkan dampak kampanye kita.

6. Menghasilkan Perubahan

Kampanye advokasi kita harus menghasilkan perubahan positif dalam kehidupan orang-orang yang terkena dampak masalah. Agar advokasi kita efektif, kita harus meyakinkan target kampanye advokasi kita bahwa apa yang kita inginkan adalah apa yang mereka inginkan.

E. Prinsip-Prinsip Advokasi

Kampanye advokasi akan menghasilkan perbaikan nyata dalam kehidupan masyarakat. Kampanye-kampanye tersebut memperkuat peran masyarakat sipil dalam pengambilan keputusan dan memperluas kesadaran masyarakat akan hak-hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Advokasi yang efektif juga dapat memperkuat hubungan antara tiga bidang masyarakat yang berbeda dan meningkatkan akuntabilitas lembaga-lembaga pemerintah.

Ada beberapa tantangan untuk kampanye advokasi yang sukses. Jika tidak direncanakan dengan baik, advokasi dapat melemahkan kelompok yang terkena dampak dengan berbicara atas nama mereka tanpa berkonsultasi dengan mereka. Karena frustrasi dengan pemerintah atau struktur kekuasaan lainnya, mungkin juga ada godaan untuk berkompromi. Mengalihkan sumber daya yang dibutuhkan dari kegiatan-kegiatan kita yang lain untuk kampanye advokasi akan menuntut perencanaan yang matang. Dalam beberapa kasus

yang sulit, para advokat mungkin akan menghadapi ancaman terhadap keamanan pribadi, harta benda, atau keamanan pekerjaan mereka.

F. Langkah-Langkah Untuk Melakukan Advokasi (Siklus Advokasi)

Kampanye advokasi mengikuti siklus kegiatan umum yang sesuai dengan faktor-faktor yang disebutkan di atas. Kita akan membahas masing-masing dari enam komponen siklus tersebut.

1. Identifikasi Masalah

Masalah yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah atau praktik-praktik sosial biasanya tidak dapat diselesaikan oleh satu orang. Masyarakat yang terkena dampak membutuhkan advokat untuk membantu mereka mengatasi masalah dan menawarkan solusi. Langkah pertama dalam mempersiapkan kampanye advokasi adalah mengidentifikasi masalah-masalah tersebut dan mengedukasi diri sendiri mengenai sebab dan akibatnya.

Masalah sering kali menyerupai struktur pohon: akarnya mewakili penyebab dan cabang-cabangnya mewakili dampaknya. Setelah kita mengidentifikasi dampak dan penyebab dari masalah kita, kita mungkin akan menemukan masalah lain yang harus diatasi. Kita perlu memprioritaskan dan memutuskan mana yang paling penting dan dapat diselesaikan secara realistis oleh advokasi kita. Masalah yang paling penting adalah masalah yang, jika dipecahkan, akan membawa kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat yang terkena dampak.

Bagi para advokat, masalah adalah situasi negatif yang mempengaruhi sekelompok orang. Masalah yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah atau praktik sosial biasanya tidak dapat diselesaikan oleh satu orang dan mungkin berakar secara historis. Komunitas atau masyarakat yang terkena dampak membutuhkan advokat untuk membantu mereka mengatasi masalah dan menawarkan solusi. Langkah pertama dalam mem-

persiapkan kampanye advokasi adalah mengidentifikasi masalah-masalah tersebut dan mengedukasi diri kita sendiri mengenai sebab dan akibatnya. Setiap masalah terdiri dari berbagai masalah yang berbeda. Sebuah isu advokasi yang "baik" adalah yang cukup terfokus sehingga dapat dikaitkan dengan situasi kebijakan/politik yang jelas dan dapat dengan mudah dikomunikasikan kepada banyak orang. salah satu metode identifikasi masalah adalah dengan melihat penyebab, akibat dan solusi yang mungkin untuk masalah tersebut. memeriksa konsekuensi menunjukkan bagaimana masalah tersebut mempengaruhi kehidupan masyarakat. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi konstituen dan nantinya akan membantu dalam memilih target dan pesan untuk penjangkauan.

2. Penelitian

Penelitian adalah langkah penting dalam mempersiapkan kampanye advokasi kita. Penelitian yang objektif akan mendidik kita dan para pendukung kita tentang sebab dan akibat dari suatu masalah. Banyak kampanye yang melakukan kesalahan dengan melaksanakan kegiatan advokasi tanpa terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap masalahnya.

Kita harus memiliki informasi yang lengkap mengenai masalah yang ada jika kita berharap untuk membujuk orang dan institusi untuk mengubah kebijakan menjadi lebih baik. Ingatlah, informasi adalah sebuah kekuatan dan penelitian menyediakan informasi. Untungnya, banyak informasi yang tersedia bagi kita di Internet, di perpustakaan, departemen-departemen pemerintah, dan LSM.

Penelitian dapat dilakukan melalui:

- a. Kuesioner dan survei
- b. Wawancara informal
- c. Kajian dokumentasi
- d. Observasi
- e. Kelompok-kelompok fokus/FGD

Penelitian merupakan langkah penting dalam mempersiapkan kampanye atau kegiatan advokasi. Penelitian yang cermat dan obyektif akan memberikan informasi kepada para advokat dan pendukungnya mengenai sebab dan akibat (konsekuensi) dari suatu masalah. Banyak juru kampanye yang melakukan kesalahan dengan melaksanakan kegiatan advokasi tanpa melakukan penelitian terhadap masalah yang ada. Para advokat harus memiliki informasi yang lengkap mengenai masalah yang dihadapi jika mereka berharap dapat membujuk orang dan lembaga untuk mengubah kebijakan menjadi lebih baik. Orang yang mengadvokasi suatu masalah atau isu, harus dapat menjawab pertanyaan Apa, Bagaimana, Kapan, Dimana dan yang paling penting adalah Mengapa. Ingatlah, informasi adalah kekuatan dan satu-satunya cara untuk mendapatkan kekuatan ini adalah melalui penelitian.

Untungnya, ada banyak informasi yang tersedia di internet, di perpustakaan, kantor pemerintah dan melalui LSM. Para advokat tidak boleh bergantung pada satu sumber informasi dan harus mendapatkan fakta dan rincian melalui berbagai teknik. Akan tetapi, tidak ada yang dapat menggantikan pendengaran langsung dari kelompok yang terkena dampak. Ada banyak hal yang dapat dipelajari dari melakukan wawancara, menggunakan kuesioner dan survei, serta mengadakan diskusi kelompok terarah. Hanya dengan mengamati bagaimana kelompok yang terkena dampak mengelola dan hidup dengan masalah yang ada akan sangat membantu penelitian dan membantu mengidentifikasi solusi.

Informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus diintegrasikan ke dalam kegiatan kampanye advokasi. Menarik perhatian media dengan mengadakan konferensi pers dan menulis siaran pers dapat membantu mengkomunikasikan informasi tersebut kepada khalayak yang lebih luas. Pastikan bahwa Anda telah melakukan penelitian dengan baik dan informasinya akurat.

3. Rencana

Setelah kita mengidentifikasi masalah, melakukan penelitian, dan menentukan bahwa advokasi akan menjadi respon yang paling efektif untuk menghasilkan perubahan positif, kita harus merencanakan kampanye. Kita memulai proses perencanaan dengan memilih tujuan, sasaran, indikator, target, pemangku kepentingan, dan kegiatan.

a. Tujuan

Mengartikulasikan perubahan yang diinginkan dalam kebijakan atau praktik yang ingin kita capai dalam jangka waktu tertentu.

b. Sasaran

Mendefinisikan apa yang akan dicapai, dengan siapa, bagaimana, dan dalam jangka waktu berapa lama. Tujuan tersebut harus menghasilkan perubahan perilaku yang signifikan dan terukur pada masyarakat. Strategi advokasi biasanya memiliki lebih dari satu tujuan yang memandu berbagai kegiatan. Tujuan yang baik haruslah SMART (Spesifik, Terukur, Dapat Dicapai, Realistis, Terikat waktu)

c. Indikator

Adalah tanda-tanda yang memberi tahu kita bahwa kita membuat kemajuan menuju tujuan kita. Semua indikator yang baik harus bersifat langsung, jelas, praktis dan dapat diandalkan.

Indikator adalah tanda bahwa para pendukung mengetahui bagaimana mereka berkembang menuju tujuan mereka. Semua indikator yang baik harus bersifat Langsung, Jelas, Praktis dan Dapat Diandalkan.

Indikator langsung hanya mengukur satu hal pada satu waktu. Sebagai contoh, seorang advokat mencoba mempelajari tingkat pendapatan suatu populasi tertentu. Indikator langsung adalah melacak pendapatan rumah tangga selama periode waktu tertentu. Informasi ini dapat diperoleh melalui laporan pemerintah atau laporan independen. Terkadang indikator langsung tidak tersedia. Sebagai contoh, di daerah pedesaan mungkin sulit

untuk mendapatkan statistik tingkat pendapatan. Sebagai alternatif, persentase rumah tangga desa yang memiliki radio atau sepeda dapat dianggap sebagai indikator pengganti kekayaan. Indikator pengganti ini disebut indikator proksi.

Untuk lebih memahami bagaimana kegiatan-kegiatan tersebut efektif, mungkin perlu untuk memisahkan indikator-indikator tersebut ke dalam kategori-kategori yang berbeda. Indikator-indikator tersebut dapat dibagi ke dalam kategori-kategori seperti jenis kelamin, usia, lokasi, tingkat pendidikan, atau karakteristik lainnya. Hal-hal ini diklasifikasikan sebagai indikator yang berbeda. Indikator-indikator yang berbeda akan menunjukkan dengan jelas siapa yang mendapatkan manfaat dan berpartisipasi dalam kegiatan advokasi.

Sebuah indikator dikatakan praktis jika data dapat diperoleh dengan mudah dan dengan biaya yang masuk akal. Selain murah dan mudah didapat, jumlah berita di surat kabar yang diterbitkan mengenai kampanye advokasi merupakan contoh yang baik untuk indikator praktis. Indikator ini bersifat nyata dan mudah didokumentasikan.

Indikator yang dapat diandalkan memberikan informasi yang dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan yang tepat. Banyak indikator yang didasarkan pada angka-angka dan statistik, seperti angka-angka pendapatan rumah tangga, yang berarti bahwa indikator-indikator tersebut mudah dipahami dan dievaluasi. Namun, ada banyak indikator lain yang didasarkan pada pengalaman atau pendapat pribadi masyarakat. Pendapat-pendapat ini tidak selalu jelas dan tidak dapat dianggap dapat diandalkan karena bisa jadi berdasarkan prasangka atau dugaan. Sebagai contoh, jika kelompok yang terkena dampak ditanyai bagaimana perasaan mereka tentang suatu masalah, mungkin ada berbagai macam pendapat yang diungkapkan.

Jika tidak ada konsensus di dalam kelompok, mungkin akan sulit untuk menemukan indikator yang mewakili kemajuan menuju

tujuan dan sasaran. Tidak selalu mungkin untuk menemukan indikator, baik berdasarkan angka atau fakta maupun berdasarkan pengalaman yang sesuai dengan keempat karakteristik di atas. Para pendamping harus menyadari hal ini dan mencari sebanyak mungkin dari keempat karakteristik tersebut.

d. Target

Ketika mengidentifikasi sekutu dan lawan, para advokat perlu mempertimbangkan tingkat pengaruh yang dimiliki oleh setiap pemangku kepentingan terhadap masalah tersebut. Orang-orang yang terkena dampak dari fokus kampanye advokasi tentu saja merupakan pemangku kepentingan, namun seringkali mereka tidak memiliki kemampuan untuk secara langsung mengubah kebijakan. Setiap pemangku kepentingan yang terdaftar memiliki pengaruh yang tinggi terhadap suatu masalah terlepas dari kesepakatan dengan posisi tersebut adalah target. Target dibagi menjadi dua kelompok:

1. Target primer

Adalah orang yang memiliki kekuatan paling besar untuk secara langsung mengatasi masalah kita. Kita mungkin tidak memiliki akses kepada orang tersebut atau mungkin ada risiko politik yang besar bagi mereka untuk mendukung kita secara terbuka.

Sasaran Utama adalah para pengambil keputusan individu yang memiliki kekuasaan paling besar untuk menanggapi tuntutan advokasi dan mengatasi masalah tersebut. Namun demikian, mungkin sulit atau tidak mungkin untuk mendapatkan akses kepada orang tersebut atau mungkin terdapat risiko politik yang terlalu besar untuk mendapatkan dukungan dari orang tersebut.

2. Target sekunder

Adalah orang yang tidak dapat menyelesaikan masalah secara langsung, namun memiliki kemampuan untuk mempengaruhi target primer.

Seseorang yang tidak dapat menyelesaikan masalah secara langsung namun memiliki kemampuan untuk mempengaruhi target primer adalah target sekunder. Jika orang ini dapat dipengaruhi, mereka juga dapat mempengaruhi target primer.

Dalam pemerintahan, Anggota Parlemen atau Menteri adalah orang yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi - mereka adalah target primer. Target sekunder yang dapat mempengaruhi mereka adalah donor internasional, media, staf dan politisi di partai mereka.

Sangat penting bagi keberhasilan kampanye untuk mengidentifikasi Sekutu dan Lawan. Sekutu adalah individu-individu dan organisasi-organisasi yang mendukung advokasi dengan berbagai cara dan tingkatan. Lawan adalah individu dan organisasi berpengaruh yang menentang advokasi. Lawan-lawan ini dapat berupa pembangkang ringan hingga musuh langsung. Kenali siapa saja teman-teman Anda!

Ingatlah bahwa ada banyak sisi untuk setiap masalah dan beberapa target mungkin merupakan lawan. Salah satu bidang penelitian yang harus dilakukan adalah menentukan opini target (baik primer maupun sekunder) mengenai topik advokasi. Dengan demikian, para advokat dapat lebih siap untuk menemukan titik temu dalam menghadapi argumen-argumen tersebut. Penelitian faktual, kemampuan untuk memahami kepentingan target dan kemampuan persuasi advokat akan membantu mengubah opini target dan memberikan mereka motivasi untuk mengubah posisi mereka.

e. Rencana

Setelah target telah dipilih, selanjutnya adalah memilih kegiatan. Kegiatan yang dipilih akan sangat bergantung pada sumber daya dan hubungan dengan target. Kegiatan yang paling mahal belum tentu yang paling efektif dalam mencapai sasaran. Metode terbaik

adalah metode yang partisipatif, hemat biaya dan menjangkau sebanyak mungkin orang, terutama mereka yang paling miskin atau tidak memiliki hak.

Setelah melakukan analisis menyeluruh terhadap tujuan, sasaran, indikator, target dan kegiatan, semua ini harus disatukan ke dalam Rencana Aksi Kampanye Advokasi. Rencana ini akan membantu mengkonsolidasikan semua pemikiran dan upaya ke dalam kerangka kerja yang ringkas untuk kampanye dan memandu semua orang yang terlibat dalam pelaksanaannya.

f. Membangun Aliansi

Aliansi dan koalisi memperkuat advokasi dengan menyatukan kekuatan dan sumber daya dari berbagai kelompok untuk menciptakan suara yang lebih kuat untuk perubahan. Kolaborasi ini membantu masyarakat untuk sampai ke meja pengambilan keputusan melalui sumber daya yang terkumpul dan jaringan bersama. Aliansi yang efektif adalah aliansi yang bersifat sukarela, yang mendorong pertukaran informasi dan pelaksanaan kegiatan bersama yang memungkinkan para anggotanya untuk mempertahankan otonomi mereka sendiri.

Manfaat bekerja secara kolaboratif dalam sebuah koalisi antara lain:

1. Kekuatan dalam jumlah Bekerja bersama dapat menciptakan tekanan terhadap para pengambil keputusan dan legitimasi terhadap suatu isu dan dapat meningkatkan kemampuan individu untuk mengambil risiko yang diperhitungkan bersama kelompok.
2. Kekuatan dalam keragaman Berbagai macam perspektif dan konstituen menciptakan gambaran yang lebih luas dan menyeluruh mengenai suatu masalah; meningkatkan pemecahan masalah; memperkuat jangkauan dan pengaruh; dan meningkatkan kredibilitas.
3. Beban kerja dan sumber daya bersama Keragaman bakat, gaya kerja, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan

rencana aksi yang komprehensif dan untuk mengurangi beban pada satu organisasi

4. Kohesi dan solidaritas Nilai-nilai, tujuan dan pengalaman yang sama membantu para advokat mengatasi keterasingan, membangun kepercayaan diri dan memperbaharui keyakinan bahwa perubahan itu mungkin terjadi.
5. Demokrasi dalam aksi Koalisi memberikan kesempatan untuk mempraktekkan pada tingkat yang lebih kecil keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk demokrasi yang kuat - seperti rasa hormat, transparansi, akuntabilitas, kesetaraan, dan komitmen untuk bekerja sama dengan berbagai kelompok masyarakat.

Namun, kita juga perlu hati-hati. Membangun aliansi juga memiliki jebakan. Jebakan dalam Koalisi, seperti:

1. Perbedaan visi tentang tujuan dan sasaran
 2. Kolaborasi dan kompromi menyita waktu yang berharga
 3. Investasi sumber daya lebih besar daripada manfaat yang diterima
 4. Kekuasaan pengambilan keputusan bersama mengakibatkan para anggota enggan mengambil alih kendali
 5. Organisasi kehilangan identitas mereka sendiri
 6. Koalisi menjadi terlalu besar dan birokratis untuk berfungsi
 7. Alih-alih bekerja sama, para anggota akhirnya bersaing untuk mendapatkan sumber daya dari luar
- g. Siapapun yang memiliki kepentingan langsung terhadap hasil kampanye advokasi kita disebut "pemangku kepentingan".

Pemangku kepentingan meliputi orang-orang yang terkena dampak langsung dari suatu masalah, kelompok-kelompok yang bertanggung jawab atas timbulnya masalah, dan kelompok-kelompok yang tertarik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pemangku kepentingan dapat dibagi menjadi tiga kelompok: sekutu, netral, dan lawan.

h. Setelah kita memilih target, kita perlu memilih kegiatan-kegiatan kita.

Kegiatan-kegiatan yang kita pilih akan sangat tergantung pada sumber daya dan hubungan kita dengan target. Pilihan yang paling mahal belum tentu yang paling efektif untuk mencapai target kita. Metode yang terbaik adalah yang partisipatif, hemat biaya, dan menjangkau sebanyak mungkin orang, terutama mereka yang paling miskin dan tidak memiliki hak.

4. Bertindak (Act)

Setelah menulis rencana aksi kampanye advokasi, kami siap untuk mulai mengimplementasikan kegiatan-kegiatan kampanye kami. Namun, sebelum kita memulai serangkaian kegiatan yang telah kita pilih, kita perlu membuat prioritas. Beberapa kegiatan dapat dilakukan kapan saja, beberapa kegiatan mungkin memerlukan kegiatan lain yang dilakukan terlebih dahulu, dan beberapa kegiatan lainnya harus dilakukan pada tanggal atau waktu tertentu. Kegiatan kampanye akan memiliki dampak yang lebih besar jika kita merencanakannya terlebih dahulu.

Setelah mempersiapkan rencana aksi kampanye advokasi dan membangun aliansi yang diperlukan, sekarang saatnya untuk melakukan advokasi itu sendiri dan membawa pesan tersebut kepada kelompok-kelompok sasaran. Namun, sebelum memulai serangkaian kegiatan yang dipilih, para advokat perlu memprioritaskan kegiatan-kegiatan tersebut. Beberapa kegiatan dapat dilakukan kapan saja, sementara yang lain mungkin memerlukan waktu yang tepat untuk menyesuaikan dengan kegiatan-kegiatan di luar, yang mungkin atau mungkin tidak berhubungan langsung dengan kampanye advokasi.

Semua kegiatan yang dilaksanakan harus memiliki hasil, indikator, dan jika perlu, anggaran.

5. Monitoring dan Evaluasi

Selain rencana aksi yang dapat dilakukan dan dipikirkan dengan matang, semua kampanye advokasi yang berhasil harus secara

teratur memantau, mengevaluasi dan mendapatkan umpan balik mengenai perkembangan kampanye tersebut. Dengan melakukan hal ini, kita dapat melakukan penyesuaian tepat waktu terhadap rencana kita untuk menyesuaikan diri dengan perubahan situasi.

Monitoring, evaluasi dan umpan balik juga merupakan sarana bagi kita untuk memeriksa akuntabilitas. Kita harus selalu memastikan bahwa masyarakat adat mendapatkan informasi yang lengkap dan terkini tentang bagaimana kita melakukan kampanye advokasi. Melakukan pemantauan dan evaluasi adalah salah satu cara agar kita dapat menginformasikan kepada anggota masyarakat bahwa apa yang kita lakukan mengalami kemajuan dan mencapai tujuan kita, atau tidak berjalan dengan baik, sehingga kita perlu membuat perubahan dalam rencana kita. Semua kampanye advokasi yang berhasil memiliki komitmen yang kuat untuk secara teratur memantau dan mengevaluasi upaya-upaya mereka. Melalui pemantauan dan evaluasi, kita dapat menyesuaikan rencana aksi untuk merefleksikan pelajaran yang telah kita pelajari di tengah-tengah kampanye. Pemantauan membandingkan *input*, *output*, dan hasil terhadap rencana aksi kampanye advokasi kami. Evaluasi adalah tahap analisis terhadap informasi yang telah kita kumpulkan selama proses pemantauan yang dilakukan secara berkala.

Mengumpulkan informasi untuk mengukur dampak dari kampanye advokasi disebut Pemantauan. Pemantauan membandingkan *Input* (sumber daya manusia, material, dan keuangan), *Output* (kegiatan, produk), dan Hasil (pencapaian) terhadap rencana aksi kampanye advokasi. Agar pemantauan menjadi efektif, pemantauan harus benar-benar terintegrasi ke dalam semua fase kampanye advokasi. Ketika pemantauan dilakukan secara teratur, kita dapat mengetahui apakah kegiatan-kegiatan tersebut membantu pencapaian tujuan.

Program pemantauan yang sukses akan memberikan sumber informasi yang kaya mengenai suatu kampanye dan memastikan adanya akuntabilitas. Sebagai contoh, untuk melihat apakah sebuah

kampanye media berhasil, seseorang perlu menyimpan catatan liputan pers. Untuk melihat apakah upaya-upaya lobi telah berhasil, seseorang harus menghitung surat-surat dukungan dari target.

Secara berkala selama kampanye advokasi, kita perlu menganalisis informasi yang dikumpulkan selama proses pemantauan. Hal ini disebut evaluasi. Evaluasi membantu dalam pemikiran kritis tentang kekuatan dan kelemahan. Dengan menggunakan indikator-indikator dari rencana aksi kampanye advokasi, seseorang dapat menilai apa yang telah dicapai dan seberapa baik sumber daya telah digunakan. Data monitoring juga dapat mengindikasikan perubahan dalam struktur kekuasaan, sekutu dan lawan atau bahkan masalah itu sendiri. Kita harus siap untuk menyesuaikan rencana aksi kampanye advokasi, bahkan ketika kampanye sedang berlangsung, untuk merefleksikan hasil evaluasi.

Gambar 5. Proses Monitoring



Ketika kami melakukan pemantauan, kami mengumpulkan informasi agar kami dapat mengukur dampak dari kampanye advokasi kami. Kami juga memantau untuk memastikan bahwa kegiatan kami dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu. Ketika kita memantau, kita juga dapat melihat masalah yang muncul dan dapat segera mengatasinya.

Pertanyaan-pertanyaan panduan yang dapat membantu kami melakukan pemantauan adalah sebagai berikut:

- a. Apakah kita sudah melakukan hal-hal yang kita katakan akan kita lakukan?
- b. Jika belum, mengapa tidak?
- c. Kegiatan apa yang perlu kita ubah?

Pemantauan harus dilakukan pada semua tahapan kampanye kita. Ingatlah bahwa ketika kita melakukan pemantauan, kita dapat mengetahui apakah kegiatan kita membantu kita mencapai tujuan. Selain itu, pemantauan juga dapat memberikan kita informasi yang berharga tentang kampanye kita.

Sebagai contoh, jika kita meluncurkan sebuah kampanye media, kita dapat mengukur seberapa suksesnya kampanye tersebut dari jumlah siaran pers yang dimuat di koran. Atau dengan jumlah penandatanganan yang kita kumpulkan dalam kampanye penandatanganan petisi.

Evaluasi sedikit lebih rumit daripada pemantauan karena kita ingin melihat dampak dari kegiatan kita. Hal ini melibatkan analisis informasi yang telah kita kumpulkan ketika kita memantau kampanye kita. Evaluasi sangat penting karena hal ini memberi kita gambaran tentang kekuatan dan kelemahan kita dan seberapa jauh kita mencapai tujuan kita. Hal ini juga memberikan kita dasar yang diperlukan untuk menyesuaikan atau membuat rencana jika diperlukan.

Di sinilah indikator-indikator tersebut akan terbukti berguna. Ketika kita mengevaluasi, indikator-indikator tersebut akan menunjukkan apa yang telah kita capai dan juga dapat menunjukkan bagaimana sumber daya kita digunakan. Pertanyaan-pertanyaan panduan yang dapat membantu kita dalam melakukan evaluasi adalah sebagai berikut:

- a) Apakah kita telah mencapai tujuan kita?
- b) Jika belum, mengapa tidak?
- c) Apa yang perlu diubah dalam strategi sebagai hasilnya?

G. Pertanyaan-Pertanyaan Untuk Membangun Strategi Advokasi

Terdapat banyak kerangka kerja perencanaan strategi advokasi yang berbeda. Toolkit ini menggunakan 'Model Sembilan Pertanyaan untuk Perencanaan Strategi'. Model ini akan membawa Anda, selangkah demi selangkah, mulai dari mengidentifikasi isu-isu inti yang ingin Anda advokasikan, hingga menyusun rencana aksi spesifik untuk mengimplementasikan pekerjaan advokasi Anda. Model ini berguna untuk perencanaan advokasi strategis jangka panjang untuk membangun lingkungan yang mendukung evaluasi; namun, model ini juga merupakan daftar periksa yang berguna untuk membuat tanggapan advokasi yang cepat untuk mempromosikan kebijakan dan sistem evaluasi nasional. Model ini dapat diterapkan pada aksi advokasi di semua tingkatan: lokal, nasional, regional dan global.

Sembilan pertanyaan untuk perencanaan advokasi strategis adalah:

1. Apa yang kita inginkan? (Tujuan)
2. Bagaimana cara mendapatkannya? Siapa yang dapat memberikannya kepada kita? (Khalayak)
3. Apa yang perlu mereka dengar? (Pesan)
4. Dari siapa mereka perlu mendengarnya? (Penyampai pesan)
5. Bagaimana kita membuat mereka mendengarnya? (Penyampaian)
6. Apa yang kita miliki? (Sumber daya; kekuatan)
7. Apa yang perlu kita kembangkan? (Tantangan; kesenjangan)
8. Bagaimana kita memulainya? (Langkah pertama)
9. Bagaimana kita tahu bahwa hal tersebut berhasil atau tidak berhasil? (Monitoring dan Evaluasi)

Lima pertanyaan pertama membantu menilai lingkungan advokasi eksternal. Empat pertanyaan terakhir menilai lingkungan advokasi internal dan apa yang perlu dilakukan sebelum tindakan dapat dilakukan.

Pengalaman menunjukkan bahwa advokasi jarang sekali merupakan suatu proses yang teratur dan linier. Beberapa organisasi advokasi yang paling sukses beroperasi dalam lingkungan yang kacau, mengambil kesempatan ketika kesempatan itu muncul. Namun demikian, kemampuan untuk memanfaatkan peluang tidak mengurangi pentingnya proses yang baik dan perencanaan yang matang. Melihat advokasi dengan cara yang sistematis akan membantu Anda merencanakan strategi advokasi yang efektif.

Meskipun Anda tidak harus membahas kesembilan pertanyaan tersebut secara berurutan, Anda perlu meninjau kembali pertanyaan-pertanyaan tersebut secara konstan ketika Anda merencanakan dan mengimplementasikan strategi Anda. Sebagai contoh, menetapkan tujuan dan hasil sementara, memperjelas perubahan apa yang ingin Anda wujudkan, sering kali merupakan bagian tersulit dari proses perencanaan advokasi. Anda mungkin harus sering meninjau kembali tahap ini saat Anda menganalisis target advokasi, pesan, dan rencana aksi Anda. Anda juga perlu terus menganalisis lingkungan advokasi dan mengumpulkan bukti saat Anda menjalani proses perencanaan dan hal ini dapat membuat Anda terus memodifikasi rencana Anda. Bersikap fleksibel dan menyesuaikan perencanaan Anda dengan keadaan yang berubah-ubah adalah penting dan efektif.

Kebingungan yang sering terjadi dalam pengembangan strategi advokasi adalah perbedaan antara "strategi" dan "taktik". Taktik adalah tindakan atau aktivitas advokasi yang spesifik - misalnya mengedarkan petisi, menulis surat kepada para pembuat kebijakan, memberikan wawancara kepada media - yang dilakukan untuk menarik perhatian orang-orang yang berkuasa dalam kaitannya dengan isu Anda. Strategi adalah sebuah peta keseluruhan yang memandu penggunaan taktik-taktik tersebut untuk mencapai tujuan yang jelas. Strategi adalah sebuah penilaian yang cermat mengenai di mana Anda berada, ke mana Anda ingin pergi, dan bagaimana Anda dapat mencapainya.

H. Monitoring dan Evaluasi Advokasi

Mengumpulkan informasi untuk mengukur dampak kampanye advokasi kita disebut "pemantauan". Pemantauan membandingkan *input* (sumber daya manusia, material dan keuangan), *output* (kegiatan, produk), dan hasil (pencapaian) terhadap rencana aksi kampanye advokasi kita. Agar pemantauan menjadi efektif, pemantauan harus benar-benar terintegrasi ke dalam semua fase kampanye advokasi kita. Ketika kita melakukan pemantauan secara teratur, kita dapat mengetahui apakah kegiatan kita membantu kita mencapai tujuan. Program pemantauan yang sukses akan memberikan kita sumber informasi yang kaya tentang kampanye kita dan memastikan akuntabilitas.

Secara berkala selama kampanye advokasi, kita perlu menganalisa informasi yang telah kita kumpulkan selama proses pemantauan. Hal ini disebut evaluasi. Evaluasi akan membantu kita untuk berpikir kritis tentang kekuatan dan kelemahan kita. Dengan menggunakan indikator-indikator dari rencana aksi kampanye advokasi, kita dapat menilai apa yang telah dicapai dan seberapa baik sumber daya yang telah digunakan. Data pemantauan kita juga dapat mengindikasikan perubahan dalam struktur kekuasaan, sekutu dan lawan, atau bahkan masalah itu sendiri. Kita harus siap untuk menyesuaikan rencana aksi kampanye advokasi kita, bahkan ketika kampanye sedang berlangsung, untuk merefleksikan hasil evaluasi kita.

I. Faktor-Faktor Advokasi yang Efektif/Elemen Dasar Advokasi

Efektivitas advokasi dipengaruhi sejumlah faktor, seperti:

a. Tujuan

Tujuan dalam setiap kegiatan advokasi harus realistis, dapat dicapai dan terukur. Ini adalah salah satu faktor pertama yang harus dipahami oleh para pemangku kepentingan. Adalah tidak realistis untuk mencoba mengatasi masalah yang sangat besar dengan sumber daya yang terbatas dan dalam waktu yang ditentukan, dan itulah sebabnya tujuan dari setiap kegiatan advokasi

harus sesuai dengan jangka waktu yang direncanakan dan sebisa mungkin menggunakan dana yang minimum.

Masalah bisa sangat kompleks. Agar upaya advokasi dapat berhasil, tujuan harus dipersempit menjadi tujuan advokasi yang didasarkan pada jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti Dapatkah isu tersebut menyatukan berbagai kelompok yang beragam menjadi sebuah koalisi yang kuat? Apakah tujuan tersebut dapat dicapai? Apakah tujuan tersebut akan benar-benar mengatasi masalah?

b. Data

Untuk melakukan intervensi secara strategis dalam melakukan perubahan, informasi yang benar merupakan faktor kunci. Organisasi harus memiliki informasi yang memadai mengenai masalah tersebut, termasuk apa yang telah dilakukan, apa yang akan dilakukan oleh pihak lain, sejauh mana masalah tersebut menjadi perhatian, dan bukti-bukti masalah di lapangan. Informasi ini penting untuk meyakinkan para pemangku kepentingan.

Data dan penelitian sangat penting untuk membuat keputusan yang tepat saat memilih masalah yang akan ditangani, mengidentifikasi solusi untuk masalah tersebut, dan menetapkan tujuan yang realistis. Selain itu, data yang baik itu sendiri dapat menjadi argumen yang paling persuasif. Dengan adanya data, dapatkah Anda secara realistis mencapai tujuan? Data apa yang dapat digunakan untuk mendukung argumen Anda?

c. Audiens

Kegiatan advokasi harus menysasar khalayak yang spesifik. Jika bertujuan untuk perubahan perilaku, maka harus menysasar kelompok yang membutuhkan perubahan. Jika bertujuan untuk perubahan kebijakan, maka harus menysasar para pembuat kebijakan dan semua orang/kelompok yang dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan. Jika bertujuan untuk perubahan legislatif, maka harus menargetkan orang/kelompok yang menjadi bagian

dari proses pembuatan undang-undang, dll. Menargetkan audiens yang salah tidak akan memberikan hasil yang diinginkan.

Setelah isu dan tujuan dipilih, upaya advokasi harus diarahkan kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan dan, idealnya, kepada orang-orang yang mempengaruhi para pengambil keputusan seperti staf, penasihat, sesepuh yang berpengaruh, media, dan masyarakat. Siapa saja nama-nama pengambil keputusan yang dapat membuat tujuan Anda menjadi kenyataan? Siapa dan apa yang mempengaruhi para pengambil keputusan ini?

d. Pesan

Pesan (perubahan yang ditargetkan) harus jelas bagi audiens. Audiens harus memahami pesan tersebut agar dapat menindaklanjutinya. Pesan tersebut harus jelas, tepat, informatif, dan benar. Pesan tersebut juga harus disampaikan dalam bahasa yang sesuai, menarik, meyakinkan dan secara khusus difokuskan pada kelompok tertentu.

Audiens yang berbeda menanggapi pesan yang berbeda. Sebagai contoh, seorang politisi mungkin akan termotivasi ketika ia mengetahui berapa banyak orang di distriknya yang peduli dengan masalah tersebut. Seorang Menteri Kesehatan atau Pendidikan mungkin akan mengambil tindakan ketika dia diberikan data terperinci tentang prevalensi masalah tersebut. Pesan apa yang akan membuat audiens yang dipilih untuk bertindak atas nama Anda?

e. Membangun jaringan

Kegiatan advokasi sangat bergantung pada dukungan dari berbagai kelompok dalam masyarakat agar dapat memberikan dampak yang signifikan. Kelompok-kelompok yang menangani masalah yang sama adalah yang terbaik untuk memulai, dan kemudian kelompok-kelompok lain dapat diyakinkan untuk bergabung.

Seringkali, kekuatan advokasi ditemukan dalam jumlah orang yang mendukung tujuan Anda. Terutama ketika demokrasi dan advokasi merupakan fenomena baru, melibatkan banyak orang yang mewakili berbagai kepentingan dapat memberikan keamanan bagi advokasi serta membangun dukungan politik. Bahkan di dalam sebuah organisasi, membangun koalisi internal, seperti melibatkan orang-orang dari berbagai departemen dalam mengembangkan sebuah program baru, dapat membantu membangun konsensus untuk bertindak. Siapa lagi yang dapat Anda ajak untuk bergabung dalam perjuangan Anda? Siapa lagi yang bisa menjadi sekutu?

f. Penggalangan dana

Sumber daya merupakan elemen penting dalam setiap kegiatan advokasi. Sumber daya ini dapat diperoleh melalui berbagai strategi termasuk pendekatan kepada donor, pemerintah, masyarakat, sektor swasta, individu, dll. Dana sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan dapat dilaksanakan secara tepat waktu.

Sebagian besar kegiatan, termasuk advokasi, membutuhkan sumber daya. Mempertahankan upaya advokasi yang efektif dalam jangka panjang berarti menginvestasikan waktu dan energi untuk menggalang dana atau sumber daya lain untuk mendukung pekerjaan Anda. Bagaimana Anda dapat mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan upaya advokasi Anda?

g. Membuat Presentasi Persuasif

Kesempatan untuk mempengaruhi audiens kunci sering kali terbatas. Seorang politisi mungkin akan memberikan Anda satu kali pertemuan untuk mendiskusikan masalah Anda, atau seorang menteri mungkin hanya memiliki waktu lima menit di sebuah konferensi untuk berbicara dengan Anda. Persiapan yang cermat dan menyeluruh dari argumen yang meyakinkan dan gaya presentasi dapat mengubah kesempatan singkat ini menjadi advokasi yang sukses. Jika Anda memiliki satu kesem-

patan untuk menjangkau pengambil keputusan, apa yang ingin Anda sampaikan dan bagaimana cara menyampaikannya?

h. **Monitoring dan Evaluasi**

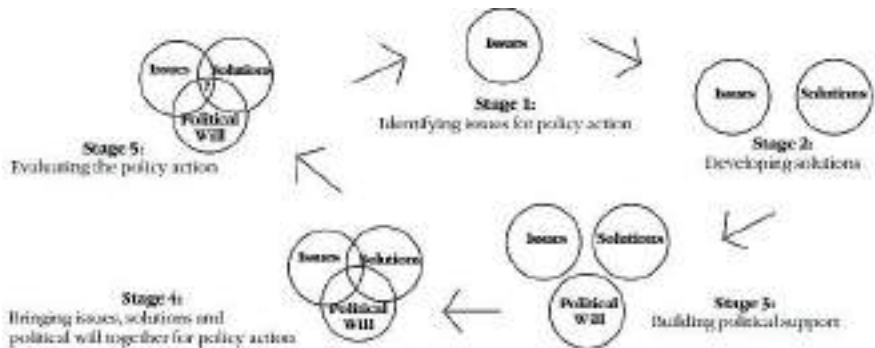
Untuk mengukur sejauh mana pencapaian yang telah dilakukan, kegiatan advokasi harus dipantau dan dievaluasi secara berkesinambungan. Pelajaran yang didapat dari evaluasi/pemantauan dapat digunakan untuk memperbaiki strategi intervensi di masa depan. Evaluasi juga akan menunjukkan apakah strategi yang digunakan berhasil atau tidak.

Bagaimana Anda mengetahui bahwa Anda telah berhasil mencapai tujuan advokasi Anda? Bagaimana strategi advokasi Anda dapat ditingkatkan? Menjadi advokat yang efektif membutuhkan umpan balik dan evaluasi yang berkelanjutan atas upaya Anda.

J. Kerangka Kerja Konseptual untuk Advokasi

Advokasi merupakan proses dinamis yang melibatkan serangkaian aktor, gagasan, agenda, dan politik yang terus berubah. Proses yang memiliki banyak aspek ini, bagaimanapun, dapat dibagi menjadi lima tahap yang berubah-ubah: identifikasi masalah, perumusan dan pemilihan solusi, peningkatan kesadaran, aksi kebijakan, dan evaluasi. Tahapan-tahapan ini harus dilihat sebagai sesuatu yang berubah-ubah karena dapat terjadi secara simultan atau progresif. Selain itu, proses tersebut dapat terhenti atau berbalik arah.

Gambar 6. Proses Advokasi yang Dinamis



Sumber: Diadaptasi dari *Knowledge Utilization and the Process of Policy Formulation: Toward a Framework for Africa*

Tahap pertama adalah identifikasi masalah untuk aksi kebijakan. Tahap ini juga disebut sebagai penyusunan agenda. Ada banyak sekali masalah yang membutuhkan perhatian, namun tidak semua masalah tersebut dapat dimasukkan ke dalam agenda aksi. Para advokat memutuskan masalah mana yang akan ditangani dan berusaha untuk membuat lembaga sasaran menyadari bahwa masalah tersebut perlu ditindaklanjuti.

Tahap kedua, perumusan solusi, berjalan dengan cepat. Para advokat dan aktor-aktor kunci lainnya mengusulkan solusi untuk masalah tersebut dan memilih solusi yang layak secara politis, ekonomi, dan sosial.

Tahap ketiga, membangun kemauan politik untuk bertindak terhadap masalah serta solusinya, merupakan inti dari advokasi. Tindakan-tindakan yang dilakukan pada tahap ini termasuk membangun koalisi, bertemu dengan para pengambil keputusan, membangun kesadaran, dan menyampaikan pesan-pesan yang efektif.

Tahap keempat, aksi kebijakan, terjadi ketika suatu masalah dikenali, solusinya diterima dan ada kemauan politik untuk bertindak, semuanya pada saat yang bersamaan. Tumpang tindih ini biasanya merupakan kesempatan singkat yang harus dimanfaatkan oleh para

advokat. Pemahaman mengenai proses pengambilan keputusan dan strategi advokasi yang solid akan meningkatkan kemungkinan terciptanya peluang untuk bertindak.

Tahap terakhir, evaluasi, sering kali tidak dilakukan, meskipun hal ini penting. Para advokat yang baik menilai efektivitas dari upaya-upaya mereka di masa lalu dan menetapkan tujuan-tujuan baru berdasarkan pengalaman mereka. Para advokat dan lembaga yang mengadopsi perubahan kebijakan harus secara berkala mengevaluasi efektivitas perubahan tersebut

K. Lima Perilaku yang Baik dari Seorang Advokat

Selaku advokat yang memperjuangkan kepentingan-kepentingan publik, maka kita harus memiliki lima perilaku berikut:

a. Dorong Partisipasi

Libatkan sebanyak mungkin orang dalam pengambilan keputusan selama kampanye advokasi. Setiap peserta akan membawa keahlian, kontak, sumber daya dan ide yang berbeda. Ketika kita mendorong partisipasi, kita memberikan rasa memiliki kepada kelompok yang terkena dampak terhadap proses tersebut dan pada akhirnya meningkatkan kemungkinan keberhasilan.

b. Memastikan Legalitas

Agar sah, semua kampanye advokasi harus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan komunitas yang diwakilinya. Hal ini dilakukan dengan menghormati berbagai pendapat dan pengalaman individu dalam kelompok yang terkena dampak.

c. Bertanggungjawab

Kita bertanggung jawab ketika kita secara terbuka dan jujur mendiskusikan kemajuan (dan masalah) kampanye dengan kelompok-kelompok yang terkena dampak. Proses ini juga akan mengurangi godaan yang kita hadapi untuk menyalahgunakan kekuasaan dan akan membantu menghindari korupsi dalam kampanye advokasi kita.

d. Bertindak Damai

Jangan gunakan kekerasan untuk mencapai tujuan advokasi Anda. Kekerasan tidak akan pernah menjadi solusi jangka panjang yang berkelanjutan. Advokasi yang damai akan mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat dari para pendukung dan penentang Anda.

- e. Wakili kelompok yang terkena dampak
Dengarkan kelompok yang terkena dampak, kembangkan strategi bersama mereka, informasikan kepada mereka tentang risiko atau tantangan dan lakukan tindakan bersama. Jika memungkinkan, bangunlah kapasitas mereka untuk mengadvokasi atas nama mereka sendiri.

Monitoring Dan Evaluasi Pemberdayaan Desa

Terminologi Monitoring dan Evaluasi (M&E) menggambarkan sekelompok kegiatan dan indikator untuk mengukur keberhasilan proyek Pemberdayaan yang sedang berlangsung dalam kaitannya dengan output yang sebelumnya telah didefinisikan dengan jelas. Dengan memasukkannya ke dalam desain pemberdayaan sejak awal, kita dapat menilai kemajuan dan pencapaian sesuai dengan tujuan pemberdayaan.

Monitoring dan Evaluasi menawarkan cara yang nyata untuk memastikan bahwa proyek pemberdayaan dapat dipertanggungjawabkan, transparan, meminimalkan kerusakan lingkungan, dan secara aktif mengidentifikasi proses yang boros serta kinerja yang buruk. Strategi Monitoring dan Evaluasi yang baik pada akhirnya merupakan penilaian terhadap efektivitas pemberdayaan, dan dengan demikian harus dianggap sebagai aspek penting dari proses desain pemberdayaan.

Sebagai catatan, jika pemberdayaan dilakukan dengan melibatkan donor maka monitoring dan evaluasi harus dilakukan dengan hati-hati. Proses pemberdayaan tidak dapat dikontrol dan dikelola secara eksternal; jika donor menggunakan metode yang bersifat teknokratis dan mengontrol, maka akan menimbulkan dampak yang tidak diharapkan, yaitu disempowering. Monitoring dan Evaluasi (M&E) harus digunakan dengan hati-hati dalam konteks pemberdayaan. Donor harus menyeimbangkan antara fleksibilitas yang diperlukan dalam mendukung pemberdayaan dan perubahan sosial

dan kebutuhan mereka untuk menunjukkan hasil. Monitoring dan Evaluasi pemberdayaan dapat mendorong donor untuk mengakui bahwa mereka sendiri memiliki kekuasaan dan merefleksikan dampak yang ditimbulkannya terhadap proses pemberdayaan. Donor juga harus menyadari batas-batas kekuasaan mereka dalam struktur politik yang lebih besar. Metode partisipatif untuk Monitoring dan Evaluasi dapat menjadi efisien, menghasilkan data untuk analisis dan tindakan untuk mendukung pemberdayaan.

A. Mengapa Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Penting?

Para donor dan mitra semakin menyadari pentingnya Monitoring dan Evaluasi kebijakan dan program pembangunan. Monitoring dan Evaluasi dimaksudkan untuk memberikan kontribusi pada wawasan tentang apa yang berhasil dan tidak berhasil dan mengapa, dan harus memungkinkan perubahan program yang akan membuat donor dan mitra lebih efektif dalam mendukung pemberdayaan. Monitoring adalah fungsi berkelanjutan yang menggunakan pengumpulan data secara sistematis tentang indikator-indikator tertentu untuk memberikan indikasi kepada manajemen dan pemangku kepentingan dari intervensi pembangunan yang sedang berlangsung mengenai tingkat kemajuan dan pencapaian tujuan dalam penggunaan dana yang dialokasikan (OECD, 2002).

Di sisi lain, evaluasi adalah penilaian yang sistematis dan obyektif terhadap proyek, program atau kebijakan yang sedang berjalan atau yang telah selesai, desain, implementasi dan hasilnya. Tujuannya adalah untuk menentukan relevansi dan pemenuhan tujuan, efisiensi, efektivitas, dampak dan keberlanjutan pembangunan. Evaluasi harus memberikan informasi yang kredibel dan berguna, sehingga memungkinkan penggabungan pelajaran yang diperoleh ke dalam proses pengambilan keputusan baik bagi mitra maupun donor. Karena proses-proses ini melibatkan penentuan tujuan dan penentuan nilai atau signifikansi dari suatu intervensi pembangunan,

maka hubungan kekuasaan dipengaruhi oleh cara Monitoring dan Evaluasi dilakukan.

Para donor juga menyadari pentingnya intervensi yang berupaya memberdayakan masyarakat miskin dalam hubungan ekonomi, sosial, dan politik mereka. Mendorong pemberdayaan adalah tentang mengubah struktur dan institusi sambil mengembangkan kapasitas individu dan kelompok. Pemberdayaan terjadi "ketika individu dan kelompok yang terorganisir mampu membayangkan dunia mereka secara berbeda dan mewujudkan visi tersebut dengan mengubah relasi kekuasaan yang selama ini membuat mereka tetap berada dalam kemiskinan". Pemberdayaan melibatkan perubahan dalam hubungan. Seperti halnya banyak proses pembangunan, perubahan ini bukanlah perubahan sebab dan akibat yang sederhana di mana satu tindakan donor dapat dikaitkan dengan seperangkat keluaran dan hasil. Pemberdayaan bersifat kompleks, dinamis dan kontekstual, serta sulit untuk diamati dan diukur.

Pada saat yang sama, para donor semakin menyadari akuntabilitas mereka terhadap konstituen mereka sendiri-parlemen dan masyarakat-serta mereka yang ingin diberdayakan oleh program-program pemberdayaan (penerima manfaat) sehingga menekankan "mengelola untuk hasil." Mengingat semakin pentingnya menunjukkan hasil (kepada parlemen, manajer, dan pembayar pajak), maka risiko yang dihadapi para donor adalah mencari atribusi dan hasil-hasil yang dapat diukur, dengan mengorbankan dukungan terhadap proses pemberdayaan yang kompleks, berisiko, dan sulit diperkirakan.

Hal ini menimbulkan ketegangan bagi para donor antara mengadopsi peran yang fleksibel dan memungkinkan dalam mendukung proses pemberdayaan perubahan sosial (Guijt, 2007) dan kewajiban untuk menunjukkan hasil dan memenuhi aturan dan regulasi internal.

Karena ketegangan ini, monitoring dan evaluasi pemberdayaan dapat menjadi sangat baik atau sangat buruk. Dalam kondisi terbaiknya, monitoring dan evaluasi memungkinkan donor dan mitra untuk memahami peran mereka dan belajar dari pengalaman untuk

mempengaruhi perubahan di lapangan secara lebih efektif. Yang terburuk, monitoring dan evaluasi memperkuat kekuasaan donor dan melemahkan pihak lain-dalam hubungan mereka dengan para pemangku kepentingan di dalam negeri.

B. Apa yang Membuat Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Menjadi Sulit?

Monitoring pemberdayaan melibatkan pelacakan perubahan dalam hubungan. Hal ini, bukanlah perubahan sebab dan akibat yang sederhana, di mana hasil dari "peristiwa tunggal" dapat dikaitkan dengan serangkaian input dan output. Pemberdayaan bersifat kompleks, dinamis, dan kontekstual, serta sulit untuk diamati dan diukur.

Monitoring dan evaluasi dapat berdampak pada dinamika kekuasaan, antara donor dan mitra, serta manajer/evaluator dan pemangku kepentingan lokal. Oleh karena itu, para evaluator dan manajer adalah aktor dalam, dan juga pengamat dari, proses pemberdayaan.

Para donor lebih terbiasa mengukur dampak yang dapat diamati. Melihat perubahan (yang lebih sulit untuk diamati) dalam hubungan kekuasaan yang mungkin telah menghasilkan pergeseran-pergeseran ini, dapat mendukung pemahaman kita tentang bagaimana pemberdayaan terjadi. Mengevaluasi perubahan hubungan yang menghasilkan dampak terukur ini, memungkinkan donor untuk menguji asumsi mereka, bahwa intervensi mereka telah memberdayakan masyarakat.

Para donor yang berada di kantor-kantor perwakilan negara, sering kali memiliki pemahaman yang baik mengenai realitas sosial di negara mereka, namun menghadapi berbagai tantangan. Mereka dituntut untuk mengelola kemitraan lokal mereka dengan cara yang efektif dan memberdayakan serta melaporkan hasilnya sebagai bentuk akuntabilitas mereka terhadap atasannya. Keduanya penting dan berhubungan, tentu saja dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Selain itu, tekanan untuk menunjukkan hasil, sering kali

diterjemahkan sebagai tekanan untuk memberikan perhatian pada dampak yang dapat diamati secara sederhana.

Namun, hanya karena pemberdayaan itu rumit, bukan berarti kita harus menghindari Monitoringnya. Menyederhanakan kerumitan bisa berbahaya, tetapi sangat mungkin untuk menyajikan perubahan dalam hubungan kekuasaan dengan cara yang sederhana namun mendalam. Hal ini dapat dilakukan, misalnya, dengan menguraikan berbagai komponen pemberdayaan yang berbeda, yang berkaitan dengan individu, kelompok, organisasi, jaringan dan sistem (SDC, 2006).

C. Siapa yang Memonitoring dan Mengevaluasi Pemberdayaan?

Sebagian besar perdebatan di kalangan donor mengenai penguatan Monitoring dan evaluasi intervensi donor bersifat "donor-sentris", yaitu bagaimana kita sebagai donor dapat mengukur dan meningkatkan dampak dari satu intervensi donor. Perspektif ini cenderung mendorong pendekatan dari atas ke bawah dalam Monitoring monitoring dan evaluasi. Kebutuhan data dan instrumen diidentifikasi di kantor-kantor donor dan informasi digali dari para penerima bantuan pasif di lapangan oleh para ahli eksternal melalui prosedur Monitoring yang kaku dan dipaksakan (Guijt, 1999).

Para evaluator pembangunan, termasuk unit-unit evaluasi lembaga donor, mulai beralih dari pendekatan yang berpusat pada donor menuju dukungan terhadap Monitoring dan evaluasi yang dipimpin oleh negara. Pergeseran positif dalam pendekatan ini mengakui dampak yang melemahkan dari pemikiran yang berpusat pada donor dan mengakui sifat kompleks dari proses-proses pembangunan.

"Cara evaluasi pembangunan dilakukan harus mencerminkan konteks [kerja sama pembangunan] yang baru, menjadi lebih selaras, lebih baik dan semakin dipimpin oleh negara, untuk memenuhi kebutuhan evaluasi semua mitra" (OECD. 2010). Evaluasi bersama merupakan salah satu cara di mana para donor bekerja sama untuk

menangkap proses pembangunan yang lebih luas dan bergerak menuju pendekatan yang tidak terlalu berpusat pada donor yang secara aktif melibatkan berbagai mitra dalam menilai hasil kerja sama pembangunan.

Cara lain yang dapat dilakukan oleh para donor untuk mendukung pergeseran ini adalah dengan membantu memonitor dan mengevaluasi kapasitas mereka yang bekerja dalam bidang pemberdayaan di kantor-kantor perwakilan di tingkat nasional dan negara-negara mitra.

Pendekatan partisipatif terhadap Monitoring dan Evaluasi menantang perspektif kepemilikan dan kontrol yang bersifat *top down* dengan menanyakan "realitas siapa yang penting?" (Chambers, 1997) dan "siapa yang menghitung realitas?" (Estrella dan Gaventa, 1998). Pendekatan partisipatoris menghargai pengetahuan lokal dan memfasilitasi kepemilikan dan kontrol lokal atas pembuatan dan analisis data (Chambers, 1994, 1997). Aspek kepemilikan dan kontrol dalam penelitian partisipatif ini dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi masyarakat lokal untuk membangun kerangka kerja analisis mereka sendiri dan berada dalam posisi untuk menantang "pembangunan dari atas" (Mukherjee, 1995).

Berbeda dengan pengamatan dan diskusi individual dalam banyak investigasi dari atas ke bawah, penelitian partisipatoris juga berfokus pada refleksi dan aksi publik dan kolektif. Pada tingkat yang paling politis, penelitian partisipatoris merupakan proses di mana refleksi diinternalisasi dan mendorong peningkatan kesadaran politik. Dengan cara ini, keterlibatan masyarakat dalam penelitian bergeser dari pasif menjadi aktif. Oleh karena itu, Monitoring dan Evaluasi partisipatoris dapat dilakukan dengan cara-cara yang benar-benar mendukung pemberdayaan dengan memberikan kesempatan bagi agensi dan pergeseran dinamika kekuasaan dalam hubungan kerjasama pembangunan.

D. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan

Monitoring dan Evaluasi dapat menggabungkan metode dan data secara efektif untuk menggambarkan dan menjelaskan pemberdayaan, serta dapat menggabungkan indikator perubahan yang terukur dengan narasi kualitatif yang kuat yang menjelaskan perubahan dan membantu donor menafsirkan dan mengarahkan intervensi mereka. Tanpa wawasan analitis tentang "titik tengah yang hilang" yang kompleks antara intervensi dan dampak, para peneliti dan analis kebijakan cenderung melakukan "lompatan interpretatif" analisis berdasarkan apa yang diukur. Bahayanya adalah apa yang tidak dapat diukur menjadi tidak penting, sementara "apa yang dapat diukur dan terukur kemudian menjadi sesuatu yang nyata dan penting" (Chambers, 1995).

Sebaliknya, jika penelitian kualitatif secara induktif menghasilkan hubungan dan pola yang menarik, sering kali mengejutkan dan terkadang berlawanan, penelitian kuantitatif kemudian dapat bertanya "seberapa besar?" dan menentukan seberapa yakin kita dapat mempercayai "hipotesis kerja" ini. Hubungan berulang antara mendeskripsikan dan menjelaskan ini menjadi kunci bagi kombinasi metode dan data yang efektif untuk memantau dan mengevaluasi intervensi pemberdayaan. Fokusnya adalah menghasilkan informasi yang kredibel yang berguna untuk mendukung program yang lebih efektif atau akuntabilitas hasil.

Indikator pemberdayaan yang "sesuai dengan tujuan" adalah indikator yang memberikan gambaran yang memadai tentang perubahan dalam hubungan kekuasaan untuk membongkar dan mendorong analisis mendalam tentang perubahan tersebut dengan cara yang akan mengarah pada intervensi pemberdayaan yang lebih baik dan membantu meminta pertanggungjawaban para pengambil keputusan atas dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

Metode kuantitatif menghasilkan indikator pemberdayaan berupa perubahan obyektif dan subyektif, indikator obyektif mengukur perubahan yang dapat diamati dalam frekuensi dan jenis

interaksi yang berfungsi sebagai proksi untuk perubahan hubungan kekuasaan yang mendasarinya. Contoh indikator obyektif antara lain menghitung jumlah warga desa yang berpartisipasi dalam Musyawarah Desa atau memberikan suara dalam pemilihan Kepala Desa, BPD, dan RT/RW, jumlah perempuan yang bekerja di segmen pasar tenaga kerja non-tradisional, atau berapa kali rincian siklus APBDesa diumumkan kepada publik. Data proksi pemberdayaan ini harus dipilah-pilah, misalnya berdasarkan jenis kelamin, usia, atau latar belakang etnis, agama, atau kasta untuk menjelaskan perbedaan dampak dan perubahan hubungan kekuasaan di antara kelompok-kelompok masyarakat yang relevan.

Pengukuran perubahan dalam frekuensi dan jenis interaksi dapat diperoleh dari observasi, catatan program atau ingatan, (meskipun ingatan sering kali tidak dapat diandalkan seperti bentuk pengumpulan data lainnya). Indikator ingatan secara keseluruhan menghasilkan data tentang pengalaman individu dan oleh karena itu harus digunakan dengan responden individu, misalnya sebagai bagian dari modul survei.

Indikator subyektif pemberdayaan mengukur "kualitas", atau efektivitas, dari perubahan dalam hubungan kekuasaan dengan skala yang berbeda. Penilaian dapat dilakukan oleh panel yang terdiri dari informan kunci. Penilaian indikator subyektif pemberdayaan juga dapat dilakukan oleh individu atau kelompok dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh program-program donor, dengan menghasilkan data berdasarkan skala yang berbeda, baik secara individu maupun kelompok dengan menggunakan kartu penilaian masyarakat (*Community Score Card*). Kartu skor masyarakat (*Community Score Card*) telah digunakan secara luas sebagai alat monitoring interaktif untuk memberdayakan pengguna layanan dalam hubungan mereka dengan penyedia layanan dengan memunculkan persepsi pengguna tentang kualitas, aksesibilitas dan relevansi berbagai layanan publik.

Pengukuran kuantitatif dapat diurutkan dengan metode penelitian kualitatif (termasuk wawancara, observasi, diskusi kelompok,

dan etnografi sejawat) untuk memberikan analisis mendalam tentang mengapa perubahan perilaku dan hubungan kekuasaan telah atau belum terjadi.

Berpartisipasi dalam monitoring dan evaluasi itu sendiri dapat memberdayakan. Monitoring dan evaluasi dapat terasa sangat ekstraktif dan tidak memberdayakan bagi mereka yang "dipantau" atau "dinilai". Namun, monitoring dan evaluasi partisipatif dapat memberdayakan "penerima manfaat yang pasif", memberikan ruang bagi masyarakat setempat untuk membangun kerangka analisis mereka sendiri, menentukan perubahan-perubahan apa saja yang bernilai, dan berada dalam posisi yang mampu menentang "pembangunan dari atas" (Chambers, 1994, 1997; Mukherjee, 1995).

Metode partisipatif dapat menghasilkan data kuantitatif yang kuat. Tim peneliti telah menunjukkan bahwa sangat mungkin untuk menghasilkan statistik yang akan ditanggapi secara serius oleh para pembuat kebijakan dari penelitian yang menggunakan metode partisipatif. Dalam iklim kerja sama pembangunan saat ini dengan tekanan akuntabilitas yang semakin meningkat, penting untuk dapat menunjukkan hasil pemberdayaan, jika kita tidak dapat secara memadai menangkap nilai dan dampak dari pekerjaan pemberdayaan, maka akan sulit untuk menjustifikasi kelanjutan pendanaannya. Kuncinya adalah mendorong penggunaan Monitoring dan evaluasi dengan cara-cara yang mendukung, bukan melemahkan, proses pemberdayaan.

Metode partisipatif dapat dilakukan dengan cepat dan efisien, menghasilkan data secara tepat waktu untuk analisis dan tindakan berbasis bukti dengan cara yang mendukung pemberdayaan. Statistik yang dihasilkan melalui metode partisipatif juga dapat dikumpulkan dan diperluas dengan kuat melalui standarisasi (terbatas dan dapat dipertanggungjawabkan) pertanyaan-pertanyaan spesifik dalam survei partisipatif atau diskusi kelompok. Dengan semakin banyaknya pekerjaan yang dilakukan untuk memonitoring dan mengevaluasi

pemberdayaan, maka perangkat metode yang efektif dan indikator yang berguna akan semakin bertambah.

Agar Monitoring dan evaluasi partisipatif dapat dianggap serius oleh para pembuat kebijakan, salah satu persyaratan utama adalah menghasilkan hasil dari sampel yang cukup besar untuk menangkap keragaman dan menarik kesimpulan untuk analisis agregat. Hal ini dapat berarti bekerja di sejumlah besar lokasi penelitian yang lebih besar daripada yang biasanya dilakukan dalam penelitian partisipatif.

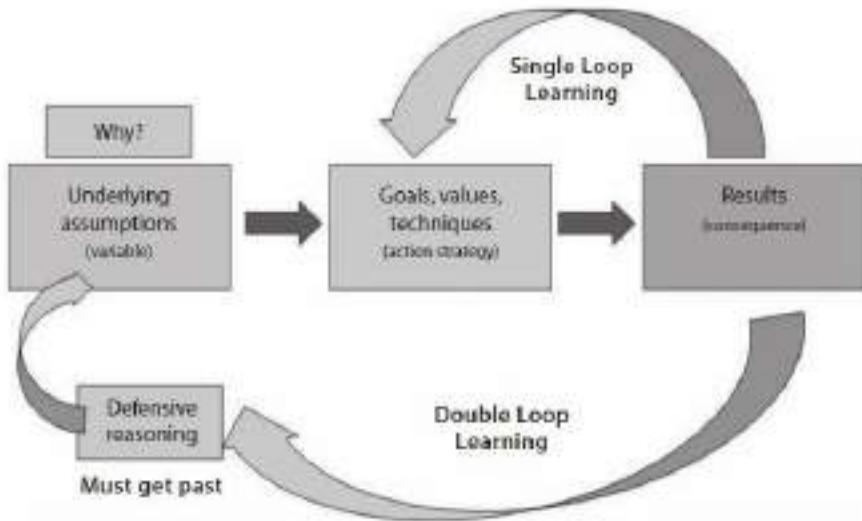
Kerangka kerja analisis sederhana dapat digunakan untuk mengevaluasi perubahan yang memberdayakan dan membantu donor untuk mengarahkan intervensi mereka. Lensa analitis yang berfokus pada upaya untuk menangkap sejauh mana proyek-proyek tersebut memberdayakan kemungkinan besar akan mengungkapkan wawasan baru tentang apa yang berhasil dan apa yang paling dihargai. Hal ini juga dapat memusatkan perhatian pada perubahan yang memberdayakan yang dihargai oleh "penerima manfaat", seperti peningkatan keterampilan, hubungan rumah tangga yang lebih baik, dan status yang lebih tinggi di masyarakat setempat.

Data kualitatif dapat digunakan untuk menghasilkan narasi perubahan (cerita) yang kuat dalam menafsirkan dan menjelaskan perubahan hubungan kekuasaan. Cerita mampu menyampaikan gagasan yang kompleks dan berlapis-lapis dalam bentuk yang sederhana dan mudah diingat oleh khalayak yang memiliki budaya yang beragam (Snowden, 2005). Cerita memiliki kekuatan untuk menghubungkan dan beresonansi dengan para pembuat kebijakan. Sebuah cerita dipahami sebagai rangkaian peristiwa yang disajikan dalam narasi yang koheren dan masuk akal bagi para pendengarnya (Eyben, 2009).

Studi kasus adalah sebuah cerita yang digunakan untuk menjelaskan tema dan isu tertentu yang didukung oleh analisis yang lebih luas. Cerita sangat baik dalam menggambarkan proses yang melibatkan banyak aktor dan berbagai rangkaian hubungan.

Monitoring dan evaluasi dukungan donor paling efektif jika dipadukan dengan praktik refleksif donor yang mendorong pembelajaran organisasi. Monitoring dan evaluasi pemberdayaan dapat mendorong organisasi donor untuk menantang perilaku dan praktik mereka sendiri. Salah satu elemen penting adalah fokus pada penggunaan dan komunikasi data Monitoring dan evaluasi untuk mendukung pembelajaran. Salah satu cara untuk mengkonseptualisasikan hal ini adalah gagasan "double-loop", pembelajaran adaptif untuk perubahan organisasi, dengan berbagi cerita tentang kegagalan dan keberhasilan dan menginterogasinya.

Gambar 7. Double-Loop Learning



Sumber: OECD (2012), *Poverty Reduction and Pro-Poor Growth: The Role of Empowerment*

Pembelajaran "double-loop" melibatkan pertanyaan tentang tujuan dan nilai-nilai yang mendasari tindakan seseorang (seperti yang dilakukan dalam evaluasi), sementara pembelajaran "single-loop" adalah manajemen korektif dalam kerangka kerja yang telah diberikan sebelumnya (Argyris dan Schön, 1974). Konsep "organisasi pembelajar" berakar pada pemikiran organisasi arus utama (misalnya

Senge et al., 1999) namun juga telah diadaptasi dan digunakan secara luas dalam konteks pembangunan (misalnya Friedman dan Meer, 2007).

Metode yang dapat membantu organisasi merefleksikan perilaku dan dampaknya antara lain adalah metodologi Pemetaan Hasil (*Outcome Mapping/OM*) yang kini banyak digunakan (Earl et al., 2001). Pemetaan Hasil (*Outcome Mapping/OM*) adalah pendekatan yang praktis, fleksibel dan partisipatif untuk perencanaan, Monitoring dan evaluasi. Pertama kali diperkenalkan oleh International Development Research Centre (IDRC) pada tahun 2000, Pemetaan Hasil (*Outcome Mapping/OM*) telah digunakan dalam berbagai proyek, program, dan organisasi di seluruh dunia. Semakin banyak lembaga donor, LSM, dan para profesional monitoring dan evaluasi yang mengadopsi Pemetaan Hasil (*Outcome Mapping/OM*), karena Pemetaan Hasil (*Outcome Mapping/OM*) membantu mereka mengatasi masalah-masalah kompleksitas yang tidak dapat dipertimbangkan oleh metode-metode lain yang lebih tradisional.

E. Implikasi dan Rekomendasi Kebijakan

Jika monitoring dan evaluasi pemberdayaan dilakukan dengan cara yang teknokratis, maka kemungkinan besar lembaga donor akan berkontribusi pada ketidakberdayaan masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. Jika donor benar-benar berorientasi pada hasil dan ingin menjadi efektif, mereka harus mendukung pendekatan yang ketat, tetapi fleksibel dalam memantau dan mengevaluasi intervensi pemberdayaan dan mempertimbangkan untuk menggunakan pendekatan-pendekatan, termasuk metode-metode partisipatoris, yang dapat berkontribusi terhadap (bukan melemahkan) pemberdayaan. Pendekatan yang diusulkan di sini menerima kompleksitas dan ketidakpastian proses yang ingin kita pengaruhi dan mendorong penggunaan perangkat manajemen dan metode penelitian yang dapat mengatasi ketidakpastian tersebut, sementara pada saat yang sama mendo-

kumentasikan dan menginterpretasikan proses pemberdayaan dengan bukti yang berkualitas.

Gunakan monitoring dan evaluasi untuk merefleksikan hubungan kekuasaan antara donor dan pemangku kepentingan di suatu negara. Memantau hubungan kekuasaan dan mengevaluasi intervensi pemberdayaan seharusnya tidak hanya berfokus pada mitra.

Monitoring dan evaluasi juga harus mendorong donor, evaluator, dan staf program untuk mengakui bahwa mereka sendiri memiliki kekuasaan dalam hubungan mereka dengan mitra di dalam negeri dan merefleksikan dampak yang mereka miliki. Monitoring dan evaluasi juga harus mendorong para donor untuk mengenali batas-batas kekuasaan mereka dalam struktur dan proses politik yang lebih besar.

Menekankan kepemilikan lokal dan tidak ingin terlihat mencampuri struktur kekuasaan lokal dapat dimengerti, namun hal ini tidak mencerminkan secara akurat peran donor. Dinamika ini juga berarti bahwa anggota staf hanya memiliki sedikit pengetahuan praktis tentang bagaimana mendukung pemberdayaan masyarakat yang hidup dalam kemiskinan secara optimal (Eyben, 2009). Memperkuat bank pengetahuan tentang pemberdayaan dengan bukti-bukti berkualitas dari monitoring dan evaluasi akan membantu staf dan mitra untuk menciptakan program yang lebih efektif.

Hubungkan monitoring dan donor ini dengan proses kelembagaan untuk membangun kemitraan. Seperti yang telah dibahas di atas, pelembagaan monitoring dalam proses pembelajaran "*Double-Loop*" membantu donor dan mitra untuk merefleksikan bagaimana mereka menggunakan kekuatan mereka, memperjelas peran dan tanggung jawab masing-masing dan menjadi lebih efektif dalam intervensi mereka. Pendekatan kemitraan terhadap Monitoring dan evaluasi dapat mendukung perkembangan dan pendalaman kesadaran diri dan menambah proses perubahan hubungan dengan mitra.

Pastikan bahwa kebutuhan untuk menunjukkan hasil seimbang dengan pentingnya mengenali konteks dan memahami proses yang kompleks. Seperti yang telah dibahas di atas, indikator pemberdayaan dapat dibuat, dianalisis, dan ditindaklanjuti secara lokal. Indikator-indikator tersebut juga dapat dipetakan ke dalam kerangka kerja program atau proyek dengan cara yang dapat menciptakan ruang dalam manajemen proyek untuk mengidentifikasi dan memahami perubahan dalam hubungan kekuasaan. Dokumentasi dan analisis hasil yang diharapkan dan tidak diharapkan akan memperkuat pelaporan hasil. Sebuah program bisa saja berhasil namun tidak dilaporkan seperti itu!

Memperjuangkan komitmen dan kapasitas di dalam hirarki organisasi donor dan di antara para mitra untuk menggunakan metode-metode campuran dan praktek-praktek reflektif dalam monitoring, evaluasi dan pembelajaran. Menantang kebijaksanaan yang telah diterima di dalam organisasi tentang bagaimana Monitoring dan evaluasi harus dilakukan dan untuk siapa Monitoring dan evaluasi harus dilakukan. Mendukung pendekatan bersama dan berbasis kemitraan dalam perancangan dan pelaksanaan program, serta Monitoring dan evaluasi. Meningkatkan kepekaan dan membangun kapasitas untuk pendekatan monitoring, evaluasi, dan pembelajaran pemberdayaan yang baru sebagai bagian dari proses, termasuk di antara manajemen program, unit evaluasi, pejabat pemerintah, dan mitra masyarakat sipil.

F. Memahami Monitoring dan Evaluasi

Program pemberdayaan desa, seperti halnya jenis intervensi kebijakan publik lainnya, dirancang untuk mengubah situasi saat ini dari kelompok sasaran dan mencapai hasil tertentu, seperti meningkatkan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran, dan memerangi kemiskinan. Pertanyaan kebijakan utamanya adalah apakah hasil yang direncanakan (*outcome*) benar-benar tercapai. Seringkali, pada kenyataannya, perhatian para pembuat kebijakan

dan manajer program terfokus pada *input* (misalnya sumber daya manusia dan keuangan yang digunakan untuk melaksanakan program) dan *output* (misalnya jumlah peserta), bukan pada apakah program tersebut mencapai hasil yang diharapkan (misalnya peserta yang diberdayakan apakah sudah memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk berdaya).

Monitoring dan evaluasi adalah proses yang memungkinkan para pembuat kebijakan, manajer program, dan para pelaku pemberdayaan untuk menilai: bagaimana sebuah intervensi berkembang dari waktu ke waktu (Monitoring); seberapa efektif sebuah program dilaksanakan dan apakah ada kesenjangan antara hasil yang direncanakan dan hasil yang dicapai (evaluasi); dan apakah adanya perubahan dalam kesejahteraan karena disebabkan oleh program atau hanya karena program itu sendiri (evaluasi dampak).

Monitoring adalah proses pengumpulan dan analisis informasi yang berkesinambungan mengenai suatu program, dan membandingkan hasil aktual dengan hasil yang direncanakan untuk menilai seberapa baik intervensi tersebut dilaksanakan. Monitoring menggunakan data yang dihasilkan oleh program itu sendiri (karakteristik peserta individu, pendaftaran dan kehadiran, situasi akhir program penerima manfaat dan biaya program) dan membuat perbandingan antar individu, jenis program dan lokasi geografis. Keberadaan sistem Monitoring yang dapat diandalkan sangat penting untuk evaluasi.

Evaluasi adalah suatu proses yang secara sistematis dan obyektif menilai semua elemen dari suatu program (misalnya desain, implementasi dan hasil yang dicapai) untuk menentukan nilai atau signifikansi secara keseluruhan. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang kredibel bagi para pengambil keputusan untuk mengidentifikasi cara-cara untuk mencapai lebih banyak hasil yang diinginkan.

Secara garis besar, ada dua jenis evaluasi:

1. Evaluasi kinerja

Evaluasi ini fokus pada kualitas pemberian layanan dan hasil yang dicapai oleh suatu program pemberdayaan. Evaluasi ini biasanya mencakup hasil jangka pendek dan jangka menengah (misalnya tingkat pencapaian komunitas). Evaluasi ini dilakukan berdasarkan informasi yang dikumpulkan secara teratur melalui sistem Monitoring program. Evaluasi kinerja lebih luas daripada Monitoring. Evaluasi mencoba untuk menentukan apakah kemajuan yang dicapai merupakan hasil dari intervensi yang dilakukan, atau apakah ada penjelasan lain yang bertanggung jawab atas perubahan yang terjadi.

2. Evaluasi dampak

Evaluasi ini mencari perubahan (hasil) pemberdayaan yang dapat secara langsung dikaitkan dengan program yang sedang dievaluasi. Evaluasi ini memperkirakan apa yang akan terjadi seandainya penerima manfaat tidak berpartisipasi dalam program pemberdayaan. Penentuan hubungan sebab-akibat antara program dan hasil tertentu merupakan ciri utama yang membedakan evaluasi dampak dengan jenis evaluasi lainnya.

Monitoring dan evaluasi biasanya mencakup informasi mengenai biaya program yang dimonitoring atau dievaluasi. Hal ini memungkinkan untuk menilai manfaat dari sebuah program dibandingkan dengan biayanya dan mengidentifikasi intervensi mana yang memiliki tingkat pengembalian tertinggi. Ada dua alat yang biasa digunakan, yaitu:

a. Analisis biaya-manfaat (*A cost-benefit analysis*)

Analisa ini memperkirakan manfaat total dari suatu program dibandingkan dengan total biayanya. Jenis analisis ini biasanya digunakan secara *ex-ante*, untuk memutuskan di antara berbagai pilihan program. Kesulitan utama adalah memberikan nilai moneter pada manfaat yang "tidak berwujud". Sebagai contoh, manfaat utama dari program pemberdayaan bagi kelompok perempuan desa adalah peningkatan lapangan kerja dan kesempatan memperoleh

penghasilan bagi para peserta. Ini adalah manfaat nyata yang dapat diberikan nilai moneter. Namun, memiliki pekerjaan juga meningkatkan harga diri seseorang, yang lebih sulit untuk dinyatakan dalam bentuk uang karena memiliki nilai yang berbeda untuk setiap orang.

b. Analisis efektivitas biaya (*A cost-effectiveness analysis*)

Membandingkan biaya dari dua atau lebih program dalam menghasilkan hasil yang sama. Sebagai contoh, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan program padat karya tunai. Masing-masing memiliki tujuan untuk menempatkan warga desa yang tak berdaya atau rentan ke dalam sebuah pekerjaan, tetapi subsidi upah melakukannya dengan biaya Rp. 50.000 per orang yang dipekerjakan, sementara program padat karya tunai membutuhkan biaya Rp. 80.000. Dalam hal efektivitas biaya, subsidi upah berkinerja lebih baik daripada skema pekerjaan umum.

G. Teori Perubahan

Teori perubahan menjelaskan bagaimana suatu intervensi akan memberikan hasil yang direncanakan. Rantai sebab-akibat (atau kerangka kerja logis) menguraikan bagaimana urutan input, kegiatan dan *output* dari suatu program akan mencapai hasil (tujuan) tertentu. Hal ini pada gilirannya akan berkontribusi pada pencapaian tujuan secara keseluruhan.

Rantai sebab-akibat memetakan:

1. *Input* (sumber daya keuangan, manusia, dan sumber daya lainnya);
2. Kegiatan (tindakan atau pekerjaan yang dilakukan untuk menerjemahkan *input* menjadi *output*);
3. *Output* (barang yang dihasilkan dan jasa yang diberikan);
4. Hasil (penggunaan *output* oleh kelompok sasaran); dan
5. Tujuan (atau hasil akhir jangka panjang dari intervensi).

Gambar 8. Rantai Hasil



Dalam rantai hasil di atas, sistem monitoring akan terus menerus melacak:

1. Sumber daya yang diinvestasikan/digunakan oleh program;
2. Pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu yang direncanakan;
3. Penyediaan barang dan jasa.

Evaluasi kinerja pada titik waktu tertentu, akan menilai hubungan *input-output* dan hasil yang langsung terlihat. Evaluasi dampak akan memberikan bukti apakah perubahan yang diamati disebabkan oleh intervensi atau hanya karena intervensi itu sendiri.

H. Sistem Manajemen Kinerja Dan Pengukuran Kinerja

Manajemen kinerja (*results-based management*) adalah strategi yang dirancang untuk mencapai perubahan dalam cara organisasi beroperasi, dengan peningkatan kinerja (hasil yang lebih baik) sebagai inti dari sistem. Pengukuran kinerja (*performance monitoring*) lebih berkaitan dengan produksi informasi tentang kinerja. Sistem ini berfokus pada penetapan tujuan, pengembangan indikator, dan pengumpulan serta analisis data hasil. Sistem manajemen berbasis hasil biasanya terdiri dari tujuh tahap.

1. Merumuskan tujuan: mengidentifikasi secara jelas dan terukur hasil yang ingin dicapai dan mengembangkan kerangka kerja konseptual tentang bagaimana hasil tersebut akan dicapai.

2. Mengidentifikasi indikator: untuk setiap tujuan, tentukan dengan tepat apa yang akan diukur berdasarkan skala atau dimensi.
3. Menetapkan target: untuk setiap indikator, menentukan tingkat hasil yang diharapkan untuk dicapai pada tanggal tertentu, yang akan digunakan untuk menilai kinerja.
4. Memantau hasil: mengembangkan sistem pemantauan kinerja yang secara teratur mengumpulkan data tentang hasil yang dicapai.
5. Meninjau dan melaporkan hasil: membandingkan hasil aktual dengan target (atau kriteria lain untuk menilai kinerja).
6. Mengintegrasikan evaluasi: melakukan evaluasi untuk mengumpulkan informasi yang tidak tersedia melalui sistem pemantauan kinerja.
7. Menggunakan informasi kinerja: menggunakan informasi dari pemantauan dan evaluasi untuk pembelajaran organisasi, pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Sebagai catatan untuk diketahui, poin 1-3 di atas merupakan poin perencanaan strategis. Sementara, poin 1-6 adalah poin-poin penilaian kinerja. Terakhir, poin 1-7 merupakan poin-poin Manajemen Berbasis Hasil (*results-based management*).

Oleh karena itu, penyusunan sistem pemantauan kinerja untuk program pemberdayaan memerlukan beberapa hal:

- a. Mengklarifikasi tujuan program
- b. Mengidentifikasi indikator kinerja
- c. Menetapkan *baseline* dan target, memantau hasil, dan pelaporan

Dalam banyak kasus, tujuan program ketenagakerjaan kaum muda lebih banyak tersirat daripada tersurat. Dalam kasus seperti itu, tugas pertama dari pemantauan kinerja adalah mengartikulasikan apa yang ingin dicapai oleh program tersebut dalam bentuk yang terukur. Tanpa tujuan yang jelas, pada kenyataannya, akan sulit

untuk memilih ukuran (indikator) yang paling tepat dan mengungkapkan target program

I. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran ringkas kuantitatif dan kualitatif dari kinerja program yang dapat dengan mudah dilacak secara teratur. Indikator kuantitatif mengukur perubahan dalam nilai tertentu (angka, rata-rata atau median) dan persentase. Indikator kualitatif memberikan wawasan tentang perubahan sikap, kepercayaan, motif, dan perilaku individu. Meskipun penting, informasi mengenai indikator-indikator ini lebih banyak memakan waktu untuk dikumpulkan, diukur, dan dianalisis, terutama pada tahap-tahap awal pelaksanaan program.

Ada beberapa kiat untuk mengembangkan indikator. Kiat ini diadaptasi dari CIDA (1997):

1. Relevansi

Indikator harus relevan dengan kebutuhan pengguna dan tujuan monitoring. Indikator harus dapat dengan jelas menunjukkan kepada pengguna apakah kemajuan telah dicapai (atau tidak) dalam mengatasi masalah yang diidentifikasi.

2. Disagregasi

Data harus dipilah-pilah sesuai dengan apa yang akan diukur. Sebagai contoh, untuk individu, pemilahan dasar adalah berdasarkan jenis kelamin, kelompok usia, tingkat pendidikan dan karakteristik pribadi lainnya yang berguna untuk memahami bagaimana program berfungsi. Untuk layanan dan/atau program, pemilahan biasanya dilakukan berdasarkan jenis layanan/program.

3. Keterpahaman (*comprehensibility*)

Indikator harus mudah digunakan dan dipahami serta data untuk penghitungannya relatif mudah dikumpulkan.

4. Kejelasan definisi

Indikator yang tidak jelas definisinya akan terbuka untuk beberapa interpretasi, dan dapat diukur dengan cara yang berbeda pada waktu dan tempat yang berbeda. Dalam hal ini, akan sangat berguna untuk menyertakan sumber data yang akan digunakan dan contoh/metode penghitungan. Misalnya, indikator "pekerjaan peserta pada masa tindak lanjut" akan membutuhkan:

- a) Spesifikasi tentang apa yang dimaksud dengan pekerjaan (bekerja setidaknya selama satu jam untuk mendapatkan upah, keuntungan atau barang dalam 10 hari sebelum pengukuran);
- b) Definisi peserta (misalnya, mereka yang menghadiri setidaknya 50 persen dari program); dan
- c) Jangka waktu tindak lanjut (enam bulan setelah selesainya program). Kehati-hatian juga harus dilakukan dalam menentukan standar atau tolok ukur perbandingan. Misalnya, dalam mengkaji status kaum muda, apa yang menjadi patokan - situasi kaum muda di wilayah tertentu atau di tingkat nasional?

5. Jumlah yang dipilih haruslah kecil

Tidak ada aturan baku untuk menentukan jumlah indikator yang tepat. Namun, aturan praktisnya adalah bahwa pengguna harus menghindari dua godaan: informasi yang berlebihan dan agregasi yang berlebihan (yaitu terlalu banyak data dan merancang indeks komposit berdasarkan skema agregasi dan pembobotan yang dapat menyembunyikan informasi penting). Kesalahan yang umum terjadi adalah merencanakan sistem monitoring secara berlebihan (misalnya, pengumpulan data untuk ratusan indikator, yang sebagian besar tidak digunakan). Di bidang program ketenagakerjaan, pejabat senior cenderung menggunakan indikator strategis tingkat tinggi seperti keluaran dan hasil. Sebaliknya, para manajer lini dan staf mereka fokus pada indikator operasional yang menargetkan proses dan layanan.

6. Kekhususan

Pemilihan indikator harus mencerminkan masalah-masalah yang ingin diatasi oleh program ketenagakerjaan kaum muda. Sebagai contoh, sebuah program yang bertujuan untuk memberikan pengalaman kerja kepada para lulusan sekolah perlu memasukkan indikator cakupan (berapa banyak di antara semua lulusan sekolah yang berpartisipasi dalam program tersebut), jenis perusahaan tempat pengalaman kerja berlangsung dan pekerjaannya, dan jumlah penerima manfaat yang mendapatkan pekerjaan setelahnya berdasarkan karakteristik individu (misalnya jenis kelamin, tingkat pendidikan, status rumah tangga, dan sebagainya).

7. Biaya

Ada tarik ulur antara indikator dan biaya pengumpulan data untuk pengukurannya. Jika pengumpulan data menjadi terlalu mahal dan memakan waktu, indikator pada akhirnya dapat kehilangan relevansinya.

8. Kesehatan teknis

Data harus dapat diandalkan. Pengguna harus diberitahu tentang bagaimana indikator dibuat dan sumber-sumber yang digunakan. Sebuah diskusi singkat harus disediakan mengenai makna, interpretasi, dan yang paling penting, keterbatasannya. Indikator harus tersedia tepat waktu, terutama jika indikator tersebut digunakan untuk memberikan umpan balik selama pelaksanaan program.

9. Berwawasan ke depan

Sistem indikator yang dirancang dengan baik tidak boleh dibatasi untuk menyampaikan informasi tentang masalah-masalah yang ada saat ini. Indikator juga harus dapat mengukur tren dari waktu ke waktu.

10. Kemampuan beradaptasi

Indikator harus mudah diadaptasi untuk digunakan di berbagai wilayah dan situasi.

J. Target, Data Dasar (*Baseline*) dan Sumber Data

Salah satu isu yang paling bermasalah dalam monitoring kinerja adalah penentuan target yang tepat. Sebagai contoh, informasi bahwa peserta memiliki rata-rata 50 persen tingkat penyerapan tenaga kerja pada tahun berikutnya setelah keikutsertaan dalam program tidak memiliki nilai sebagai ukuran kinerja; informasi tersebut harus dibandingkan dengan nilai lain. Hasil dapat diukur berdasarkan target (yaitu nilai tertentu yang ditetapkan untuk suatu indikator yang harus dicapai dalam jangka waktu tertentu) atau standar (nilai yang mendefinisikan kinerja yang dapat diterima untuk suatu program tertentu, biasanya dibuat berdasarkan angka-angka yang berasal dari pelaksanaan program sebelumnya). Penetapan target terdiri dari empat langkah:

1. Menetapkan garis dasar (*baseline*)

Tanpa data dasar - yaitu nilai indikator sebelum implementasi dimulai - akan sulit, atau bahkan tidak mungkin, untuk menetapkan target kinerja yang realistis. Data *baseline* adalah informasi awal mengenai peserta program (atau aspek program lainnya) yang dikumpulkan sebelum intervensi program. Data ini dapat dibuat dengan menggunakan sumber data sekunder yang ada atau mungkin memerlukan pengumpulan data primer.

2. Mengidentifikasi tren

Hal ini memungkinkan pengguna untuk memahami tren historis dalam nilai indikator dari waktu ke waktu (misalnya, apakah data yang tersedia menunjukkan perubahan, baik naik atau turun dari waktu ke waktu). Target harus mencerminkan tren ini ditambah dengan nilai yang diharapkan dapat ditambahkan oleh suatu program. Misalnya, jika tingkat pengangguran kaum muda dengan tingkat pendidikan rendah tetap berada di angka 40 persen selama lima tahun terakhir, maka target yang masuk akal dapat ditetapkan dengan nilai di atas angka tersebut.

3. Meninjau temuan-temuan penelitian

Ada banyak literatur tentang program pasar kerja aktif yang menargetkan kaum muda (desain dan implementasi, bukan pengukuran dampak). Meninjau temuan penelitian dapat membantu dalam menetapkan target yang realistis, terutama untuk program yang paling umum (misalnya program pelatihan kejuruan). Sebagai contoh, pengalaman berbagai negara dalam program pelatihan yang menargetkan kaum muda menunjukkan tingkat penyerapan tenaga kerja kotor pada masa tindak lanjut berkisar antara 50 hingga 65 persen dari total peserta.

4. Penetapan tolok ukur (*benchmarking*)

Cara yang semakin populer untuk menetapkan target adalah dengan menggunakan hasil dari program-program berkinerja tinggi yang serupa. Selain itu, target dapat juga ditetapkan berdasarkan tingkat penempatan program di berbagai jenis peserta atau tingkat penempatan program di berbagai wilayah geografis yang berbeda. Sebagai contoh, jika program tersebut menargetkan orang dewasa dan kaum muda, kinerja program yang menargetkan kaum muda dapat dibandingkan dengan kinerja program yang menargetkan orang dewasa. Sebaliknya, jika program dilaksanakan di beberapa lokasi untuk kelompok sasaran yang sama, tingkat penempatan dapat dibandingkan di seluruh lokasi.

Pengukuran pertama dari indikator kinerja adalah data dasar (*baseline*). Data dasar (*baseline*) kinerja adalah informasi - kuantitatif dan kualitatif - yang menyediakan data tentang indikator hasil yang secara langsung dipengaruhi oleh program pada awal periode monitoring.

Informasi *baseline* perlu dikumpulkan dan dianalisis untuk setiap indikator yang dipilih. Karena alasan ini, semakin banyak indikator yang ada, semakin kompleks (dan mahal) proses monitoring yang

dilakukan. Selain itu, jika evaluasi dampak direncanakan, data dasar perlu dikumpulkan dari sampel yang representatif dari seluruh populasi yang memenuhi syarat untuk memungkinkan pemilihan peserta dan non-peserta secara acak. Hal ini dapat meningkatkan biaya pengumpulan data secara signifikan. Indikator kinerja dan strategi pengumpulan data perlu didasarkan pada jenis sistem data yang ada dan angka-angka yang dapat dihasilkan (sumber, metode pengumpulan, frekuensi dan biaya).

Tantangan pertama adalah mengidentifikasi sumber data untuk indikator kinerja program pemberdayaan. Sumber data untuk data dasar dapat berupa data primer (dikumpulkan oleh lembaga pelaksana secara khusus untuk tujuan program melalui pelaksanaan survei data dasar) atau data sekunder (dikumpulkan oleh lembaga lain untuk tujuan lain), atau (lebih sering) kombinasi keduanya. Contoh sumber data sekunder adalah angka-angka dari Survei Angkatan Kerja (data berbasis survei) dan data administratif terkait ketenagakerjaan, yang umumnya diperoleh sebagai produk sampingan dari prosedur administratif (layanan ketenagakerjaan, kontribusi jaminan sosial, dll.).

Ketika sistem statistik yang ada tidak dapat menyediakan data yang diperlukan untuk menetapkan data dasar bagi program pemberdayaan, maka perlu untuk mengumpulkan angka-angka dari sumber-sumber primer. Data primer dapat dikumpulkan dengan berbagai cara (misalnya melalui wawancara kelompok terfokus atau observasi langsung). Metode yang paling umum adalah dengan melakukan survei yang dirancang khusus dan dilakukan secara tatap muka terhadap kelompok sasaran. Jika data primer perlu dikumpulkan untuk membangun data dasar, langkah-langkah yang harus diikuti meliputi:

1. Pemilihan strategi pengambilan sampel
2. Desain dan uji coba kuesioner; dan
3. Pengumpulan dan pembersihan data.

K. Mengukur Hasil

Untuk mengoperasionalkan sistem pemantauan kinerja, catatan peserta program (termasuk informasi tentang karakteristik seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan hambatan pasar tenaga kerja lainnya seperti putus sekolah dini, menganggur dalam jangka waktu lama, atau tingkat kecacatan) perlu digabungkan dengan bukti hasil individu pada masa tindak lanjut. Yang terakhir ini harus dikumpulkan baik melalui data administratif atau survei tindak lanjut.

Jika data tentang pekerjaan peserta setelah program tidak dapat diperoleh secara pasti dari sumber data yang ada, mungkin perlu dilakukan survei tindak lanjut (atau penelusuran) terhadap peserta program untuk mengukur tingkat pekerjaan (kembali) mereka. Perbedaan utama antara survei tindak lanjut dan survei penelusuran adalah survei penelusuran mungkin tidak sepenuhnya representatif. Banyak hal, bergantung pada jumlah penerima manfaat yang dapat "ditelusuri" dan diwawancarai beberapa bulan (atau bahkan beberapa tahun) setelah keikutsertaan mereka dalam program pemberdayaan.

Biasanya, enam bulan setelah program berakhir, survei lanjutan dilakukan terhadap para peserta untuk memverifikasi status keberdayaan mereka dan tingkat pendapatan mereka. Idealnya, semua peserta harus diwawancarai baik melalui wawancara tatap muka atau melalui telepon. Jika jumlah peserta besar, sampel yang representatif perlu diambil untuk memastikan validitas data yang dikumpulkan.

Desain dan pelaksanaan survei tindak lanjut mengikuti langkah-langkah yang sama dengan pengumpulan data awal primer (pemilihan strategi pengambilan sampel, desain dan uji coba kuesioner, serta pengumpulan dan pembersihan data). Satu-satunya perbedaan adalah bahwa instrumen survei perlu dirancang untuk memverifikasi kuantitas dan kualitas pekerjaan dan mengukur relevansi penyediaan layanan dengan hasil pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, F., & Rončević, B. (2003). Social capital: Recent debates and research trends. *Social science information*, 42(2), 155-183.
- Adams, R. (2003). *Social work and empowerment*.
- Adi, I. R. (2013). *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Akram, T., Lei, S., Hussain, S. T., Haider, M. J., & Akram, M. W. (2016). Does relational leadership generate organizational social capital? A case of exploring the effect of relational leadership on organizational social capital in China. *Future Business Journal*, 2(2), 116-126.
- Alone, B. (2004). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*.
- Andereck, K. L., & Vogt, C. A. (2000). The relationship between residents' attitudes toward tourism and tourism development options. *Journal of Travel research*, 39(1), 27-36.
- Anderson, C. A., & Owens, J. (Eds.) (1990). *Propositional attitudes: The role of content in logic, language, and mind*. CSLI Lecture Notes 20 (pp. xvi + 342). Stanford: Center for the Study of Language and Information.
- Andrews, R. (2010). Organizational social capital, structure and performance. *human relations*, 63(5), 583-608.
- Ansari, S., Munir, K., & Gregg, T. (2012). Impact at the 'bottom of the pyramid': The role of social capital in capability development and community empowerment. *Journal of Management Studies*, 49(4), 813-842.
- Argyris, C., & Schon, D. A. (1992). *Theory in practice: Increasing professional effectiveness*. John Wiley & Sons.
- Arrow, K. J. (2000). Observations on social capital. *Social capital: A multifaceted perspective*, 6, 3-5.

- Bandura, A., Freeman, W. H., & Lightsey, R. (1999). Self-efficacy: The exercise of control.
- Bartunek, J. M., & Spreitzer, G. M. (2006). The interdisciplinary career of a popular construct used in management: Empowerment in the late 20th century. *Journal of Management Inquiry*, 15(3), 255-273.
- Baum, F. (2008). Foreword to Health promotion in action: from local to global empowerment. In *Glob. Conf. Health Prom* (Vol. 21, pp. 88-89).
- Becker, D., & Weyemann, B. (2006). Gender, conflict transformation and the psychosocial approach. Retrieved on May, 11, 2021.
- Benjamin, O., & Sullivan, O. (1999). Relational resources, gender consciousness and possibilities of change in marital relationships. *The Sociological Review*, 47(4), 794-820.
- Bhandari, H., & Yasunobu, K. (2009). What is social capital? A comprehensive review of the concept. *Asian Journal of Social Science*, 37(3), 480-510.
- Bicchieri, C. (2005). *The grammar of society: The nature and dynamics of social norms*. Cambridge: Cambridge University Press
- Blanchard, K., Carlos, J. P., & Randolph, A. (2001). *Empowerment takes more than a minute*. Berrett-Koehler Publishers.
- Bogler, R., & Somech, A. (2004). Influence of teacher empowerment on teachers' organizational commitment, professional commitment and organizational citizenship behavior in schools. *Teaching and teacher education*, 20(3), 277-289.
- Bourdieu, P. (2011). The forms of capital.(1986). *Cultural theory: An anthology*, 1(81-93), 949.
- Bourdieu, P. (2018). *Distinction a social critique of the judgement of taste*. In *Inequality* (pp. 287-318). Routledge.
- Breton, M. (1994). On the meaning of empowerment and empowerment-oriented social work practice. *Social work with groups*, 17(3), 23-37.

- Brown, A., & Johnson, R. (2015). Cultural Diversity and Community Empowerment: A Comparative Analysis. *International Journal of Community Development*, 20(3), 45-60.
- Canadian International Development Agency (CIDA), 1997. Guide to Gender-Sensitive Indicators (Ottawa, CIDA)
- Chambers, R. (1994). The origins and practice of participatory rural appraisal. *World development*, 22(7), 953-969.
- Chambers, R. (1997). *Whose reality counts* (Vol. 25). London: Intermediate technology publications.
- Chambers, R. (2007). *Who counts?: the quiet revolution of participation and numbers*.
- Chaskin, R. J. (2001). Building community capacity: A definitional framework and case studies from a comprehensive community initiative. *Urban affairs review*, 36(3), 291-323.
- Chen, L., & Li, M. (2018). The Influence of Cultural Values on Community Empowerment: A Cross-Cultural Study. *Journal of Applied Social Psychology*, 48(2), 89-102.
- Chou, Y. K. (2006). Three simple models of social capital and economic growth. *The Journal of Socio-Economics*, 35(5), 889-912.
- Cialdini, R. B., & Trost, M. R. (1998). Social influence: Social norms, conformity and compliance. In D. T. Gilbert, S. T. Fiske and G. Lindzey (Eds.). *The Handbook of Social Psychology*. 4th Edition. Vol. 2 (pp. 151-192).
- Coleman, J. S. (1988). Social capital in the creation of human capital. *American journal of sociology*, 94, S95-S120.
- Cummins, D. D. (1998). Social norms and other minds: The evolutionary roots of higher cognition. In D. D. Cummins, and C. Allen (Eds.). *The evolution of mind* (pp. 163-228). New York: Oxford University Press.
- D'Andrade, R. (2005). Some methods for studying cultural cognitive structures (pp. 83-104). Palgrave Macmillan US.

- D'Andrade, R. (2006). Commentary on Searle's 'Social ontology: Some basic principles'. *Anthropological Theory*, 6 (1), 30–39.
- D'Andrade, R. (2017). From value to Lifeworld. *Universalism Without uniformity: Explorations in mind and culture* (pp. 61–74). Ed. by Julia L. Cassaniti, Usha Menon. Chicago, IL: University of Chicago Press.
- D'Andrade, R. (2017). From value to Lifeworld. *Universalism Without uniformity: Explorations in mind and culture*, 61-74.
- D'Andrade, R. (2008). *A study of personal and cultural values: American, Japanese, and Vietnamese*. Springer.
- Davenport, S., & Daellenbach, U. (2011). 'Belonging'to a virtual research centre: exploring the influence of social capital formation processes on member identification in a virtual organization. *British Journal of Management*, 22(1), 54-76.
- Diale, N. R. (2013). Community group environment for people participation and empowerment: the socio-cultural perspective. *South African Journal of Agricultural Extension*, 41(1), 34-43.
- Dika, S. L., & Singh, K. (2002). Applications of social capital in educational literature: A critical synthesis. *Review of educational research*, 72(1), 31-60.
- Dinata, A., Asteriani, F., Muliana, R., Dalilla, F., & Anwar, I. (2023). Sosialisasi Pembangunan Desa Berkelanjutan di Desa Lubuk Emas, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 3(6), 1743-1750.
- Dreier, P. (1996). Community empowerment strategies: The limits and potential of community organizing in urban neighborhoods. *Cityscape*, 121-159.
- Dressler, W. (2005). What's cultural about biocultural research? *Ethos*, 33, 20–45.
- Dressler, W. (2007). Cultural dimensions of the stress process: measurement issues in fieldwork. *Measuring stress in humans: A practical guide for the field* (pp. 27–59). G. Ice and G. D. James, eds. Cambridge: Cambridge University Press.

- Earl, S., Carden, F., & Smutylo, T. (2001). Outcome mapping: Building learning and reflection into development programs. IDRC, Ottawa, ON, CA.
- Estrella, M., & Gaventa, J. (1998). Who counts reality? Participatory monitoring and evaluation: A literature review.
- Ferguson, R. F., & Dickens, W. T. (1999). Introductions. In *The Symposium on the Applications of Hidden Markov Models to Text and Speech*. Princeton\NJ^ 032068.
- Fine, B. (2002). It ain't social, it ain't capital and it ain't Africa. *Studia Africana: revista interuniversitària d'estudis african*, (13), 18-33.
- Fine, B. (2002). They f**k you up those social capitalists. *Antipode*, 34(4), 796-799.
- Forsman, M. (2005). Development of research networks: the case of social capital.
- Frank, F., & Smith, A. (1999). *The community development handbook: A tool to build community capacity* (p. 13). Ottawa, ON: Human Resources Development Canada.
- Freire, P. (1985). *The politics of education: Culture, power, and liberation*. Greenwood Publishing Group.
- Friedlander, W. A. (1949). Some international aspects of social work education. *Social Service Review*, 23(2), 204-210.
- Friedman, M., & Meer, S. (2007). Change is a slow dance: Three stories of challenging gender and power inequalities in organizations. *Gender at Work*, Toronto, www.genderatwork.org/article/change-is-a-slow-dance.
- Friedmann, J. (1992). *Empowerment: The politics of alternative development*. John Wiley & Sons.
- Fukuyama, F. (1996). *Trust: The social virtues and the creation of prosperity*. Simon and Schuster.
- Gooderham, P. N. (2007). Enhancing knowledge transfer in multinational corporations: a dynamic capabilities driven model. *Knowledge management research & practice*, 5, 34-43.

- Granovetter, M. (2018). Economic action and social structure: The problem of embeddedness. In *The sociology of economic life* (pp. 22-45). Routledge.
- Grootaert, C. (Ed.). (2004). *Measuring social capital: An integrated questionnaire* (No. 18). World Bank Publications.
- Guijt, I. (1999). *Participatory monitoring and evaluation for natural resource management and research*. Chatham: Natural Resources Institute.
- Gupta, S., & Sharma, R. (2012). Social Capital and Community Empowerment: A Review of Literature. *Journal of Social Work*, 25(4), 321-335.
- Gutierrez, L. M. (1990). Working with women of color: An empowerment perspective. *Social work*, 35(2), 149-153.
- Gutierrez, L. M. (1995). Understanding the Empowerment Process: Does Consciousness Make a Difference? *Social Work Research*, 19 (4), 229-237.
- Gutierrez, L.M. (1990). Working with Women of Color: An Empowerment Perspective. *Social Work Research*, 35, 149-154.
- Hajar, D. S., & SOS, S. (2021). *Pemerintahan Desa Dan Kualitas Pelayanan Publik* (Vol. 1). umsu press.
- Hajar, S. (2017, December). Increased Capacity Village Officials About Governance Administration in of the Village Administration. In *International conference on ethics in governance (ICONEG 2016)* (pp. 387-389). Atlantis Press.
- Hardoy, J. E., Mitlin, D., & Satterthwaite, D. (1992). *Environmental problems in Third World cities*. London: Earthscan.
- Hasbullah, J. (2006). *Social capital: Menuju keunggulan budaya manusia Indonesia*. (No Title).
- Hassanpoor, A., Mehrabi, J., Hassanpoor, M., & Samangoei, B. (2012). Analysis of effective factors on psychological empowerment of employees. *American International Journal of Contemporary Research*, 2(8), 229-236.

- Hemric, M., Eury, A. D., & Shellman, D. (2010). Correlations between perceived teacher empowerment and perceived sense of teacher self-efficacy. *Journal of Scholarship and Practice*, 7(1), 37-50.
- Holle, E. S. (2011). Pelayanan Publik Melalui Electronic Government: Upaya Meminimalisir Praktek Maladministrasi Dalam Meningkatkan Public Service. *Sasi*, 17(3), 21-30.
- Ife, J., & Fiske, L. (2006). Human rights and community work: Complementary theories and practices. *International Social Work*, 49(3), 297-308.
- Inglehart, R. (2005). Christian Welzel Modernization, Cultural Change, and Democracy The Human Development Sequence.
- Janssens, W. (2010). Women's empowerment and the creation of social capital in Indian villages. *World Development*, 38(7), 974-988.
- John L. Martin, Monica Lee, (2015) Social Structure, Editor(s): James D. Wright, *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Second Edition)*, Elsevier, 2015, Pages 713-718,
- Jordan, J. B. (2015). A study in how linking social capital functions in community development. The University of Southern Mississippi.
- Kabeer, N. (2001). Conflicts over credit: Re-evaluating the empowerment potential of loans to women in rural Bangladesh. *World development*, 29(1), 63-84.
- Kamerman, S. B., & Kahn, A. J. (2001). Child and family policies in an era of social policy retrenchment and restructuring. In *Child well-being, child poverty and child policy in modern nations* (pp. 501-526). Policy Press.
- Kane, T. J. (1987). Giving back control: Long-term poverty and motivation. *Social Service Review*, 61(3), 405-419.

- Keating, W. D., & Vidal, A. C. (2004). Community development: Current issues and emerging challenges. *Journal of Urban Affairs*, 26, 125.
- Keeble, B. R. (1988). The Brundtland report: 'Our common future'. *Medicine and war*, 4(1), 17-25.
- Kieffer, C. H. (2014). Citizen empowerment: A developmental perspective. In *Studies in empowerment* (pp. 9-36). Routledge.
- Korten, D. C. (2005). Sustainable development: Conventional versus emergent alternative wisdom. *Development*, 48(1), 65-69.
- Krishna, A., & Shrader, E. (1999). Social capital assessment tool. In *Conference on social capital and poverty reduction* (Vol. 2224). The World Bank.
- Labonté, R., & Laverack, G. (2008). *Health promotion in action: from local to global empowerment*. Springer.
- Laverack, G. (2006). Using a 'domains' approach to build community empowerment. *Community Development Journal*, 41(1), 4-12.
- Lee, J. A. (2001). *The empowerment approach to social work practice*. Columbia University Press.
- Lee, R., & Jones, O. (2008). Networks, communication and learning during business start-up: The creation of cognitive social capital. *International Small Business Journal*, 26(5), 559-594.
- Lee-Rife, S. M. (2010). Women's empowerment and reproductive experiences over the lifecourse. *Social Science & Medicine*, 71(3), 634-642.
- Lefebvre, V. M., Sorenson, D., Henchion, M., & Gellynck, X. (2016). Social capital and knowledge sharing performance of learning networks. *International Journal of Information Management*, 36(4), 570-579.
- Liden, R. C., Wayne, S. J., & Sparrowe, R. T. (2000). An examination of the mediating role of psychological empowerment on the relations between the job, interpersonal relationships, and work outcomes. *Journal of applied psychology*, 85(3), 407.

- Lin, N. (2002). *Social capital: A theory of social structure and action* (Vol. 19). Cambridge university press.
- Markowska-Przybyla, U. (2012). Social capital as an elusive factor of socio-economic development. *Journal of Leadership, Accountability and Ethics*, 9(3), 93-103.
- Maton, K.I. (2008). Empowering, Community Settings: Agents of Individual Development, Community Betterment, and Positive Social Change. *American Journal of Community Psychology*, 41(1-2), 4-21.
- Matsumoto, D. (2007). Culture, context, and behavior. *Journal of Personality*, 75 (6), 1285–1319.
- Midgley, J. O. (1995). Social development: The developmental perspective in social welfare. *Social Development*, 1-208.
- Miley, K. K., O'Melia, M., & DuBois, B. (2001). *Generalist social work practice: An empowering approach*. (No Title).
- Miller, D. T., & Prentice, D. A. (1994). Collective errors and errors about the collective. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 20 (5), 541–550.
- Mukherjee, N. (1995). Participatory rural appraisal and questionnaire survey (comparative field experience and methodological innovations). *Participatory rural appraisal and questionnaire survey (comparative field experience and methodological innovations)*.
- Murphy-Graham, E. (2010). And when she comes home? Education and women's empowerment in intimate relationships. *International Journal of Educational Development*, 30(3), 320-331.
- Myers, J. E. (1990). *Empowerment for Later Life*. ERIC/CAPS, 2108 School of Education, University of Michigan, Ann Arbor, MI 48109-1259.
- Nahapiet, J., & Ghoshal, S. (1998). Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage. *Academy of management review*, 23(2), 242-266.

- Parsons, R. (1991). Empowerment: Purpose and practice in social work. *Social Work with Groups*, 14 (2), 7-22.
- Parsons, R. J. (1989). Empowerment for Role Alternative for Low Income Minority Girls: A Group Work Approach. *Social Work with Groups*, 11(4), 27-45.
- Parsons, R. J. (1998). Empowerment in social work practice: A sourcebook. Wadsworth Publishing Company.
- Parsons, T. (1951). *The social system*. NY: Routledge & Kegan Paul Ltd.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Pinderhughes, E. (1990). Understanding race, ethnicity and power: The key to efficacy in clinical practice. New York: Free Press.
- Poder, T. G. (2011). What is really social capital? A critical review. *The American Sociologist*, 42, 341-367.
- Portes, A. (1998). Social capital: Its origins and applications in modern sociology. *Annual review of sociology*, 24(1), 1-24.
- Portes, A., & Vickstrom, E. (2015). Diversity, social capital, and cohesion. *SERIES «ETUDESEUROPEENNES*, 41.
- Pranarka, A.M.W & Vidhyandika. (1996). Pemberdayaan (Empowerment) Dalam Onny Prijono dan Pranarka (ed). *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies
- Prentice, D. A., & Miller, D. T. (1993). Pluralistic ignorance and alcohol use on campus: Some consequences of misperceiving the social norm. *Journal of Personality and Social Psychology*, 64 (2), 243-256.
- Prijono, O.S., and Pranarka, A.M.W. (1996). *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies Publisher.
- Putnam, R. D. (1994). Making democracy work: Civic traditions in modern Italy.

- Putnam, R. D. (2015). Bowling alone: America's declining social capital. In *The city reader* (pp. 188-196). Routledge.
- Putnam, R. D., Leonardi, R., & Nanetti, R. Y. (1992). *Making democracy work: Civic traditions in modern Italy*. Princeton university press.
- Ra'is, D. U. (2018). Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Asas Rekognisi Dan Subsidiaritas Undang-Undangdesa Nomor 6 Tahun 2014. *Reformasi*, 7(1).
- Ra'is, D. U. (2018). Peta inklusi sosial dalam regulasi desa. *Reformasi*, 7(2).
- Ra'is, D. U. (2022). Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik Melalui Penerapan Akuntabilitas Sosial. *Journal of Urban Sociology*, 5(2), 109-118.
- Rappaport, J. (1985). The power of empowerment language. *Social policy*, 16(2), 15-21.
- Rappaport, J. (1987). Terms of Empowerment/Exemplars of Prevention: Towards a Theory for Community Psychology. *American Journal of Community Psychology*, 15 (2), 121-147.
- Rappaport, J. (1987). Terms of empowerment/exemplars of prevention: Toward a theory for community psychology. *American journal of community psychology*, 15(2), 121-148.
- Richard, M. (1990). *Propositional attitudes: An essay on thoughts and how we ascribe them*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Richerson, P. J., & Boyd, R. (2005). *Not by genes alone: How culture transformed human evolution*. Chicago, IL: The University of Chicago Press.
- Riessman, F. (1997). Ten self-help principles. *Social Policy*, 27(3), 6-12.
- Rivis, A., & Sheeran, P. (2003). Descriptive norms as an additional predictor in the theory of planned behavior: A meta-analysis. *Current Psychology: Developmental, Learning, Personality, Social*, 22 (3), 218-233.

- Robison, L. J., Schmid, A. A., & Siles, M. E. (2002). Is social capital really capital?. *Review of social economy*, 60(1), 1-21.
- Rodenberg, B. and Wichterich, Ch. (1999): *Empowerment: A study of women's projects abroad*. Heinrich-Böll Foundation, Berlin
- Rowlands, J. (1997). *Questioning empowerment: Working with women in Honduras*. Oxford, UK: Oxfam.
- Roy, P. (2010). Analyzing empowerment: an ongoing process of building state–civil society relations–the case of Walnut Way in Milwaukee. *Geoforum*, 41(2), 337-348.
- Rozin, P., Haidt, J., McCauley, C. R., & Imada, S. (1997). The cultural evolution of disgust. In H. M. Macbeth (ed.). *Food preferences and taste: continuity and change* (pp. 65–82). Berghahn.
- Sanders, I. T. (1958). *Theories of Community Development*. *Rural Sociology*, 23(1), 1.
- Sarjiyanto, S., Sarwoto, S., & Darma, T. S. (2022). The Sustainability of Community Empowerment as Development Strategies: The Experience of Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9(3), 207-218.
- Schwartz, S. H., & Bilsky, W. (1990). Toward a theory of the universal content and structure of values: Extensions and cross-cultural replications. *Journal of personality and social psychology*, 58(5), 878.
- Searle, J. R. (1995). *The construction of social reality*. NY: Simon & Schuster Inc.
- Sechrist, G. B., & Stangor, C. (2001). Perceived consensus influences intergroup behavior and stereotype accessibility. *Journal of Personality and Social Psychology*, 80 (4), 645–654.
- Senge, P., Kleiner, A., Roberts, C., Roth, G., & Smith, B. (1999). *The Dance of Change*, Currency Doubleday. New York.
- Shaffer, R. (1989). *Community economics. Economic Structure and Change in Smaller*.

- Shroff, G. (2010). Towards a design model for women's empowerment in the developing world. Unpublished Master's Dissertation. Pittsburg: Carnegie Mellon University.
- Shteynberg, G., Gelfand, M. J. & Kim, K. (2009). Peering into the magnum mysterium of culture: The explanatory power of descriptive norms. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 40 (1), 46–69
- Simon, B. (1990). Rethinking empowerment. *Journal of Progressive Human Services*. 1, 27
- Smith, J. (2010). The Role of Social and Cultural Factors in Community Empowerment. *Journal of Community Psychology*, 35(2), 123-135.
- Snowden D. (2005), "The art and science of Story or "Are you sitting uncomfortably?"Part 1: Gathering and Harvesting the Raw Material", *Business Information Review* No.17 (147), SAGE publications, Thousand Oaks, United States.
- Solekhan, M. (2012). The Implementation of Village Administration.
- Soler, P., Planas, A., Ciraso-Calí, A. & Ribot-Horas. A. (2014). Empowerment in the Community. The Design of an Open Indicators System from Participatory Evaluation Processes. *Pedagogía Social Revista Interuniversitaria*, 24 49-77.
- Solow, R. M. (2000). Notes on social capital and economic performance. *Social capital: A multifaceted perspective*, 6(10).
- Sripada, C. S., & Stich, S. (2006). Framework for the psychology of norms. In Peter Carruthers, Stephen Laurence and Stephen Stich (Eds.). *The innate mind. Vol. 2. Culture and Cognition* (pp. 280–301). Oxford: Oxford University Press.
- Staples, L. (1990). Powerful Ideas about Empowerment. *Administration in Social Work*, 14, 29
- Strandberg, N. (2001, November). Conceptualising empowerment as a transformative strategy for poverty eradication and the implications for measuring progress. In UN Division for the

Advancement of Women (DAW), Expert group meeting on empowerment of women throughout the life cycle as a transformative.

- Suharto, Edi (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Swift C., & Levin, G. (1987). Empowerment: An Emerging Mental Health Technology. *Journal of Primary Prevention*, 8(1-2), 71-94
- Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) (2006), "Capacity Development in SDC Working Paper", SDC, Berne.
- Taylor, S. (2007). Creating social capital in MNCs: The international human resource management challenge. *Human Resource Management Journal*, 17(4), 336-354..
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi*, edisi 9, jilid 1. Erlangga.
- Tzanakis, M. (2013). Social capital in Bourdieu's, Coleman's and Putnam's theory: empirical evidence and emergent measurement issues. *Educate*, 13(2), 2-23.
- Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa
- Uphoff, N. (2000). Understanding social capital: learning from the analysis and experience of participation. *Social capital: A multifaceted perspective*, 6(2), 215-249.
- Uphoff, N., & Wijayaratra, C. M. (2000). Demonstrated benefits from social capital: the productivity of farmer organizations in Gal Oya, Sri Lanka. *World development*, 28(11), 1875-1890.
- Van Bastelaer, T. (1999). Imperfect information, social capital and the poor's access to credit. *Social Capital and the Poor's Access to Credit* (October 1999). IRIS Center Working Paper, (234).
- Wacquant, L. J., & Bourdieu, P. (1992). An invitation to reflexive sociology (pp. 1-59). Cambridge: Polity.
- Wan, C., Tam, K., Lau, I. Y., Chiu, C., Lee, S., & Peng, S. (2007). Perceived cultural importance and actual self-importance of

- values in cultural identification. *Journal of Personality and Social Psychology*, 92 (2), 337–354
- White, S. C. (2010, July). Domains of contestation: Women's empowerment and Islam in Bangladesh. In *Women's Studies International Forum* (Vol. 33, No. 4, pp. 334–344). Pergamon.
- Whiteside, M. (2009). A grounded theory of empowerment in the context of Indigenous Australia (Doctoral dissertation, James Cook University).
- Yoo, S., Butler, J., Elias, T. I., & Goodman, R. M. (2009). The 6-step model for community empowerment: revisited in public housing communities for low-income senior citizens. *Health Promotion Practice*, 10(2), 262–275.
- Young, H. P. (2003). The power of norms. Genetic and cultural evolution of cooperation (pp. 389–399). Ed. by Peter Hammerstein. Cambridge, MA: MIT Press.
- Zimmerman, M. A. (1995). Psychological empowerment: Issues and illustrations. *American journal of community psychology*, 23, 581–599.
- Zimmerman, M. A., Israel, B. A., Schulz, A., & Checkoway, B. (1992). Further explorations in empowerment theory: An empirical analysis of psychological empowerment. *American journal of community psychology*, 20, 707–727.
- Zoabi, K. (2012). Self-esteem and motivation for learning among minority students: A comparison between students of pre-academic and regular programs. *Creative education*, 3(08), 1397.
- Zou, X., Tam, K-P., Morris, M. W., Lee, S-L., Lau, Y-M., & Chiu, C-Y. (2009). Culture as commonsense: Perceived consensus vs. personal beliefs as mechanisms of cultural influence. *Journal of Personality and Social Psychology*, 97 (4), 579–597.
- Zubaedi. (2007). *Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media Group.
- Zubaedi. (2013). *Pengembangan masyarakat: Wacana & praktik*. Kencana.

TENTANG PENULIS



Dr. Darwin Abd Radjak, S.Sos., M.AP adalah Staf pengajar di Program Magister Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Menyelesaikan pendidikan Sarjana di Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang 2007. Setelah itu memperoleh Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPPDN) untuk melanjutkan Program Magister Administrasi Publik (MAP) di Universitas Brawijaya Malang 2010. Pendidikan S3 di selesaikan di Universitas Brawijaya Malang, pada Program Doktor Ilmu Administrasi Publik 2020. Selama karir penulis pernah menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Maluku Utara 2009 s/d 2013. Anggota Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Maluku Utara 2010-2013. Sebagai Anggota Pusat, *Indonesian Association for Public Administration (IAPA)* 2017 s/d 2020. Dewan Pengarah pada Pengurus Daerah *Indonesian Association for Public Administration (IAPA)* Wilayah Maluku Utara Periode 2020-2023. Penulis juga aktif menulis di Jurnal Nasional maupun International. Direktur Eksekutif *Foundation for North Moluccas Archipelago*. Pimpinan Redaksi *Journal of Administrative Science* Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Ketua Program Magister Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Periode 2022-2026. Kegiatan yang pernah di ikuti adalah *International Share Learning Session for Post Graduate Program at TGBC-Thailand on February-March 2024*.



Dekki Umamur Rais, S.Sos., M.Soc.Sc Lulus S1 di Program studi Administrasi Negara di Universitas Jember (FISIP UNEJ) tahun 2010 dan Lulus S2 di program Master Psikologi Perkembangan Manusia, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) tahun 2014. Saat ini penulis Aktif di berbagai kegiatan advokasi

Kebijakan publik dan Pemberdayaan Masyarakat, Khususnya masyarakat pedesaan dan Pemerintah Desa. Penulis Juga aktif memberikan pelatihan baik itu kepada masyarakat, lembaga profesional, dan lembaga pemerintahan. Selain itu, melalui lembaga yang dipimpinnya yaitu Pusat Studi Desa Indonesia (PUSDI) juga terlibat dalam serangkaian kegiatan kajian tentang desa dan Pemerintahan Daerah. Penulis juga pernah terlibat dalam kegiatan proyek dari NGO Internasional seperti World Vision dan MOHE. Selain aktif dalam kegiatan pemberdayaan, penulis juga merupakan seorang Dosen di sebuah PT di Kota Malang.



Abd. Rohman, S.Sos., M.AP, Dosen pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tunggaladewi Malang. Gelar sarjana dan magisternya diperoleh dari Universitas tempat ia mengajar saat ini. Selain aktif menulis dan menjadi editor buku, ia juga aktif

menjadi pembicara forum-forum ilmiah dan terlibat di beberapa organisasi kemasyarakatan maupun organisasi keprofesian. Selain sebagai Dosen dan Penulis, ia juga aktif terlibat dalam banyak kegiatan *research* tentang dinamika politik dan pembangunan, kebijakan publik, dan pelayanan publik. Penulis pernah mengikuti Program Magang Dosen Muda (Dosma) oleh Kemdikbud di UGM pada tahun 2021.

PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA

Buku berjudul "Pembangunan Masyarakat Desa" ini telah disusun dengan sebaik mungkin untuk memberikan manfaat kepada para pembaca (baik itu akademisi, pemerhati, praktisi, profesional, pemangku kepentingan desa, dan masyarakat luas) yang membutuhkan pengayaan informasi, pengetahuan, metode, teknik, pengalaman, dan praktik tentang Pembangunan Masyarakat Desa.

Dalam buku ini, kami membahas Kemandirian dan Kesejahteraan Desa, keterlibatan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat desa, pemahaman terhadap aspek sosial dan budaya sebagai basis dan modal pemberdayaan masyarakat desa, metode dan teknik pemberdayaan masyarakat desa, advokasi pembangunan desa, dan metode monitoring dan evaluasi pembangunan desa.



Penerbit Forind
Jl. Raya Tlogomas V No. 24
Tlogomas Malang 65141
Telp. 081233992973
Email: forind_publishing@yahoo.com

ISBN 978-623-99722-9-5

